

BUKU I



BUPATI PAMEKASAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

BUPATI PAMEKASAN

TAHUN ANGGARAN 2018

**KEPADA :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
PAMEKASAN, TAHUN 2019**



BUPATI PAMEKASAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

LKPJ Bupati Pamekasan Akhir Tahun Anggaran 2018 ini, disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Melalui LKPJ ini, diharapkan DPRD sebagai Perwakilan Rakyat di Kabupaten Pamekasan dan seluruh komponen masyarakat lainnya, memiliki bahan informasi dan evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja Bupati selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018.

Bupati Pamekasan selaku Kepala Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajarannya, menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah, oleh karena itu, kritik dan

saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka, dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Pamekasan Akhir Tahun Anggaran 2018, sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun yang akan datang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Pamekasan atas kerjasama yang selama ini terbina, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Demikian pula, kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas kami selaku Bupati Pamekasan.

Akhirul kalam, Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Amiin

Billahi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 29 Maret 2018



BUPATI PAMEKASAN

L. PADDRUT TAMAM, S.Psi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Dasar Hukum	2
2. Gambaran Umum Daerah	6
2.1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi, Luas Wilayah, Topografi dan Lain-lain	6
3. Gambaran Umum Demografis	12
3.1. Jumlah Penduduk	12
3.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	14
3.3. Struktur Usia	16
3.4. Jenis Pekerjaan.....	17
3.5. Pendidikan	21
4. Kondisi Ekonomi	24
4.1. Potensi Unggulan Daerah	24
4.2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	41
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
1. Visi dan Misi Daerah	4
2. Strategi dan Arah Kebijakan	9
3. Prioritas Daerah.....	20
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	5
1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	5
1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	6
1.3. Permasalahan dan Solusi	7
2. Pengelolaan Belanja Daerah	8
2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	8
2.2. Target dan Realisasi Belanja.....	10

2.3. Permasalahan dan Solusi	10
------------------------------------	----

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Dinas Pendidikan	5
2. Dinas Kesehatan.....	12
3. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo	28
4. RSUD Waru	32
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	38
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	44
7. Satuan Polisi Pamong Praja	52
8. Dinas Sosial.....	57
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	62
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	68
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	75
12. Dinas Lingkungan Hidup	80
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	87
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92
15. Dinas Perhubungan	98
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	105
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	113
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	119
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	122
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	127
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	135
22. Dinas Perikanan	140
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	147
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	154
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	162
26. Badan Keuangan Daerah.....	171
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.....	178
28. Inspektorat Daerah	184
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	190

30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	195
31. Sekretariat Daerah.....	199
32. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	216
33. Kecamatan Pamekasan.....	221
34. Kecamatan Pademawu	231
35. Kecamatan Larangan.....	237
36. Kecamatan Galis	240
37. Kecamatan Tlanakan.....	243
38. Kecamatan Proppo	246
39. Kecamatan Palengaan	249
40. Kecamatan Pegantenan	253
41. Kecamatan Pakong.....	257
42. Kecamatan Kadur.....	260
43. Kecamatan Waru.....	263
44. Kecamatan Batumarmar.....	268
45. Kecamatan Pasean.....	271

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima	4
2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan.....	6

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah.....	1
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	3
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	45
4. Pembinaan Batas Wilayah.....	52
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	56
6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	68

BAB VII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Memegang amanah dan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati adalah sebuah kepercayaan sekaligus tanggungjawab yang harus dilaporkan kepada publik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban sekaligus tuntutan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah, tak terkecuali di Kabupaten Pamekasan. Laporan ini disusun sebagai informasi sekaligus bukti tentang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir (2018) kepada DPRD dan masyarakat Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan.

LKPJ Kepala Daerah pada dasarnya adalah wahana untuk menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan sebagai sarana bagi DPRD untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk catatan dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya. LKPJ Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD melalui sidang paripurna dalam tempo tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LKPJ Kepala Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di Kabupaten Pamekasan, sepanjang tahun 2018 berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan strategis pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan. Tidak sedikit dana telah disalurkan ke berbagai wilayah dan komunitas, serta program-program pembangunan pun telah dirancang sedemikian rupa agar dapat berjalan efektif dan bermanfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Dalam rangka melaporkan *performance* pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Pamekasan selama tahun 2018, langkah yang penting

adalah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana program, proses implementasinya di lapangan, dan hasil-hasil yang diperoleh. Untuk itu, dalam kesempatan ini disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.

Secara garis besar, arti penting dan alasan perlunya disusun LKPJ Kabupaten Pamekasan tahun 2018 ini adalah Pertama, sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan implementasi prinsip akuntabilitas publik terhadap pemanfaatan dana pembangunan dari APBD kepada rakyat. Kedua, menjadi bagian terpadu dari sistem perencanaan program dan manajemen pembangunan yang sekaligus merupakan *feed back* dan masukan data untuk pijakan merumuskan program pembangunan baru yang lebih terarah dan tepat sasaran. Ketiga, untuk bahan masukan dalam proses perencanaan program pembangunan di masa yang akan datang agar dapat lebih konektual, efisien dan efektif dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah.

A. Dasar Hukum

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahun 2013-2018 yang implementasinya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 ini merupakan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan *progress report* atas hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Sedangkan mengenai muatan LKPJ, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 18 dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; Penyelenggaraan urusan desentralisasi; Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan Penyelenggaraan tugas umum.

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini, merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu : adanya akuntabilitas, efektifitas efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu Rapat Paripurna DPRD, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Landasan hukum yang mendasari disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun 2018, selengkapnya sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penerimaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14A Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan;
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14A Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi, Luas Wilayah, Topografi dan Lain-lain.

Secara Astronomis, Kabupaten Pamekasan terletak pada 113°19' - 113°58' BT dan 6°51' - 7°31' LS sehingga beriklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan. Wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki luas 79.230,01 Hektar yang secara administratif dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah Utara, Selat Madura di sebelah Selatan, Kabupaten Sampang di sebelah Barat dan Kabupaten Sumenep di sebelah Timur.

Tabel 1.1

Kondisi Umum Geografis dan Iklim Kabupaten Pamekasan

Tahun 2017

001.	Luas Wilayah	:	79.230,01 Hektar
002.	Letak Wilayah	:	113°19' - 113°58' BT 6°51' - 7°31' LS
003.	Batas Wilayah		
	a. Utara	:	Laut Jawa
	b. Selatan	:	Selat Madura
	c. Barat	:	Kab. Sampang
	d. Timur	:	Kab. Sumenep
004.	Ketinggian dari Permukaan Laut		
	a. Tertinggi	:	350 meter
	b. Terendah	:	6 meter
005.	Musim		
	a. Oktober-April	:	Penghujan
	b. April-Oktober	:	Kemarau
006.	Temperatur Rata-rata		
	a. Maksimum	:	30° Celcius
	b. Minimum	:	28° Celcius
007.	Kelembaban Udara rata-rata	:	80 %
008.	Jarak Pamekasan ke:		
	a. Sumenep	:	53 Km
	b. Sampang	:	33 Km
	c. Bangkalan	:	99 Km
	d. Surabaya	:	125 Km

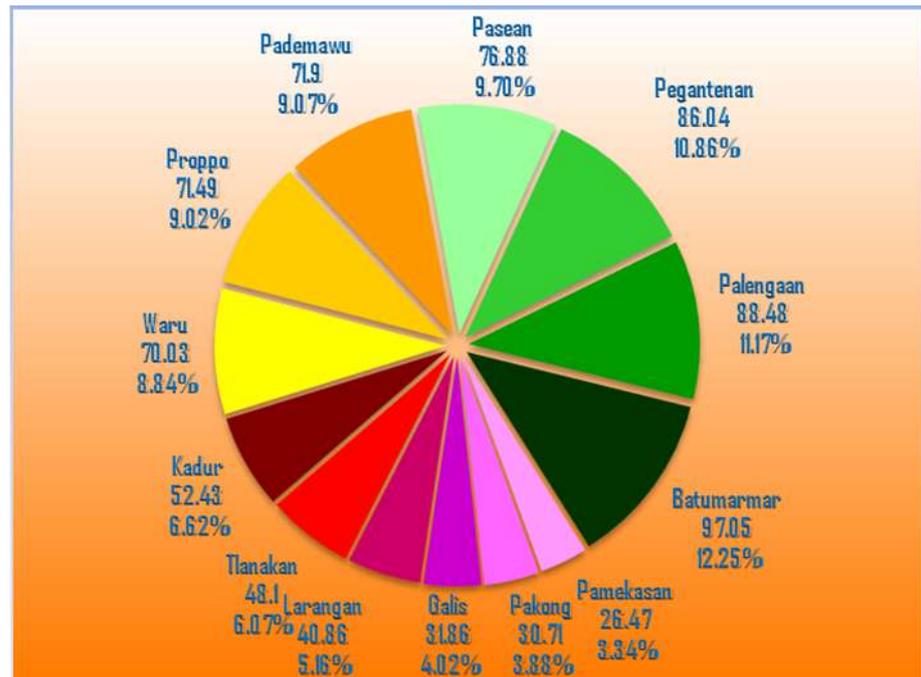
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Wilayah ini memiliki ketinggian tertinggi 350 meter diatas permukaan laut dan wilayah terendah pada ketinggian 6 meter diatas

permukaan laut. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki temperatur rata-rata maksimum 30° C dan 28° C dan kelembaban udara rata-rata 80%.

Gambar 1.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2017 (Km²)



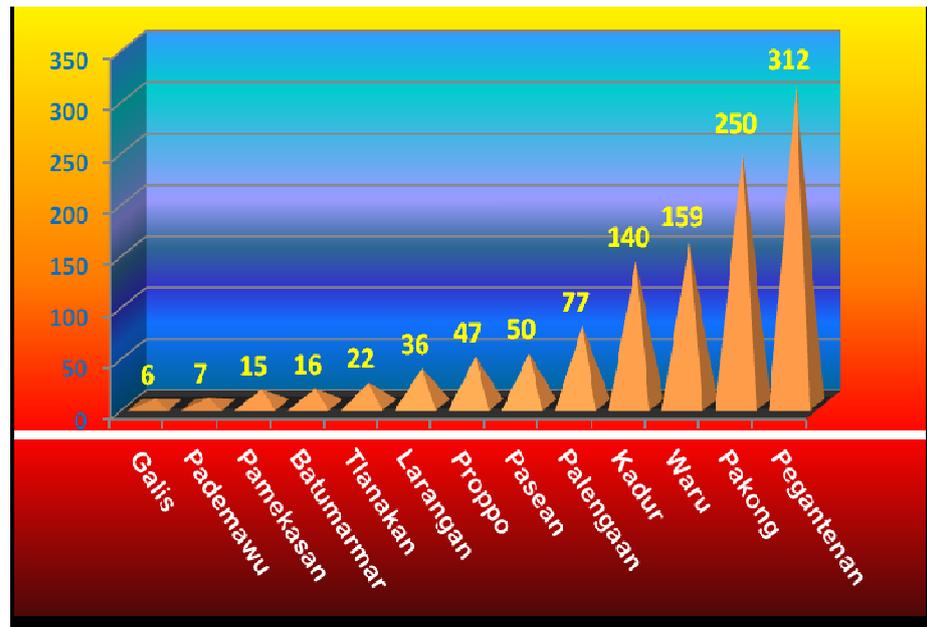
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam 13 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda di masing-masing kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan kecamatan yang wilayahnya terluas yaitu 97,05 Ha atau 12,25% dari luas Pamekasan. Sedangkan kecamatan Pamekasan yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah terkecil yaitu 26,47 Ha atau 3,34% dari luas Kabupaten Pamekasan.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Pamekasan sebagian terletak di dataran rendah dan sebagian lagi di dataran tinggi. Hal ini memberikan karakter yang berbeda terhadap mata pencaharian penduduk. Dataran rendah memberikan potensi kelautan serta pertanian

dan dataran tinggi memberikan potensi perbukitan yang cocok digunakan untuk perkebunan.

Gambar 1.2
Ketinggian Wilayah dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan 2017 (meter)



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Wilayah yang terletak pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut adalah Kecamatan Pegantenan, Pakong, Waru dan Kadur dengan wilayah tertinggi adalah Pegantenan yang terletak pada 312 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang berada pada >40 dan <100 meter di atas permukaan laut adalah Kecamatan Palengaan, Pasean, dan Proppo. Sedangkan yang terletak pada ketinggian <40 meter di atas permukaan laut adalah Kecamatan Larangan, Tlanakan, Batumarmar, Pamekasan, Pademawu dan Galis.

Ketinggian wilayah yang berbeda menyebabkan wilayah Kecamatan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan tanah yang berbeda-beda. Secara umum, tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam 4 kluster yaitu kemiringan antara 0° - 15° , 15° - 25° , 25° - 40° dan $>40^{\circ}$.

Tabel 1.2

Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kemiringan Tanah
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 (Ha)

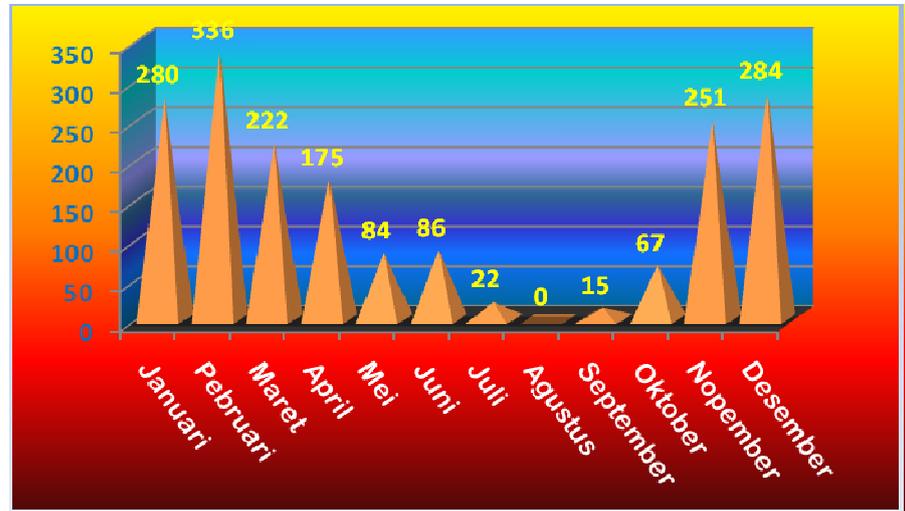
Kecamatan	Kemiringan Tanah				Jumlah
	0°-15°	15°-25°	25°-40°	>40°	
1. Tlanakan	4.810	-	-	-	4.810
2. Pademawu	7.189	-	-	-	7.189
3. Galis	3.186	-	-	-	3.186
4. Larangan	3.841	245	-	-	4.086
5. Pamekasan	2.647	-	-	-	2.647
6. Proppo	6.882	267	-	-	7.149
7. Palengaan	6.830	1.880	138	-	8.848
8. Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604
9. Kadur	3.376	272	638	956	5.242
10. Pakong	1.993	532	113	433	3.071
11. Waru	4.774	1.509	-	720	7.003
12. Batumarmar	3.308	5.808	463	128	9.707
13. Pasean	5.395	1.905	388	-	7.688
Jumlah	59.964	14.291	2.253	2.722	79.230

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis dan Pamekasan semua wilayahnya berada pada kemiringan 0°-15°. Keempat kecamatan ini terletak di dataran rendah, sehingga tingkat kemiringan tanahnya juga rendah. Beberapa wilayah memiliki tingkat kemiringan sampai 15°-25° yaitu Kecamatan Larangan, Proppo dan Waru.

Semakin suatu wilayah terletak pada dataran tinggi maka semakin besar pula tingkat kemiringan tanahnya. Beberapa wilayah berada pada kemiringan 25°-40° yaitu Palengaan dan Pasean. Wilayah yang terletak pada tingkat kemiringan >40° antara lain Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Jika dilihat secara umum maka sebagian besar wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu 59.964 Ha terletak pada kemiringan 15°-25°.

Gambar 1.3
Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan di
Kabupaten Pamekasan 2017



Sumber : Dinas Pengairan UPTD Pamekasan Tahun 2018

Kabupaten Pamekasan terletak di daerah tropis, sehingga curah hujan di wilayah Kabupaten Pamekasan bersifat fluktuatif mengikuti musim. Pada Tahun 2017, curah hujan tinggi terjadi pada musim penghujan dengan puncaknya yaitu bulan februari dimana dalam setahun telah terjadi 336 kali hujan. Bulan desember mengalami 284 kali hujan, januari 280 kali hujan dan curah hujan mulai berkurang menjelang musim kemarau. Sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan juli-september dengan curah hujan terendah di bulan agustus. Pada bulan agustus tidak terjadi hujan sama sekali, sementara pada bulan juli masih terjadi 22 kali hujan dan bulan september terjadi hujan sebanyak 15 kali.

Dengan adanya dua musim ini, menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pertanian yang beberapa merupakan tanaman komoditas baik lokal, nasional maupun internasional yaitu padi pada saat musim penghujan dan tembakau disaat musim kemarau.

Tabel 1.3

Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jenis Kualitas Tanah
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 (Ha)

Kecamatan	Aluvial	Regosol	Mediteran	Litosol	Jumlah
1. Tlanakan	401	4.409	-	-	4.810
2. Pademawu	3.735	2.779	-	675	7.189
3. Galis	-	2.661	-	525	3.186
4. Larangan	-	1.351	1.359	1.376	4.086
5. Pamekasan	2.572	0	75	-	2.647
6. Proppo	-	1.550	4.665	934	7.149
7. Palengaan	-	4.022	647	4.179	8.848
8. Pegantenan	-	3.234	1.692	3.678	8.604
9. Kadur	-	3.477	-	1.765	5.242
10. Pakong	-	967	1.654	450	3.071
11. Waru	-	3.770	1.468	1.765	7.003
12. Batumarmar	-	6.157	1.536	2.014	9.707
13. Pasean	-	1.686	4.279	1.723	7.688
Jumlah	6.708	36.063	17.375	19.084	79.230

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Letak geografis selain berpengaruh pada ketinggian, kemiringan, curah hujan, juga berpengaruh pada jenis kualitas tanah. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 4 jenis kualitas tanah yaitu aluvial, regosol, mediteran dan litosol. Tanah aluvial di Kabupaten Pamekasan seluas 6.708 Ha berada di Kecamatan Pademawu 3.735 Ha, Pamekasan seluas 2.752 Ha dan di Tlanakan seluas 401 Ha. Jenis tanah aluvial ini cocok digunakan untuk menanam padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau dan buah-buahan.

Tanah regosol luasnya mencapai 36.063 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Pamekasan. Tanah regosol yang berasal dari material gunung api ini sangat cocok digunakan sebagai area pertanian padi, tebu, palawija, sayuran, dan tembakau.

Kabupaten Pamekasan juga memiliki luas tanah mediteran 17.375 Ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali Tlanakan, Pademawu Galis dan Kadur. Tanah jenis mediteran ini merupakan hasil dari pelapukan batuan kapur dan sedimen, sehingga cocok untuk tanaman palawija, jati, tembakau dan jambu mente.

Sebanyak 19.084 Ha wilayah Kabupaten terdiri dari tanah litosol yang terdapat di hampir semua kecamatan kecuali Pamekasan dan Tlanakan. Adanya tanah litosol yang berbatu-batu ini memberikan potensi bagi hidupnya rumput untuk pakan ternak, palawija dan beberapa tanaman yang cocok hidup di tanah jenis litosol.

Adanya jenis-jenis kualitas tanah yang berbeda di Kabupaten Pamekasan memberikan potensi bagi wilayah tersebut untuk pengembangan berbagai jenis tanaman. Jenis kualitas tanah yang berbeda di dalam satu wilayah kecamatan, memberikan potensi bagi wilayah tersebut untuk memiliki variasi tanaman yang berbeda sesuai dengan kecocokan tanah.

2. Gambaran Umum Demografis

2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk tidak hanya sekedar sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah Kabupaten Pamekasan. Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Tugas pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan tanpa adanya penduduk.

Penduduk di setiap wilayah berbeda-beda tergantung dari karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Jumlah penduduk di setiap wilayah juga berbeda-beda tergantung dari kondisi natalitas, mortalitas dan migrasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk	
				Per Km ²	Per Ruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Tlanakan	48,10	63.660	17.270	1.323	3,69
020 Pademawu	71,90	82.724	22.565	1.151	3,67
030 Galis	31,88	28.852	8.936	905	3,23
040 Larangan	40,86	55.529	17.055	1.359	3,26
050 Pamekasan	26,47	95.318	24.393	3.601	3,91
060 Proppo	71,49	79.056	19.037	1.106	4,15
070 Palengaan	88,48	104.325	19.688	1.179	5,30
080 Pegantenan	86,04	66.181	16.433	769	4,03
090 Kadur	52,43	45.061	13.117	859	3,44
100 Pakong	30,71	35.874	9.562	1.168	3,75
110 Waru	70,03	64.683	16.441	924	3,93
120 Batumarmar	97,05	91.852	24.188	946	3,80
130 Pasean	76,88	49.889	14.926	649	3,34
Jumlah	792,32	863.004	223.611	1.089	3,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 berjumlah 863.004 jiwa, terdiri dari 419.789 laki-laki dan 443.515 perempuan. Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2010, pertumbuhan penduduk Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 1,11 persen pertahun.

Penduduk Kabupaten Pamekasan tersebar kedalam 223.611 rumah tangga. Rata-rata setiap rumah tangga di Kabupaten Pamekasan terdiri dari 3,9 anggota rumah tangga. Walaupun penduduk bertambah tiap tahun, namun penghuni setiap rumah

tangga di Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir masih tergolong ideal, yaitu rata-rata 4 anggota rumah tangga.

Pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 1.089 jiwa per km². Dibandingkan tahun 2010, penduduk Kabupaten Pamekasan bertambah padat sekitar 81 jiwa tiap satu km². Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pamekasan yang mencapai 3.601 jiwa per km². Hal ini wajar karena sekitar 11,04 persen penduduk Pamekasan bertempat tinggal di wilayah ibukota kabupaten ini.

2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mencapai 419.489 laki-laki dan 443.515 perempuan dan semuanya merupakan WNI. Kecamatan Palengaan dan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan memiliki jumlah penduduk terbesar.

Tabel 1.5

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	WNI		WNA		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Tlanakan	31.030	32.630	-	-	31.030	32.630
020 Pademawu	40.146	42.578	-	-	40.146	42.578
030 Galis	13.976	14.876	-	-	13.976	14.876
040 Larangan	26.465	29.064	-	-	26.465	29.064
050 Pamekasan	46.692	48.626	-	-	46.692	48.626
060 Proppo	38.370	40.686	-	-	38.370	40.686
070 Palengaan	53.328	50.997	-	-	53.328	50.997
080 Pegantenan	31.256	34.925	-	-	31.256	34.925
090 Kadur	21.442	23.619	-	-	21.442	23.619
100 Pakong	16.747	19.127	-	-	16.747	19.127
110 Waru	31.235	33.448	-	-	31.235	33.448
120 Batumarmar	45.161	46.691	-	-	45.161	46.691
130 Pasean	23.641	26.248	-	-	23.641	26.248
Jumlah	419.489	443.515	-	-	419.489	443.515

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Wilayah ini selain menjadi pusat pemerintahan juga pusat perekonomian bagi penduduk Kabupaten Pamekasan. Pasar besar,

pusat pertokoan, bank dan fasilitas pelayanan publik juga terdapat di wilayah ini, sehingga sebagian besar penduduk memilih untuk bermukim di wilayah Kecamatan Pamekasan. Akan tetapi jika dilihat dari distribusi penduduk, maka persebarannya antara wilayah perkotaan dan perdesaan relatif tidak terpaut jauh.

Mengetahui distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk melihat sex ratio. Sex ratio dapat menunjukkan kondisi penduduk perempuan di suatu wilayah dan berguna untuk menentukan kebijakan yang berbasis kesetaraan gender. Sex ratio yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa hal seperti angka kematian perempuan dan migrasi yang dilakukan oleh penduduk perempuan.

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
010 Tlanakan	31.030	32.630	63.660	95,10
020 Pademawu	40.146	42.578	82.724	94,29
030 Galis	13.976	14.876	28.852	93,95
040 Larangan	26.465	29.064	55.529	91,06
050 Pamekasan	46.692	48.626	95.318	96,02
060 Proppo	38.370	40.686	79.056	94,31
070 Palengaan	53.328	50.997	104.325	104,57
080 Pegantenan	31.256	34.925	66.181	89,49
090 Kadur	21.442	23.619	45.061	90,78
100 Pakong	16.747	19.127	35.874	87,56
110 Waru	31.235	33.448	64.683	93,38
120 Batumarmar	45.161	46.691	91.852	96,72
130 Pasean	23.641	26.248	49.889	90,07
Jumlah	419.489	443.515	863.004	94,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Secara umum, kondisi sex ratio di Kabupaten Pamekasan masih dibawah 100 artinya, jumlah penduduk perempuan di Pamekasan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan di wilayah Pakong dan Pegantenan angka sex ratio dibawah 90. Sedangkan sex ratio tertinggi adalah Palengaan yaitu 104,57.

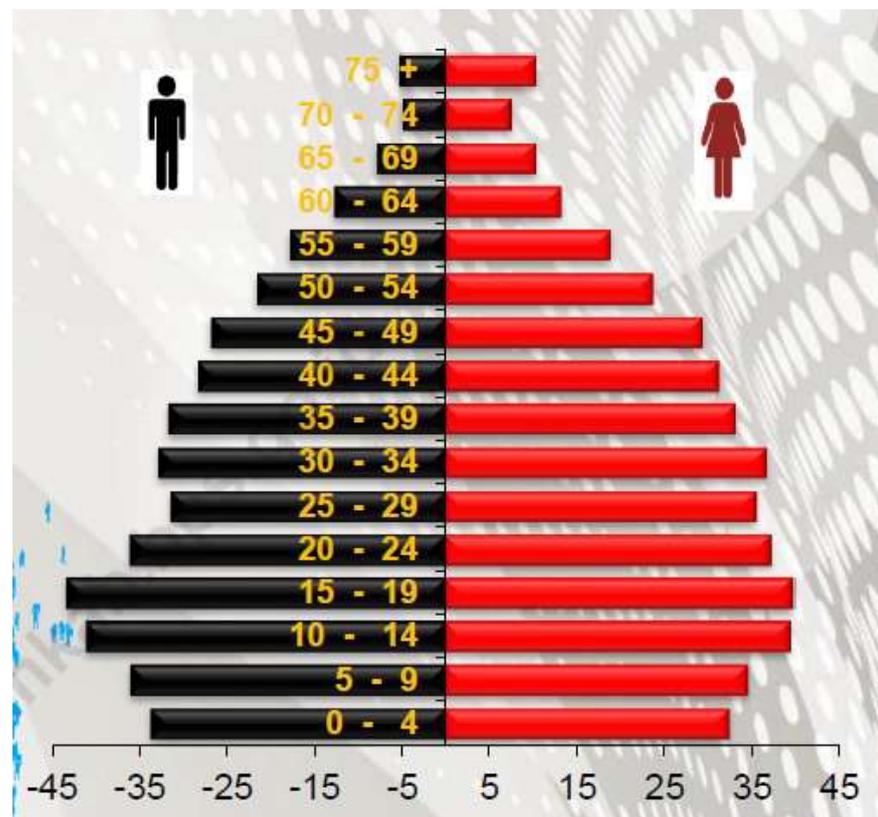
Tingginya angka sex ratio di Palengaan ini bisa menjadi indikator mengapa penduduk perempuan di wilayah tersebut lebih sedikit. Apakah disebabkan oleh jumlah kelahiran penduduk perempuan sedikit, angka kematian penduduk perempuan tinggi atau dikarenakan penduduk perempuan banyak yang migrasi.

2.3. Struktur Usia

Distribusi penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari piramida penduduk yang menggelembung dibagian tengah. Hal ini menggambarkan bahwa dari segi usia, sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan berada pada rentang usia produktif.

Gambar 1.4

Piramida Penduduk Pamekasan Tahun 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan 2018

Kondisi penduduk yang demikian sangat menguntungkan karena memiliki potensi bagi pembangunan di Kabupaten

Pamekasan. Banyaknya penduduk usia produktif juga sekaligus mengurangi angka ketergantungan di Kabupaten Pamekasan dimana jumlah penduduk usia produktif tidak memiliki beban tanggungan yang besar terhadap penduduk usia non produktif. Dengan demikian penduduk usia produktif dapat hidup lebih sejahtera.

2.4. Jenis Pekerjaan

Kondisi kependudukan selain dikaitkan dengan dinamika penduduk juga dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan. Seringkali di suatu daerah tenaga kerja menjadi permasalahan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan serta rendahnya SDM. Tidak jarang karena kondisi tersebut banyak penduduk melakukan migrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Dinamika penduduk yang terus bertambah karena tingginya natalitas dan menurunnya mortalitas seiring dengan semakin membaiknya kualitas pelayanan kesehatan tidak jarang menambah jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Pertambahan penduduk Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun juga terus bertambah yang berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah angkatan kerja.

Tabel 1.7

Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Penduduk	836.224	845.314	854.194	863.004
Penduduk Usia 15 Thn Keatas	624.787	634.253	*	651.952
Bukan Angkatan Kerja	155.706	189.972	*	188.551
Angkatan Kerja	469.081	444.281	*	463.401
Bekerja Seminggu Yang Lalu	459.046	425.333	*	445.268
Pengangguran	10.035	18.948	*	18.133
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,08	70,05	*	71,08
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,86	95,74	*	96,09

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,14	4,26	*	3,91
----------------------------------	------	------	---	------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

Keterangan : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2014-2017

*) Data Sakernas Tidak Tersedia

Dilihat dari komposisinya, jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terus bertambah dalam kurun waktu 2014-2017. Dari jumlah yang ada, angkatan kerja lebih banyak dibanding dengan yang bukan angkatan kerja. Sementara itu angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan berfluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah angka pengangguran mencapai 10.035 jiwa meningkat menjadi 18.948 jiwa pada tahun 2015. Kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 pemerintah berhasil menekan angka pengangguran menjadi 18.133 jiwa.

Kondisi Tingkat Partispasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pamekasan juga berfluktuasi dimana pada tahun 2014 mencapai angka 75,08% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 70,05%. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017 menjadi 71,08%. Sejalan dengan hal tersebut perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja juga mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 97,86% mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 95,74%. Kondisi tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 96,09%.

Keberhasilan pembangunan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menekan angka pengangguran terbuka juga terlihat dari angka pengangguran terbuka pada tahun 2014 sebesar 2,14% yang kemudian mengalmi kenaikan berlipat pada tahun 2015 menjadi 4,26%, namun pada 2017 pemerintah berhasil menekan angka tersebut menjadi 3,91%.

Komposisi pencari kerja di Kabupaten Pamekasan dilihat dari jenis kelamin lebih banyak laki-laki, meskipun kenyataannya jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Hal ini bisa

dikarenakan oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Pada masyarakat pedesaan kultur patriarki masih kuat diyakini oleh masyarakat. Laki-laki masih dikaitkan dengan perannya sebagai tulang punggung keluarga, sehingga banyak pencari kerja laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sementara perempuan biasanya mereka lebih banyak berperan pada sektor domestik seperti mengurus rumah tangga.

Tabel 1.8

Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Tlanakan	23	22	45
020 Pademawu	80	22	102
030 Galis	22	15	37
040 Larangan	9	9	18
050 Pamekasan	99	50	149
060 Proppo	7	10	17
070 Palengaan	13	3	16
080 Pegantenan	4	4	8
090 Kadur	1	3	4
100 Pakong	6	4	10
110 Waru	8	5	13
120 Batumarmar	3	3	6
130 Pasean	7	1	8
Jumlah	282	151	433

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Dilihat dari komposisi di setiap kecamatan, jumlah pencari kerja terbanyak adalah Kecamatan Pamekasan dan Pademawu. Sementara beberapa kecamatan lainnya jumlahnya relatif sedikit. Kondisi ini bisa terkait dengan struktur perekonomian di setiap kecamatan. Di wilayah kota seperti Kecamatan Pamekasan maupun Pademawu struktur ekonomi yang berkembang biasanya lebih didominasi oleh sektor formal sehingga banyak pencari pekerjaan yang mencari pekerjaan formal. Sedangkan di wilayah pedesaan yang umumnya memiliki kondisi geografis baik area perkebunan

atau pertanian yang luas maupun pantai biasanya lebih didominasi sektor informal, sehingga masyarakat banyak yang terserap pada sektor tersebut. Tentu saja kita tidak bisa mengabaikan faktor migrasi yang bisa saja juga mempengaruhi sedikitnya jumlah pencari kerja dari kecamatan-kecamatan tersebut.

Tabel 1.9

Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2017

Tingkat Pendidikan	2016			2017		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Dasar	3	1	4	-	-	-
S M T P	5	-	5	2	-	2
S M T A	84	25	109	175	68	243
Sarjana Muda	20	24	44	10	18	28
Sarjana	65	51	116	95	65	160
Jumlah	177	101	278	282	151	433

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pamekasan Tahun 2018

Dari tingkat pendidikannya, pencari kerja di Kabupaten Pamekasan bervariasi dan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2017. Pada tahun 2016 masih ada pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sebanyak 4 orang. Pada tahun 2017 pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sudah tidak ada, bahkan untuk tingkat SMTP hanya 2 orang saja. Lainnya merupakan lulusan SMTA hingga Sarjana.

Tabel 1.10

Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Program Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017

Tahun	Program Kerja			Jumlah
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah	Antar Kerja Antar Negara	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2013	30	-	41	71
2014	89	-	64	153
2015	51	-	7	58
2016	6	-	17	23

2017	84	-	-	84
------	----	---	---	----

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Untuk penempatan tenaga kerja ada yang penempatan antar kerja lokal dan antar kerja antar negara atau biasa disebut sebagai TKI. Pada tahun 2017 penempatan tenaga kerja sebanyak 84 semuanya terserap di wilayah lokal. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana tenaga kerja selain penempatan kerja lokal juga ada yang antar negara. Pada tahun 2014 misalnya sebanyak 64 tenaga kerja mendapat penempatan antar negara. Pada tahun 2015 penempatan tenaga kerja antar negara sempat turun, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2017 tidak ada penempatan tenaga kerja antar negara.

2.5. Pendidikan

Di dalam kependudukan, pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesejahteraan penduduk. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Seringkali pendidikan disebut sebagai *elevator* bagi penduduk untuk melakukan mobilitas sosial vertikal agar taraf kehidupannya menjadi lebih baik.

Gambar 1.5

Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan 2018

Keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari indikator kemampuan baca tulis penduduk, Angka Partisipasi Sekolah, status pendidikan penduduk maupun kondisi sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Pada tahun 2018 kemampuan baca tulis penduduk laki-laki mencapai 93,37% dan penduduk perempuan mencapai 83,50%.

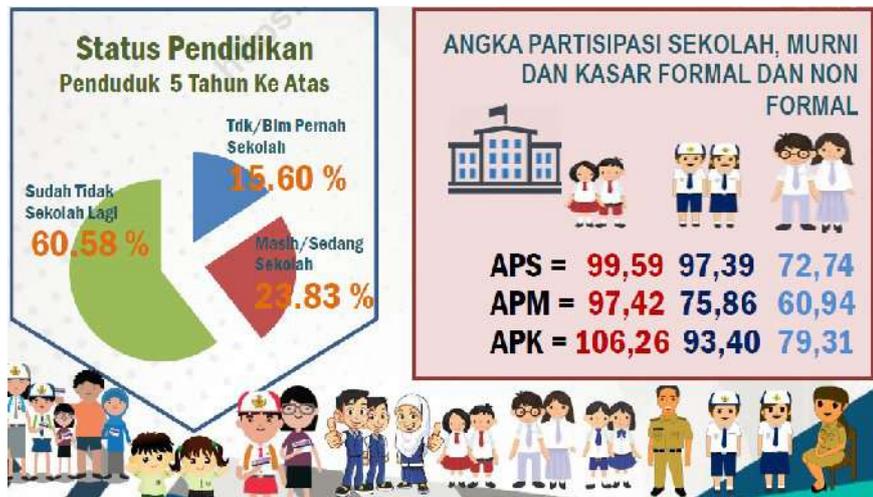
Kemampuan untuk menulis huruf latin penduduk laki-laki sebesar 91,54% dan perempuan 76,16%. Kemampuan baca tulis huruf lainnya untuk laki-laki sebesar 88,34% dan perempuan sebesar 78,97%.

Di Kabupaten Pamekasan juga masih terdapat penduduk yang masih buta huruf. Pada tahun 2018 tercatat ada 6,63% penduduk laki-laki yang buta huruf dan 16,50% penduduk perempuan yang buta huruf. Adanya sejumlah masyarakat yang belum bisa baca tulis atau buta huruf ini bisa disebabkan berbagai faktor seperti lemahnya kondisi ekonomi sehingga tidak mampu mengakses fasilitas pendidikan, kondisi geografis yang sulit diakses pendidikan maupun situasi sosial budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Adapun status pendidikan penduduk 5 tahun ke atas sebagian besar sudah tidak sekolah lagi yaitu 60,58%. Yang saat ini masih/sedang sekolah sebesar 23,83% dan yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 15,60%. Untuk melihat sejauhmana pembangunan di bidang pendidikan telah diakses oleh masyarakat dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah.

Grafik 1.6

Status Pendidikan Penduduk 5 Tahun ke atas, APS, APM dan APK



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan 2018

Pada tahun 2018, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Pamekasan untuk tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 99,59%. Angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP sebesar 97,39% dan untuk tingkat SMA sebesar 72,74%. Melihat angka partisipasi sekolah dari setiap tingkat pendidikan terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat yang dapat mengakses tingkat pendidikan tertentu semakin berkurang.

Sejauh mana masyarakat pada golongan usia tertentu dapat mengakses pendidikan di pada golongan usia tertentu digambarkan melalui angka partisipasi kasar. Di Kabupaten Pamekasan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan SD sebesar 106,26%. Untuk tingkat pendidikan SMP sebesar 93,40% dan SMA sebesar 79,31. Angka APK yang melebihi 100% menunjukkan bahwa ada

golongan usia tertentu yang bersekolah diluar golongan usia sekolah, hal ini bisa dikarenakan keterlambatan dalam memulai sekolah, terlalu cepat dalam memulai sekolah atau tidak naik kelas. Sedangkan angka partisipasi kasar yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa adanya penduduk usia golongan tertentu yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai golongan umur tertentu.

Sementara itu, untuk melihat penduduk golongan usia tertentu yang bersekolah tepat waktu dapat dilihat dari angka partisipasi murni dimana menunjukkan angka 97,42% untuk tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SMP angka partisipasi murni sebesar 75,86% dan untuk tingkat SMA sebesar 60,94%.

Jika dilihat semakin tinggi tingkat suatu pendidikan maka APS, APM dan APK semakin turun. Hal ini merupakan indikator sejauh mana penduduk di Kabupaten Pamekasan mampu menempuh pendidikan pada jenjang usia tertentu. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah baik karena faktor ekonomi, sosial maupun budaya.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Pamekasan dengan kondisi geografis yang tidak hanya memiliki luasan wilayah daratan tetapi juga lautan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah ini merupakan sumber utama bagi kesejahteraan penduduk Kabupaten Pamekasan.

➤ Pertanian

Beberapa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pamekasan yang telah dikelola dengan baik bahkan menjadi potensi unggulan

daerah. Potensi daerah dalam bidang pertanian dapat dilihat dari luas panen dan rata-rata produksi padi sawah di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.11

Luas Panen dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi *(Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Tlanakan	1.616	1.616	5,01	80.887
020 Pademawu	5.345	5.345	5,01	267.539
030 Galis	1.021	1.021	5,01	51.105
040 Larangan	647	647	5,01	32.385
050 Pamekasan	1.764	1.764	5,01	88.295
060 Proppo	2.892	2.892	5,01	144.757
070 Palengaan	709	709	5,01	35.488
080 Pegantenan	648	648	5,01	32.435
090 Kadur	985	985	5,01	49.303
100 Pakong	1.971	1.971	5,01	98.657
110 Waru	1.453	1.453	5,01	72.729
120 Batumarmar	1.671	1.671	5,01	83.640
130 Pasean	1.263	1.263	5,01	63.218
Jumlah	21.985	21.985	5,01	1.100.438

*)Gabah Kering Giling

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Pada tahun 2017, luas tanam padi sawah sebanyak 21.985 Ha dengan luas terbesar di Pademawu yang luasnya mencapai 5.345 Ha. Luas tanam tersebut menghasilkan luas panen sebesar 21.985 Ha dengan produktivitas padi 5,01 Ton/Ha dan produksi sebanyak 1.100.438 Kw.

Tabel 1.12

Luas Panen dan Rata-rata Produksi Padi Ladang Menurut
Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi *) (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Tlanakan	187	187	4,44	8.303
020 Pademawu	1.516	1.516	4,44	67.310
030 Galis	78	78	4,44	3.463
040 Larangan	-	-	-	-
050 Pamekasan	472	472	4,44	20.950
060 Proppo	1.035	1.035	4,44	45.954
070 Palengaan	1.277	1.277	4,44	56.690
080 Pegantenan	1.986	1.986	4,44	88.170
090 Kadur	194	194	4,44	8.614
100 Pakong	433	433	4,44	19.225
110 Waru	1.125	1.125	4,44	49.950
120 Batumarmar	10	10	4,44	444
130 Pasean	990	990	4,44	43.950
Jumlah	9.303	9.303	4,44	413.023

*)*Gabah Kering Giling*

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Padi ladang juga banyak dibudidayakan di Kabupaten Pamekasan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak padi sawah tetapi sudah terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Larangan. Luas tanam dan luas panen padi ladang pada tahun 2017 mencapai 9.303 Ha dengan produktivitas 4,44 Ton/Ha dan produksi sebanyak 413.023 Kw.

Adapun budidaya padi ladang terbanyak di Kecamatan Pegantenan yang luas panennya mencapai 1.986 Ha dan memiliki produktivitas 4,44 Ton/Ha. Pada tahun 2017 total produksi padi ladang di Kecamatan Pegantenan mencapai 88.170 kw.

Pertanian jagung juga dibudidayakan di Pamekasan. Budidaya tanaman jagung bahkan lebih besar dibanding padi, namun produktivitas dan hasil produksinya lebih banyak padi. Luas tanam dan luas panen jagung mencapai 38.828 Ha pada tahun 2017.

Produktivitas jagung pada tahun 2017 mencapai 2,26 Ton/Ha dengan produksi sebanyak 877.513 Kw.

Tabel 1.13

Luas Panen dan Rata-rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi *) (Kw)
010 Tlanakan	1.425	1.425	2,26	32.205
020 Pademawu	1.154	1.154	2,26	26.080
030 Galis	78	78	2,26	1.763
040 Larangan	1.942	1.942	2,26	43.889
050 Pamekasan	188	188	2,26	4.249
060 Proppo	2.025	2.025	2,26	45.765
070 Palengaan	5.731	5.731	2,26	129.521
080 Pegantenan	2.433	2.433	2,26	54.986
090 Kadur	4.036	4.036	2,26	91.214
100 Pakong	325	325	2,26	7.345
110 Waru	4.630	4.630	2,26	104.638
120 Batumarmar	6.444	6.444	2,26	145.634
130 Pasean	8.417	8.417	2,26	190.224
Jumlah	38.828	38.828	2,26	877.513

*)*Pipilan Kering*

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Pasean merupakan kecamatan yang memiliki potensi budidaya tanaman jagung terbesar. Luas tanam dan luas panen mencapai 8.417 Ha dan hasil produksi mencapai 190.224 kw pada tahun 2017. Batumarmar juga merupakan penghasil jagung terbanyak setelah Pasean dengan luas tanam dan luas panen sebesar 6.444 Ha dan hasil produksi mencapai 145.634 kw.

Tabel 1.14

Luas Panen dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi *) (Kw)
010 Tlanakan	-	-	-	-
020 Pademawu	-	-	-	-
030 Galis	-	-	-	-
040 Larangan	42	42	11,85	4.977
050 Pamekasan	-	-	-	-
060 Proppo	520	520	11,85	61.620
070 Palengaan	290	290	11,85	34.365
080 Pegantenan	152	152	11,85	18.012
090 Kadur	19	19	11,85	2.251
100 Pakong	125	125	11,85	14.813
110 Waru	40	40	11,85	4.740
120 Batumarmar	315	315	11,85	37.328
130 Pasean	260	260	11,85	30.810
Jumlah	1.763	1.763	11,85	208.916

*)Umbi Basah Berkulit

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Berbeda dengan padi dan jagung yang berfungsi sebagai makanan pokok, ubi kayu biasanya dikonsumsi sebagai bahan olahan makanan dan tepung. Karena fungsinya inilah tidak semua petani membudidayakan ubi kayu. Namun di Kabupaten Pamekasan beberapa kecamatan membudidayakan tanaman ubi kayu meskipun luas tanam tidak sebanyak jagung dan padi.

Luas tanam dan luas panen ubi kayu pada tahun 2017 mencapai 1.763 Ha yang tersebar di sembilan kecamatan. Produktivitas tanaman ubi kayu ini mencapai 11,85 Ton/Ha dengan produksi 208.916 kw.

Budidaya tanaman hortikultura di Kabupaten Pamekasan seperti kacang tanah dibudidayakan di semua kecamatan kecuali Pademawu. Adapun luas tanam dan luas panen tanaman kacang tanah mencapai 1.306 Ha dengan tingkat produktivitas sebesar 0,86

Ton/Ha dan mampu menghasilkan produksi kacang tanah sebanyak 11.232 Kw pada tahun 2017.

Tabel 1.15

Luas Panen dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah Menurut
Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi *) (Kw)
K	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Tlanakan	25	25	0,86	215
020 Pademawu	-	-	-	-
030 Galis	4	4	0,85	34
040 Larangan	13	13	0,86	112
050 Pamekasan	5	5	0,86	43
060 Proppo	45	45	0,86	387
070 Palengaan	231	231	0,86	1.987
080 Pegantenan	58	58	0,86	499
090 Kadur	22	22	0,86	189
100 Pakong	11	11	0,86	95
110 Waru	15	15	0,86	129
120 Batumarmar	93	93	0,86	800
130 Pasean	784	784	0,86	6.742
Jumlah	1.306	1.306	0,86	11.232

*)Biji Kering

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Hasil produksi tanaman kacang tanah terbesar ada di Kecamatan Pasean. Luas tanam dan luas panen di Kecamatan Pasean mencapai 784 Ha dengan tingkat produktivitas sebesar 0,86 Ton/Ha. Hasil produksi kacang tanah di Kecamatan Pasean pada tahun 2017 mencapai 11.232 Kw.

Tabel 1.16

Luas Panen dan Rata-rata Produksi Kacang Hijau Menurut
Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi *) (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Tlanakan	45	45	1,10	495
020 Pademawu	-	-	-	-
030 Galis	5	5	1,10	55
040 Larangan	53	53	1,10	583
050 Pamekasan	-	-	-	-
060 Proppo	-	-	-	-
070 Palengaan	-	-	-	-
080 Pegantenan	-	-	-	-
090 Kadur	36	36	1,10	396
100 Pakong	-	-	-	-
110 Waru	10	10	1,10	110
120 Batumarmar	-	-	-	-
130 Pasean	550	550	1,10	6.050
Jumlah	699	699	1,10	7.689

*)Biji Kering

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Produk tanaman hortikultura lainnya adalah kacang hijau. Meskipun produk ini merupakan salah satu produk unggulan, namun hanya beberapa kecamatan saja yang membudidayakan. Kecamatan Pasean merupakan kecamatan yang paling banyak membudidayakan hortikultura termasuk kacang hijau. Luas tanam dan luas panen mencapai 550 Ha dengan tingkat produktivitas 1,10 Ton/Ha. Hasil panen pada tahun 2017 mencapai 6.050.

Sementara kecamatan lainnya hanya memiliki luas tanam dan luas panen dibawah 60 Ha dengan tingkat produktivitas 1,10 Ton/Ha. Jika dihitung secara keseluruhan maka potensi produksi kacang hijau di Kabupaten Pamekasan mencapai 699 Ha luas tanam dan luas panen dengan tingkat produktivitas 1,10 Ton/Ha. Pada tahun 2017, produksi kacang hijau di Kabupaten Pamekasan mencapai 7.689 Kw.

Selain kacang-kacangan, produk hortikultura lainnya berupa sayuran. Sayuran yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Pamekasan adalah Bawang Merah, Cabe Merah, Cabe Rawit, Tomat, Ketimun. Bawang merah dibudidayakan hampir diseluruh kecamatan kecuali Tlanakan dan Pemakasan. Pada tahun 2017 luas panen tanaman bawang merah mencapai 2.414 Ha dengan luas panen terbesar ada di Batumarmar yaitu 1.958 Ha.

Tabel 1.17

Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Pamekasan (Ha) Tahun 2017

Kecamatan	Bawang Merah	Cabe Merah	Cabe Rawit	Tomat	Ketimun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Tlanakan	-	350	250	2	1
020 Pademawu	2	2	1	-	-
030 Galis	17	7	2	6	-
040 Larangan	2	8	50	16	-
050 Pamekasan	-	-	-	-	-
060 Proppo	20	61	89	-	37
070 Palengaan	56	-	281	-	12
080 Pegantenan	40	-	254	15	12
090 Kadur	16	8	202	1	2
100 Pakong	2	4	2	-	-
110 Waru	175	-	125	-	-
120 Batumarmar	1.958	-	631	-	-
130 Pasean	126	-	207	-	-
Jumlah	2.414	440	2.094	40	64

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Cabe merah hanya dibudidayakan di beberapa kecamatan saja seperti Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Proppo, Kadur dan Pakong. Pada tahun 2017 luas panen cabe merah mencapai 440 Ha dengan luas panen terbesar di Kecamatan Tlanakan.

Tabel 1.18

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran
di Kabupaten Pamekasan (Kw) Tahun 2017

Kecamatan	Bawang Merah	Cabe Merah	Cabe Rawit	Tomat	Ketimun
010 Tlanakan	-	24.132	20.200	8	2
020 Pademawu	180	48	40	-	-
030 Galis	1.205	107	23	35	-
040 Larangan	140	1.055	12.638	7.550	-
050 Pamekasan	-	-	-	-	-
060 Proppo	1.288	434	779	-	210
070 Palengaan	3.603	-	14.217	-	739
080 Pegantenan	3.000	-	33.228	1.579	1.589
090 Kadur	1.457	484	2.976	10	29
100 Pakong	190	45	32	-	-
110 Waru	12.800	-	900	-	-
120 Batumarmar	119.594	-	13.738	-	-
130 Pasean	8.829	-	4.754	-	-
Jumlah	152.286	26.305	103.525	9.182	2.569

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Berbeda dengan cabe merah yang hanya dibudidayakan di beberapa kecamatan, tanaman cabe rawit dibudidayakan hampir disemua kecamatan kecuali Kecamatan Pamekasan. Jumlah luas panen keseluruhan mencapai 2.094 Ha dengan luas panen terbesar di Batumarmar mencapai 631 Ha. Tanaman lainnya yaitu tomat dan mentimun hanya dibudidayakan di beberapa kecamatan. Luas panen tomat mencapai 40 Ha dan mentimun 64 Ha.

Adapun jumlah produksi bawang merah pada tahun 2017 mencapai 152.286 Kw dengan jumlah produksi terbanyak di Batumarmar mencapai 119.594 Kw. Untuk cabe merah jumlah produksinya mencapai 26.305 Kw dan terbanyak adalah Kecamatan Tlanakan yang produksinya mencapai 24.132 Kw.

Produksi cabe rawit di Kabupaten Pamekasan mencapai 103.525 Kw dengan hasil produksi terbesar di Pegantenan sebanyak 33.228

Kw dan Tlanakan sebanyak 20.200 Kw. Sedangkan tomat produksinya mencapai 9.182 Kw dan ketimun sebesar 2.569 Kw.

Tabel 1.19

Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di
Kabupaten Pamekasan (Kw) Tahun 2017

Kecamatan	Mangga	Jambu Biji	Pisang	Nangka	Pepaya
010 Tlanakan	2.351	906	9.192	-	1.197
020 Pademawu	69.963	-	55.858	482	1.705
030 Galis	4.170	6	532	66	-
040 Larangan	12.000	546	66.000	1.229	1.382
050 Pamekasan	-	-	760	-	1.004
060 Proppo	10.024	7.111	1.834	3.267	1.838
070 Palengaan	-	-	16.770	-	549
080 Pegantenan	1.712	-	7.129	-	-
090 Kadur	2.441	45	1.822	275	709
100 Pakong	11.074	159	17.039	2.469	390
110 Waru	6.600	632	6.180	2.800	720
120 Batumarmar	-	-	88	-	36
130 Pasean	1.918	730	1.961	-	2.164
Jumlah	122.253	10.135	185.165	10.588	11.694

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Beberapa jenis buah-buahan juga menjadi produk unggulan di Kabupaten Pamekasan. Pisang merupakan buah komoditas yang banyak dihasilkan pada tahun 2017. Produksi pisang mencapai 185.165 Kw dengan hasil produksi terbanyak di Kecamatan Larangan dan Pademawu.

Berikutnya buah mangga juga banyak dihasilkan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 122.253 Kw. Buah mangga banyak dihasilkan di Kecamatan Pademawu yang produksinya mencapai 69.963 Kw. Produksi buah pepaya pada tahun 2017 mencapai 11.694 yang produksinya tersebar di setiap kecamatan kecuali Galis dan Pegantenan. Nangka dan Jambu biji juga banyak dihasilkan di Kecamatan Proppo.

Jika dilihat secara keseluruhan, hampir setiap kecamatan memiliki potensi untuk menghasilkan produk buah-buahan unggulan. Kecamatan Pademawu merupakan salah satu kecamatan

yang cukup berpotensi untuk pengembangan budidaya mangga dan pisang. Terbukti dari hasil panen yang dihasilkan pada tahun 2017.

Kabupaten Pamekasan juga merupakan salah satu daerah yang berpotensi menghasilkan produk tembakau pilihan. Tembakau sebagai bahan baku pembuatan rokok ini dibudidayakan oleh petani pada saat musim kemarau sebagai pengganti tanaman padi. Banyaknya budidaya tembakau menjadikan banyak gudang tembakau di Pamekasan yang pada musim panen juga banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Tabel 1.20

Produksi, Produktivitas, dan Luas Areal Tanaman Perkebunan
Tembakau Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Produksi (Ton)	Produk- tivitas (Kg/Ha)	Luas Lahan (Ha)			
			TBM	TM	TTR	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Tlanakan	650	637	-	1.020	-	1.020
020 Pademawu	1.034	538	-	1.921	-	1.921
030 Galis	574	649	-	885	-	885
040 Larangan	728	648	-	1.124	-	1.124
050 Pamekasan	311	607	-	512	-	512
060 Proppo	1.700	642	-	2.647	-	2.647
070 Palengaan	1.090	528	-	2.065	-	2.065
080 Pegantenan	1.322	487	-	2.714	-	2.714
090 Kadur	662	494	-	1.340	-	1.340
100 Pakong	639	590	-	1.083	-	1.083
110 Waru	1.513	513	-	2.952	-	2.952
120 Batumarmar	1.681	470	-	3.578	-	3.578
130 Pasean	1.613	505	-	3.197	-	3.197
Jumlah	13.517	540	-	25.038	-	25.038

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

*) data tidak tersedia

Produksi tembakau pada tahun 2017 di Kabupaten Pamekasan mencapai 13.517 ton dengan luas lahan 25.038 Ha dan tingkat produktivitas 540 kg/Ha. Tembakau banyak dibudidayakan di beberapa kecamatan seperti Proppo, Batumarmar, Pasean, Waru, Pegantenan dan Pademawu. Beberapa kecamatan lainnya juga melakukan budidaya tetapi luas lahannya relatif sedikit dibanding beberapa kecamatan tersebut.

Hasil tanaman perkebunan kelapa di Kabupaten Pamekasan mencapai 5.223 ton pada tahun 2017. Kondisi topografi yang terletak di sepanjang garis pantai menjadikan wilayah ini memiliki potensi perkebunan kelapa yang tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan lokal tetapi juga menjadi komoditas di luar daerah.

Tabel 1.21

Produksi, Produktivitas, dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Produksi (Ton)	Produk-tivitas (Kg/Ha)	Luas Lahan (Ha)			Jumlah
			TBM	TM	TTR	
010 Tlanakan	214	1.050	13	204	25	242
020 Pademawu	158	1.000	9	158	4	171
030 Galis	180	1.050	7	171	7	185
040 Larangan	420	1.100	6	382	28	416
050 Pamekasan	160	900	50	178	6	234
060 Proppo	252	950	9	265	4	278
070 Palengaan	546	1.200	89	455	54	598
080 Pegantenan	888	1.200	52	740	79	871
090 Kadur	960	1.200	101	800	35	936
100 Pakong	287	1.200	314	239	34	587
110 Waru	523	1.200	28	436	21	485
120 Batumarmar	505	1.200	12	421	9	442
130 Pasean	130	1.101	12	118	10	140
Jumlah	5.223	1.144	702	4.567	316	5.585

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

*) data tidak tersedia

Luas area perkebunan kelapa pada tahun 2017 mencapai 5.585 Ha yang terbagi menjadi TBM (Tanaman Belum Menghasilkan), TM (Tanaman Menghasilkan) dan TTR (Tanaman Tua dan Rusak). Adapun tingkat produktivitas tanaman kelapa mencapai 1.144 kh/Ha. Jumlah produksi kelapa terbesar yaitu di Kecamatan Kadur yang mencapai 960 ton dan Pegantenan sebanyak ton. Selain di dua kecamatan tersebut memiliki luas area tanam yang besar juga memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahun.

Perkebunan di Kabupaten Pamekasan juga menghasilkan kapuk. Kapuk digunakan sebagai bahan baku kapas, dan masyarakat lokal

biasanya menggunakan kapuk sebagai bahan baku untuk membuat alas tidur maupun bantal. Produksi kapuk terbesar adalah Kecamatan Pasean yaitu sebanyak 49 ton pada tahun 2017. Pasean memiliki luas area tanaman kapuk paling besar yaitu 238 Ha dengan produktivitas 209 kg/Ha.

Tabel 1.22

Produksi, Produktivitas, dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Kapuk Randu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Luas Lahan (Ha)			
			TBM	TM	TTR	Jumlah
010 Tlanakan	15	302	0,00	48,0	4,0	52,0
020 Pademawu	2	450	0,00	4,0	0,0	4,0
030 Galis	1	267	0,00	3,0	0,0	3,0
040 Larangan	26	297	1,00	86,0	6,0	93,0
050 Pamekasan	1	200	0,00	4,0	0,0	4,0
060 Proppo	12	316	0,00	38,0	4,0	42,0
070 Palengaan	20	323	2,00	62,0	3,0	67,0
080 Pegantenan	5	333	0,00	15,0	1,0	16,0
090 Kadur	11	314	0,00	35,0	4,0	39,0
100 Pakong	30	256	0,00	117,0	6,0	123,0
110 Waru	40	223	2,00	179,5	8,0	189,5
120 Batumarmar	10	323	0,00	31,0	2,0	33,0
130 Pasean	49	209	0,00	232,0	6,0	238,0
Jumlah	222	259,80	5,00	854,5	44,0	903,5

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan

Kecamatan Waru juga merupakan salah satu penghasil kapuk terbesar di Kabupaten Pamekasan. produksi kapuk di Kecamatan Waru mencapai 40 ton dengan luas area tanam 189,5 Ha dengan tingkat produktivitas 223 kg/Ha. Produksi kapuk lainnya dihasilkan oleh kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Pada tahun 2017, total hasil produksi kapuk mencapai 222 ton dengan luas area 903,5 Ha dan tingkat produktivitas 259,80 kg/Ha. Adanya hasil kapuk yang melimpah merupakan peluang pasar bagi Kabupaten Pamekasan untuk terus meningkatkan produksinya

mengingat tanaman ini juga mudah untuk dibudidayakan seperti halnya tanaman kelapa.

Cabe jamu merupakan salah satu tanaman komoditas unggulan di Kabupaten Pamekasan karena tanaman yang bisa dipergunakan sebagai obat herbal ini belum dibudidayakan di daerah lain. Cabe jamu banyak ditemukan di kebun-kebun maupun di pohon-pohon pekarangan rumah warga.

Tabel 1.23

Produksi, Produktivitas, dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Cabe Jamu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Produksi (Ton)	Produkti- vitas (Kg/Ha)	Luas Lahan (Ha)			
			TBM	TM	TTR	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Tlanakan	18,00	600,00	6,00	30,00	3,50	39,50
020 Pademawu	-	-	-	-	-	-
030 Galis	-	-	-	-	-	-
040 Larangan	154,00	832,43	9,00	185,00	11,00	205,00
050 Pamekasan	-	-	-	-	-	-
060 Proppo	-	-	-	-	-	-
070 Palengaan	25,00	781,25	11,00	32,00	5,00	48,00
080 Pegantenan	30,00	882,35	10,00	34,00	5,50	49,50
090 Kadur	93,00	768,60	19,00	121,00	10,00	150,00
100 Pakong	26,00	838,71	13,00	31,00	5,00	49,00
110 Waru	32,00	820,51	7,00	39,00	7,00	53,00
120 Batumarmar	25,00	714,29	7,00	35,00	6,00	48,00
130 Pasean	27,00	642,86	9,00	42,00	7,00	58,00
Jumlah	430	783,24	91,00	549,00	60,00	700,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan Tahun 2018

Produksi cabe jamu ini telah dibudidayakan di seluruh kecamatan kecuali Pademawu, Galis, Pamekasan dan Proppo. Total produksi cabe jamu pada tahun 2017 mencapai 430 ton dengan luas area tanam 700 Ha dan produktivitas sebesar 783,24 kg/Ha.

Cabe jamu banyak dihasilkan di Kecamatan Larangan yaitu mencapai 154 ton dengan luas area 205 Ha dan produktivitas 832,43 kg/Ha. Penghasil cabe jamu terbanyak juga berada di Kecamatan Kadur dengan total produksi sebanyak 93 ton dengan luas area tanam 150 Ha dan produktivitas 768,60 kg/Ha. Produktivitas cabe

jamur di beberapa kecamatan lainnya juga tinggi meskipun luas area kecil. Melihat produktivitas yang tinggi, maka bukan hal yang mustahil jika tanaman ini bisa dikembangkan lagi agar menjadi komoditas unggulan daerah mengingat kemudahan dalam budidaya tanaman cabe jamu dan belum dikembangkan di daerah lain.

Potensi tanaman perkebunan lainnya yang terdapat di Kabupaten Pamekasan adalah tanaman pinang dan asam jawa. Tanaman pinang dan asam jawa ini selain digunakan untuk bahan campuran makanan juga sebagai bahan obat herbal. Dua tanaman ini potensial karena adanya kebutuhan pasar serta budidaya tanaman pinang dan asam jawa ini relatif mudah.

➤ **Peternakan**

Bagi masyarakat pedesaan salah satu diversifikasi usaha yang mudah untuk dilakukan adalah beternak. Pekerjaan ini relatif mudah karena dapat dilakukan disela-sela kesibukan mereka bercocok tanam. Beternak bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan waktu luang yang biasa dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Kultur semacam ini memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

Tabel 1.24

Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Sapi			Kuda	Kerbau
	Jantan	Betina	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Tlanakan	9.153	7.107	16.260	5	-
020 Pademawu	8.552	3.812	12.364	3	-
030 Galis	3.145	1.105	4.250	3	-
040 Larangan	8.752	2.982	11.734	0	-
050 Pamekasan	4.418	3.029	7.447	2	-
060 Proppo	5.842	11.431	17.273	3	-
070 Palengaan	2.891	14.855	17.746	3	-
080 Pegantenan	9.484	7.562	17.046	0	-
090 Kadur	7.109	6.411	13.520	0	-
100 Pakong	1.428	9.451	10.879	0	-
110 Waru	4.832	13.138	17.970	6	-
120 Batumarmar	9.324	14.548	23.872	7	-
130 Pasean	884	21.210	22.094	7	-
Jumlah	75.814	116.641	192.455	39	-

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Hasil dari peternakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan terdiri dari ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2017, ternak besar di Kabupaten Pamekasan populasinya mencapai 192.455 ekor sapi. Peternakan sapi di Kabupaten Pamekasan ini lebih didominasi oleh sapi betina yaitu 116.641 ekor, sementara sapi jantan sebanyak 75.814 ekor sapi. Hal ini dikarenakan peternakan sapi betina memiliki fungsi menghasilkan susu dan berkembangbiak, sementara sapi jantan selain diambil dagingnya mereka juga berfungsi sebagai pejantan.

Tabel 1.25

Populasi Ternak Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Kambing		Domba		Kelinci
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Tlanakan	417	9.995	1.562	1.650	230
020 Pademawu	253	8.512	1.019	1.296	813
030 Galis	230	5.390	1.057	795	395
040 Larangan	156	7.557	546	2.194	780
050 Pamekasan	308	4.582	650	547	425
060 Proppo	125	4.085	595	1.305	158
070 Palengaan	89	2.711	890	1.060	220
080 Pegantenan	44	2.266	384	692	106
090 Kadur	76	2.944	335	890	95
100 Pakong	40	1.800	614	796	215
110 Waru	56	2.774	458	627	100
120 Batumarmar	195	6.445	248	572	102
130 Pasean	142	5.226	580	745	100
Jumlah	2.131	64.287	8.938	13.169	3.739

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Peternakan yang lebih banyak yaitu ternak kecil antara lain kambing, domba dan kelinci. Jumlah populasi kambing di Pamekasan mencapai 64.287 ekor kambing betina dan 2.131 ekor kambing jantan. Populasi kambing terbesar berada di Kecamatan Tlanakan yaitu 417 ekor kambing jantan dan 9.995 ekor kambing betina.

Domba juga menjadi salah satu peternakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2017 populasi domba mencapai 13.169 ekor domba betina dan 8.938 ekor domba jantan. Populasi domba terbesar juga berada di Kecamatan Tlanakan yaitu 1.562 domba jantan dan 1.650 domba betina. Peternakan kecil seperti kelinci juga banyak ditemui di Kabupaten Pamekasan namun jumlahnya tidak sebanyak kambing dan domba. Hal ini terkait dengan tingkat konsumsi daging kelinci masyarakat yang masih didominasi oleh daging sapi, kambing dan domba.

Bagi masyarakat desa, hampir setiap keluarga memiliki ternak unggas. Masyarakat biasa memperlakukan unggas sebagai hewan piayaraan yang memiliki nilai ekonomis serta mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja karena biayanya yang relatif murah.

Tabel 1.26

Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik	Itik Manila
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Tlanakan	56.950	15.600	84.500	2.135	2.295
020 Pademawu	100.550	48.200	19.200	8.180	5.355
030 Galis	34.160	71.900	26.300	5.615	2.008
040 Larangan	56.750	280.000	90.200	4.500	2.605
050 Pamekasan	91.530	45.500	13.900	8.090	665
060 Proppo	115.500	39.200	18.200	2.470	1.095
070 Palengaan	60.150	48.250	19.780	4.275	2.590
080 Pegantenan	80.870	37.500	18.200	1.120	610
090 Kadur	49.464	238.050	147.650	1.780	220
100 Pakong	48.850	8.530	16.600	7.190	2.448
110 Waru	49.400	22.475	13.100	1.480	1.695
120 Batumarmar	69.780	9.350	3.000	1.370	456
130 Pasean	51.450	31.800	7.300	1.795	430
Jumlah	865.404	896.355	477.930	50.000	22.472

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Ada beberapa jenis unggas yang dibudidayakan di Kabupaten Pamekasan antara lain Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik dan Itik Manila. Jumlah populasi ayam buras di Kabupaten pada tahun 2017 mencapai 865.404 ekor, sementara populasi ayam ras pedaging mencapai 896.355 dan ayam ras petelur sebanyak 477.930 ekor.

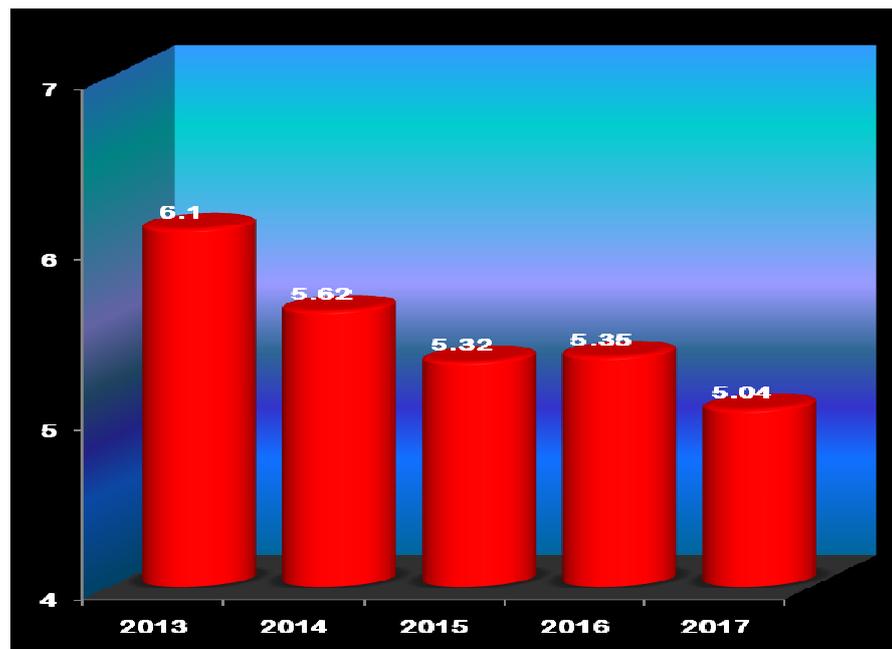
Sama halnya ayam yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, permintaan akan daging itik saat ini juga mulai banyak seiring dengan meningkatnya konsumsi daging itik di masyarakat. Kondisi ini menjadi potensi bagi peternakan itik di Kabupaten Pamekasan.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Kondisi perekonomian di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selama kurun waktu 2013-2017 kondisi ekonomi Kabupaten Pamekasan fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan mencapai titik tertinggi yaitu 6,1%.

Gambar 1.6

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,62% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 5,32%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan 0,03% yaitu menjadi 5,35%. Namun pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan kembali mengalami penurunan menjadi 5,04%. Bahkan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan paling rendah selama kurun 2013-2017.

Tabel 1.27

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016*	2017**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.748.281,8	4.944.112,5
B. Pertambangan dan Penggalian	452.281,9	520.274,4
C. Industri Pengolahan	825.768,1	922.152,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.431,9	7.268,4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.277,4	11.214,5
F. Konstruksi	1.397.204,9	1.559.098,5
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	2.740.935,3	3.038.802,3
H. Transportasi dan Pergudangan	207.652,9	232.889,4
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.479,3	98.373,7
J. Informasi dan Komunikasi	798.869,2	883.026,7
K. Jasa Keuangan	267.658,3	287.862,2
L. Real Estat	246.235,3	264.370,4
M.N. Jasa Perusahaan	50.377,7	55.243,8
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	871.062,9	938.787,6
P. Jasa Pendidikan	575.891,8	617.985,2
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	93.595,8	104.626,7
R,S,T,U. Jasa Lainnya	145.094,2	154.487,6
PDRB	13.525.098,7	14.640.576,0

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Perekonomian Kabupaten Pamekasan ditopang oleh beberapa sektor usaha. Sektor terbesar yang membentuk PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) terbesar adalah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 4.944.112,5 juta rupiah pada tahun 2017. Sektor ini

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.749.481,1 juta rupiah.

Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga memberikan banyak sumbangan bagi PDRB ADHB sebesar 3.038.802,3 juta rupiah pada tahun 2017. Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang menyumbang PDRB ADHB sebesar 2.740.935,3 juta rupiah.

Tabel 1.28

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (TD 2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2017
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016*	2017**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.126.107,1	3.137.578,5
B. Pertambangan dan Penggalian	334.348,5	376.476,4
C. Industri Pengolahan	611.823,8	659.667,8
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.849,7	6.109,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.658,1	9.110,1
F. Konstruksi	998.125,2	1.081.967,7
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	2.066.132,1	2.222.637,5
H. Transportasi dan Pergudangan	163.533,0	176.844,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63.402,3	69.432,0
J. Informasi dan Komunikasi	718.955,5	776.903,4
K. Jasa Keuangan	186.583,5	194.190,4
L. Real Estat	193.839,5	203.143,8
M.N. Jasa Perusahaan	41.806,7	44.277,5
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	670.121,6	694.045,0
P. Jasa Pendidikan	435.938,2	456.514,5
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	73.810,1	79.305,1
R,S,T,U. Jasa Lainnya	116.738,6	122.038,5
PDRB	9.815.773,6	10.310.241,6

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

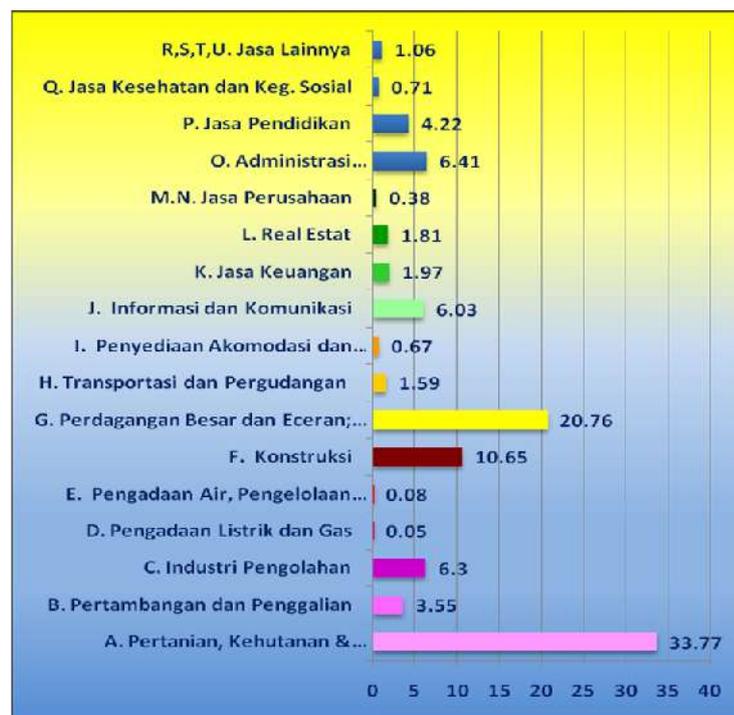
Demikian juga untuk PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan), juga mengalami peningkatan pada tahun 2017. Sumbangan PDRB ADHK terbesar juga berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 3.137.578,5 juta rupiah yang merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sektor kedua yang banyak menyumbang PDRB ADHK adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2.222.637,5 juta rupiah dan dari sektor konstruksi sebesar 1.081.967,7 juta rupiah. Adanya sektor penyusun ekonomi yang bervariasi tersebut merupakan potensi bagi Kabupaten Pamekasan dalam upaya peningkatan kondisi perekonomian di Kabupaten Pamekasan.

Seberapa besar sumbangan setiap sektor usaha bagi kondisi ekonomi di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari distribusi PDRB setiap sektor usaha.

Gambar 1.7

Distribusi PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Sumbangan terbesar masih pada sektor primer yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 33,77%. Sumbangan pada sektor ini terbesar karena secara geografis kondisi wilayah Kabupaten Pamekasan sangat cocok untuk pertanian, kehutanan

maupun kelautan. Posisi geografis yang terletak di dataran rendah dan dataran tinggi menyebabkan Pamekasan kaya akan sumber daya alam dan di sektor kelautan ada perikanan.

Distribusi PDRB terbesar lainnya merupakan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,76%. Perdagangan merupakan sektor sekunder yang saat ini mulai berkembang dengan adanya peningkatan konsumsi di masyarakat akan barang sekunder seperti mobil dan sepeda.

Sektor lainnya yang banyak adalah konstruksi sebesar 10,65% dan sektor-sektor lainnya yaitu sektor tersier. Dengan adanya banyak sektor penopang ekonomi di Kabupaten Pamekasan menjadikan perekonomian di Kabupaten Pamekasan akan semakin kuat. Karena jika salah satu sektor mengalami penurunan akibat tekanan ekonomi global maka sektor lainnya dapat saling menopang. Pada saat ini sektor terkuat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan Kabupaten Pamekasan sebagai wilayah agraris.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan di tahun 2018 yang dikembangkan pada dasarnya mengacu pada visi-misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

Sejak awal telah disadari bahwa substansi pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial-ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan, perubahan tentu tidak hanya diharapkan terjadi pada aspek fisik dan kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kesejahteraan dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pembangunan idealnya harus diikuti dengan meningkatnya kadar keberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan yang dikembangkan berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus, membangun gedung-gedung sekolah, jembatan yang kokoh atau membangun berbagai prasarana ekonomi. Namun, juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan —baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

Selama tahun 2018, pembangunan yang sudah dilaksanakan dan dikembangkan di Kabupaten Pamekasan, harus diakui masih menemui berbagai kendala, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional yang terkadang fluktuatif, dan orientasi pembangunan yang cenderung masih mementingkan pusat-pusat pertumbuhan dan kota besar. Namun demikian, sepanjang tahun 2018, berbagai upaya telah dan terus dilakukan Pemerintah

Kabupaten Pamekasan untuk memastikan arah dan kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai harapan.

Di era otonomi seperti sekarang ini, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pemandu atau acuan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak salah arah, selain RPJPD Kabupaten Pamekasan, adalah RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di sini pada dasarnya adalah dokumen komprehensif lima tahunan, yang memuat program-program prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sifatnya komprehensif dan berkesinambungan. RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, di mana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Esensi RPJMD adalah memuat rencana pembangunan berskala daerah selama jangka waktu lima tahun yang wajib dijadikan sebagai komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Formulasi arah kebijakan dan program-program pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan proses multidimensional yang ditandai dengan perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang senantiasa bersendikan nilai-nilai religi dan kearifan budaya lokal demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan.

Di tahun kelima proses pelaksanaan program pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018, berbagai upaya dan program pembangunan telah dilaksanakan agar tercipta masyarakat Pamekasan yang makin bersih, sehat, cerdas, dan sejahtera.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Pamekasan sepanjang tahun 2018 telah dikembangkan berbagai program pembangunan untuk mempercepat terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Di era otonomi daerah, disadari bahwa peluang Kabupaten Pamekasan untuk berkembang lebih cepat dan lebih maju menjadi sangat terbuka, terutama karena keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang benar-benar kontekstual. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan sebuah tata *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan daerah yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang akan disampaikan kepada DPRD dalam konteks dan kerangka waktu jangka panjang tersebut, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005–2025, yang menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang.

Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), yang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang selanjutnya tercermin dalam APBD, dan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya.

Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2018 ini, merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14A Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14A Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013–2018.

LKPJ Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 memuat rekam jejak dan berbagai hal yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sepanjang tahun 2018, dan hasil-hasil pembangunan yang telah berhasil dicapai.

A. Visi dan Misi Daerah

Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang dicita-citakan. Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 - 2025, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013–2018 adalah:

“Terwujudnya Pamekasan yang Bersih , Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang Profesional”

Adapun penjelasan visi tersebut di atas adalah :

- a) **Bersih**, artinya kondisi lingkungan masyarakat yang indah dan asri serta bebas polusi;
- b) **Sehat**, artinya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh

- masyarakat Kabupaten Pamekasan;
- c) **Cerdas**, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, tidak tergantung dan tidak menjadi pihak yang ter subordinasi pihak lain serta meningkatnya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat, berkurangnya angka buta huruf yang ada pada muaranya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan;
 - d) **Sejahtera**, artinya mencapai taraf kehidupan yang tentram, nyaman, secara sosial-ekonomi dan psikologis tidak kekurangan dan mampu memenuhi paling-tidak kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya;
 - e) **Iman dan Taqwa**, artinya berpegangan pada ajaran agama dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa;
 - f) **Profesional**, artinya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara adil.

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : *“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”* dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah: *“Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”* maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Pamekasan, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan sekaligus menetapkan fokus arah kebijakan yang diinginkan, telah ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- 1) Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui

- peningkatan fasilitas layanan kesehatan;
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur publik;
 - 4) Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan;
 - 5) Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel);
 - 6) Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta mudah.

Atas 6 (enam) Misi Kabupaten Pamekasan tersebut secara substansi maknanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperluas Pendidikan Berbasis Potensi Daerah dan Pemerataan Kualitas Pendidikan.

Artinya dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018), Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan akan memperluas dan mempermudah aksesibilitas pendidikan, pemerataan pendidikan melalui upaya peningkatan APM–APK untuk jenjang Pendidikan SD/MI sampai dengan SMA/MA, utamanya pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun, selain itu upaya peningkatan kualitas hasil pendidikan juga perlu dioptimalkan, sehingga angka putus sekolah dapat ditekan, angka melanjutkan meningkat, nilai rata UAN/UNAS meningkat dan rata–rata sekolah bagi masyarakat Pamekasan juga meningkat, yang didukung sarana prasarana kependidikan yang cukup memadai dan kualitas tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi pendidik secara cukup.

Pendidikan yang berbasis potensi lokal pada masyarakat Pamekasan tentunya tidak akan meninggalkan basis sosial masyarakat Madura yang islami dan nilai nilai keagamaan lain yang baik serta budi pekerti yang luhur.

2. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Hidup Bersih dan Sehat Melalui Peningkatan Fasilitas Layanan Kesehatan.

Dimaksudkan bahwa layanan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat utamanya masyarakat miskin di Puskesmas/Pustu akan diupayakan terjangkau/ murah bahkan gratis, Kualitas dan kuantitas Puskesmas/Pustu secara bertahap dan berkesinambungan akan ditingkatkan terus, kecukupan tenaga medis dan para medis diupayakan lebih optimal pada tahun tahun mendatang.

Pola layanan RSUD yang sudah berjalan melalui mekanisme BLUD akan terus dikembangkan menuju Rumah Sakit yang mandiri, maju/modern dan profesional, biaya layanan pasien miskin RSUD dan rawat inap kelas 3 diupayakan semurah mungkin bahkan gratis. Kecukupan dokter spesialis dari tahun ke tahun akan diupayakan bertambah disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik.

Dimaksudkan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan dan Jaringan Irigasi serta infrastruktur industri dan perdagangan akan diupayakan lebih optimal, sehingga dukungan infrastruktur pengembangan perekonomian, peningkatan alur/arus distribusi barang dan jasa dapat lebih lancar, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan kelautan dapat ditingkatkan, sekaligus pembenahan kali/sungai dan jaringan irigasi diharapkan dapat meningkatkan luas areal panen dan merupakan alat pengendalian banjir di wilayah pertanian maupun permukiman.

4. Meningkatkan Pembangunan di Bidang Ekonomi Dengan Prioritas Sektor Pertanian dan Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Dimaksudkan bahwa sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar perlu menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, peningkatan produksi dan produktivitas dilakukan melalui perbaikan

pola tanam, pemberantasan hama, pemupukan secara baik dan irigasi yang cukup.

Pengembangan pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan (tanaman tahunan) maupun tanaman keras dan peternakan di Kabupaten Pamekasan tentunya disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah (berbasis komoditas unggulan daerah/wilayah). Pengembangan perekonomian daerah juga akan didukung melalui pengembangan Koperasi/Usaha Mikro dan UKM serta pengembangan industri kecil/kreatif/pengrajin melalui pola pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai basis ekonomi kerakyatan.

5. Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi di Segala Bidang, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Transparan dan Akuntabel).

Dimaksudkan bahwa penataan kelembagaan dalam hal ini organisasi SKPD secara periodik perlu dilakukan kajian/Analisis jabatan dan atau review disesuaikan dengan perkembangannya, penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensinya, kecukupan pegawai perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan SKPD, demikian pula pelatihan pegawai dalam bentuk pelatihan/pendidikan secara struktural maupun fungsional perlu dilakukan terus, peningkatan etos kerja, disiplin kerja dan budaya kerja juga perlu ditingkatkan, melalui penerapan etika dan perilaku pegawai secara baik.

6. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Publik yang Cepat, Sederhana Serta Murah.

Dimaksudkan bahwa layanan publik yang baik, cepat, murah merupakan hak masyarakat untuk mendapat pemenuhan dari lembaga publik dalam hal ini adalah Kabupaten Pamekasan, karena layanan publik yang baik adalah salah satu ciri berjalannya tugas pemerintahan secara baik, oleh karena itu semua SKPD yang mempunyai tugas terkait dengan layanan publik harus menyusun

standart pelayanan publik (SPP) dan disosialisasikan kepada masyarakat/stakeholder dan pemangku kepentingan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategy objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Sedangkan yang dimaksud dengan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Pamekasan merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Penetapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

Misi pertama yaitu Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk Mewujudkan masyarakat Pamekasan yang cerdas, terampil dan terdidik berlandaskan iman dan taqwa. Terhadap pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya akses dan pemerataan, peningkatan kualitas hasil pelayanan pendidikan dengan strategi pencapaian yaitu Pemerataan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak diskriminatif dengan biaya murah (gratis), yang didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan yang memadai, dengan arah kebijakan antara lain :
 - Menyelenggarakan sistem pendidikan murah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan mencerdaskan masyarakat;

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
- 2) Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang akan dicapai melalui strategi Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang didukung dengan kompetensi tenaga pendidik yang memadai dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan;
 - Meningkatkan kualitas SDM tenaga Pendidikan;
 - Meningkatkan layanan perpustakaan.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

Misi Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan memiliki tujuan pencapaian berupa Terwujudnya masyarakat Pamekasan yang sehat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat serta arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
 - Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- 2) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dengan strategi optimalisasi sumber daya dalam rangka mewujudkan pola hidup bersih dan sehat yang diikuti dengan arah kebijakan berupa Meningkatkan peran serta aktif masyarakat bidang kesehatan.
- 3) Meningkatnya Layanan RSUD yang akan dicapai melalui strategi Pengembangan RSUD, melalui dukungan kecukupan tenaga medis dan paramedis serta sarana dan prasarana rumah sakit secara memadai yang

diarahkan melalui kebijakan berupa Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.

- 4) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha dan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Penguatan kelembagaan organisasi wanita; dan
 - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
- 5) Pemantapan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dicapai melalui strategi Pemantapan kapasitas pelayanan KB di klinik KB Pemerintah dan swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Pemantapan Program KB; dan
 - Meningkatkan Keluarga Sejahtera.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

Misi ketiga yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur publik mempunyai tujuan Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penetapan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan memadai. Pencapaiannya dilakukan dengan strategi meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan arah kebijakan:
 - Penyediaan sistem informasi/database infrastruktur;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan penanggulangan banjir dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air.

- 3) Meningkatnya kualitas permukiman dilakukan dengan strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman dan arah kebijakan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan.
- 4) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan strategi Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan dan angkutan umum dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

Misi Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan arah kebijakan Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pertanian;
 - Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani dengan arah kebijakan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi maupun nasional dengan arah kebijakan Mewujudkan dan mengembangkan agrobisnis yang berdaya saing.
 - b. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya Kapasitas dan Peran serta Masyarakat dicapai melalui strategi

optimalisasi Sumber Daya ketahanan pangan daerah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penyediaan lumbung pangan menuju desa mandiri;
 - Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan dan peran serta masyarakat.
- c. Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui strategi Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan serta arah kebijakan Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan menjaga kelestarian hutan rakyat.
- d. Meningkatnya Pembangunan perikanan dicapai dengan strategi Penguatan dan Perluasan Sumber Daya Perikanan serta arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan;
 - Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dan pengusaha kecil dan mikro.
- 2) Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata yang dapat dicapai melalui strategi Promosi dan Eksplorasi sektor pariwisata serta arah kebijakan berupa Pengembangan potensi pariwisata.
- 3) Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan sasaran Berkurangnya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Sosial dan Kesenjangan Antar Wilayah yang didukung oleh strategi berupa sinergitas antar wilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang diarahkan melalui kebijakan Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kegiatan ekonomi dan meningkatkan keberpihakan.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja yang memiliki sasaran berupa Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Serta Penyediaan Lapangan Kerja yang dapat dicapai melalui strategi Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan arah kebijakan Mendorong profesionalitas kerja dan menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis.

- 5) Memperkuat iklim usaha UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan memiliki sasaran berupa Meningkatnya Koperasi, UMKM dan Etos Kewirausahaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan koperasi sejalan dengan pengembangan dunia usaha dengan arah kebijakan Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
 - b. Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru dengan arah kebijakan yaitu :
 - Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
 - Meningkatkan fasilitasi manajemen dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar daerah dengan arah kebijakan yaitu :
 - Pengembangan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan;
 - Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
 - Peningkatan perlindungan konsumen.
- 6) Meningkatnya investasi dan penanaman modal dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah yang mempunyai sasaran Meningkatnya investasi/ penanaman modal daerah. Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru serta arah kebijakannya yaitu Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- 7) Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembangunan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini dilakukan dengan strategi Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan dengan

memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya;
- Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan ruang terbuka hijau;
- Peningkatan kebersihan lingkungan;
- Pengurangan beban pencemaran lingkungan.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5

Misi kelima yaitu Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) yang mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, partisipatif, inovatif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai didukung kajian secara memadai yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu dengan arah kebijakan Meningkatkan koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor serta Mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan Peraturan Perundangan lainnya yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan arah kebijakan Penyusunan perencanaan tata

ruang dan Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Terwujudnya sistem inovasi daerah (SIDa) bagi terciptanya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- Melaksanakan litbang, pengkajian, pengoperasian, penerapan, dan perekayasaan dalam menumbuhkembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dengan arah kebijakan merumuskan kebijakan inovasi (*road map, grand design, dan action plan*) berskala Kabupaten dan melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan perekayasaan, dan pengoperasian dalam rangka penguatan SIDa.

2) Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik, tujuan ini dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN yang dicapai melalui strategi memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten.
- b. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat yang dicapai melalui strategi meningkatkan fungsi lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan fungsi lembaga legislatif.
- c. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien yang dicapai melalui strategi Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas dan manajemen layanan administratif kepada Sekda dan SKPD terkait;

- Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam merumuskan penanganan masalah lintas sektor;
 - Menegakkan supremasi hukum.
- 3) Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat dicapai melalui strategi :
- a. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan sebagai berikut :
 - Meningkatkan transparansi pelaksanaan penganggaran;
 - Meningkatkan kompetensi pengawasan.
 - b. Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Mengintensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- 4) Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan bertanggung jawab dengan sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Transparan, dan Profesional melalui strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif serta arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum;
 - Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi politik yang terbuka dan saling menghormati;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana dengan sasaran Meningkatnya upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien melalui strategi peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana serta arah kebijakannya sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana;
 - Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana.
- 6) Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga seni dan budaya dengan sasaran Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
- Peningkatan peran serta generasi muda dengan arah kebijakan Meningkatkan peran generasi muda;
 - peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan dengan arah kebijakan Meningkatkan prestasi olahraga dan meningkatkan fasilitas olah raga;
 - Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap seni, budaya dan nilai-nilai tradisi dengan arah kebijakan Mengembangkan seni dan budaya nilai tradisi.
- 7) Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah memiliki sasaran berupa Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah yang dapat dicapai melalui strategi Peningkatan akses dan kapasitas masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah yang diarahkan melalui kebijakan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.
- 8) Meningkatnya sistem pengelolaan arsip agar dapat termanfaatkan secara maksimal dengan sasaran Meningkatnya utilitas kearsipan bagi masyarakat luas yang dicapai melalui strategi memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan arsip daerah serta arah kebijakannya Memberikan layanan prima terhadap pengguna arsip.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 6

Misi Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah yang bertujuan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik menuju masyarakat yang bertanggung jawab berbasis iman dan

taqwa. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang benar-benar Prima, serta Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Seluruh Lembaga Layanan Publik dengan strategi Optimalisasi sarana prasarana layanan publik dengan arah kebijakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yg efektif dan efisien.
- 2) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas layanan kependudukan dengan strategi memberdayakan fasilitas pendukung administrasi kependudukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diarahkan melalui kebijakan peningkatan layanan prima terkait dengan administrasi kependudukan.
- 3) Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta keleluasaan untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban syariat agama sesuai dengan keyakinannya dengan strategi mengkoordinasikan dan memobilisasi *stake holder* bidang keimanan dan ketaqwaan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dengan arah kebijakan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan hidup umat beragama.
- 4) Meningkatnya Penyelesaian Ijin Lokasi tepat waktu dengan strategi meningkatkan kapasitas sumber daya menuju stardar pelayanan ijin lokasi dengan arah kebijakan Peningkatan layanan prima penerbitan ijin lokasi.
- 5) Meningkatnya sistem komunikasi dan media massa dengan strategi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada pengembangan TI.

C. Prioritas Daerah

Pasal 1 ayat(3) UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu perencanaan pembangunan di daerah mengacu dan berpedoman pada perencanaan di tingkat nasional dan perencanaan pembangunan pemerintah di atasnya.

Dengan memperhatikan kaidah tersebut dan berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di muka maka program prioritas daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Mempercepat pembangunan Infra struktur publik;
4. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah;
5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang;
6. Meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana serta murah.

Program prioritas tersebut setiap tahun *break-down* kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, yang pelaksanaannya tertuang dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja dari masing masing satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2018 merupakan implementasi rencana pembangunan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Tema RKPD kabupaten Pamekasan tahun 2018 yaitu *“Optimasi*

Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi “. Tema ini merupakan manifestasi dari misi ke-4 dan misi ke-6 dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan. Tema tersebut diharapkan dapat mereformasi birokrasi dan mendorong pembangunan infrastruktur publik Kabupaten Pamekasan di tahun 2018 mendatang.

Gambar 2.1

Skema Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018



Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu tugas yang sangat vital dan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah. Pengelolaan keuangan daerah intinya adalah bagaimana mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berhasil guna dan berdaya guna.

Daerah yang mendapatkan mandat untuk mengelola keuangan di daerah – tak terkecuali di Kabupaten Pamekasan— bukan hanya bertanggung jawab (*accountability*) melaporkan peruntukannya kepada masyarakat, DPRD, dan berbagai pihak lain secara terbuka, tetapi juga memastikan peruntukannya benar-benar tepat. Unsur-unsur penting dalam tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

Mengelola keuangan daerah sudah barang tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Istilah mengelola merupakan tata cara mengurus keuangan daerah sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dalam konteks ini, para aparat pengelolah keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan keuangan daerah bukan hanya berkaitan dengan kekayaan dan aset yang dimiliki daerah, tetapi juga berkaitan dengan sumber-sumber keuangan yang dapat diakses dan dimanfaatkan daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap daerah, tak terkecuali di Kabupaten Pamekasan harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah untuk menjamin pengalokasian dan pemanfaatan keuangan daerah yang tepat. Beberapa prinsip manajemen keuangan daerah yang penting adalah: Pertama, akuntabilitas. Pengambilan suatu keputusan pengalokasian dan pemanfaatan keuangan daerah harus sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan. Kedua, *value for money*. Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Ketiga, kejujuran dalam mengelola keuangan publik. Artinya dalam pengelolaannya harus dipercayakan kepada pegawai yang punya integritas dan kejujuran yang tinggi. Keempat, transparansi, yakni berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan Masyarakat. Kelima, pengendalian, yaitu monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan Keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan di daerah, sehingga dapat mencapai sasaran dan target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerah. Mengingat pentingnya kedudukan keuangan daerah tersebut, maka pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Untuk mendukung

hal tersebut, berbagai regulasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai panduan atau pedoman dalam pengelolaan keuangan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Pamekasan maupun Keputusan Bupati Pamekasan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan atas dasar asas desentralisasi fiskal. Kebijakan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 didahului melalui Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan unsur penting di dalam mendukung terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Maka untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan regulasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati.

Regulasi tersebut antara lain berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 07 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14A Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018; Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018; Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14A Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018; Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018; Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018.

Kebijakan anggaran tahun 2018 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Pamekasan sesuai urusannya, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor, antara lain melalui:

1. Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi dengan cara penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi, mengantisipasi kebocoran, tunggakan dan pemberian sanksi atas penghindar pajak.
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan penghematan belanja daerah sesuai dengan prioritas
3. Prioritas anggaran diarahkan untuk membiayai program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat
4. Pembinaan untuk mewujudkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dan investasi swasta
5. Membangun kinerja pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengancam transparansi pengelolaan keuangan daerah.
6. Peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah.

7. Pemberdayaan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah/BUMD dan Dinas atau lembaga penghasil agar makin mampu menampilkan kinerja yang efisien, transparan serta mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan keuangan daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah, menurut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan jenis penerimaan yang ada dan masih berpeluang untuk ditingkatkan serapannya, baik itu pajak daerah, retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah yang lain, baik peningkatan tarif maupun penambahan wajib pajak/wajib kelembagaan, ketatalaksanaan dan kemampuan personil. Di tengah keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki, melakukan intensifikasi pendapatan daerah adalah salah satu strategi meningkatkan pendapatan daerah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui proses ekstensifikasi dapat dicapai dengan menambah jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang baru melalui Peraturan Daerah yang sebelumnya belum ada dalam jenis pendapatan tersebut. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya ini, khususnya penggalan sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah disadari tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni bahwa pungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 serta tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga harus melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak membebani masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah yang diliput dari Rincian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH	1,761,281,131,744.00	1,840,978,455,415.09	(79,697,323,671.09)	104,52
Pendapatan Asli Daerah	179,974,568,986.00	222,288,080,549.09	(42,313,511,563.09)	123,51
Hasil Pajak Daerah	29,682,649,630.00	36,520,160,896.00	(6,837,511,266.00)	123,04
Hasil Retribusi Daerah	14,841,970,458.00	16,150,680,713.88	(1,308,710,255.88)	108,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,923,442,124.00	1,923,442,124.80	(0.80)	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	133,526,506,774.00	167,693,796,814.41	(34,167,290,040.41)	125,59
Dana Perimbangan	1,241,155,382,500.00	1,252,406,756,553.00	(11,251,374,053.00)	100,91
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	112,938,525,000.00	135,741,325,291.00	(22,802,800,291.00)	120,19
Dana Alokasi Umum	849,764,469,000.00	849,764,469,000.00	0.00	100,00
Dana Alokasi Khusus	278,452,388,500.00	266,900,962,262.00	11,551,426,238.00	95,85
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	340,151,180,258.00	366,283,618,313.00	(26,132,438,055.00)	107,68
Pendapatan Hibah	60,087,940,000.00	54,083,440,000.00	6,004,500,000.00	90,01
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	69,737,148,258.00	102,727,693,913.00	(32,990,545,655.00)	147,31
Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	188,617,892,000.00	187,764,284,400.00	853,607,600.00	99,55
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	21,708,200,000.00	21,708,200,000.00	0.00	100,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 1.761.281.131,744.00, sedangkan realisasinya melebihi jumlah pendapatan daerah, yakni mencapai 1.840.978.455,415.09 atau lebih sebesar Rp. 79.697.323,671.09. Realisasi sebesar 104,52% ini sudah barang tentu berkat kerja keras dari semua pihak yang terkait.

Pendapatan Asli Daerah, dari target sebesar Rp. 179.974.568,986.00, ternyata realisasinya mencapai 123,51%. Realisasi PAD yang diperoleh sepanjang tahun 2018 naik menjadi Rp. 222.288.080,549.09. Sementara itu, untuk dana perimbangan tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Dari

target yang ditetapkan, realisasi perolehan dana perimbangan hanya naik 0,91%.

Kenaikan perolehan pendapatan daerah yang kenaikannya signifikan berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Di tahun 2018, dari target sebesar Rp. 69.737.148.258.00, ternyata realisasinya naik menjadi 147,31% hingga menjadi Rp. 102.727.693.913.00.

3. Permasalahan dan Solusi

Untuk memastikan pengalokasian dan pemanfaatan keuangan daerah benar-benar tepat sasaran sebagaimana direncanakan harus diakui bukan hal yang mudah. Selama tahun 2018, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Pengelolaan dana yang berasal dari Pusat sering terlambat di dalam penetapan Peraturan Daerah yang menjadi dasar sumber pengalokasian penganggaran.
- 2) Kurangnya potensi daerah yang dapat digali khususnya sumber daya alam.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah:

- 1) Terus dilakukan koordinasi dengan pusat terkait realisasi bantuan kepada Pemerintah Daerah. Sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi seringkali dilakukan sampai tingkat desa.
- 2) Mengelola potensi pendapatan daerah semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas SDM, dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, pendidikan penjenjangan, Diklat Tekhnis Fungsional maupun pendidikan formal agar menjadi profesional, berdaya guna, dan berhasil guna. Serta meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan peningkatan pendapatan.

Melihat kondisi potensi pendapatan dan permasalahan yang dihadapi, maka dalam memprediksi pendapatan daerah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah tetap dapat meningkat tanpa mengakibatkan melemahnya kemampuan untuk memberdayakan perekonomian di daerah.
- 2) Penggalan Pendapatan Asli Daerah harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan, pengawasan internal, perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

a. Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan APBD yang efisien dan efektif, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dengan menempatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan utama;
- 2) Pengembangan Standar Analisis Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap SKPD sebagai dasar perencanaan anggaran;
- 3) Peningkatan Sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah;

- 4) Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat;
- 5) Revitalisasi Aset-Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan;
- 6) Penurunan dan pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah;
- 7) Kerjasama pembangunan, baik antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan swasta maupun dengan lembaga-lembaga donor;
- 8) Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat;
- 9) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aparatur pengelola anggaran daerah.

b. Kebijakan Pembiayaan

Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terlebih dahulu melalui Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah.

Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau menggunakan defisit atau surplus anggaran penetapannya dioptimalkan sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan umum penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dipertimbangkan dengan kebutuhan, kualitas manajemen dan kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan.

- 2) Penyertaan modal kepada masyarakat berupa bantuan pinjaman modal berbunga rendah baik kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun kelompok tani.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dari anggaran yang ada, sepanjang tahun 2018 belanja daerah yang telah dilakukan dilaporkan hanya mencapai 80,41%, yakni dari Rp. 2.138.127.562.564.00 anggaran yang ada, realisasi belanja daerah hanya Rp. 1.719.270.402.417.17.

Serapan belanja daerah yang terbesar berasal dari belanja langsung, khususnya belanja pegawai. Untuk belanja pegawai tercatat telah terserap sebesar 90,41%. Sedangkan belanja yang serapannya paling kecil adalah belanja bantuan sosial yang tercatat hanya 26,20%.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA DAERAH	2,138,127,562,564.00	1,719,270,402,417.17	418,857,160,146.83	80,41
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,152,221,282,855.00	1,004,696,939,775.26	147,524,343,079.74	87,20
Belanja Pegawai	777,921,221,018.00	658,340,508,734.90	119,580,712,283.10	84,63
Belanja Hibah	85,276,404,200.00	74,801,168,041.36	10,475,236,158.64	87,72
Belanja Bantuan Sosial	22,492,796,509.00	5,893,820,000.00	16,598,976,509.00	26,20
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	7,350,296,828.00	6,514,215,949.00	836,080,879.00	88,63
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	255,780,564,300.00	255,779,759,400.00	804,900.00	100,00
Belanja Tidak Terduga	3,400,000,000.00	3,367,467,650.00	32,532,350.00	99,04
BELANJA LANGSUNG	985,906,279,709.00	714,573,462,641.91	271,332,817,067.09	72,48
Belanja Pegawai	42,339,076,400.00	38,277,237,302.00	4,061,839,098.00	90,41
Belanja Barang dan Jasa	478,519,971,100.00	358,934,545,984.08	119,585,425,115.92	75,01
Belanja Modal	465,047,232,209.00	317,361,679,355.83	147,685,552,853.17	68,24

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun 2018, antara lain:

- 1) Selalu berubahnya peraturan perundangan tentang pengelolaan

keuangan daerah yang mengakibatkan para pengelola keuangan perlu waktu untuk menyesuaikan dengan dengan peraturan perundangan tersebut.

- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan keuangan khususnya yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pemerintah pusat terus diintensifkan untuk lebih awal mengetahui perubahan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan serta informasi tentang alokasi DAU dan DAK.
- 2) Mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti diklat-diklat, seminar ataupun pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan efektif.
- 3) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang operasional dan administrasi kinerja aparatur khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

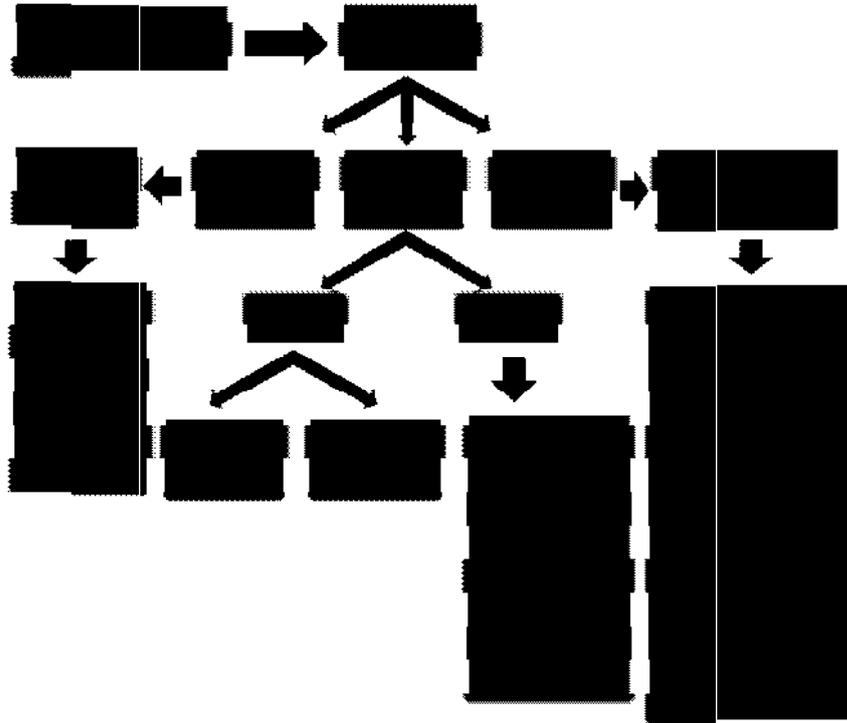
BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam menjalankan pemerintahan, tugas yang harus diemban oleh pemerintah yaitu urusan pemerintahan umum, absolut dan konkuren. Klasifikasi Urusan Pemerintahan tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sementara urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan kongruen merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Kabupaten/Kota mengemban tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Adapun tanggungjawab yang dimiliki tidak hanya melaksanakan urusan wajib tetapi juga urusan pilihan. Gambar berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar 4.1
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah



Sumber : Analisa Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan wajib tersebut merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh semua daerah termasuk Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk urusan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan SDM, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Urusan pilihan ini merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, diatur sedemikian rupa untuk menjamin sinergitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan merata.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas provinsi atau lintas negara, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas provinsi atau lintas negara, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas provinsi atau lintas negara, Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota, dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Urusan

pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olah raga;

- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Kehutanan;
- 6) Energi dan sumber daya mineral;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

Pelaksanaan urusan Pemerintah di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun didalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala. Dukungan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah daerah beserta *stakeholder* dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi program, hasil yang dicapai dalam pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat sesuai harapan.

Gambaran secara lengkap tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pamekasan tahun 2018 dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Pendidikan.

1.1. Sasaran Strategis

- 1) *Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang merata dengan indicator kinerja angka rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Sekolah.*

Pada tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah ditargetkan 6 tahun dengan realisasi kinerja 7 tahun sehingga tingkat capaian kinerja

sebesar 117% dan angka harapan sekolah ditargetkan sebesar 16,5 tahun dengan realisasi 13 tahun sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 79%. Sedangkan dukungan anggaran untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan sebesar Rp.127.622.516.428,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.112.307.105.302,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 88%.

2) *Menurunnya angka buta huruf dengan indikator kinerja penurunan angka buta huruf.*

Pada tahun 2018, penurunan angka buta huruf ditargetkan 100% dengan realisasi kinerja 98% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98%. Sedangkan dukungan anggaran sebesar Rp.335.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.322.550,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 96%.

1.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Evaluasi Hasil Renja Dinas Pendidikan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	90	90%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor	orang	90	90	100%
2.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kegiatan	Paket	1	1	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	90	90%
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit	14	14	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona	Unit	3	3	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	paket	1	1	100%
4.	Rehab berat gedung UPTD Kec. Larangan & Pakong (Jadwal Ulang)	Jumlah Gedung Yang Direhab	Unit	2	0	0%
5.	Pembangunan Gedung Kantor DISDIK (lanjutan)(DPAL)	Jumlah Gedung Yang Dibangun	Unit	1	1	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	90	90%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta DIKLAT	ASN	90	90	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	Dokumen Anjab	1	1	100%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	85	80	94%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang disusun	Dokumen	4	4	100%
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	%	90	85	94%
1.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti pekatihan	Guru	50	50	100%
2.	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya Penyelenggaraan HAN	Murid dan Guru	38	38	100%
3.	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga yang menerima bantuan	Guru	75	75	100%
4.	Rehab Ringan dan Sedang Gedung	Jumlah Lembaga yang menerima	Lembaga Pendidikan	31	31	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
	PAUD, TK/RA	Bantuan				
5.	Sosialisasi Lembaga PAUD (PAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi	Lembaga	815	815	100%
6.	Pembinaan dan Pengembangan Guru (PAK)	Jumlah Guru TK yang mengikuti pembinaan	Guru	240	240	100%
VI.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpenuhinya Guru Berkualifikasi S1/DIV	PTK	70%	45%	64%
1.	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah guru calon sertifikasi	Guru	200	200	100%
2.	Penetapan Penilaian Angka Kredit/DUPAK	Jumlah Guru yang dinilai Angka kredit/DUPAK	Guru	400	400	100%
3.	Pengembangan Kinerja Pengawas	Jumlah Pengawas yang dikembangkan kinerjanya	Pengawas	66	66	100%
4.	Pengembangan Kinerja Penilik	Jumlah Penilik yang dikembangkan kinerjanya	Penilik	30	30	100%
5.	Pembinaan dan Pemeriksaan Guru PNS	Jumlah Kasus guru yang diselesaikan	Guru	80	80	100%
6.	Peningkatan Fungsi Guru Tidak Tetap (GTT) (APBD - DID)	Jumlah Guru Tidak Tetap yang menerima tunjangan Kesajateraan	GTT	909	909	100%
7.	Peningkatan Kinerja Guru TK/PAUD (BK Prov)	Jumlah guru TK/PAUD penerima bantuan	Guru	219	219	100%
8.	Peningkatan Kinerja Guru TK (BK Prov)	Jumlah guru TK penerima bantuan	Guru	16	16	100%
9.	Peningkatan Kinerja Guru SD (BK Prov)	Jumlah guru SD penerima bantuan	Guru	3	3	100%
10.	Peningkatan Kinerja Guru SMP (BK Prov)	Jumlah guru SMP penerima bantuan	Guru	7	7	100%
11.	Penyelenggaraan Diklat Calon Pengawas	Jumlah Peserta Diklat Calon Pengawas	Pengawas	50	0	0%
VII.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Penerapan MBS	Lembaga	90%	80%	89%
1.	Dana Operasional BOS	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	2	100%
2.	BOP Madin (BK Provinsi)	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	4	100%
3.	Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik	Jumlah Lembaga SMP Negeri yang melaksanakan	SeKolah	35	35	100%

No.	Program/Kegiatan/Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
	Baru (PPDB)	PPDB				
4.	Hari Pendidikan Nasional	Jumlah Peserta	Murid & Guru	600	600	100%
5.	Pengelolaan DAPODIK	Jumlah data yang di hasilkan	Data Pendidikan	25	25	100%
6.	Rapat Koordinasi Pendidikan	Jumlah Peserta	Lembaga Pendidikan	250	250	100%
7.	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	100%
8.	Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan	Jumlah Peserta	Operator	100	100	100%
VIII.	Program Pendidikan Dasar (SD)	Meningkatnya APK SD/MI/Paket A	siswa	100%	100%	100%
		Meningkatnya APM SD/MI/Paket A	siswa usia sekolah	100%	98%	98%
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang direhabilitasi/dibangun	Lembaga SD	95	95	100%
2.	Rehab Ringan dan Sedang SD/MI/MD	Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang direhabilitasi	Lembaga Pendidikan	67	67	100%
3.	Rehab ringan sedang dan RKB PAUD TK/RA,SD/MI/MD, SMP/MTs, SMA/MA & Sederajat (DPAL)	Jumlah Meubeler yang diserahkan ke SD	Lembaga Pendidikan	29	29	100%
4.	Peningkatan sarana SD	Jumlah Gedung SD yang direhabilitasi/dibangun	SD/MI	1	1	100%
5.	Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah tanah SD Negeri yang diadakan	SD Negeri	416	416	100%
6.	Pengadaan sampul rapor (Jadwal Ulang)	Jumlah Unit Sampul SD yang diadakan	SD Negeri	416	416	100%
7.	Peningkatan Prasarana SD (Jadwal Ulang)	Jumlah lembaga penerima bantuan	SD Negeri	3	3	100%
8.	Fasilitasi US dan UASBN SD/MI	Jumlah SD/MI yang melakukan UASBN	Lembaga Pendidikan	800	800	100%
9.	Pelaksanaan BOSDA Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah dasar yang menerima BOS	SD Negeri	416	416	100%
10.	Fasilitasi Pusat Pendidikan Sains	Jumlah Peserta Pelatihan	Siswa	320	320	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
11.	Pelaksanaan Uji Kompetensi Baca Al-Qur'an	Jumlah peserta uji kompetensi	Siswa SD	11000	11,000	100%
12.	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah Peserta FLS2N	Siswa SD	20	20	100%
13.	Penyelenggaraan Olimpiade olah raga siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah Peserta Seleksi O2SN SD	Siswa SD	104	104	100%
14.	Peningkatan Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah peserta	SD Negeri	3	3	100%
15.	Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran SD (OSN)	Jumlah peserta OSN SD	Siswa SD	2814	2814	100%
16.	Penyediaan/ Pengadaan Lahan Pendidikan Sekolah Dasar (PAK)	Jumlah luas lahan pendidikan yang disediakan/ diadakan	SD Negeri	1	0	0%
IX.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B	siswa	100%	100%	100%
		Meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B	siswa usia sekolah	100%	95%	95%
1.	Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang direhabilitasi/dibangun	SMP	49	0	0%
2.	Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan	Jumlah Gedung yang di sewa	Unit	1	1	100%
3.	Rehab Ringan dan Sedang Gedung SMP/MTs	Jumlah Gedung Lembaga Pendidikan yang direhabilitasi	SMP/MTs	25	25	100%
4.	Pengembangan Kelas Digital SMP	Jumlah Lembaga SMP penerima bantuan kelas digital	SMP	3	3	100%
5.	Pengadaan Server UNBK SMP Swasta	tersedianya sarana pendidikan yang memadai	SMP	40	40	100%
6.	Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian) SMPN Pamekasan (BK Prov)	tersedianya sarana pendidikan yang memadai	SMP Neg	35	35	100%
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan SMP (BOSDA)	Jumlah lembag SMP penerima BOSDA	SMP Negeri	35	35	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
8.	Fasilitasi Penyelenggaraan UNAS SMP/MTs	Jumlah siswa yang ikut UNAS	SMP/MTs	350	350	100%
9.	Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran (OSN) SMP	Jumlah peserta OSN	siswa SMP	31	31	100%
10.	Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta O2SN	siswa SMP	20	20	100%
11.	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa nasional (FLS2N) SMP	Jumlah Peserta FLS2N	siswa SMP	22	22	100%
X.	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun	penduduk usia > 15	100%	98%	98%
1.	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Jumlah PKBM yang melaksanakan	PKBM	15	15	100%
2.	Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C	Jumlah Lembaga PKBM yang melaksanakan Ujian Nasional Kejar Paket	PKBM	25	25	100%
3.	Pembinaan Kursus & Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Tutor	15	15	100%
4.	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional	Jumlah peserta perayaan HAI	Peserta HAI	45	45	100%
5.	Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF)	Jumlah peserta KF	Kelompok	20	20	100%
6.	Pameran LKP dan PKBM	Jumlah Pameran LKP & PKBM	Kegiatan	1	1	100%

1.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikanyang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Kesehatan.

2.1. Sasaran Strategis

1) *Terlaksananya fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase pelayanan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase pelayanan yang sesuai dengan SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dana yang dianggarkan sebesar Rp.4.488.346.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.685.046.192,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 59,82%.

2) *Meningkatnya mutu pelayanan di bidang kesehatan dengan indikator kinerja angka kesakitan dan indeks keluarga sehat.*

Pada tahun 2018, angka kesakitan ditargetkan sebesar 15,40% dengan realisasi sebesar 15,40% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Untuk Indeks Keluarga Sehat ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 0,20% dengan realisasi kinerja 0,20% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.140.981.818.124,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.731.302.785,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 74.29%.

2.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Evaluasi Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Orang	720	720	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Orang	1008	1008	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan yang Diadakan	Item	6	6	100%
2.	Pengadaan Meubelair (DID)	Jumlah Mebeleur yang Diadakan	Item	4	4	100%
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DPAL)	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	10	10	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	50	50	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	unit	8	8	100%
6.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	10	10	100%
7.	Pembangunan/Pengembangan Sarana Gedung Kantor (PAK)	Jumlah pembangunan/ pengembangan sarana gedung kantor	unit	10	10	100%
8.	Rehabilitasi Rumah Medis/Paramedis (Pajak Rokok)	Jumlah Rumah Medis Direhabilitasi	Unit	2	2	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	60	60	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah penyusunan analisa kepangkatan	Dokumen	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Terselesaikan	Dokumen Sakip	4	4	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun dengan baik	Dokumen Renstra	1	1	100%
3.	Monitoring dan Evaluasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dievaluasi Secara Berkala	puskesmas	20	20	100%
4.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (DID)	Jumlah Software yang Dikembangkan	Unit	1	1	100%
V.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Rumah Tangga Sehat	Prosen	30	28	93%
1.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	item	44	44	100%
2.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Pajak Rokok)	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	item	44	44	100%
3.	Distribusi Obat dan E- Logistik (DAK)	Jumlah Kegiatan Distribusi Obat	Puskesmas	20	20	100%
4.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)(DAK)	*	Paket	1	1	100%
5.	BOK UKM SEKUNDER (DAK)	Jumlah kegiatan operasional UKM Sekunder	Pusk	20	20	100%
6.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk UKS dan KRR (Pajak Rokok)	Jumlah pelaksanaan kegiatan screening UKS dan KRR	Paket	1	1	100%
7.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkup Pondok Pesantren	Jumlah paket	Paket	1	1	100%
8.	Penyediaan/Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berbasis IT (E-Sehat)	Jumlah aplikasi yang disediakan/dikelola	aplikasi	1	1	100%
9.	Pengadaan peralatan kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (Pajak Rokok)(PAK)	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	item	44	44	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
10.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Larangan dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
11.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Talang dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
12.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pademawu dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
13.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sopaah dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
14.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kadur dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
15.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pakong dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
16.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waru dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
17.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tampojung Pregi dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
18.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
19.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulangan Haji dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
20.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlanakan dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
21.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bandaran dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
22.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Palengaan dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
23.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
24.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galis dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
25.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teja dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
26.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kowel dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
27.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Proppo dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
28.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panaguan dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
29.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pasean dan Jaringannya (Kapitasi)	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	unit	1	1	100%
30.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Larangan dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
31.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Talang dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
32.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pademawu dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
33.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sopaah dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
34.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kadur dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
35.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pakong dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
36.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waru dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
37.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tampojung Pregi dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
38.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
39.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulangan Haji dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
40.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlanakan dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
41.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bandaran dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
42.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Palengaan dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
43.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
44.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galis dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
45.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teja dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
46.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kowel dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
47.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Propo dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
48.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panaguan dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
49.	Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pasean dan Jaringannya (Non Kapitasi)	Jumlah pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan operasional di puskesmas	unit	1	1	100%
50.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Proppo (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	189	189	100%
51.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panagan (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	11	11	100%
52.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tlanakan (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	10	10	100%
53.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bandaran (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	7	7	100%
54.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pademawu (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	8	8	100%
55.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sopaah (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	12	12	100%
56.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Larangan (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	7	7	100%
57.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Talang (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	7	7	100%
58.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Galis (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	10	10	100%
59.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palengaan (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	12	12	100%
60.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pegantenan (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	8	8	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja <small>7 = 6/5 x 100%</small>
1	2	3	4	5	6	7
61.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bulangan Haji (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	5	5	100%
62.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pakong (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	12	12	100%
63.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kadur (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	10	10	100%
64.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasean (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	9	9	100%
65.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Waru (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	5	5	100%
66.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tampojung Pregi (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	7	7	100%
67.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batumarmar (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	13	13	100%
68.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Teja (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	5	5	100%
69.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kowel (DAK)	Jumlah kegiatan promotif dan preventif	desa	4	4	100%
70.	Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Standar Pelayanan	Faskes	20	20	100%
71.	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia (DID)	Jumlah pelaksanaan pembinaan pemanfaatan tanaman obat	Paket	2	2	100%
72.	Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat (Pajak Rokok)	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jumlah Promosi Kesehatan Yang Dilakukan Ke Media Seperti Surat Kabar, Leaflet	orang kali	320 orang 42 kali	320 orang 42 kali	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
73.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Pajak Rokok)	Jumlah penyuluhan PHBS	Paket	1	1	100%
74.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui UKBM (Pajak Rokok)	Jumlah Desa Yang Diberdayakan Jumlah UKBM Kit yang diadakan	desa unit	189 desa 8 unit	189 desa 8 unit	100%
75.	Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (Pajak Rokok)	Jumlah Kader Posyandu Yang Diseleksi	Orang	100	100	100%
76.	Pengembangan Taman Posyandu (BK Prov)	Jumlah Taman Posyandu Yang Terbentuk	Kader/ Posy	100 Kader/23 5 Posy	100 Kader/23 5 Posy	100%
77.	Pengadaan Mobil Unit Promosi Kesehatan (Pajak Rokok) (PAK)	Jumlah mobil yang diadakan	Paket	1	1	100%
78.	Pemberihan tambahan makanan dan vitamin (Pajak Rokok)	Jumlah Pemberian makanan dan vitamin	Paket	1	1	100%
79.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP) Anemia gizi besi gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya (Pajak Rokok)	Jumlah Pemberian PMT Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk Serta Ibu Hamil KEK Jumlah pemberian MP-ASI untuk bealita 6 - 24 bulan	Balita	50,786	50,786	100%
80.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (Pajak Rokok)	Jumlah Kader , Toma , Nakes Yang mendapat Sosialisasi Gizi Masyarakat	Desa	189	189	100%
81.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)(Pajak Rokok)	Jumlah pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat	Paket	1	1	100%
82.	Penyehatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Pajak Rokok)	Jumlah pelaksanaan penyehatan lingkungan	Paket	1	1	100%
83.	Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Dana Pendamping APBN)	Jumlah jamban yang memenuhi syarat	puskes mas	20	20	100%
84.	Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Pajak Rokok)	Jumlah pembinaan kesehatan kerja	Paket	1	1	100%
VI.	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	80	80%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja <small>7 = 6/5 x 100%</small>
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Alat Fogging, Themefos dan Malation Yang Diadakan	Unit	1	1	100%
2.	Peningkatan Imunisasi (Pajak Rokok)	Jumlah desa UCI, bayi IDL, imunisasi lanjutan baduta, serta tertanganinya kasus PD31 < 24 jam	desa/ bayi/ baduta	189 desa/ 12700 bayi/127 38 baduta	189 desa/ 12700 bayi/127 38 baduta	100%
3.	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (Pajak Rokok)	Jumlah survailans epidemiologi	Paket	1	1	100%
4.	Operasional Pemeriksaan CJH di Puskesmas (Pajak Rokok)	Jumlah Calon Jamaah Haji Diperiksa	Orang	1000	1000	100%
5.	Pengembangan inovasi "PELITA" Pamekasan Eliminasi Kusta (Pajak Rokok)	Jumlah Pelayanan Penyakit Kusta	kasus	250	250	100%
6.	Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah (Pajak Rokok)	Jumlah Upaya Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	Desa	189	189	100%
7.	Pengadaan Prasarana Distribusi Vaksin (DID)		1 Paket	1	1	100%
8.	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)	Jumlah desa dan sarana tempat kerja berposbindu Jumlah ODGJ berat	desa/ tempat/ ODGJ	189 desa/ 11 tempat/ 110 ODGJ	189 desa/ 11 tempat/ 110 ODGJ	100%
VII.	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Sesuai Standar	%	100	100	100%
9.	Standarisasi Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas standar	Paket	1	1	100%
10.	Operasional Pelayanan Kesehatan Primer (Pajak Rokok)	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan	Paket	1	1	100%
11.	Lomba puskesmas berprestasi	Jumlah puskesmas berprestasi	Paket	1	1	100%
12.	Peningkatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan	Jumlah faskes rujukan yang dilakukan pembinaan	Faskes	7	7	100%
13.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	jumlah hatra yang sesuai kualitas pelayanan	Hatra	150	150	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
14.	Pemenuhan Pendukung Kinerja Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap Standar (BK Prov)	Jumlah dokter yang dikontrak	Paket	1	1	100%
15.	Evaluasi Dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (Pajak Rokok)	Jumlah Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar	Pusk	20	20	100%
16.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN	Monev	213,549	213,549	100%
VIII.	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Puskesmas dan Jaringannya	Prosentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Layak Fungsi	%	100%	100%	100%
1.	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pajak Rokok)	Jumlah pustu yang direhab	Unit	5	5	100%
2.	Pengadaan tanah Puskesmas (PAK)	Jumlah tanah yang diadakan	Paket	1	1	100%
3.	Penambahan Ruang Puskesmas (Pajak Rokok)		Paket	1	1	100%
4.	Pembangunan IPAL Puskesmas (DPAL)	Jumlah upembangunan ipal puskesmas	Paket	1	1	100%
5.	Pembangunan Puskesmas Baru di Kec.Palengaan(DA U)	Jumlah pembangunan puskesmas baru	Unit	1	1	100%
6.	Pengadaan Dokumen UKL UPL (Pajak Rokok)	Jumlah pengadaan dokumen UKL dan UPL	Paket	1	1	100%
7.	Pembangunan Pagar Puskesmas (Pajak Rokok)(DPAL)	Jumlah Pagar Puskesmas yang Bangun	Unit	6	6	100%
8.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Larangan (DPAL)	Jumlah puskesmas yang direhab	Paket	1	1	100%
9.	Pembangunan Pagar Puskesmas dan Jaringannya (DID)	Jumlah pembangunan pagar puskesmas	Paket	1	1	100%
10.	Pembangunan Pagar Polindes (PAK)	Jumlah pembangunan pagar puskesmas	Paket	3	3	100%
11.	Pembangunan Gudang Obat Puskesmas (Pajak Rokok)(PAK)	Jumlah gedung obat puskesmas yang dibangun	Paket	1	1	100%
12.	Rehabilitasi Puskesmas (Pajak Rokok)(PAK)	Jumlah puskesmas yang direhab	Paket	2	2	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
13.	Rehabilitasi berat/ringan dan penambahan sarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok) (PAK)	Jumlah puskesmas yang direhab	Paket	1	1	100%
14.	Penyediaan Ambulan Transportasi Roda Empat Single Gardan (Pajak Rokok)(PAK)	Jumlah ambulans yang diadakan	Unit	3	3	100%
15.	Pengadaan Tanah Pengganti Puskesmas Batumarmar (Jadwal Ulang)	jumlah tanah yang diadakan	Paket	1	1	100%
16.	Pembangunan Polindes Batubintang Kec. Batumarmar (DPAL)	jumlah yang dibangun	Paket	1	1	100%
17.	Pembangunan Polindes Kadur Kecamatan Kadur (DPAL)	jumlah yang dibangun	Paket	1	1	100%
18.	Peningkatan Pembangunan Puskesmas Tlanakan/Gudang Penyimpanan Obat (Pajak Rokok)(PAK)(DPA L)	jumlah yang dibangun	Paket	1	1	100%
19.	Peningkatan Pembangunan Puskesmas Panaguan/Pagar (Pajak Rokok)(PAK)(DPA L)	jumlah yang dibangun	Paket	1	1	100%
20.	Pembangunan IPAL Puskesmas (Pajak Rokok)(PAK)	jumlah yang dibangun	Paket	4	4	100%
21.	Memenuhi Pendukung Kinerja Perawat Ponkesdes (BK Provinsi)	jumlah yang dibangun	Paket	1	1	100%
IX.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Angka	96,99/23,87	96,99/23,87	100%
1.	Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Anak Balita (Pajak Rokok)	Jumlah pelayanan kesehatan ibu dan anak	Paket	1	1	100%
2.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan kesehatan	Paket	1	1	100%
3.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan pengawasan pangan	Paket	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
4.	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak Rokok)	Jumlah Ibu dan Anak yang dilayani	WUS / Anak	242.821 WUS / 50786 Anak	242.821 WUS / 50786 Anak	100%
5.	Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK)	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran, Operasional Persalinan Khusus Masyarakat yang tidak memiliki Jamkesmas.	Bulin	13,402	13,402	100%
6.	Penyediaan/Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis IT (E-Rembik) (PAK)	Jumlah aplikasi yang disediakan/dikelola	aplikasi	1	1	100%
X.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Prosentase SDM Rumah Sakit Yang Memenuhi Standart Kualifikasi Tenaga Kesehatan	%	100	100	100%
7.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah pelatihan	Paket	1	1	100%
8.	Lomba Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah tenaga kesehatan teladan	Paket	1	1	100%
9.	Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah diklat	Paket	1	1	100%
10.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah pemeliharaan kesehatan	Paket	1	1	100%
11.	Monitoring Evaluasi Alat Kesehatan	jumlah puskesmas yang dimonev dan petugas aspak yang sesuai standar	bulan	12	12	100%
XI.	Program pembinaan lingkungan sosial lingkup kesehatan	Prosentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pembangunan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pembangunan jaringan pusat kesehatan masyarakat (DAU)	jumlah yang dibangun	Unit	6	6	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Sosial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (DBHCT)	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN	213,549	213,549	213,549	100%
3.	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan gudang obat Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah jaminan kesehatan sosial yang dibiayai	Paket	1	1	100%
4.	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pembangunan Laboratorium Klinik Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah labkes yang dibangun	Paket	1	1	100%
5.	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pengadaan Ambulance Transport (DBHCHT)	Jumlah pengadaan ambulans	Paket	1	1	100%
6.	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	Paket	1	1	100%

2.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo

RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi 83% dan tingkat capaian kinerja sebesar 97,65%. Adapun dana yang dianggarkan sebesar Rp. 166.792.860.717,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.108.942.059.849,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 65,32%.

3.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Evaluasi Hasil Renja RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	79	79	100%
2.	Pembangunan Prasarana Gedung Rumah Sakit	Luas pagar yang dibangun	m2	580	580	100%
II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
1.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Tersusunnya Dokumen Kelas Jabatan	dokumen	1	1	100%
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja Yang Menyusun Perencanaan Dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan Dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	1	1	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	1	1	100%
IV.	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (BLUD)	Prosentase Mutu Layanan	%	100	100	100%
1.	Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUDrumah sakit	Jumlah layanan di Rumah Sakit yang terpenuhi	Layanan	12	12	100
V.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Prosentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Tersedia Sesuai Dengan Standart Yang Ditentukan	%	100	100	100%
1.	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran Ruang Rawat Jalan Dan IGD (DAK)	Jumlah alat kesehatan di rawat jalan dan UGD	unit	31	31	100%
2.	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan/Kedokteran Ruang Rawat Inap Dan Intensif (DAK)	Jumlah alat kesehatan di rawat Inap Dan Intensif	unit	64	64	100%
3.	Peningkatan Pelayanan Farmasi Dan CSSD (DAK)	Jumlah alat kesehatan di CSSD	unit	1	1	100%
VI.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	Prosentase Sarana Prasarana Dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi	Persen	100	40	40%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya Melalui Pengadaan Alat Kesehatan (DPAL) (DBHCT Earmark)	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	Set	1	0	0%
2.	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCT Earmark)	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	Unit	47	39	82.98%
3.	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Pembangunan Baru Gedung ICCU (DBHCT Earmark)	Jumlah Bangunan ICCU yang dibangun	Bangunan ICCU	1	0.3	30%

3.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Adanya keterlambatan turunnya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 sehingga waktu dalam melaksanakan semua kegiatan kurang waktu pekerjaannya
- 2) Untuk tempat tidur pasien di Ruang ICCU sebanyak 8 unit sebesar Rp.553.600.000,- tidak bisa terserap karena menunggu kegiatan fisik pembangunan Ruang ICCU yang proses pengadaannya gagal lelang dan akan dilaksanakan/ di DPA-L pada tahun 2019

- 3) Biaya perencanaan konstruksi gedung baru ICCU kontraknya sudah selesai dengan nilai sebesar Rp.61.716.000,- sedangkan konstruksi fisiknya gagal lelang dan akan dilaksanakan/di DPA-L pada tahun 2019

Solusi dari permasalahan tersebut adalah:

- 1) Mengusahakan agar tahun 2019 turunnya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak terlambat.

4. RSUD Waru

RSUD Waru melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4.1. Sasaran Strategis

- 1) *Meningkatkan tata kelola pendukung pelaksanaan layanan urusan organisasi perangkat daerah dengan indicator kinerja indeks kepuasan unit kerja.*
- 2) *Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indicator kinerja Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja dan prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP ditargetkan 40% dengan realisasi capaian kinerja 20% dan tingkat capaian kinerja sebesar 50%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp. 2.141.897.280 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.033.054.084 dan tingkat capaian anggaran sebesar Rp. 48,23%.

- 3) *Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas dengan indicator kinerja Angka Harapan Hidup.*
- 4) *Standar pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan indikator kinerja Prosentase SPM yang dilaksanakan.*

Pada tahun 2018, Angka Harapan Hidup dan Prosentase SPM yang dilaksanakan ditargetkan 40% dengan realisasi capaian kinerja 30% dan tingkat capaian kinerja sebesar 75%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp. 9.153.842.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.755.912.426 dan tingkat capaian anggaran sebesar Rp. 73,80%.

4.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan RSUD Waru pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Evaluasi Hasil Renja RSUD Waru Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan perangkat daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	Prosen	100	100	100%
1.	Rapat-rapat konsultasi dan konsultasi ke luar Daerah	Lama pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	9	75%
2.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Periode/lama pelaksanaan pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	5	42%
3.	Penyediaan Program SIMRS (Jadwal Ulang) (RSUD WARU)	Jumlah SIMRS yang diadakan	Jenis	1	0	0%
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Pendukung kualitas kinerja Aparatur yang Layak Fungsi	*	*	*	*
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis/unit	50	29	58%
2.	Pengadaan Meubelair DPAL)	Jumlah meubelair yang diadakan	jenis/unit	3	3	100%
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan layak huni	gedung	1	1	100%
4.	Pembangunan Pagar Rumah sakit	Jumlah Pagar Rumah sakit yang akan di bangun	Jenis	1	0	0%
5.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional dalam kondisi baik dan layak operasional	unit	3	2	67%
6.	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	jenis/unit	50	12	24%
7.	Pembangunan Tempat Parkir (Jadwal Ulang)	Luas parkir yang dibangun	*	*	0	0,00%
8.	Pengadaan Papan Nama Kantor (Jadwal Ulang)	Jumlah papan nama kantor yang diadakan	*	*	0	0,00%

No.	Program/Kegiatan perangkat daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100\%$
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (JwUlang)	Jumlah instalasi listrik yang diadakan	*	*	0	0,00%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*	*	*	*	0,00%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel	264	0	0.00%
2.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	stel	300	0	0.00%
3.	Penyusunan kelas jabatan pegawai	Jumlah dokumen Kelas jabatan pegawai yang disusun	orang	35	32	91.43%
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	*	*	*	*	0,00%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	12	12	100%
V.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	*	*	*	0,00%
1.	Perencanaan Program, kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	5	2	40.00%
2.	Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dok. Renstra	1	1	100.00%
VI.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase Pelayanan Rumah Sakit sesuai standart	*	*	*	0,00%
1.	Penyusunan Standart Pelayanan dan Standart Prosedur Operasional (SPO)	Jumlah Standart Pelayanan dan Standart Prosedur Operasional (SPO) Yang disusun sesuai ketentuan	jenis SP/SPO	150	35	23%

No.	Program/Kegiatan perangkat daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100\%$
VII.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Tersedia Sesuai Dengan Standart yang Ditentukan	*	*	*	0,00%
1.	Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit (DPAL)	Jumlah obat dan BHP yang diadakan	jenis/item	2	1	50.00%
2.	Pembangunan Gedung IPSRS (Jadwal Ulang)	Luas Gedung IPSRS yang dibangun	meter	189	189	100.00%
3.	Pembangunan Gedung Musholla Rumah Sakit (Jadwal Ulang)	Luas Gedung Musholla yang dibangun	meter	91.5	91.5	100.00%
4.	Pembangunan Pavingisasi/ Pengaspalan, Jalan Lingkungan/ Aberan Halaman Keliling Rumah Sakit (Jadwal Ulang)	Luas Paving dan aberan halaman yang diadakan	meter	7581.9	7581.9	100.00%
5.	Pengadaan Makan/ Minum Pasien Rawat Inap (Jadwal Ulang)	Jumlah makan/mimun pasien yang diadakan	porsi	87600	0	0.00%
6.	Pembangunan Pagar Keliling RSUD (DPAL)	Luas pagar yang dibangun	meter	*	*	0,00%
7.	Pengadaan Pot dan taman Hias (Jadwal Ulang) (RSUD Waru)	Luas taman yang dibangun	*	*	*	0,00%
8.	Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Keluarga Pasien (Jadwal Ulang) (RSUD WARU)	Luas gedung ruang tunggu yang dinagun	*	*	*	0,00%
9.	Pengadaan Sumur Bor (Jadwal Ulang) (RSUD WARU)	Jumlah sumur Bor yang diadakan	*	*	*	0,00%
10.	Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Rumah Sakit (Jadwal Ulang)	Jumlah Alkes yang diadakan	*	*	*	0,00%
11.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, ruang pasien, laundry) (DPAL)	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Rumah sakit yang diadakan	unit	4	1	25.00%

No.	Program/Kegiatan perangkat daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100\%$
12.	Pengadaan Alat-alat Kesehatan/ Kedokteran Umum (DPAL)	Jumlah Alkes yang diadakan	*	*	*	0,00%
VIII.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Tersedia Sesuai Dengan Standart yang Ditentukan	*	*	*	0,00%
1.	Pemeliharaan Rutin/berkala alat kesehatan Rumah Sakit (APBD)	Jumlah alat alat kesehatan Rumah Sakit dalam keadaan baik dan layak fungsi	jenis/unit	150	0	0.00%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah mobil ambulance/jenazah dalam keadaan baik dan layak operasional	unit	3	1	33.33%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dalam keadaan baik dan berfungsi	IPAL	1	1	100.00%
IX.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Keberlangsungan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	*	*	*	0,00%
1.	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan Paramedis yang diadakan	Nakes	28	10	35.71%
2.	Kemitraan Konsultasi Hukum Kesehatan	Jumlah kemitraan konsultasi hukum kesehatan yang diadakan	orang	1	1	100.00%
3.	Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah (GEMBIRA PASTI)	Jumlah bidan dan masyarakat yang diberdayakan	orang	100	*	0.00%
X.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	*	*	*	*	0,00%
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas/keahlian	Nakes	40	25	62.50%

No.	Program/Kegiatan perangkat daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
XI.	Program Pembinaan Lingkungan sosial lingkup Kesehatan	Prosentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi	*	*	*	0,00%
1.	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHC-Earmark)	Jumlah sarana alat kesehatan yang diadakan	unit	39	27	69.23%

4.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

5.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya Infrastruktur Penunjang Ekonomi, Sosial yang berkualitas dengan indikator kinerja Prosentase jalan dan jembatan yang terpenuhi dan berfungsi baik.*

Pada tahun 2018, prosentase jalan dan jembatan kondisi baik ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 65,60% dan tingkat capaian kinerja sebesar 82%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.90.564.955.764,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.86.143.136.290,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,12%.

2) *Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Irigasi dan keperluan lain serta Penurunan Luas Genangan Banjir dengan indikator kinerja Prosentase ketersediaan air baku untuk irigasi dan penurunan luas genangan banjir.*

Pada tahun 2018, prosentase ketersediaan air baku untuk irigasi dan penurunan luasan genangan banjir ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 70,40% dan tingkat capaian kinerja sebesar 94%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.42.379.914.970,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.303.305.795,00 sehingga capaian anggaran sebesar 52,63%

3) *Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dengan indikator kinerja prosentase pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.*

Pada tahun 2018, prosentase pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang ditargetkan sebesar 54% dengan realisasi kinerja 38,46% dan tingkat capaian kinerja sebesar 71,22%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.718.597.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.627.335.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 87,30%

5.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5

Evaluasi Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100	100,00%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diakomodir	Rakor	50	50	100,00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang diakomodir	Layanan	6	5	83,33%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100,00%
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	1	1	100,00%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Unit R4	12	11	91,67%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	6	6	100,00%
4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pengamat Utara	Jumlah fasilitas gedung kantor terbangun	Unit	1	1	100,00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang yang sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100	100	100,00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN/aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	25	6	24,00%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah ASN/aparatur yang tertata dalam dokumen analisis jabatan yang disusun	ASN	73	73	100,00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	100	100,00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	5	5	100,00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	2	2	100,00%
V.	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan yang ditingkatkan	%	80	70,12	87,65%
		Panjang jembatan yang ditingkatkan	M	200	200	100,00%
1.	Peningkatan Trotoar	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	m2	900	900	100,00%
2.	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	M	4,5 x 9.000	4,5 x 9.000	100,00%
3.	Peningkatan Jalan (Pajak Rokok)	Panjang jalan dalam kondisi baik	M	4,5 x 4.000	4,5 x 4.000	100,00%
4.	Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Buah	35	21	60,00%
5.	Peningkatan Trotoar (Pajak Rokok)	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	m2	2.000	2.000	100,00%
6.	Pelaksanaan Kerjasama Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Lingkup Pekerjaan Umum	Panjang jalan dalam kondisi baik	Lokasi	4	4	100,00%
7.	Pembangunan/Peningkatan Jembatan (BK Prov)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Buah	20	20	100,00%
8.	Penyediaan/Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Pekerjaan Umum Berbasis IT (E-Lorong)(PAK)	Data panjang jalan dalam kondisi baik	Dokumen	1	0	0,00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
9.	Peningkatan Jalan Bujur Timur-Bujur Tengah (21) (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	3,5 x 1.600	3,5 x 1.600	100,00%
10.	Peningkatan Jalan Panglegur-Tlanakan (22) Lanjutan (DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	4,5 x 2.300	4,5 x 2.300	100,00%
11.	Peningkatan Jalan Beltok-Pegantenan (28) (Lingkar Luar)(DAK)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	6 x 2.500	6 x 2.500	100,00%
12.	Pembangunan/ Peningkatan Jembatan (BK Prov)(DPAL)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Buah	5	5	100,00%
13.	Peningkatan Jalan (DPAL)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	2,5 x 13.150	2,5 x 13.150	100,00%
14.	Peningkatan Jalan Ponjanaan Timur-Batu Bintang (42)(Jadwal Ulang)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	3,5 x 4.200	3,5 x 4.200	100,00%
15.	Pembangunan/ Peningkatan Jembatan (DPAL)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Buah	2	2	100,00%
16.	Peningkatan Jalan (DBHCHT Earmark)(Jadwal Ulang)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	3,5 x 10.700	3,5 x 10.700	100,00%
VI.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan yang terpelihara	%	2,7	2,7	100,00%
		Panjang jembatan yang dipelihara	m	160	160	100,00%
1.	Perencanaan Legger Jalan (PAK)	Data panjang jalan dalam kondisi baik	Dokumen	1	0	0,00%
2.	Pemeliharaan Rutin Trotoar	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	m ²	700	700	100,00%
3.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	m	67	67	100,00%
4.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	2.340	2.340	100,00%
5.	Pemeliharaan Berkala Jalan (DAU)(DPAL)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	3,5 x 4.300	3,5 x 4.300	100,00%
6.	Pemeliharaan Berkala Jalan (BK Prov)(DPAL)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	3,5 x 4.300	3,5 x 4.300	100,00%
7.	Pemeliharaan Berkala Jalan (DBHCHT)	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	4 x 5.800	4 x 5.800	100,00%
VII.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan irigasi	Rasio	14,69	14,69	100,00%
1.	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lokasi Tersebar	Lokasi Tersebar	Lokasi Tersebar	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
2.	Operasional Pemeliharaan Sungai, Embung dan DAM	Jumlah Sungai,DAM dan Embung yang terpelihara	m	700	700	100,00%
3.	Pembangunan Drainase/Saluran Irgasi	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	210.000	64.367	30,65%
4.	Pengembangan Saluran Irgasi (DAK); Pendukung Kedaulatan Pangan	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	4.000	3053	76,33%
5.	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irgasi (BK Prov)	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	2.700	2.700	100,00%
6.	Infrastruktur Irgasi (DAK)(DPAL)	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lokasi	8	8	100,00%
7.	Rehabilitasi Saluran Irgasi (PAK)(Jadwal Ulang)	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lokasi	3	3	100,00%
8.	Pengasetan Jaringan Irgasi (PAK)	Data jaringan irigasi dalam kondisi baik	Dokumen	1	1	100,00%
9.	Pengembangan Saluran Irgasi Pendukung Kedaulatan Pangan PAK)	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lokasi	5	5	100,00%
VIII.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang penanganan kerusakan akibat abrasi pantai	m	300	300	100,00%
1.	Pembangunan Tangkis Laut (DPAL)	Panjang tangkis laut yang dibangun	m	300	300	100,00%
IX.	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik genangan banjir yang teratasi	Titik	2	2	100,00%
1.	Pembangunan Penahan Tebing Sungai (DPAL)	Panjang penahan tebing yang dibangun	m	1.400	1.400	100,00%
2.	Revitalisasi Saluran Pembuang (Jadwal Ulang)	Panjang penahan tebing yang dibangun	m	1.500	1.500	100,00%
3.	Pembangunan Penahan Tebing Sungai (Pajak Rokok)	Panjang penahan tebing yang dibangun	m	1.500	1.500	100,00%
4.	Normalisasi Saluran Perkotaan (DPAL)	Data perencanaan penahan tebing yang dibangun	Dokumen	1	1	100,00%
5.	Pembangunan Penahan Tebing Sungai Sekitar Masjid Asyuhada (PAK)	Panjang penahan tebing yang dibangun	m	120	0	0,00%
6.	Pengasetan Wilayah Sungai (PAK)	Jumlah dokumen data daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Dokumen	1	0	0,00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
7.	Pembangunan Penahan Tebing Sungai (PAK)	Panjang penahan tebing yang dibangun	m	500	0	0,00%
X.	Program Penataan Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	23	21	91,30%
1.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Lokasi	14	9	64,29%
2.	Pengadaan Peta Analog	Jumlah peta dasar kecamatan yang disusun	Buah	5	5	100,00%
3.	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Pakong dan Kadur	Jumlah dokumen RDTR dan PZ perkantoran yang disusun	Dokumen	5	4	80,00%
4.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Kesehatan dan Jalan Stadion	Jumlah dokumen RTBL yang disusun	Dokumen	5	4	80,00%
5.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Jumlah tim yang difasilitasi	Tim	5	4	80,00%
6.	Fasilitasi Penujang Layanan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)(PAK)	Jumlah tim yang difasilitasi	Lokasi	15	11	73,33%
7.	Pengadaan Album Peta (PAK)	Jumlah dokumen peta yang tersusun	Dokumen	13	13	100,00%

5.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah yang signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penyerapan anggaran yang tidak terserap atau terserap namun dibawah 75% kendalanya adalah masalah waktu. Disamping waktu untuk lelang pekerjaan fisik, juga untuk lelang konsultan perencanaan.

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

6.1. Sasaran Strategis

1) *Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP ditargetkan 100% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.632.930.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.838.849.884 dan tingkat capaian anggaran sebesar 51,37%.

2) *Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan indikator kinerja prosentase rumah layak huni.*

Pada tahun 2018, prosentase rumah layak huni ditargetkan sebesar 94,68% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.786.755.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.510.414.100,00, sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 64,88%.

3) *Menurunnya luasan kawasan kumuh perkotaan dengan indikator kinerja prosentase penurunan luasan kawasan kumuh.*

Pada tahun 2018, prosentase penurunan luasan kawasan kumuh ditargetkan sebesar 53,88% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.067.845.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.057.134.400, sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 99%.

4) *Meningkatnya pemenuhan bangunan yang berkualitas dengan indikator kinerja rasio bangunan ber – IMB per satuan bangunan.*

Pada tahun 2018, rasio bangunan ber – IMB per satuan bangunan ditargetkan sebesar 0,94% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.272.740.000,00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp.234.347.000,00, sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 85,92%.

- 5) *Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi dasar yang layak dengan indikator kinerja proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; dan persentase rumah tinggal bersanitasi.*

Sasaran indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 4,52% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.16.250.533.800,00 dengan realisasi anggaran Rp.7.674.561.200,00, sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 47,23%.. Sedangkan untuk indikator prosentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 2,16% dengan dukungan anggaran Rp.2.139.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.068.449.800,00, sehingga capaian anggaran sebesar Rp96,67%.

6.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	13	10	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kali	60	72	120%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Layanan	6	6	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	6	6	100%
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	Unit	5	5	100%
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	85	85	100%
4.	Perencanaan Pembangunan Kantor DPRD (Jadwal Ulang)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kantor DPRD yang disusun	dokumen	1	0	0%
5.	UKL /UPL Pembangunan Kantor DPRD (Jadwal Ulang)	Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan kantor DPRD yang disusun	dokumen	1	0	0%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	32 orang	32	32	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Tersusunnya Dokumen kelas Jabatan	dokumen	1	1	100%
IV.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	4	4	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Pengembangan	Prosentase Rumah Layak Huni	Unit	475	172	36%
1.	Validasi Database Rumah Tidak Layak Huni Perdesaan	Jumlah study database rumah tidak layak huni perdesaan	Dokumen	1	1	100%
2.	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK)	Jumlah perumahan yang mendapat peningkatan kualitas perumahan swadaya	Unit	155	152	98%
3.	Koordinasi Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	300	0	0%
4.	Pelaksanaan Kerjasama Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Infrastruktur yang Dibangun	Unit	20	20	100%
VI.	Program Lingkungan Sehat Perumahan		%	80	100	100
1.	Penyediaan Air Bersih Lingkungan Permukiman (Bertambah PAK) DPA-L 2017	Jumlah sistem penyediaan air minum yang baru dan dikembangkan	Kegiatan	10	10	100%
2.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan yang	Dokumen	1	1	100%
VII.	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman	Prosentase Luasan Kumuh yang tertangani	Ha	87	76	87,36%
1.	Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah Sarana Prasarana Program Kota Tanpa Kumuh yang di bangun	Unit	3	3	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah dokumen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Dokumen	1	1	100%
3.	Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan	Jumlah wilayah permukiman perkotaan yang mendapat perbaikan lingkungan	Unit	361	241	67%
4.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan RUPANANDUR	Jumlah Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan	Unit	20	0	0%
5.	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman (BK PROV)	Jumlah Kawasan yang mendapat Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana	Unit	9	9	100%
6.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	Jumlah kawasan minapolitan yang dibangun / dikembangkan	Unit	7	7	100%
7.	Penyusunan Rencana Peningkatan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Jumlah Dokumen RP2KPKP yang disusun	Dokumen	1	1	100%
8.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang dibangun / dikembangkan	Unit	6	4	67%
9.	Identifikasi / Verifikasi Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan	Jumlah Dokumen Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Ter Identifikasi / Verifikasi	Dokumen	1	0	0%
VIII.	Program Penataan bangunan dan lingkungan	Prosentase dokumen penyusunan bupati tentang sertifikasi layak fungsi bangunan	%	0.94	*	*
1.	Penyusunan Peraturan Tentang Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan	Jumlah Dokumen Peraturan Tentang Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan	Dokumen	1	1	100%
2.	Koordinasi Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang dikoordinasikan	Unit	300	201	67%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Unit PPA	Jumlah Ruang Pelayanan Khusus yang dibangun	Unit	1	1	100%
IX.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang direhabilitasi	%	100	87,67	87,67%
1.	Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren	Jumlah Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren Yang dibangun / direhabilitasi	Unit	267	163	61.05%
2.	Perbaikan Saluran Pembuang / MCK	Jumlah Saluran Pembuang / MCK yang dibangun / direhabilitasi	Unit	7	4	57.14%
X.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	KK / RT dan KK / RT	3.370 / 13.480 dan 1.300 / 5.200	0,07	84,62
1.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) (DPA - L)2016	Jumlah Infrastruktur Air Minum yang dibangun	Unit	1	1	100%
2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK) (DPA - L)	Jumlah Infrastruktur Air Minum yang dibangun	Unit	1	1	100%
3.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK - IPD) (DPA - L) 2016	Jumlah Infrastruktur Air Minum yang dibangun	Unit	1	1	100%
4.	Penyediaan Infrastruktur Air Minum/Air Bersih	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Penyediaan Air Minum / Air Bersih	Unit	96	35	36.46%
5.	Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Infrastruktur Air Minum yang dikoordinasi / dibangun	Desa	13	11	84,62
6.	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK) Reguler	Jumlah Prasarana Sanitasi yang dibangun	Unit	4	4	100%
7.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (DAK) Reguler	Jumlah sistem penyediaan air minum yang baru dan dikembangkan	Unit	6	6	100%
8.	Pembangunan Prasarana Sanitasi / Saluran Pembuang	Jumlah Prasarana Sanitasi yang dibangun	Unit	4	4	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
9.	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK) Penugasan	Jumlah Prasarana Sanitasi yang dibangun	Unit	16	12	75%
10.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (DAK) Penugasan	Jumlah sistem penyediaan air minum yang baru Jumlah sistem penyediaan air minum yang baru dan dikembangkan	Unit	1	0	0%
11.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Pembangunan SPAM (DID)	Jumlah sistem penyediaan air minum yang baru dan dikembangkan	Unit	4	4	100%
12.	Penyediaan Infrastruktur Air Minum (DAK Tambahan) (DPA - L) 2015	Jumlah Lokasi yang mendapatkan penyediaan infrastruktur air minum	Unit	2	2	100%
13.	Pendamping PAMSIMAS DPA - L 2017	Jumlah desa yang dikoordinasikan	Desa	13	13	100%
14.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) (DPA - L) 2015	Jumlah Lokasi yang mendapatkan pembangunan infrastruktur air minum	Unit	1	1	100%
15.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi / air bersih / air minum	Unit	8	8	100%
16.	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan DAK	Jumlah Pelaksanaan yang dikoordinasikan	Lokasi	14	0	0%
17.	Pipanisasi / Air Bersih / Air Minum	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi / air bersih / air minum	Unit	1	0	0%
18.	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Sanimas	Jumlah saluran Pelaksanaan program sanimas yang dikoordinasi dan monitoring	Lokasi	1	0	0%
19.	Peningkatan Jaringan Air Minum Perkotaan	Jumlah Lokasi yang mendapatkan pipasasi minum / air bersih	Unit	2	0	0%
20.	Penentuan Titik Air Melalui Geolistrik	Jumlah lokasi titik air yang ditentukan melalui Geolistrik	Dokumen geolistrik	1	0	0%
XI.	Program pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	prosentase luasan kawasan strategis yang tertangani	Ha	0.3	97.3	31,43%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
1.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan RUPANANDUR DPA - L 2017	Jumlah sarana dan Prasarana Wilayah Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan	Unit	8	6	75%
2.	Penanganan Infrastruktur Keciptakarya (BK Prov) (DPA - L) 2017	Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang dibangun	Unit	1	1	100%
XII.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang direhabilitasi	%	90	20	22,2%
1.	Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren (Tambahan PAK) (DPA - L) 2017	Jumlah sarana dan prasarana Lingkungan Pondok Pesantren yang dibangun / direhabilitasi	Unit	30	17	57%
2.	Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Infrastruktur Perdesaan (Tambahan PAK) (DPA - L) 2017	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdesaan yang dilaksanakan	Unit	1	1	100%
XIII.	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Luas lahan kumuh yang tertangani	Ha	87	76	87,36
1.	Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan (Tambahan PAK) (DPA - L) 2017	dibangun	Unit	58	56	97%

6.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Koordinasi Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000 merupakan dana pendamping program pusat yang tidak dapat dilaksanakan karena dana pusat tidak terealisasi.
- 2) Waktu pelaksanaan (PAK) terlalu dekat atau kurang memadai.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

7.1. Sasaran Strategis

- 1) *Meningkatnya ketertiban dan ketentraman umum dengan indikator kinerja angka pelanggaran perda.*

Indikator kinerja angka pelanggaran perda pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 1 dengan realisasi 4,5 dan tingkat capaian kinerja sebesar 22,22%. Adapun dana yang dianggarkan sebesar Rp.2.429.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.423.725.000,00 dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.

- 2) *Meningkatnya ketertiban dan ketentraman umum dengan indikator kinerja angka kejadian gangguan ketentraman dan keteriban umum.*

Indikator kinerja angka kejadian gangguan ketentraman dan keteriban umum pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 1 dengan realisasi sebesar 1,5 dan capaian kinerja sebesar 66,67%. Adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.078.185.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 821.710.000,00, sehingga capaian anggaran sebesar 76%.

7.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sehingga target kinerja tersebut dapat dicapai sesuai dengan harapan. Target, realisasi capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7.

Evaluasi Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100	100%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi yang terpenuhi	bulan	12	12	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Gedung	1	1	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dalam kondisi baik	Unit	7	7	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	bulan	12	12	100%
4.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Item	7	7	100%
5.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	3	3	100%
6.	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan	Stel	46	46	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Aparatur	17	1	5.88%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	Dokumen	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Prgram Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen sakip yang disusun dengan kondisi baik	bulan	12	12	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan	Prosentase kegiatan kepomongprajaan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	100	100%
1.	Penyelenggaraan Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan upacara yang dilaksanakan	Kali	1	1	100%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Jambore Tingkat Provinsi	Kegiatan jambore yang difasilitasi	Kali	1	1	100%
3.	Fasilitasi National Corps Building Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah National Corps Building yang difasilitasi	Kali	1	1	100%
4.	Peningkatan Kapasitas Fungsional Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	58	10	78%
5.	Pembinaan Kesamaptaan Aparatur Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan kesamaptaan	Kali	12	12	100%
VI.	Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase penegakan PERDA	%	100	100	100%
1.	Pendukung Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah operasi penegakan perda dan perkada	Bulan	12	12	100%
2.	Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Peraturan Bupati Terhadap Pelajar/Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan	Orang	400	400	100%
3.	Pendampingan Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah pendampingan	Kali	12	12	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
4.	Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tembakau	Jumlah penertiban dan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	26	26	100%
5.	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Implementasi Peraturan dan Kebijakan Daerah / Kepala Daerah	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100%
6.	Penertiban Penyakit Masyarakat	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	20	20	100%
7.	Penertiban Sarana Publikasi Umum	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	60	57	95%
8.	Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Gabungan Lintas Satuan	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	33	33	100%
9.	Pengawasan dan Pembinaan Pelajar	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	Kali	20	20	100%
VII.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten / Kota	%	100	100	100%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Bulan Romadhan	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	bulan	1	1	100%
2.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Kali	96	96	100%
3.	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri	Jumlah pengamanan yang dilaksanakan	Kali	15	15	100%
4.	Pengamanan Hari Raya Idul Adha	Jumlah pengamanan yang dilaksanakan	Kali	3	3	100%
5.	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan	Kali	96	96	100%
6.	Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru	Jumlah pengamanan yang dilaksanakan	Kali	7	7	100%
7.	Pelaksanaan Patroli Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah patroli yang dilaksanakan	Kali	72	72	100%
8.	Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Lamanya pengamanan yang dilaksanakan	bulan	7	7	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
9.	Penertiban dan Penataan Kawasan Arek Lancor dalam rangka Pamekasan Cantik	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Hari	100	7	7%
VIII.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	19.4	19.40%
1.	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran	Jumlah sarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	Unit	4	4	100%
2.	Sosialisasi Penanganan Terhadap Bencana Kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	120	120	100%
IX.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten / Kota	Orang/RT	1	1.7	170%
1.	Penunjang Kegiatan Kegiatan Trenggana	Kepuasan pelayanan trenggana	bulan	12	12	100%

7.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

8. Dinas Sosial

Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang sosial.

8.1. Sasaran Strategis

1) *Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP..*

Pada tahun 2018, prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP ditargetkan 100% dengan realisasi kinerja 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.064.580.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.200.226,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 94%.

2) *Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indikator kinerja prosentase kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meningkat.*

Pada tahun 2018, prosentase kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meningkat ditargetkan sebesar 15% dengan dukungan dana sebesar Rp.1.884.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.701.966.148,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 90,32%.

3) *Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial dengan indikator kinerja prosentase kualitas kehidupan sosial meningkat.*

Pada tahun 2018, prosentase kualitas kehidupan sosial meningkat ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 125%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.880.975.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.847.485.052,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,22%.

8.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Evaluasi Hasil Renja Dinas Sosial Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	80	80	100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Periode pendukung administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	80	80	100%
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional R2 dan R4	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	2	2	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	item	3 item/10 unit, 1 item/30 unit, 1 item/6 unit, 1 item/1 unit	3 item/10 unit, 1 item/30 unit, 1 item/6 unit, 1 item/1 unit	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	unit	1	1	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	unit	4	4	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	unit	30	30	100%
6.	Pengadaan Paving Halaman Kantor	Jumlah halaman kantor dipaving	halaman	1	1	100%
7.	Pembangunan Area Parkir dan Rehab Parkir Sepeda Motor (PAK) (Jadwal Ulang)	Jumlah area parkir yang direhab dan dibangun	unit	2	2	100%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparatur meningkat	%	80	80	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
1.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	dokumen	1	1	100%
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kapasitas sumber daya aparatur meningkat	%	80	0	0.00%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	orang	17	0	0.00%
V.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	80	80	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan program dan pelaporankinerja yang tersusun dengan baik	dokumen	6	6	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100%
VI.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase PMKS yang ditangani meningkat	%	15	15	100%
1.	Penanganan masyarakat miskin pesisir melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditangani	orang	2 Kube / 20 orang	2 Kube / 20 orang	100%
2.	Peningkatan kapasitas pelaksana/pelaku Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) semakin meningkat	orang	25	25	100%
3.	Penanganan masyarakat miskin pedesaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditangani	orang	2 KUBE / 20 orang	2 KUBE / 20 orang	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5}{100\%} \times 100\%$
4.	Penanganan masyarakat miskin perkotaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditangani	orang	2 KUBE / 20 orang	2 KUBE / 20 orang	100%
VII.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang dilayani dan direhab	%	15	15	100%
1.	Rehabilitasi sosial penyandang masalah tuna sosial	Jumlah penyandang masalah tuna sosial yang direhab	orang	60	60	100%
2.	Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Jumlah penyandang masalah tuna sosial yang direhab	orang	60	60	100%
3.	Fasiltasi penertiban Tuna Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang ditertibkan	orang	25	25	100%
4.	Layanan Pendampingan Korban Penyalahgunaan Napza (PAK)	Jumlah Tuna Sosial yang ditertibkan	orang	25	25	100%
VIII.	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Prosentase panti asuhan/panti jompo yang dibina	%	100	100	100%
1.	Pembinaan kesejahteraan anak yatim	Jumlah anak yatim yang dibina	orang	3000	3000	100%
2.	Pembinaan kesejahteraan lansia	Jumlah lansia yang dibina	orang	105	105	100%
3.	Pendampingan Penyaluran Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah rastra dan bantuan pangan non tunai yang disalurkan	Keluarga Penerima Manfaat	n/a	n/a	n/a
IX.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	80	80	100%
1.	Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka peringatan HUT RI.	Veteran, janda pahlawan, napi dan panti sosial	orang	60	60	100%
2.	Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka peringatan hari pahlawan	Veteran, janda pahlawan, napi dan panti sosial	orang	45	45	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5}{100\%}$
3.	Pelaksanaan peringatan hari pahlawan	Jumlah peringatan hari pahlawan yang dilaksanakan	peringatan	1	1	100%
4.	Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah sistem layanan dan rujukan terpadu(SLRT) yang ditangani	sistem	1	1	100%
5.	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberdayakan	orang	13	13	100%
X.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	15	15	100%
1.	Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Peserta Mandiri Tidak Mampu	Jumlah peserta mandiri tidak mampu yang mendapat pelayanan KIS	orang	3000	3000	100%
2.	Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Pendamping, operator dan penerima manfaat PKH	orang	135	135	100%
3.	Pendukung pelaksanaan mitigas dan penyerahan bantuan bencana	Masyarakat terdampak bencana	orang	491	491	100%
4.	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	orang	38	38	100%
XI.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Prosentase areal pemakaman yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100%
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	TMP	1	1	100%
2.	Rehab Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang direhab	TMP	1	1	100%

8.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat permasalahan yang signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

9.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP 2018 ditargetkan sebesar 97,5% dengan realisasi kinerja 90% dan tingkat capaian kinerja sebesar 92%. Adapun dana yang dianggarkan sebesar Rp.713.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.566.391.485,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 79%.

2) *Peningkatan penyerapan pengangguran oleh pasar kerja dengan indikator kinerja prosentase pencari kerja yang ditempatkan.*

Pada tahun 2018, prosentase pencari kerja yang ditempatkan ditargetkan sebesar 14% dengan realisasi kinerja sebesar 18,80% dan tingkat capaian kinerja sebesar 134%. Adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.600.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.259.980.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 43%.

3) *Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja prosentase perusahaan yang menerpakan sarana HI.*

Pada tahun 2018, prosentase perusahaan yang menerpakan sarana HI ditargetkan 60% dengan realisasi kinerja 48,85% dan tingkat capaian kinerja 81%. Adapun pagu anggaran sebesar Rp.181.390.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.81.023.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 45%.

4) *Peningkatan animo bertransmigrasi dengan indikator kinerja prosentase catrans (KK) yang diberangkatkan.*

Pada tahun 2018, prosentase catrans (KK) yang diberangkatkan ditargetkan 2% dan realisasi 2% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.215.000.000,00

dengan realisasi anggaran Rp.196.336.800,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 91%.

5) *Peningkatan jumlah pencari kerja terampil dengan indikator kinerja prosentase pencari kerja yang terlatih.*

Pada tahun 2018, prosentase pencari kerja yang terlatih ditargetkan sebesar 24% dengan realisasi sebesar 0% sehingga tingkat capaian kinerja 0%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.025.000.000,00.

9.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9

Evaluasi Hasil Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir	persen	100	100	100%
1.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diakomodir dan difasilitasi	kali	35	35	100%
2.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan sarana administrasi perkantoran	item	16	16	100%
3.	Updating Data kegiatan - kegiatan dinas melalui website	Tersedianya data dan informasi publik secara langsung	kegiatan	29	29	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	persen	100	100	100%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	item	5	5	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Terpeliharanya kebersihan gedung kantor	unit	2	2	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Perawatan kendaraan operasional	unit	4	4	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
4.	Pemeliharaan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah peralatan gedung kantor yang digunakan	item	5	5	100%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase ASN yang disiplin	persen	100	85	85%
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapat pakaian dinas	ASN	30	30	100%
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur	persen	100	70	70%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Untuk pengembangan sumber daya manusia	ASN	5	3	60%
2.	Penyusunan kelas jabatan pegawai (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan yang disusun	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	persen	100	100	100%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	4	4	100%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	2	2	100%
VI.	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Jumlah pecaker terdaftar yang ditempatkan	persen	14	18.80	134%
1.	Bursa Kerja	Besaran pencari kerja yang berpartisipasi dalam bursa kerja	Orang	1250	1127	90%
2.	One Day One Legal TKI	Besaaran pencari kerja yang ditempatkan ke luar negeri	Orang	365	333	91,23%
VII.	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja	persen	60	48.85	81%
1.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industri	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan	Kasus	2	2	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan jamsostek aktif	Perusahaan	30	30	100%
3.	Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang membuat PP	Perusahaan	50	0	0%
4.	fasilitas pembinaan kesejahteraan pekerja	Jumlah serikat pekerja perusahaan yang difasilitasi	Perusahaan	30	25	83%
5.	Pembinaan dan pemantauan UMK dan pelaksanaan jaminan sosial	besaran peningkatan UMK	Perusahaan	30	30	100%
VIII.	program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah KK catrans yang diberangkatkan	Kk	2	2	100%
1.	Fasilitas pengiriman guru tugas / ustad ke daerah transmigrasi	Jumlah guru tugas yang diberangkatkan	*	40	38	95%
2.	penjajakan kerjasama antar daerah (KSAD) dengan daerah transmigrasi	Jumlah MOU	*	2	1	50%
3.	Pemberangkatan Calon Transmigrasi	Jumlah KK yang diberangkatkan	*	2KK	2KK	100%
4.	pendidikan dan pelatihan calon transmigrasi	jumlah peserta	*	20	20	100%
IX.	program pembinaan lingkungan Sosial lingkup ketenaga kerjaan	Besaran pencari kerja yang mendapat pelatihan	persen	24	0	0%
1.	pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan kewirausahaan (DHBCT Earmark)	Besaran pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	24	0	0%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja bagi masyarakat melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi calon wirausaha baru (DBHCT Earmark)	Besaran pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	Orang	30	0	0%
3.	pembinaan dan pelatihan kerja dan tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan membuat bagi pemuda pemudi putus sekolah dan pengangguran (DBHCT Earmark)	Besaran pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan membuat	orang	75	0	0%
4.	pembinaan dan pelatihan tenaga kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dan pelatihan menjahit dan tata rias (DBHCT Earmark)	Besaran pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat tata rias dan menjahit	Orang	35	0	0%
5.	pembinaan dan pelatihan tenaga kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan otomotif kendaraan roda dua (DBHCT Earmark)	Besaran pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Orang	30	0	0%
6.	bantuan sarana produksi melalui bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat (DBHCT Earmark)	Jumlah pencakar terdaftar yang mengikuti pembinaan dan pelatihan yang mendapat bantuan peralatan	Orang	194	0	0%

9.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan koordinasi internal khususnya pada saat perencanaan program dan kegiatan dirasa masih kurang efektif, sehingga ada program dan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena terkendala dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu pada saat

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran seharusnya ada komunikasi yang optimal sehingga semua program dan bisa dilaksanakan 100%.

Tenaga pendamping TKI yang telah direkrut tidak bisa menjalankan *marketplan* yang ditetapkan Disnakertrans sehingga penyerapan anggaran relatif kecil 43%, akan tetapi telah kami laksanakan sosialisasi penempatan TKI secara massif sehingga capaian kinerja secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial tingkat capaian 0%, kami akan mengoptimalkan kinerja ASN Fungsional Mediator Hubungan Industrial sehingga capaian kinerja terpenuhi.

Pada Sasaran Peningkatan animo bertransmigrasi ini relatif terlaksana tanpa kendala yang berarti, akan tetapi ada salah satu kegiatan capaian kinerjanya sebesar 50%, sedangkan capaian keuangannya lebih dari 90%. Semua ini dikarenakan ada pemindahan daerah penempatan transmigrans dari Maluku Utara ke Sulawesi Tenggara, sehingga MOU dengan daerah penempatan yang direncanakan untuk 2 cukup untuk satu daerah saja.

Kegiatan Peningkatan jumlah Pencari Kerja Terampil tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan regulasi yang ada, dimana calon peserta pelatihan yang sekaligus sebagaimana penerima bansos yang sesuai dengan bidang pelatihannya tidak terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) dari Kementrian Sosial, dimana BDT adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi penerima Bansos.

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah dengan indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja dan prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja ditargetkan 75% dengan realisasi kinerja 69% dan capaian kinerja 92%. Sedangkan prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi kinerja 75% dan capaian kinerja 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.225.165.500,00 dengan realisasi sebesar anggaran Rp.1.218.007.079,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 99%.

2) *Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah dengan indikator kinerja prosentase pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.*

Pada tahun 2018, prosentase pemenuhan hak-hak perempuan dan anak ditargetkan mencapai 60% dengan realisasi kinerja sebesar 55% dan tingkat capaian kinerja 91,67%. Dukungan anggaran sebesar Rp.719.517.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.697.920.038,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 97%.

3) *Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui pengendalian penduduk dengan indikator kinerja prosentase partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk dan KB.*

Pada tahun 2018, prosentase partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk dan KB ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi kinerja sebesar 50% dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,33%. Adapun Dukungan anggaran sebesar Rp.5.318.007.550,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.240.228.800,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 99%.

10.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10

Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	Prosen	80	75	97.75%
1.	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Periode pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Kali	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang didukung	Jenis	16	16	100%
II.	Program Peningkatan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosen	80	70	87.50%
		Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	Prosen	80	70	87.50%
1.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	Gedung	1	1	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas dalam kondisi baik	Roda Empat	4	4	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor dalam kondisi baik	Jenis	4	4	100%
4.	Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Parkir Roda Dua	Jumlah Gedung Ruang Parkir yang direhab	Tempat	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 65 x 100%
5.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Unit	3	3	100%
6.	Pembangunan Pagar Dinas PPPA dan KB	Jumlah Bangunan Pagar yang direhab	Tempat	1	1	100%
7.	Pengadaan Meubelair untuk Dinas PPPA dan KB	Jumlah Pengadaan Meubelair	Unit	6	6	100%
8.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mendapat diklat	Aparatur	21	25	119.05%
III.	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan	Prosentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	Prosen	30%	30%	100%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah dokumen saki yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	5	5	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	1	1	100%
3.	Koordinasi Penyusunan Kelas Jabatan	Jumlah dokumen Penyusunan Kelas Jabatan yang disusun	Dokumen	1	1	100%
4.	Pengelolaan Manajemen Kegiatan yang Bersumber dari DAK (DAK Non Fisik)	Jumlah Lokasi yang dimonitoring dan evaluasi	Kecamatan	13	13	100%
IV.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosentase Promosi/Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosen	80	65	81.25%
1.	Fasilitasi Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah sekolah dasar yang menerima Asupan Gizi	Kecamatan	13	13	100%
2.	Percepatan pemenuhan Hak-hak Anak	Jumlah Anak yang terpenuhi Hak-haknya	Kecamatan	13	13	100%
3.	Penyelenggaraan kreatifitas dan partisipasi forum anak kabupaten	Jumlah peserta forum anak kabupaten yang mengikuti gelar kreatifitas dan partisipasi forum anak kabupaten	Siswa	156	156	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
4.	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak (PPTP3A)	Jumlah koordinasi PPTP3A yang dilaksanakan	Kasus	77	75	97.40%
5.	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah koordinasi kelompok kerja	Orang	100	100	100%
6.	Pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah pendamping kekerasan terhadap perempuan dan anak	Orang	95	90	94.74%
7.	Pendampingan Pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal (P3EL)	Jumlah kecamatan yang mendapat pendampingan P3EL	Orang	55	50	90.91%
8.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Kartini	Jumlah peserta yang hadir dalam peringatan hari kartini	Orang	300	300	100%
9.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu	Jumlah peserta yang hadir dalam peringatan hari ibu	Orang	400	400	100%
10.	Fasilitasi Area bermain anak / Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Area bermain untuk Anak- Anak	Area	1	1	100%
V.	Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Kegiatan di Masyarakat	Prosentase Promosi/Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan	Prosen	60%	55%	91.67%
1.	Fasilitasi pelayanan Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim (Pap Smear)	jumlah pelayanan deteksi dini kanker yang di fasilitasi	Jenis	1	1	100%
VI.	Program Keluarga Berencana	Prosentase Laporan bulanan pengendalian lapangan tingkat Kecamatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)	Prosen	60	60	100%
1.	Pemantapan Program Kesehatan Reproduksi bagi Wanita Usia Subur (WUS)	Jumlah remaja yang mengikuti KRR	Orang	238	238	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Operasionalisasi Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	Jumlah UPT KB yang mendapat biaya operasional	Kecamatan	13	13	100%
3.	Operasionalisasi Integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB (DAK Non Fisik)	Jumlah KB yang mendapat bantuan operasional dari DAK Non Fisik	Kecamatan	13	13	100%
4.	Pendistribusian Alat Kontrasepsi / Non alat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah fasilitas kesehatan yang menerima alat kontrasepsi	Unit	32	31	96.88%
5.	Pengadaan Sarana kerja PLKB/PKB dan Koordinator Lapangan (DAK Reguler)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat sarana kerja	Orang	55	35	63.64%
6.	Pengadaan Sarana kerja PPKBD (DAK Reguler)	Jumlah Sarana Kerja untuk PPKBD	Orang	189	189	100%
7.	Pengadaan Sarana kerja PLKB/PKB dan Koordinator Lapangan (DAU)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat sarana kerja	Orang	26	26	100%
8.	Fasilitasi Operasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Jumlah bantuan yang disalurkan ke perkumpulan keluarga berencana indonesia	Klinik	1	1	100%
9.	Fasilitasi Klinik Keluarga Berencana (KKB)	Jumlah klinik Keluarga Berencana yang difasilitasi	Klinik	32	32	100%
10.	Orientasi Peningkatan Peranan Perempuan di Pedesaan Dalam Kesatuan Gerak PKK KB-KES	Jumlah desa yang difasilitasi orientasi	Orang	260	260	100%
11.	Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan medis operasi	Orang	50	50	100%
12.	Pelayanan KB dalam Kesatuan Gerak PKK KB-KES	Jumlah peserta yang mendapat pelayanan	Orang	48	48	100%
VII.	Program Ketahanan Keluarga	Prosentase bahan Informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang Anak dikelompok BKB,BKR dan BKL	Prosen	60	50	83.33%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pembinaan Bina Kelurga Balita (BKB)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	Kecamatan	13	13	100%
2.	Kegiatan Lomba Kelompok UPPKS	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Kelompok UPPKS	Kecamatan	13	13	100%
3.	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	Orang	250	250	100%
4.	Fasilitasi petugas dan pendidik sebaya/konselor sebaya pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PS/KS PIK-R/M)	Jumlah petugas dan pendidik sebaya / konselor sebaya PIK R/M	Orang	238	238	100%
5.	Pelatihan PS/KS Pusat Informasi Konseling Remaja Unggulan Kecamatan	Jumlah Pemahaman Remaja dalam kegiatan KRR	Kecamatan	13	13	100%
6.	Promosi Produk Unggulan Dalam Pembangunan	Jumlah pameran yang diselenggarakan	Kali	1	1	100%
VIII.	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	Prosentase Petugas Pelayanan KB	Prosen	20	20	100%
1.	Optimalisasi Fungsi Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat biaya operasional	Orang	189	189	100%
				1163	1163	100%
2.	Operasionalisasi Kader KB di desa/kelurahan	Jumlah peserta kader KB di desa	Orang	189	189	100%
3.	Validasi Data pendataan Kependudukan KB dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Jumlah jenis data yang divalidasi	Jenis	1	1	100%
4.	Penyelenggaraan Lomba PKB/ PLKB dan Lomba Kader IMP terbaik Tingkat Kecamatan	Jumlah kategori lomba	Jenis	4	4	100%
5.	Advokasi dalam rangka memperingati HUT Keluarga Nasional (HARGANAS)	Banyaknya Peserta dalam penyelenggaraan HUT keluarga Nasional (HARGANAS)	Orang	300	302	100.67%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
6.	Promosi dan Advokasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Banyaknya pelaksanaan kegiatan KIE	Kecamatan	13	13	100%
7.	Pembinaan Pangkalan Pramuka Saka Kencana	Jumlah pangkalan saka kencana	Pangkalan	14	14	100%
8.	Kegiatan Perkemahan Bhakti Pramuka Saka Kencana (perti kencana)	Jumlah Peserta yang mengikuti perkemahan	Kecamatan	13	13	100%
9.	Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah peserta dalam pertemuan institusi masyarakat pedesaan	Orang	300	300	100%
10.	Fasilitasi Pendampingan Sekolah Siaga Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)	Jumlah pemahaman siswa dalam laju pertumbuhan penduduk	Kecamatan	13	13	100%
11.	Penyediaan Pembuatan Media KIE untuk Kecamatan (DAK Non Fisik)	Jumlah dukungan sarana Media KIE di Kecamatan	Kecamatan	13	13	100%
IX.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Remaja yang mengikuti Pembinaan KRR	Prosen	60	50	83%
1.	Pengadaan Generasi Perencanaan (Genre) KIT untuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (DAK)	Banyaknya pengadaan genre kit	Paket	6	6	100%
2.	Penyelenggaraan Forum Group Diskusi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja yang mengikuti FGD KRR	Orang	20	20	100%

10.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan secara signifikan. Masalah yang ada, kurangnya sarana/prasarana yang memadai. Solusinya adalah dengan pengadaan komputer, meubelair dan rehab.

11. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan.

11.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan indikator kinerja prosentase penurunan rumah tangga rawan pangan dan pencapaian skor PPH.*

Pada tahun 2018, prosentase penurunan rumah tangga rawan pangan ditargetkan sebesar 0,90% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.360.837.600,00 dan realisasi sebesar Rp.360.837.600,00 sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 100%. Sedangkan pencapaian skor PPH pada tahun 2018, ditargetkan sebesar 90 poin dengan dukungan anggaran sebesar 245.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 238.170.00,00 sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 97,21%.

2) *Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak lokal dengan indikator kinerja prosentase pertumbuhan populasi ternak lokal .*

pada tahun 2018, prosentase pertumbuhan populasi ternak lokal ditargetkan mencapai 1,90% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.663.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp.654.555.000,00 sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 98,70%.

11.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11
Evaluasi Hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
I.	Program peningkatan ketahanan pangan	Prosentase peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat	<i>Persen</i>	3	*	*
1.	Pengembangan cadangan pangan	Jumlah rumah tangga yang mendapat pemberdayaan peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan	Rumah tangga	50	50	100%
2.	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah rumah tangga yang mendapat pemberdayaan peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan	Rumah tangga	50	50	100%
3.	Gerakan Tanam Pekarangan oleh Perempuan (Tanaman Buah dan Toga)	Jumlah rumah tangga yang mendapat pemberdayaan peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat	Rumah tangga	130	130	100%
4.	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah koordinasi lintas sektoral	Kali	2	2	100%
5.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari	Jumlah rumah tangga yang mendapat pemberdayaan peningkatan akses pangan	Rumah tangga	50	50	100%
6.	Sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah dokumen data pangan dan gizi	Dokumen	5	5	100%
7.	Pembinaan lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibina berkelanjutan	Desa	13	13	100%
8.	Pengembangan ketahanan pangan bagi keluarga gizi kurang	Jumlah balita yang mendapat asupan tambahan gizi	Orang	75	75	100%
II.	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Prosentase peningkatan konsumsi energi dan protein	Persen	3	*	*
1.	Fasilitasi Gerakan Olah Pangan Anak Sekolah (GOPAL)	Jumlah lomba dan sosialisasi yang diadakan	Kali	5	5	100%
2.	Pengembangan kantin sekolah sehat	Jumlah kantin sekolah yang mendapat pembinaan mutu dan keamanan jajanan sekolah	Kantin sekolah	60	60	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5}{100\%} \times 100\%$
3.	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah uji bahan pangan dan pembinaan mutu keamanan pangan	Jenis	60	60	100%
4.	Penyelenggaraan Gelar teknologi olahan pangan berbasis sumberdaya wilayah	Jumlah jenis teknologi olahan pangan lokal yang disosialisasikan	Jenis	2	2	100%
III.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Prosentase Peningkatan kelahiran sapi hasil inseminasi buatan	Persen	7,5	*	*
1.	Operasionalisasi pendukung pelayanan inseminasi buatan	Jumlah tenaga kontrak inseminator	Orang	20	20	100%
2.	Monitoring dan Pembinaan Ternak Bantuan Pemerintah	Jumlah peternak penerima bantuan pemerintah yang dibina dimonitor secara rutin	Orang	200	200	100%
3.	Pengembangan bibit hijauan pakan ternak	Jumlah bibit hijauan pakan yang disebarakan	Stek	15000	15000	100%
4.	Optimalisasi upaya khusus sapi wajib bunting (UPSUS SIWAB)	Jumlah peternak yang mengikuti sosialisasi UPSUS SIWAB	Orang	410	410	100%
5.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas inseminasi buatan	Jumlah petugas inseminasi buatan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kompetensi	Orang	17	34	200%
IV.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Prosentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan	Persen	10	*	*
1.	Penerapan teknologi peternakan	Jumlah peternak yang mendapat pelatihan/bimtek teknologi peternakan	Orang	400	*	*
V.	Program pembinaan lingkungan sosial lingkup peternakan	Prosentase Peningkatan akseptor inseminasi buatan	Persen	10	*	*
		Prosentase kawasan peternakan yang dikembangkan	Persen	40	40	100%
1.	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat kelompok tani berbasis ternak melalui inseminasi buatan satu tahun satu kelahiran	Jumlah peternak yang mendapat pelatihan Intan Satu saka	Orang	200	200	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{65} \times 100\%$
2.	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat kelompok tani berbasis ternak melalui pengembangan kawasan sapi bibit	Jumlah peternak yang mendapat pelatihan pengembangan kawasan sapi bibit	Orang	500	500	100%
VI.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase ternak sehat	Persen	70	*	*
		Cakupan pengawasan bahan pangan asal ternak	Persen	70	*	*
1.	Pelayanan pengobatan hewan	Jumlah ternak yang mendapat pengobatan gratis	Ekor	1,000	1000	100%
2.	Pengendalian dan penanggulangan penyakit avian influenza dan ND pada ayam buras	Jumlah ayam buras yang mendapat vaksinasi dan desinfeksi AI dan ND	Ekor	50,000	50000	100%
3.	Operasional pelayanan kesehatan hewan	Jumlah petugas pelayanan kesehatan hewan	Orang	8	8	100%
4.	Operasional pengelola rumah potong hewan	Jumlah petugas pengelola RPH	Orang	7	7	100%
5.	Pengembangan inovasi layanan publik kesehatan hewan (SIGAP SRATUS) (DID)	Jumlah sapi bunting dan melahirkan yang mendapat layanan kesehatan hewan	Ekor	300	300	100%
6.	Pembinaan dan pengawasan bahan pangan asal hewan	Jumlah pedagang ternak dan produk ternak dan olahannya yang diawasi dan dibina	Sampel dan ekor	150 sampel dan 200 ekor	150 sampel dan 200 ekor	100%
7.	Pembinaan dan Pengawasan rumah potong hewan	Jumlah pelaku usaha pemotongan hewan, jagal dan petugas RPH yang dibina dan diawasi	Orang	30	30	100%
8.	Pengawasan obat hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dibina dan diawasi	Unit	13	13	100%
VII.	Program peningkatan pelayanan UPTD	Prosentase peningkatan pelayan UPTD	Persen	100	100	100%
1.	Fasilitasi pendukung pelayanan UPTD	Jumlah UPTD yang difasilitasi	UPTD	4	4	100%
2.	Fasilitasi penilaian lomba petugas dan layanan publik	Jumlah petugas puskesmas yang dibina	Orang	8	8	100%
VIII.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Prosentase peningkatan promosi pemasaran ternak dan hasil produksi ternak	Persen	10	-33	-330%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times \frac{100\%}{100\%}$
1.	Ekspose/promosi hasil pembangunan peternakan	Jumlah fasilitas sarana ekspose dan promosi hasil pembangunan peternakan	Jenis	3	2	66.67%
2.	Promosi gizi / hasil produk peternakan	Jenis dan Jumlah produk peternakan olahan yang dipromosikan kepada anak usia sekolah	Dos /jenis	1000 dos (3 jenis produk)	1000 dos (3 jenis produk)	100%
3.	Festival ternak dan promosi hasil produk peternakan	Jumlah ternak dan hasil produk peternakan yang mengikuti promosi pemasaran	Ternak dan produk ternak	200 ternak dan produk ternak	200 ternak dan produk ternak	100%
IX.	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Prosentase peningkatan kemampuan kelompok tani berbasis ternak	Persen	10	5	50%
1.	Pembinaan dan penilaian kelompok tani berbasis ternak	Jumlah kelompok tani berbasis ternak yang dibina dan di nilai	Poktan	26	26	100%
2.	Pembinaan paguyuban ternak	Jumlah petenak paguyuban sapi tacek dan sapi sonok yang dibina	Orang	200	200	100%
3.	Bimbingan teknis peternakan	Jumlah kelompok tani/petenak yang mendapat bimbingan teknis peternakan	Orang	150	150	100%

11.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikanyang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

12. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan hidup merupakan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Lingkungan Hidup.

12.1. Sasaran Strategis

1) Meningkatnya perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan indikator kinerja indek kualitas air, indek kualitas udara, % volume sampah yang dikelola terhadap jumlah produksi sampah perkotaan, dan indek tutupan hutan/vegetasi.

Indeks kualitas air pada tahun 2018, ditargetkan sebesar 62,50-67,50 poin dengan realisasi 70,00 poin dan tingkat capaian kinerja sebesar 103,70%. Adapun dana yang dianggarkan sebesar Rp.1.628.817.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.242.806.150,00 dan tingkat capaian anggaran 76,30%.

Indeks kualitas udara pada tahun 2018, ditargetkan 81,00-81,99 poin dengan realisasi kinerja sebesar 88,04 poin dan tingkat capaian kinerja sebesar 107,38% Adapun pagu yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.48.650.000,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,30%.

Prosentase volume sampah yang dikelola terhadap jumlah produksi sampah perkotaan pada tahun 2018, ditargetkan 35%-45% dengan realisasi kinerja sebesar 97,04% dan capaian kinerja sebesar 216,22%. Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 5.594.425.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.836.747.750,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 86,46%.

Untuk indikator indeks tutupan hutan/vegetasi pada tahun 2018, ditargetkan sebesar 28,82-30,01 poin dengan realisasi kinerja sebesar 28,82 poin dan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun pagu anggaran sebesar Rp.1.959.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.868.020.550,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,34%.

12.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4..12

Evaluasi Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	Prosen	100	100	100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi	Rakor	60	62	103.33%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung administrasi yang terpenuhi	Layanan	6	6	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosen	100	100	100%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	9	9	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	Unit	2	2	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	3	3	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara secara berkala	Unit	45	45	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Persen	21.37	20.51	96%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang difasilitasi	Orang	7	7	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	Dokumen	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	Persen	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen kegiatan dan laporan kinerja	Dokumen	3	3	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah renstra SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Operasionalisasi TPA / TPST di Kabupaten		75,84	75,84	100%
		Persentase jumlah sampah yang tertangani		11,86	11,86	100%
		Persentase cakupan area pelayanan sampah		3,59	3,59	100%
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		13,74	13,74	100%
		Timbulan sampah yang ditangani		11,86	11,86	100%
1.	Koordinasi dan Evaluasi Titik Pantau Kebersihan Kota Sehat	Jumlah titik pantau kebersihan kota sehat yang dikoordinasi dan dievaluasi	Lokasi	15	15	100%
2.	Peningkatan Kebersihan Perkotaan	Jumlah titik pantau kebersihan	Kawasan	1	1	100%
3.	Pemenuhan Jasa Penyapuan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan	Jumlah tenaga kontrak penyapuan	orang	64	64	100%
4.	Pemenuhan Jasa Pengangkutan Sampah Jalan di Area Pelayanan	Jumlah tenaga kontrak pengangkutan	orang	62	62	100%
5.	Pendukung Peningkatan Pengelolaan TPA Angsanah	Jumlah Layanan pendukung pengelolaan sistem Sanitarylandfill	Layanan	2	2	100%
6.	Operasional Pengelolaan Sistem Sanitary Landfill	Persentase pengelolaan sampah sistem sanitary landfill	Prosen	100	100	100%
7.	Pengadaan Tanah Urug Penimbun Sampah	Jumlah tanah urug penimbun sampah yang diadakan	m ³	720	720	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
8.	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Sampah dan Mesin Pengolah Sampah	Jumlah kendaraan pengangkut sampah dan mesin pengolah sampah yang beroperasi	Unit	22	22	100%
9.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang terpelihara	Unit	2	2	100%
10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	Unit Sarpras	2	2	100%
11.	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah dan Penyiraman (DPAL)	Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang diadakan	Unit	2	2	100%
12.	Pembangunan Bank Sampah (DPAL)	Jumlah garasi kendaraan operasional persampahan	Unit	1	1	100%
VI.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Hasil pengukuran indeks kualitas air		67.5	70	103.70%
1.	Pendukung Pelaksanaan Izin/Dokumen Lingkungan Hidup	Persentase Survey Permohonan Izin	Prosen	100%	100%	100%
2.	Lomba Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri serta Pendampingan Kelurahan/Desa berseri	Jumlah Desa Binaan untuk lomba tingkat provinsi	Desa	1	1	100%
3.	Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosen	100%	100%	100%
4.	Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mengerti tata cara pengaduan terhadap masalah lingkungan	Orang	100	100	100%
5.	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan LH	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi	pelaku usaha	45	31	68.89%
6.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah kualitas air sungai dan udara yang di pantau	Lokasi	13	10	76.92%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VII.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen / sarana informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	2	100%
1.	Penyusunan Buku Daftar Isian Non Fisik Program Adipura	Jumlah Dokumen isian dan profile data Adipura	Dokumen	1	1	100%
2.	Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pamekasan	Jumlah sekolah-sekolah yang menjadi binaan Adiwiyata	Sekolah	50	50	100%
3.	Penyusunan Laporan IKPLHD	Jumlah laporan dokumen IKPLHD	Dokumen	2	2	100%
4.	Penanaman Pohon di Kawasan Sumber Mata Air dan Lahan Kritis	Jumlah tanaman ditanam	Pohon	1200	1200	100%
5.	Bimbingan Teknis Micro Excel Untuk Sekolah Calon Adiwiyata	Jumlah peserta sekolah yang ikut bimtek Mikro Excel	Sekolah	50	50	100%
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional, Mandiri dan Asia (PAK)	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang terfasilitasi dalam lomba tingkat provinsi, nasional, mandiri dan asia	Sekolah	39	39	100%
VIII.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Hasil pengukuran indeks tutupan lahan / vegetasi		28.82	28.82	100%
1.	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang mendapat penataan	RTH	1	1	100%
2.	Penanaman Pohon di Turus Jalan	Jumlah Pohon yang ditanam	Pohon	3363	3363	100%
IX.	Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Persentase pelaksanaan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sesuai aturan	Prosen	100	100	100%
1.	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah peraturan B3	Perda	1	1	100%
X.	Program Peningkatan Tata Lingkungan	Persentase taman / RTH Pemerintah yang terkelola	Prosen	100	100	100%
		Persentase perizinan yang memenuhi peraturan LH	Prosen	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pengadaan Jasa Kebersihan dan Perawatan Taman Kota	Jumlah tenaga kebersihan dan perawat taman	Orang	16	16	100%
2.	Pemeliharaan Kendaraan/Alat/Mesin Pertamanan	Jumlah kendaraan/alat/mesin yang terpelihara	Unit	12	15	100%
3.	Operasional Kendaraan/Alat/Mesin Pertamanan	Persentase kendaraan/alat/mesin pertamanan yang beroperasi	Prosen	100	100	100%
4.	Pembangunan Gapura Kabupaten	Jumlah Dokumen Gapura yang dibuat	Dokumen	1	1	100%
5.	Penataan Taman	Jumlah taman yang di tata	Taman	1	1	100%
6.	Penyusunan / Reviu Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan	Dokumen	1	1	100%
XI.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Lingkungan Hidup	• Persentase lomba lingkungan tingkat provinsi dan Nasional yang diikuti	Prosen	80%	80%	100%
1.	Fasilitasi Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang terfasilitasi dalam lomba tingkat provinsi, nasional, mandiri dan asia	Peserta	12	12	100%
2.	Asistensi dan Pembinaan Kalpataru Kabupaten Pamekasan (DID)	Jumlah Pemerhati Lingkungan yang dibina	Orang	3	3	100%
3.	Asistensi dan Pembinaan Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina	Sekolah	50	50	100%
4.	Penyediaan Pemeliharaan Sanitasi Melalui Pembangunan Sarpras TPA (DBHCHT Earmark) (DBHCHT)	Jumlah Sarpras yang dibangun	Unit	2	2	100%
5.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Melalui Pembangunan Bank Sampah/TPS3R (DBHCHT)	Jumlah Sarpras yang dibangun	Unit	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
XII.	Program Pemanfaatan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter pengujian sampel sesuai SNI	Parameter	12	12	100%
1.	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah Pengujian sampel	Sampel	40	40	100%

12.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat permasalahan. Yang pertama, sedikitnya jumlah pengaduan sehingga banyak anggaran yang tidak terserap. Solusi dari permasalahan tersebut adalah adanya kegiatan sosialisasi tentang lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Permasalahan kedua yaitu penetapan P-APBD yang mendekati akhir tahun dan solusinya adalah mengusahakan agar penetapan tersebut pada pertengahan tahun.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP ditargetkan sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.027.059.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.824.461.241,00 sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 80%.

2) *Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja prosentase jumlah penduduk ber – KTP elektronik, prosentase jumlah penduduk yang ber – KK, dan prosentase jumlah penduduk yang ber – Akta kelahiran.*

Prosentasi jumlah penduduk yang ber-KTP elektronik pada tahun 2018, ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 88,11% dan capaian kinerja sebesar 74%. Indikator prosentase jumlah penduduk yang ber-KK pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Sementara untuk indikator prosentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran ditargetkan 100% dan realiasi sebesar 92,26% dan capaian kinerja sebesar 93%. Adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.765.555.528,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.544.876.807,00 sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 66%.

13.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.13

Evaluasi Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	Prosentase	100	100	100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lama periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan administrasi perkantoran	Lama periode pelaksanaan pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100%
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DID)	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Unit	1	1	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	4	4	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Gedung	2	2	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dapat pemeliharaan dalam kondisi baik	Unit	3	3	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Item	4	4	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosentase	100	100	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	PNS	16	16	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan yang di susun	Dokumen	1	1	100%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	Prosentase	100	100	100%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	5	100%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen (Renstra)	1	1	100%
V.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KTP-el, KK dan Akte kelahiran	Prosentase	80	75	94%
1.	Fasilitasi pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (DAK)	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi	Kec	13	13	100%
2.	Pelaksanaan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Ds/Kel	189	189	100%
3.	Pengelolaan SIAK (DAK)	Jumlah buku kependudukan yang dicetak	Buku	240	240	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
4.	Pengadaan Peralatan penunjang perekaman/input data KTP-el (DPAL)	Jumlah peralatan penunjang perekaman/ input data KTP-el yang diadakan	Kec	5	5	100%
5.	Pelaksanaan Pencatatan Sipil (DAK) (DPAL)	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Ds/Kel	189	0	0%
VI.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Prosentase	94.07	90	96%
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Sabtu Pelayanan Rutin di Tingkat Desa (Sabtu Perkasa)	Jumlah pelayanan rutin tingkat desa (Sabtu Perkasa) yang difasilitasi	Ds/Kel	8	8	100%
2.	Penyediaan Peralatan/Sarana Penunjang Perekaman/Input Data KTP Elektronik (PAK)	Jumlah peralatan penunjang perekaman/ input data KTP-el yang diadakan	Kec	5	5	100%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Ulang Susunan Anggota Keluargaku (Pulang Sakeraku)	Jumlah kartu keluarga yang difasilitasi	Kec	13	0	0%
VII.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Prosentase	90.73	92.94	102%
1.	Fasilitasi Penyampaian Akte Kelahiran Kepada Masyarakat	Jumlah pemberian akte kelahiran bagi yang tidak mampu	Lbr	3000	3000	100%
2.	Fasilitasi Pencetakan Buku Register dan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah buku register dan dokumen pencatatan sipil yang terfasilitasi	buku	1000	1000	100%
3.	Pelaksanaan Program Unggulan Bheji Bheber Olle Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (BABE OLGA)	Jumlah akta kelahiran dan KK gratis bagi bayi yang baru lahir	Lbr	14000	14000	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
VIII.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data	Ketersediaan Database Kependudukan	Prosentase	75	70	93%
1.	Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang di susun	Kec	13	13	100%
2.	Penunjang Dokumen Lahir, Mati, Pindah Datang (LAMPID)	Jumlah dokumen lahir, mati, pindah datang	Ds/Kel	189	189	100%
3.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan yang diadakan	Kec	13	13	100%

13.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat permasalahan. Masalah yang dihadapi hanyalah kurangnya SDM yang turun ke desa, dan solusinya adalah adanya penambahan SDM/jasa kerja.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

14.1. Sasaran Strategis

1) *Telaksananya fungsi dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase layanan kesekretariatan sesuai dengan SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase layanan kesekretariatan sesuai dengan SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.363.691.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.339.611.392,00 sehingga tingkat capaian anggaran sebesar 93%.

14.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14

Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	60	60	100%
2.	Pendukung pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan administrasi Perkantoran	layanan	7	7	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang diadakan	unit	6	6	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang diadakan	gedung/ruang	12	12	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	mobil	24	24	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Pc, printer	5	5	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	aparatur	31	31	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah dokumen kelas jabatan yang disusun	aparatur	31	31	100%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah dokumen lakip yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	4	4	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Renstra	2	2	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
V.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	5.6	51,191	9,141
1.	BOP Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)	Jumlah BOP Jalin matra	persen	100	100	100%
2.	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	Jumlah pelaku P3EL yang mendapat pemberdayaan	KK	44	44	100%
3.	Pendampingan Pelaksanaan Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapat program jalin matra	KK	400	0	0%
4.	Peningkatan Usaha Ekonomi Mendukung Usaha Sektor Informal	Jumlah pelaku usaha produktif sektor informal (Home Industri) yang mendapat peningkatan usaha ekonomi	Home Industri	80	98	123%
5.	Fasilitasi dan Pembinaan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BUMDes	Bumdes	27	27	100%
6.	Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pelayanan Pos Pelayanan Tehnologi Tepat Guna (POSYANTEK)	Jumlah Posyantek	Kecamatan	7	7	100%
7.	Pendampingan Pelayanan Sosial Dasar Berbasis Implementasi Peraturan tentang Desa	Jumlah Posyandu dan Taman Posyandu yang mendapat penguatan	Posyandu dan Taman Posyandu	1,202	1,202	100%
8.	Pengadaan Aplikasi Pasar Desa Berbasis Online	Jumlah aplikasi yang diadakan	Aplikasi	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	%	100	100	100%
1.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (PSIKD)	Jumlah sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan	Desa	178	178	100%
2.	Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah kegiatan TMMD yang dilaksanakan	Desa	1	1	100%
3.	Validasi dan Pendataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah RT/RW yang mendapat pembinaan	BPD	178	178	100%
4.	Koordinasi Penyelesaian Masalah Desa Di Tingkat Kabupaten	Jumlah Penyelesaian Masalah yang dikoordinasikan	Desa	2	2	100%
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Kepala Daerah Tentang Pemerintahan Desa	Jumlah rancangan yang disusun	Raperda/Perkada	100	100	100%
6.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Daerah / Kepala Daerah tentang Desa	Jumlah sosialisasi	Desa	178	178	100%
7.	Pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	Jumlah Kepala Desa PAW dilantik	Desa	2	2	100%
8.	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan DBH	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi keuangan Khusus BKK dan DBH	Desa	178	178	100%
9.	Penataan Peraturan tentang Desa	jumlah peraturan tentang desa yang di revisi	Peraturan ttg Desa	4	4	100%
10.	Fasilitasi Updating Profil Desa	Pendampingan profil desa	Desa	178	178	100%
11.	Pengendalian Alokasi Dana Desa	Pengendalian Alokasi Dana Desa	Desa	178	178	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
12.	Pengadaan Aplikasi Monitoring Proyek DD/ADD	Jumlah Aplikasi yang diadakan	Aplikasi	1	1	100%
VII.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	6.85	63,618	9,287
1.	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan HKG PKK	Jumlah peningkatan BBGRM yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	3	3	100%
2.	Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa	Jumlah desa yang mendapat pendampingan	Desa	178	178	100%
3.	Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui PKK	Jumlah Kader PKK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mendapat peningkatan partisipasi	13.387 Desa/Kelurahan	189	189	100%
VIII.	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Dikembangkan / Diberdayakan	Desa Kawasan	1	1	100%
1.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kampung Batik	Jumlah pengrajin batik, yang mendapat pembinaan dan pendampingan	50 Pengrajin	50	50	100%

14.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 ada beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Rakor pusat/Provinsi melampaui pagu anggaran;
- 2) Kondisi gedung/ruang yang kurang layak tidak mampu dipenuhi oleh anggaran yang ada;
- 3) Pendampingan keluarga miskin penerima Jalin Matra memiliki keterbatasan waktu;

- 4) Revitaliasasi Pemanfaatan Lembaga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) harus menyesuaikan kegiatan 100 hari Bupati Wabub;
- 5) Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapat peningkatan pemberdayaan masyarakat menyesuaikan kegiatan 100 hari Bupati Wabup;
- 6) Jumlah aplikasi yang diadakan menyelaraskan visi misi bupati;
- 7) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (PSIKD) masih DPAL (sisa).

Adapun solusi dari permasalahan tersebut:

- 1) Penggunaan dana pribadi/tidak memenuhi undangan;
- 2) Memprioritaskan perbaikan atau perawaan gedung/ruang yang kurang layak;
- 3) Adanya penjadwalan ulang untuk pendampingan keluarga miskin yang memperoleh program Jalin Matra;
- 4) Tidak dilaksanakan/dihapus didalam PAK untuk kegiatan revitalisasi POSYANTEK.

15. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Perhubungan.

15.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja 94,32% dan tingkat capaian kinerja 94,32%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.133.815.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.062.158.724,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 93,68%.

2) *Meningkatnya aksesibilitas dan keselamatan transportasi dengan indikator kinerja prosentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi.*

Pada tahun 2018, prosentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 83,28% dan tingkat capaian kinerja sebesar 83,28%. Adapun pagu anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 9.440.740.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.635.930.857,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 80,88%.

15.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.15

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran di bidang perhubungan	Prosentase	100	94.80	94.80%
1.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali	65	61	93.85%
2.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Layanan	100	94.10	94.10%
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Sarana dan Prasarana	100	90.25	90.25%
1.	Pengadaan perlatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	15	15	100%
2.	Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah peralatan gedung kantor dan rumah dinas yang diperbaiki	Unit	37	30	81%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di perbaiki	Kendaraan	10	8	80%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang diperbaiki	Gedung	2	2	100%
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pakaian kerja lapangan yang diadakan	Seragam	100	99.23	99.23%
1.	Pengadaan pakaian kerja lapangan (PAK)	Jumlah pakainya kerja lapangan yang di adakan	Pakaian	60	60	100%
IV.	Program Peningkatan Sumber daya aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	Diklat Dan Dokumen	100%	98%	98%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formam yang diikuti	Diklat	50	49	98%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
2.	Penyusunan kelas jabatan pegawai (PAK)	Tersusunnya Dokumen kelas jabatan pegawai	Dokumen	1	1	100%
V.	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	Dokumen	100%	90.41%	90.41%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Laporan	52	52	100.00%
2.	Koordinasi penyusunan Dokumen dalam perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang di susun dengan kualitas baik sesuai perundang undangan yang berlaku	Dokumen	1	1	100%
VI.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase Prasarana dan fasilitas perhubungan yang layak fungsi	Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%
1.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminak angkutan darat yang di kelola dengan baik	Terminal	1	1	100%
2.	Rehab Sedang/Berat Terminal Daerah (PAK)	Jumlah terminal yang diperbaiki	Terminal	1	1	100%
3.	ANDAL lalu lintas pembangunan terminal barang(jadwal ulang)	Jumlah terminal barang yang dioerbaiki	Terminal	1	0	0%
4.	Pembangunan/Pengembangan sarana/prasarana tempat parkir khusus (PAK)	Jumlah sarana/prasarana tempat parkir khusus yang terpasang	Parkir Khusus	1	1	100%
5.	Pemasangan jaringan dan KWH meter (PAK)	Jumlah jaringan KWH meter yang terpasang	KWH Meter	5	5	100%
6.	Pameran pembangunan dan HARHUBNAS (jadwal ulang)	Jumlah pameran dan HARPUKNAS yang diadakan	Pameran dan HARPUKNAS	2	0	0%
7.	Penyusunan Dokumen Analisis dampak lalulintas (PAK)	Tersedianya Dokumen analisis dampak lalulintas	Dokumen	1	1	100%
VII.	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase prasarana dan fasilitas laik pakai	Prasarana dan fasilitas	100%	99.85	99.85%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Rehabilitasi gedung balai pengujian kendaraan bermotor (PAK)	Jumlah prasaran balai pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik	Gedung	100%	99,24	99,24%
2.	Pemeliharaan prasarana dan pendukung pelayanan balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pemeliharaan prasarana dan pendukung pelayanan balai pengujian	Gedung	23	23	100%
3.	Renovasi area bongkar muat (DPA- L)	Jumlah area bongkar muat yang di renovasi	Area bongkar muat	1	1	100%
4.	Kalibrasi pemeliharaan dan pengadaan alat uji (PAK)	Jumlah Alat yang di kalibrasi	Unit	11	11	100%
5.	Penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas balai pengujian kendaraan bermotor (PAK)	Tersedianya dokumen analisis dampak lingkungan	Dokumen	1	1	100%
VIII.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah pelabuhan laut/terminal yang di kelola	Pelabuhan/terminal	1	1	100%
1.	Realisasi pembuatan surat dokumen kapal (surat pas kecil)	Jumlah surat dokumen kapal (surat pas kecil) yang dicetak	Dokumen	0	0	0%
2.	Kegiatan pendukung wahana tata nagraha (jadwal ulang)	Jumlah kegiatan wahana tata nagraha yang di ikuti	Lomba	1	0	0%
3.	Operasional area tempat bongkar muat	Volume operasional tempat bongkar muat	terminal	1.	1	100%
IX.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	Sarana dan Prasarana	1	0	0%
1.	AMDAL pembangunan tambatan perahu (jadal Ulang)	Jumlah tambatan perahu yang di bangun	Tambatan perahu	1	0	0%
X.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Sarana dan Prasarana layak pakai	Sarana dan Prasarana	100%	100%	50%
1.	Pengadaan rambu - rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang dipasang	Rambu rambu	65	65	100%
2.	Pemilihan pelajar populer tertib lalu lintas	Jumlah pelajar yang mengikuti pelopor tertib lalu lintas	Pelajar	100	0	0%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
3.	Pelaksanaan penertiban lalu lintas	Jumlah penertiban lalu lintas yang di adakan	PAMLAL IN	3	3	100%
4.	Operasional forum lalu lintas angkutan jalan	Jumlah Forum lalu lintas yang di adakan	Rapat	2	2	100%
5.	Pengamanan dan penertiban lalu lintas hari besar islam, natal, tahun baru, dan insidental	Jumlah pengamanan dan penertiban yang di laksanakan	Pengmanan	12	12	100%
6.	Review Penataan Transportasi Lokal (Tatralok) (Jadwal Ulang)	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan bermotor	Survey	100%	100%	79.20%
7.	Pemeliharaan Traffic light dan Flash Light	Jumlah traffic laight dan flash light yang berfungsi baik	Traffic dan Flash light	11	11	100%
8.	Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan (PAK)	Jumlah LPJU yang di sediakan	LPJU	11	0	0%
9.	Pengadaan Dan pemasangan Traffic Light (DID)	Jumlah traffic light yang di sediakan	Traffic light	1	1	100%
10.	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengamanan dan pengendalian lalu lintas (PAK)	Jumlah kendraan operasional pengamanan lalu lintas yang di sediakan	Mobil	2	1	50%
11.	Pemeliharaan tiang lampu tandem	Jumlah tiang lampu tandem yang di perbaiki	Tiang Lampu	192	192	100%
12.	Rehabilitasi tiang lampu Median	Jumlah tiang lampu Median yang di perbaiki	Tiang Lampu	0	0	0%
13.	Pengadaan Atribut pengamanan Lalu lintas (PAK)	Jumlah Atribut pengamanan lalu lintas yang di sediakan	Atribut	50	50	100%
14.	Pengadaan dan Pemasangan marka jalan (Pita Pengaduan) (PAK)	Jumlah marka jalan yang di sediakan	m2	711.12	711.12	100%
XI.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	Peralatan SIMPKB	23	23	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pembuatan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	Peralatan SIMPKB	23	23	100%
XII.	Program Pengadaan Sarana Dan Prasaran Penerangan Jalan Umum	Prosentase sarana prasaran penerangan jalan umum yang berfungsi	LPJU	100%	100%	100%
1.	Pengawasan dan Pendataan Pemakai LPJU Pamekasan	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan bermotor	LPJU	403	403	100%
2.	Pemeliharaan Lampu penerangan jalan umum dan lampu penerangan jembatan	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan bermotor	LPJU	11	11	100%
3.	Operasional Mobil/Kendaraan Pemeliharaan LPJU	Rasio kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah kendaraan bermotor	Mobil	3	3	100%
XIII.	Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan	Prosentase kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan parkir berkanggaan	Stiker dan pelunasan retribusi	100%	99%	99%
1.	Pengadaan Stiker Tanda Pelunasan Retribusi Parkir berlangganan	Jumlah stiker, tanda pelunasan retribusi parkir berlangganan yang diadakan	Stiker dan pelunasan retribusi	193.916 stiker dan 3880 tanda pelunasan	193.916 stiker dan 3880 tanda pelunasan	100%
2.	Biaya Operasional Pelaksanaan Retribusi parkir berlangganan	Jumlah Petugas layanan parkir berlangganan yang di fasilitasi	Petugas Parkir Berlangganan	132	132	100%
3.	Kegiatan Optimalisasi Fungsi Petugas Parkir	Jumlah petugas layanan pengelolaan parkir khusus yang di fasilitasi	Petugas Parkir Khusus	157	157	100%

15.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, terdapat permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Adapun permasalahan yang ada sebagai berikut:

- 1) Beberapa pekerjaan fisik telah selesai, namun keuangan belum terealisasi karena terbatasnya waktu untuk pengadaan
- 2) Beberapa program ada yang tidak dilaksanakan
- 3) Peningkatan angkutan laut tidak dilaksanakan karena dialihkan ke syahbandar/provinsi.

Adapun solusinya yaitu:

- 1) Kegiatan dilanjutkan di DPA-L
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan anggarannya dialihkan untuk kegiatan ANDAL Lalin Perhubungan atau ketika ada kegiatan Pemkab Pamekasan
- 3) Bagi pemilik perahu di bawah 7GT untuk membuat/memperpanjang dialihkan ke syahbandar.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Komunikasi dan Informatika.

16.1. Sasaran Strategis

1) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dengan indikator kinerja prosentase tindak lanjut layanan informasi, prosentase SKPD yang menerapkan layanan berbasis TIK terintegrasi, prosentase pengamanan Surat Bersandi dan prosentase data statistik sektoral yang di upload pada website e-statistik.

Pada tahun 2018, prosentase tindak lanjut layanan informasiditargetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.2.145.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.934.928.899,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 90,2%.

Pada tahun 2018, prosentase SKPD yang menerapkan layanan berbasis TIK terintegrasi ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja 24,4% dan tingkat capaian kinerja 0,24%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp. 10.703.620.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.825.814.400,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 26,4%.

Pada indikator prosentase pengamanan Surat Bersandi ditargetkan sebesar100% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp. 285.752.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 279.140.735,00 dan tingkat capaian anggaran 98%.

Pada indikator prosentase data statistik sektoral yang di upload pada website e-statistik ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 0% dan tingkat capaian kinerja 0%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.215.524.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.190.470.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 88,4%.

2) *Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang mendukung penguatan kinerja dengan indikator kinerja prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran, prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, dan prosentase pelaksanaan administrasi dan pelaporan kinerja.*

Pada tahun 2018, prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.471.040.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.410.317.411,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 87,1%.

Indikator prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.086.580,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,12%. Prosentase pelaksanaan administrasi dan pelaporan kinerja pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.500.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 88,7%.

16.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.16

Evaluasi Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola	Media Komunikasi	2	2	100%
1.	Pengadaan Tower Radio Ralita FM (DPA-L)	Jumlah Tower Radio Ralita FM	Unit	1	1	100%
2.	Fasilitasi Perijinan/izin Siar Radio Ralita FM (DPA-L)	Jumlah Ijin Siar Radio Ralita FM	Ijin	1	1	100%
II.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola	Media Komunikasi	2	2	100%
1.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah KIM yang dibentuk dan diberdayakan	KIM	11	11	100%
2.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Talkshow yang difasilitasi	Kegiatan	40	40	100%
3.	Pengelolaan Radio Ralita FM	Jumlah Radio yang dikelola	unit	1	1	100%
III.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kajian dan penelitian di bidang Komunikasi dan Informasi	penelitian	1	1	100%
1.	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informatika	Jumlah Layanan yang dilakukan survei kepuasan masyarakat	Layanan	3	3	100%
IV.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Media Informasi yang dikelola	Media Informasi	5	5	100%
1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Majalah Fokus yang diterbitkan	edisi	4	4	100%
2.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah kalender yeg diterbitkan	Jenis Kalender	2	2	100%
3.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Siaran Keliling	siaran keliling	24	24	100%
4.	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	Jumlah Media Luar ruang yang dikelola	jenis	2	2	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
5.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Jumlah SKPD yang mengikuti peringatan hari Kebangkitan Nasional	SKPD	48	48	100%
6.	Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah.	Jumlah Dokumentasi dan penyelesaian informasi	informasi	165	125	76%
V.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik	Jumlah SKPD yang menerapkan layanan berbasis TIK terintegrasi	SKPD	12	11	92%
1.	Pemanfaatan M-CAP sebagai akses internet bagi masyarakat pedesaan	Jumlah Daerah yang mendapatkan manfaat M-CAP	Kecamatan	13	13	100%
2.	Pengelolaan Website Pemerintah Daerah	Jumlah Website yang dikelola	Website	1	1	100%
3.	Pengembangan pemanfaatan sandi dan telekomunikasi daerah	Jumlah alat sandi dan telekomunikasi pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dikelola	Jenis	2	2	100%
4.	Pengelolaan telecenter daerah	Jumlah Telecenter yang dikelola	Telecenter	1	1	100%
5.	Pengelolaan / Pengembangan Smart City	Jumlah aplikasi layanan SKPD yang terintegrasi	Aplikasi	12	12	100%
VI.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Prosentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi yang difasilitasi	prosen	100	100	100%
1.	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi yang difasilitasi	pelatihan	2	2	100%
VII.	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah	Prosentase SKPD yang mengaplikasikan smart city	prosen	90%	25%	28%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pembangunan Smart City Pamekasan (DPA-L)	Volume Pembangunan Smart City Kab. Pamekasan	paket	1	1	100%
2.	Pengadaan STL (Pemancar Sistem Tembak) Radio Ralita FM (Jadwal Ulang)	Jumlah Pemancar sistem tembak	paket	1	1	100%
VIII.	Program Penyediaan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Telekomunikasi	14	14	100%
1.	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah tower BTS yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	tower BTS Kabupaten Pamekasan	176	176	100%
2.	Pengadaan Sarana Kelengkapan Pengamanan Tower BTS (PAK)	Jumlah Plat Tower BTS	Paket	1	1	100%
IX.	Program Pengelolaan Data Statistik	Prosentase Data Statistik Sektorial yang dikelola oleh Daerah	prosen	100	100	100%
1.	Penyusunan Nilai Tukar Petani	Jumlah Buku Nilai Tukar Petani Daerah yang diterbitkan	buku	5	5	100%
2.	Penyusunan Nilai Tukar Nelayan	Jumlah Buku Nilai Tukar Nelayan Daerah yang diterbitkan	buku	5	5	100%
3.	Penyusunan Indek Harga Konsumen Daerah	Jumlah Buku Indek Harga Konsumen Daerah yang diterbitkan	buku	30	30	100%
4.	Penyusunan Rasio Genie Daerah	Jumlah buku Rasio Genie Daerah yang diterbitkan	buku	10	10	100%
5.	Penyusunan Profil Koperasi Primer dan Sekunder	Jumlah buku profil Koperasi primer dan sekunder yang diterbitkan	buku	10	10	100%
6.	Pendataan Warnet di Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lokasi Pendataan Warnet	Kecamatan	13	13	100%
7.	Pengelolaan e-Statistik Sektorial	Jumlah Statistik sektorial yang dikelola	OPD	45	0	0%
X.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Prosentase dukungan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	prosen	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah yang difasilitasi	bulan	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Administrasi yang terpenuhi	bulan	12	12	100%
XI.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik terpenuhi	prosen	100	100	100%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Jenis	13	13	100%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jenis	1	1	100%
3.	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	Jenis	2	2	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara berkala	Unit Kendaraan	3	3	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	unit	1	1	100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	Jenis	6	6	100%
7.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	unit	1	1	100%
XII.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang berpakaian dinas sesuai ketentuan	prosen	100	100	100%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Orang	60	60	100%
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang diadakan	Orang	60	60	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
XIII.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang difasilitasi	prosen	100	100	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang difasilitasi	bulan	12	12	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah Kelas Jabatan pegawai yang disusun	kelas jabatan	67	67	100%
XIV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	prosen	100	100	100%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	7	7	100%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan dikoordinasikan	Dokumen	1	1	100%

16.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Perijinan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dari Kementerian Kominfo belum selesai
- 2) Beberapa pekerjaan belum selesai karena anggaran yang tidak mencukupi dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran

Adapun solusi yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Proses ijin siar dilanjutkan kembali pada tahun 2019

Pelelangan dilakukan pada awal tahun anggaran dan adanya penambahan anggaran.

17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

17.1. Sasaran Strategis

1. *Meningkatnya sistem pendukung usaha dan pemasaran dengan indikator kinerja peningkatan jumlah produk dan kualitas produk usaha.*

Pada tahun 2018, peningkatan jumlah produk dan kualitas produk usahaditargetkan sebanyak 75 item dengan realisasi sebanyak 60 item dan tingkat capaian kinerja sebesar 80%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.939.026.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.550.342.750,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 79,95%.

2. *Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pengawasan dengan indikator kinerja peningkatan pengawasan lembaga koperasi dan usaha mikro.*

Pada tahun 2018, peningkatan pengawasan lembaga koperasi dan usaha mikro ditargetkan ada 100 koperasi dan usaha mikro dengan realisasi sebanyak 94 koperasi dan usaha mikro dan tingkat capaian kinerja sebesar 94%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.1.139.026.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.104.942.750,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,01%.

3. *Meningkatnya pengembangan pembiayaan dengan indikator kinerja peningkatan pembiayaan usaha koperasi dan usaha mikro.*

Pada tahun 2018, peningkatan pembiayaan usaha koperasi dan usaha mikro ditargetkan pada 50 koperasi dan usaha mikro dengan realisasi sebanyak 43 koperasi dan usaha mikro dan tingkat capaian kinerja sebesar 86%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

4. Meningkatnya produksi dan restrukturisasi usaha dengan indikator kinerja peningkatan usaha produksi.

Pada tahun 2018, peningkatan usaha produksi ditargetkan pada 60 item dengan realisasi sebanyak 45 item dan tingkat capaian kinerja sebesar 75%. Adapun Dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.196.625.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.196.625.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

17.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17

Evaluasi Hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan baik	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Periode pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100.00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Periode pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Pengadaan Peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Item	2	1	50.00%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang memerlukan pemeliharaan	Gedung	2	2	100.00%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	3	3	100.00%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang memerlukan pemeliharaan	Unit	10	10	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS Yang mempunyai latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai dengan Tugas Yang Menjadi Tanggungjawabnya	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Aparatur	10	10	100.00%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan yang disusun	Dokumen	1	1	100.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja Yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	4	4	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	2	2	100.00%
V.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Usaha Mikro	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi Sarana Pemasaran Usaha Mikro (PAK) (Jadwal Ulang)	Jumlah sarana pemasaran yang dibuat	Item	1	1	100.00%
VI.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro	Prosentase Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Usaha Mikro ke Luar Daerah Tingkat Nasional	Jumlah promosi yang digelar/diikuti	Kali	1	1	100.00%
2.	Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Usaha Mikro ke Luar Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah promosi yang digelar/diikuti	Kali	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Fasilitasi Pameran Promosi Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah promosi yang digelar/diikuti	Kali	1	1	100.00%
4.	Koordinasi/Temu Usaha Forum Kerjasama Koppontren	Jumlah koppontren yang melaksanakan temu usaha	Koperasi	40	40	100.00%
5.	Peningkatan Akses Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) (PAK)	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan	Sertifikat	500	500	100.00%
6.	Transplantasi Pemberdayaan Koperasi Syariah ke Luar Daerah (PAK)	Jumlah koperasi syariah yang diberdayakan	Koperasi	25	25	100.00%
7.	Sinergitas Kerjasama Koperasi/Usaha Mikro Dengan Koperasi/Usaha Pasar Luar Daerah (PAK)	Jumlah kerjasama yang dilakukan/dilaksanakan	Kali	1	1	100.00%
8.	Fasilitasi Pengembangan Produk Usaha Mikro ke Luar Negeri (PAK)	Jumlah produk yang difasilitasi	Produk	5	0	0.00%
VII.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Yang Baik	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Sosialisasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil	Jumlah pemilik ijin usaha mikro	Pelaku usaha	150	150	100.00%
2.	Pembinaan Usaha Kreatif Bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	Pelaku usaha	100	100	100.00%
3.	Koordinasi dan Konsultasi Nomor Induk Koperasi (NIK)	Jumlah koperasi yang memiliki NIK	Koperasi	60	60	100.00%
4.	Updating dan Validasi Data Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	150	150	100.00%
5.	Tindaklanjut Transplantasi Manajemen Usaha Bagi KSP/KSPPS ke Luar Provinsi	Jumlah KSP/KSPPS yang mengembangkan pola usaha	Koperasi	100	100	100.00%
6.	Workshop Produk Pembiayaan Syariah Bagi KSPPS dan USPPS	Jumlah koperasi yang mengikuti workshop	Koperasi	27	27	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
7.	Peningkatan Kompetensi Bagi Kader Koperasi	Jumlah lomba yang diikuti	Lomba	6	6	100.00%
8.	Penyusunan Data Perkembangan Koperasi	Jumlah pendataan koperasi	Koperasi	150	150	100.00%
9.	Fasilitasi Peringatan Hari Gerakan Koperasi	Periode peringatan hari koperasi	Kali	1	1	100.00%
10.	Penyelenggaraan Lokakarya Dalam Rangka Hari Jadi Koperasi	Jumlah koperasi peserta lokakarya	Koperasi	80	80	100.00%
11.	Rapat Kerja/Dinas Koperasi/Usaha Mikro	Periode pelaksanaan rapat kerja	Kali	1	1	100.00%
VIII.	Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Usaha dan Pembiayaan	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Pembinaan Pengelola Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi Wanita	Jumlah koperasi wanita yang mendapatkan pembinaan	Koperasi	55	55	100.00%
IX.	Program Peningkatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Persen (%)	100	100	100.00%
1.	Penumbuhan Wira Usaha Baru	Jumlah pertumbuhan wira usaha baru	WUB	3500	3500	100.00%

17.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang di tetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Kegiatan pengadaan peralatan kantor.

Program kegiatan tersebut hanya terlaksana sebesar 50%. Hal ini disebabkan karena terbentur oleh waktu pelaksanaan pengadaan. Sehingga program kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana secara maksimal.

2) Program pengembangan sistem pendukung usaha dan pemasaran bagi usaha mikro

- Kegiatan fasilitasi pengembangan produk usaha mikro ke luar negeri (PAK)

Kegiatan tersebut tidak terlaksana (jadwal ulang) disebabkan waktu pelaksanaannya hampir bersamaan dengan kegiatan pameran bersama se Madura “Menjemput Asa Menembus Batas” di Jakarta. Tentu diperlukan persiapan yang prima dalam mendukung kedua kegiatan besar tersebut. Sehingga harus sama-sama fokus dalam mengawalinya.

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

18.1. Sasaran Strategis

- 1) *Meningkatnya promosi dan kerjasama daerah untuk mendorong investasi dengan indikator kinerja pertumbuhan nilai investasi (PMDM/PMDA)*

Pada tahun 2018, pertumbuhan nilai investasi (PMDM/PMDA) ditargetkan sebesar 16,66% dengan realisasi kinerja sebesar 0,70% dan tingkat capaian kinerja sebesar 4,20%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.270.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.270.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

- 2) *Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal.*

Pada tahun 2018, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal ditargetkan sebesar 77 point dengan realisasi kinerja sebesar 69,3 point dan tingkat capaian kinerja sebesar 90%. Adapun dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 333.780.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 83,45%.

18.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18

Evaluasi Hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
I.	Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi	prosentase pertumbuhan nilai Investasi Daerah (PMDM/PMA)	kali	1	1	100.00%
1.	Rapat Koordinasi Investasi bersama pengusaha	jumlah peserta koordinasi investasi yang dilakukan	kali	1	1	100.00%
2.	penyelenggaraan pameran investasi	jumlah pameran yang peserta pameran investasi yang diikuti	kali	1	1	100.00%
3.	peningkatan koordinasi dan kerja sama dibidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah, dan dunia usaha	jumlah peminat kerja sama Penanaman Modal.	kerja sama	2	2	100.00%
4.	penyusunan peraturan kebijakan pengembangan penanaman modal	jumlah peraturan kebijakan pengembangan Penanaman Modal yang dilakukan	draft	1	1	100.00%
II.	Program informasi, pengaduan dan pengendalian perizinan, program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Perizinan	kali	1	1	100.00%
1.	Penyusunan IKM	Nilai survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal	kali	1	1	100.00%
2.	pengembangan inovasi layanan investasi dan perizinan secara terpadu Integratif dan Komunikatif	jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan	inovasi	1	1	100.00%
3.	fasilitasi pengembangan dan Advokasi Layanan penanganan pengaduan perizinan dan PM	jumlah pengaduan yang dilayani	kali	25	25	100.00%
4.	koordinasi tehknis peninjauan perizinan	jumlah pemohon perizinan yang ditinjau	kali	90	90	100.00%

18.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan yaitu adanya penerapan OSS maka untuk menghimpun data investasi sangat sulit karena langsung ditangani pusat. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal yaitu menunggu penanggungjawab Komitmen adalah BKPM-RI yang masih dirumuskan.

19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kedudukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

19.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya prestasi bidang kepemudaan dengan indikator kinerja jumlah pemuda yang berprestasi tingkat provinsi.*

Pada tahun 2018, jumlah pemuda yang berprestasi tingkat provinsi ditargetkan sebanyak 20 orang dengan realisasi sebanyak 22 orang dan tingkat capaian kinerja sebesar 110%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.710.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.598.975.022,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 84,36%.

2) *Tercapainya prestasi bidang kepemudaan dengan indikator kinerja prosentasi cabang olahraga berprestasi tingkat nasional.*

Pada tahun 2018, prosentasi cabang olahraga berprestasi tingkat nasional ditargetkan sebesar 40% dengan realisasi sebesar 42,8% dan tingkat capaian kinerja sebesar 107%. Adapun Dukungan anggaran sebesar Rp.20.527.386.750,00 dengan realisasi anggaran sebesar 6.902.914.904,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 33.63%.

19.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.19

Evaluasi Hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	12	12	100.00%
2.	Pendukung Administrasi Perkantoran	Prosentase kepuasan pelayanan administrasi	bulan	12	12	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100.00%
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	item	5	5	100.00%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit	2	2	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas	jumlah peralatan kantor yang di rawat	bh	20	20	100.00%
4.	Pengadaan Peralatan Kantor	jumlah peralatan kantor yang diadakan	item	4	4	100.00%
5.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung yang di rehabilitasi	gedung	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	aparatur	13	13	100.00%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah dokumen yang disusun	dokumen	6	6	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	5	5	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	meningkatnya kualitas Sakip SKPD	dokumen	2	2	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
V.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	orang	20	22	110.00%
1.	Pelaksanaan Perkemahan dan Karya Bakti Pemuda	jumlah perkemahan yang dilaksanakan	even	1	1	100.00%
2.	Perintisan Klinik Pemuda Remaja (KLIPER)	jumlah pembina/pembimbing kliper	orang	6	6	100.00%
3.	Koordinasi Kerja Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	koordinasi	1	1	100.00%
4.	Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi	jumlah anggota paskibraka yang dibina	orang	74	74	100.00%
5.	Penyelenggaraan Lomba Ketangkasan Peraturan Baris Berbaris (PBB)	jumlah lomba yang dilaksanakan	lomba	1	1	100.00%
6.	Penyelenggaraan Peringatan Nasional Hari Sumpah Pemuda	jumlah peringatan yang dilaksanakan	peringatan	1	1	100.00%
VI.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok KUPP	kelompok	40	40	100.00%
1.	Pembinaan Kelompok Usaha pemuda Produktif (KUPP)	jumlah pemuda yang dibina	orang	100	100	100.00%
VII.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan	orang	100	100	100.00%
1.	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan	100 orang	100	100	100.00%
VIII.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase cabor berprestasi	%	40	42.8	107.00%
1.	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	jumlah cabor yang mendapat peningkatan mutu	cabor	3	3	100.00%
2.	Pembinaan Pengembangan Potensi Atlet daerah	jumlah atlet yang mengikuti pembinaan	orang	40	0	0.00%
3.	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional	jumlah penyelenggaraan yang diadakan	even	2	2	100.00%
4.	Fasilitasi Program Jumat Bersih Sehat Bersepeda (Jumat Bersapda)	jumlah jum'at bersabda yang diselenggarakan	even	10	7	70.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
5.	Fasilitasi Keikutsertaan Atlet Paralympic Tk. Provinsi	jumlah lomba yang di fasilitasi	even	2	2	100.00%
6.	Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional PALAPA	jumlah gerak jalan tradisional yang di selenggarakan	even	1	1	100.00%
IX.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana olahraga yang layak fungsi (dalam kondisi baik)	unit	4	4	100.00%
1.	Operasionalisasi Pengelolaan Stadion Daerah	jumlah pintu gerbang yang dibangun	unit	1	1	100%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR	jumlah gedung	unit	3	3	100%
3.	Pembangunan Lintasan Atletik (DPAL)	jumlah gedung yang dibangun	area	1		0.00%
4.	Pengembangan Lahan Parkir Stadion (Sirkuit) (DPAL)	luas tanah yang diadakan	meter	5000	5000	100.00%
5.	Pembangunan Jalan di Lingkungan Stadion Daerah	panjang jalan yang dibangun	meter	750	0	0.00%
6.	Pembangunan Saluran Air Stadion Daerah	jumlah lokasi sumber air bersih yang dilakukan drainase stadion	lokasi	1	0	0.00%
7.	Pengadaan Tanah Untuk Stadion (DID)	luas tanah yang diadakan	meter	5000	1050	21.00%
8.	Rehabilitasi Lapangan Sepakbola	jumlah lapangan yang direhab	lapangan	1	0	0.00%
9.	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	jumlah alat yang diadakan	unit	2	2	100.00%

19.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat beberapa masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

- 1) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Potensi Atlet Daerah. Kegiatan ini tidak diselenggarakan karena jadwal menyesuaikan dengan POR SD Jawa Timur.
- 2) Fasilitasi Jumat Bersih Sehat Bersepeda (Jumat Bersapda). Kegiatan ini memiliki target 10 kali event sedangkan yang terealisasi 7 kali event. Hal ini karena pada pelaksanaannya ditunda dengan alasan ,

pertama dikarenakan Bupati tidak ada. Kedua karena seluruh OPD rapat SAKIP di Malang jadi kegiatan diundur pada bulan berikutnya, kemudian terakhir karena bulan Ramadhan jadi tidak terselenggara.

- 3) Pembangunan Lintasan Atletik (DPAL). kegiatan ini tidak dilakukan pelelangan karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan / 180 hari kalender. Sementara di aspek yang lain ada beberapa item pekerjaan atletik yang bersinggungan dengan pekerjaan sirkuit. Sehingga proses penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan lintasan atletik menunggu selesainya pelaksanaan pekerjaan pengembangan sirkuit dan lahan parkir.
- 4) Kegiatan pembangunan jalan di lingkungan Stadion Daerah dan Kegiatan Pembangunan Saluran Air Stadion Daerah. beberapa kegiatan dijadwal ulang karena mepetnya waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak sempurna hasil pekerjaannya. Solusinya adalah kegiatan-kegiatan tersebut dianggarkan kembali tahun berikutnya.
- 5) Pengadaan Tanah untuk Stadion Daerah (DID). Kegiatan ini tidak terselenggara 100% karena belum ada kesepakatan terkait dengan pemilik tanah terhadap harga yang disusun oleh tim appraisal pemerintah Kabupaten.
- 6) Rehabilitasi Lapangan Sepakbola tidak dilaksanakan karena lahan yang akan dikelola merupakan aset pemerintah provinsi jawa timur dan belum ada kesepakatan yang jelas mengenai hal tersebut.

20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

20.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase kegiatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase kegiatan yang sesuai SOP ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi kinerja sebesar 70% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.463.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.436.265.795,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 94%.

2) *Terwujudnya pariwisata yang berdaya saing, mendorong pengembangan potensi daerah yang berbasis karakteristik lokal dengan indikator kinerja prosentase peningkatan kunjungan wisatawan, prosentase peningkatan seni budaya menjadi daya tarik wisata dan prosentase peningkatan PAD pariwisata.*

Pada tahun 2018, prosentase peningkatan kunjungan wisatawan ditargetkan sebesar 40% dengan realisasi kinerja sebesar 40% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.1.040.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.925.385.250,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 89%.

Prosentase peningkatan seni budaya menjadi daya tarik wisata pada tahun 2018, ditargetkan ada 40% dengan realisasi kinerja 40% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.718.450.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.689.621.250,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 98%.

Sedangkan prosentase peningkatan PAD pariwisata pada tahun 2018, ditargetkan sebesar 30% dengan realisasi sebesar 30% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar

Rp. 4.716.023.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.569.276.750 dan tingkat capaian anggaran sebesar 97%.

20.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20

Evaluasi Hasil Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	80	80	100%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi ke luar daerah	kali	30	30	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran	Layanan	5	5	100%
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	80	80	100%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	10	10	100%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	Unit	1	1	100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	1	1	100%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	25	25	100%
III.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% sumberdaya aparatur yang berkualitas dan sesuai jabatannya	%	80	80	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	15	2	13%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah pegawai yang dibuatkan penyusunan kelas jabatan	orang	20	20	100%
IV.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	50	50	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen saki yang yang disusun	Dokumen	3	3	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	2	2	100%
V.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	% Peningkatan Promosi Pariwisata	%	40	40	100%
1.	Promosi dan Penyelenggaraan Kerapan Sapi Tingkat Kewedanan dan Kabupaten	Jumlah peserta lesap yang mengikuti kerapan sapi	orang	20	20	100%
2.	Promosi Pengembangan Destinasi Wisata (DID).	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	kali	1	1	100%
3.	Penyelenggaraan Jumiang Beach Festifal	Jumlah jenis kegiatan	Jenis k	4	4	100%
4.	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Pemilihan Kacong Cebbing dan Putra-Putri Batik Tingkat Kabupaten, Propensi dan Nasional.	Jumlah duta wisata duta batik yang terpilih	Orang	24	24	100%
5.	Penyelenggaraan Festival Tahun Baru Islam.	Jumlah kelompok yang berpartisipasi	Kelompok	23	23	100%
6.	Pembinaan Keterampilan Duta Wisata dan Duta Batik Daerah	Jumlah duta yang dibina	Orang	38	38	100%
7.	Pembinaan Jasa Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku jasa usaha yang dibina	Orang	40	20	50%
8.	Pegelaran Kesenian Tradisional Islami	Jumlah kelompok seni yang ikut event seni budaya islami	Kelompok	30	30	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
9.	Penyediaan/Pengembangan lahan Wisata Daerah	Jumlah lahan wisata daerah yang disediakan/ dikembangkan	Lahan	2	0	0%
10.	Promosi Pariwisata Daerah Melalui Media Publik.	Jumlah media promosi yang diproduksi	Unit	2	2	100%
VI.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	Prosentase objek wisata yang dikembangkan dan ditata	%	30	30	100%
1.	Pembangunan Gazebo Bujuk Adirasa di Destinasi Jumiang (PAK)(DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
2.	Pembangunan Toilet dan Moshollah di Destinasi Jumiang (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
3.	Pavingisasi Tempat Parkir di Destinasi Pantai Jumiang (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
4.	Pembangunan Menara Pantau Mangrove di Pantai Talang Siring (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
5.	Pembangunan Trak Mangrove di Pantai Talang Siring (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
6.	Pembangunan Gazebo Mangrove di Pantai Talang Siring (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
7.	Pengembangan dan Peningkatan Obyek Wisata (DID).	Jumlah sarpras pendukung pariwisata yang dibangun	sarpras	8	8	100%
8.	Pembangunan Land Mark Pantai Talang Siring (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
9.	Pengadaan Tempat Sampah di Pantai Talang Siring (PAK)(DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
10.	Pembangunan Land Mark Tebing Selatan dan Utara di Destinasi Pantai Jumiang (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
11.	Pembuatan Tangga di Destinasi Pantai Jumiang (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
12.	Pembuatan Pagar Pengaman di Destinasi Pantai Jumiang (PAK) (DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
13.	Pembuatan Tempat Sampah di Destinasi Pantai Jumiang (PAK)(DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
14.	Pengembangan Pintu Gerbang dan Pagar di Wisata Bukit Brokuh (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
15.	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan (PJU) di Destinasi Pantai Jumiang (DID)(PAK)(DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
16.	Pengembangan Pintu Gerbang dan Pos Tiket di Destinasi Pantai Jumiang (DID) Jadwal Ulang (PAK)(DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
17.	Penataan Kampung Batik Klampar (PAK)(DPAL).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
18.	Penataan Kampung Batik Podak (PAK)(Jadwal Ulang).	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
19.	Pengembangan/Penataan Destinasi Wisata Daerah	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
20.	Pengembangan/Penataan Destinasi Wisata Air	Jumlah lokasi	lokasi	1	1	100%
VII.	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Prosentase peningkatan seni budaya daerah layak saji	%	30	30	100%
1.	Pengembangan Pariwisata dan Penyelenggaraan Sape Sono'	Jumlah peserta kontes sape sono yang berpartisipasi	orang	20	20	100%
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Kesenian Musik Daul.	Jumlah kelompok seni musik daul yang berpartisipasi	Kelompok	20	20	100%
3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Seni dan Budaya Daerah Tingkat Nasional.	Jumlah jenis promosi seni budaya yang ditampilkan	Jenis k	3	3	100%
4.	Penyelenggaraan Rangkaian Hari Jadi Pamekasan	Jumlah rangkaian kegiatan hari jadi	Rangkaian	9	9	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
5.	Pelestarian Situs dan Budaya Daerah.	Jumlah situs dan museum yang dilestarikan	Unit	8	8	100%
6.	Fasilitasi Pameran Museum Tingkat Provinsi.	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	kegiatan	2	2	100%
7.	Fasilitasi Pengiriman Duta Seni Budaya Daerah.	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	kegiatan	3	3	100%
8.	Fasilitasi Festival Kesenian Pasisir Utara.	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang diatraksikan/ dipromosikan	Jenis k	3	3	100%
9.	Penyelenggaraan Festival Seni Unggulan Daerah.	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	buah	10	10	100%
10.	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Madura.	Jumlah kelompok seni dab budaya masyarakat yang dibina dan dilestarikan	Kelompok	18	18	100%
11.	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Partisipasi Pekan Seni Pelajar	Jumlah pelajar yang berpartisipasi dan difasilitasi untuk penyelenggaran pekan seni pelajar	pelajar	85	85	100%
12.	Promosi Pegelaran Seni Budaya Daerah.	Jumlah rangkaian pelaksanaan kegiatan	Rangkaian	3	3	100%
13.	Pemberdayaan Pegiat Seni dan Budaya Tradisional	jumlah pegiat seni dan budaya yang diberdayakan	Kelompok	20	20	100%
VIII.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisataaan	Jumlah sumber daya kepariwisataaan yang mendapat pembinaan lingkungan sosial	sumber daya	13	13	100%
1.	Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendukung Prowisata melalui Pembangunan Pintu Gerbang Desa Wisata batik podok (DBHCHT (PAK) (jadwal Ulang).	Jumlah lokasi sarpras pendukung pariwisata yang dibangun	lokasi	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
2.	Fasilitasi Promosi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Booklet Wisata dan Budaya Kabupaten Pamekasan DBHCT (PAK) (jadwal Ulang	Jumlah booklet wisata yang disediakan	unit	400	400	100%
3.	Fasilitasi Promosi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Peta Wisata di Destinasi Wisata Kabupaten Pamekasan DBHCT (PAK) (jadwal Ulang	Jumlah peta wisata yang disediakan	unit	20	20	100%
4.	Fasilitasi Promosi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Pengadaan Aplikasi Pamekasan Jempol DBHCT (PAK) (jadwal Ulang	Jumlah aplikasi promosi pariwisata	aplikasi	2	2	100%
5.	Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendukung Prowisata melalui Pembangunan Pergola di Pantai Talang Siring (DBHCT (PAK) (jadwal Ulang).	Jumlah lokasi sarpras pendukung pariwisata yang dibangun	lokasi	1	1	100%
6.	Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendukung Prowisata melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Anak di Pantai Talang Siring (DBHCT (PAK) (jadwal Ulang).	Jumlah lokasi sarpras pendukung pariwisata yang dibangun	lokasi	1	1	100%
7.	Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendukung Prowisata melalui Penataan Taman dan Fasilitasi Bermain di Destinasi Pantai talang Siring (DBHCT (PAK) (jadwal Ulang).	Jumlah lokasi sarpras pendukung pariwisata yang dibangun	lokasi	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
8.	Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata melalui Pembuatan Kolam Anak di Pantai Talang Siring (DBHCHT (PAK) (jadwal Ulang).	Jumlah lokasi sarpras pendukung pariwisata yang dibangun	lokasi	1	1	100%

20.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, terdapat permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Yaitu, sertifikasi jasa usaha pariwisata dan solusinya adalah dengan kerjasama dengan lembaga sertifikasi (DPA-L).

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

21.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya kualitas pengelolaan, kearsipan yang sederhana, cepat dan tepat dengan indikator kinerja prosentase jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku, Prosentase arsip pemerintah dan desa yang terkelola dengan baik di Depo arsip dan Prosentase retrieval arsip secara cepat dan tepat.*

Pada tahun 2018, Prosentase jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku, Prosentase arsip pemerintah dan desa yang terkelola dengan baik di Depo arsip dan Prosentase retrieval arsip secara cepat dan tepat ditargetkan sebesar 30% dengan realisasi kinerja sebesar 30% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.501.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.363.505.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 72%.

2) *Meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan indikator kinerja Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan pertahun.*

Pada tahun 2018, Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan pertahun ditargetkan ada 10% dengan realisasi kinerja sebanyak 10% dan tingkat capaian kinerja sebanyak 100%. Adapun Dukungan anggaran pada tahun 2018, sebanyak Rp.2.439.576.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.087.219.490,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 86%.

21.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.21

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	80	70	87,8%
1.	Penciptaan Arsip Visual	Jumlah Arsip Visual yang dikumpulkan	Lembar	3000	3000	100%
2.	Praktek sistem administrasi kearsipan pemerintah desa/kelurahan	Jumlah tenaga administrasi kearsipan yang mengikuti praktek kearsipan	Desa/Kelurahan	189	189	100%
II.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip daerah	Prosentase Dokumen/arsip dalam kondisi baik	%	80	70	87,8%
1.	Penyusunan Buku agenda daerah pamekasan	Jumlah buku kerja yang dicetak	Buku	1500	0	0%
2.	Pengadaan sarana penyimpanan kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan yang diadakan	Lemari	20	20	100%
3.	Pengolahan arsip statis	Jumlah arsip statis dengan kualitas baik	Arsip	3000	3000	100%
III.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Prosentase Pelayanan Informasi Kearsipan yang dapat diakses pengguna Informasi	%	80	80	100%
1.	Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta (DID)	Jumlah arsiparis yang mengikuti penyuluhan	SKPD/Unit Kerja	55	55	100%
2.	Sosialisasi database Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis (SIMARDI)	Jumlah operator SIMARDI yang mengikuti sosialisasi	SKPD/Unit Kerja	55	55	100%
IV.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terakomudir dengan baik	%	80	80	100%
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya arir dan listrik	Prosentase pelayanan jaringan internet dengan kondisi baik	Bulan	12	12	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang melaksanakan tugas kebersihan yang berkualitas baik	Bulan	12	12	100%
3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase rapat koordinasi yang terlaksana dengan baik	Bulan	12	12	100%
4.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Bulan	12	12	100%
V.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	80	80	100%
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase gedung kantor dengan kondisi baik	Bulan	12	12	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase kendaraan dinas/operasional dengan kondisi baik	Mobil	3	3	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	Bulan	12	12	100%
4.	Rehab ringan kantor Arsip (DPAL)	Prosentase gedung kantor arsip dengan kondisi baik	Gedung	1	1	100%
5.	Penyusunan DED Gedung Perpustakaan	Jumlah dokumen DED yang disusun	Dokumen	1	0	0%
VI.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas menjadi tanggungjawabnya	%	80	80	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prosentase aparatur yang mengikuti diklat dgn nilai baik	Bulan	12	12	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	Dokumen	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan perangkat daerah dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	80	80	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kerja	Jumlah penyusunan SAKIP dengan kualitas baik	Dokumen	5	5	100%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Dokumen	1	1	100%
VIII.	Program Pelayanan Perpustakaan	Prosentase jumlah pengunjung per tahun	Pengunjung	60,000	60,000	100%
1.	Pendukung Layanan Perpustakaan	Prosentase pelayanan perpustakaan dengan kualitas baik	Bulan	12	12	100%
2.	Operasional perawatan dan alih media koleksi perpustakaan	Prosentase Perawatan dan alih media koleksi perpustakaan dgn kualitas baik	Bulan	9	9	100%
3.	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah bahan pustaka yang disediakan	Buku	2200	2200	100%
4.	Operasional perpustakaan Keliling	jumlah desa/TBM/ponpes/ masjid yang mendapat pelayanan perpustakaan keliling	Titik Kunjungan	100	100	100%
IX.	Program Pembinaan, Pengembangan, Teknologi Informasi dan Promosi	Prosentase SDM Pengelola Perpustakaan yang berkualitas	%	80	80	100%
		Prosentase pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung minat baca	%	80	80	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan	jumlah pengelola perpustakaan desa yang mendapat pembinaan/ pelatihan	Orang	50	50	100%
2.	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan minat dan budaya baca	Orang	50	50	100%
3.	Promosi Bahan Pustaka	Jumlah pameran buku dan arsip yang dilaksanakan	Kali	1	1	100%
4.	Penyediaan Sarana Visualisasi Profil Perpustakaan Daerah dan kearsipan	Jumlah sarana visualisasi perpustakaan daerah dan kearsipan	Sarana	1	0	0%
5.	Pengadaan sarana Pendukung Pelayanan Perpustakaan Keliling (DPAL)	Jumlah sarana pendukung perpustakaan keliling yang diadakan	Roda 4 / Roda 2 / Roda 3	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	100%

21.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kendala teknis serta waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan program dana dari PAK, sehingga solusinya adalah dengan DPAL.

22. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Perikanan dan Kelautan.

22.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi operasional administrasi perangkat daerah yang efisien dan efektif dengan indikator kinerja prosentase kegiatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase kegiatan yang sesuai SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.170.345.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.130.074.690,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,56%.

2) *Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya, Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan persentase peningkatan produksi garam.*

Pada tahun 2018, persentase peningkatan produksi perikanan budidaya ditargetkan ada 5,00% dengan realisasi kinerja sebanyak 2,03% dan tingkat capaian kinerja sebanyak 40,68%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp. 949.920.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 933.416.047,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,26%.

Pada tahun 2018, persentase peningkatan produksi perikanan tangkap ditargetkan ada 3,00% dengan realisasi kinerja sebanyak 2,63% dan tingkat capaian kinerja sebanyak 87,67%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebanyak Rp. 275.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 253.159.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 92,06%.

Pada tahun 2018, persentase peningkatan produksi garam ditargetkan ada 7,00% dengan realisasi kinerja sebanyak 15,30% dengan tingkat capaian kinerja 218,57%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp. 1.491.680.000,00 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.243.254.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 83,35%.

3) *Meningkatnya SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing dengan indikator kinerja prosentase peningkatan kelas pelaku usaha perikanan.*

Pada tahun 2018, prosentase peningkatan kelas pelaku usaha perikanan ditargetkan ada 1,00% dengan realisasi tingkat capaian kinerja sebanyak 1,32% dengan tingkat capaian kinerja 132,00%. adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.312.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.310.816.800,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,46%.

22.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.22

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perikanan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100	100.00%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	85	76	89.41%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Layanan	5	5	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (PAK)	Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu disediakan	Unit	15	15	100.00%
2.	Pengadaan Peralatan Mebeuler (PAK)	Jumlah mebeuler yang mampu disediakan	Unit	38	38	100.00%
3.	Pembangunan Rumah Ibadah (Musholla) dan Perlengkapannya (Jadwal Ulang)	Jumlah rumah ibadah dan perlengkapannya yang dibangun	Unit	1 Unit dan 2 Unit Sarana Pendukung	1 Unit dan 2 Unit Sarana Pendukung	100.00%
4.	Pembangunan Ruangan Penyuluh Perikanan dan Perlengkapannya (Jadwal Ulang)	Jumlah ruangan penyuluh perikanan dan perlengkapannya yang dibangun	Unit	2 Unit dan 5 Unit Sarana Pendukung	2 Unit dan 5 Unit Sarana Pendukung	100.00%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Unit	5	5	100.00%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	Unit	5	5	100.00%
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Sarana pendukung	5	5	100.00%
8.	Rehabilitasi Sedang / Berat Area Parkir Dinas (Jadwal Ulang)	Jumlah area parkir dinas yang direhabilitasi	Unit	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas menjadi tanggung jawabnya	%	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur	10	10	100.00%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah dokumen penyusunan kelas jabatan	Dokumen	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan baik	Dokumen	4	4	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra) yang disusun dengan baik	Dokumen	1	1	100.00%
V.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1,369.76	787.59	57.50%
1.	Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah produksi benih air tawar	Ekor	180,000	202,000	112.22%
2.	Pengadaan Peralatan Perkolaman di Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Reguler)	Jumlah peralatan perkolaman yang mampu disediakan	Paket	1	1	100.00%
3.	Pengadaan Peralatan Pembenihan di Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Reguler)	Jumlah peralatan pembenihan yang mampu disediakan	Paket	1	1	100.00%
4.	Pelatihan Teknik Pembenihan Ikan Air Tawar	Jumlah pembudidaya ikan yang terlatih pembenihan ikan air tawar	Pembudi daya Ikan	130	130	100.00%
5.	Workshop Teknik Budidaya Ikan Lele	Jumlah peserta pelatihan teknik budidaya ikan lele	Pembudi daya Ikan	60	60	100.00%
6.	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti sosialisasi kemitraan pelaku usaha perikanan	Pembudi daya Ikan	180	180	100.00%
7.	Pengadaan Peralatan Panen di Balai benih Ikan (BBI)(DAK Reguler)	Jumlah peralatan panen yang mampu disediakan	Paket	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
8.	Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul di Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Reguler)	Jumlah calon induk unggul dan pakan calon induk unggul yang mampu disediakan	Paket	10	10	100.00%
9.	Percontohan Budidaya Air Tawar (lele) Sistem Bioflok (DAK Reguler)	Jumlah paket bantuan percontohan budidaya lele sistem bioflok yang diterima pokdakan	Paket	8	8	100.00%
10.	Percontohan Budidaya Ikan Patin (DAK Reguler)	Jumlah paket bantuan percontohan budidaya ikan patin yang diterima pokdakan	Paket	10	10	100.00%
11.	Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Pembudidaya Ikan	Jumlah sertifikat hak atas tanah pembudidaya ikan	Sertifikat	100	95	95.00%
VI.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	24,551.53	19,554.10	79.65%
1.	Optimalisasi Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang direhabilitasi / dipelihara dengan baik	Unit	7	7	100.00%
2.	Implementasi Teknologi Penangkapan Ramah Lingkungan	Jumlah nelayan yang terlatih mengoperasikan alat tangkap ikan ramah lingkungan	Nelayan	240	240	100.00%
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)	Jumlah sertifikat hak atas tanah bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan	Sertifikat	100	100	100.00%
4.	Fasilitasi Perlindungan Bagi Nelayan	Jumlah nelayan yang mengusulkan asuransi/perlindungan bagi nelayan	Nelayan	500	450	90.00%
VII.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah produksi garam	Ton	85,183.15	128,247.42	150.55%
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1,369.76	787.59	57.50%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Paket Percontohan Budidaya Cacing Sutera	Jumlah paket percontohan budidaya cacing sutera yang mampu disediakan	Paket	4	4	100.00%
2.	Fasilitasi Pengembangan Garam dan Turunannya	Jumlah petambak garam yang terlatih diversifikasi olahan garam dan turunannya	Petambak Garam	75	75	100.00%
3.	Rehabilitasi Saluran Tambak di Desa Tanjung (DAK Reguler)	Panjang saluran tambak yang direhabilitasi	Meter	168	168	100.00%
4.	Rehabilitasi Saluran Tambak di Desa Padelegan (DAK Reguler)	Panjang saluran tambak yang direhabilitasi	Meter	65	65	100.00%
5.	Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Lembung (DAK Reguler)	Panjang jalan produksi yang direhabilitasi	Meter	150	60	40.00%
6.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan	Jumlah komoditas produk perikanan yang diuji mutunya	Komoditas	7	7	100.00%
7.	Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Majungan (DAK Reguler)	Panjang jalan produksi yang direhabilitasi	Meter	550	550	100.00%
8.	Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Tanjung (DAK Reguler)	Panjang jalan produksi yang direhabilitasi	Meter	150	150	100.00%
9.	Study Kelayakan Pengembangan Budidaya Ikan air Tawar (Jadwal Ulang)	Jumlah dokumen kelayakan pengembangan ikan air tawar yang mampu disusun dengan baik	Dokumen	1	0	0.00%
VIII.	Program Pelayanan Usaha Informasi dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang naik kelas	Kelompok	3	3	100.00%
		Konsumsi ikan perkapita	Kg/Kpt/Thn	35.67	37.02	103.78%
1.	Fasilitasi Penyediaan Pelayanan Data dan Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun dengan baik	Dokumen	2	2	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Peningkatan Kinerja Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang diverifikasi administrasi dan kinerjanya	Kelompok	50	48	96.00%
3.	Promosi Produk Unggulan Perikanan	Jumlah promosi produk unggulan perikanan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	100.00%
4.	Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah nelayan yang mengusulkan ijin usaha perikanan	Nelayan	500	400	80.00%

22.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi hanya kegiatan studi kelayakan pengembangan budidaya ikan air tawar yang tidak dilaksanakan karena sudah masuk didalam masterplan kawasan agropolitan dan dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan masterplan kawasan agropolitan di BAPPEDA, sehingga solusinya adalah koordinasi dengan BKD untuk menghapus kegiatan tersebut di tahun 2019.

Tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya dikarenakan adanya perubahan cuaca yang ekstrem, kurangnya stock benih budidaya air tawar dan RTP pembudidaya yang berhenti, terjadinya kematian massal khususnya budidaya udang serta masih banyaknya penyakit *ice-ice* pada budidaya rumput laut. Solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Pendampingan serta penyuluhan kepada pembudidaya ikan mengenai introduksi teknologi dalam budidaya ikan secara intensif dalam mendorong peningkatan produksi.
- 2) Pemberian bimbingan teknis / workshop kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)

23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

23.1. Sasaran Strategis

1) Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator kinerja daerah produksi tanaman pangan meliputi (padi, jagung, ubi kayu, kedelai dan kacang tanah), produksi tanaman hortikultura meliputi (bawang merah, cabe rawit, cabe besar, jeruk, durian dan rambutan), produksi tanaman perkebunan meliputi (tembakau, tebu, kelapa, jambu mente dan cabe jamu)

Pada tahun 2018, arah kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian diarahkan pada produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Tanaman pangan yang meliputi (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah), tanaman hortikultura yang meliputi (bawang merah, cabe rawit, cabe besar, jeruk, durian dan rambutan), produksi tanaman perkebunan yang meliputi (tembakau, tebu, kelapa, jambu mente dan cabe jamu).

Pada tahun 2018, produksi padi ditargetkan 156.246 Ton dengan realisasi 136.570 Ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87%. Produksi jagung ditargetkan 100.201 Ton dengan realisasi 94.502 ton dan tingkat capaian kinerja 94%. Produksi ubi kayu ditargetkan sebesar 38.918 Ton dengan realisasi 29.186 Ton dan tingkat capaian kinerja 75%. Produksi kedelai ditargetkan 653 Ton dengan realisasi 1.221 Ton dan tingkat capaian kinerja sebesar 187%. Produksi kacang tanah ditargetkan 2.104 Ton dengan realisasi kinerja 5.698 Ton dan tingkat capaian kinerja 271%. Sementara untuk produksi tanaman hortikultura, bawang merah ditargetkan 14.690 Ton dengan realisasi kinerja 23.279 Ton dan tingkat capaian kinerja 158%. Produksi cabe rawit ditargetkan 21.584 Ton dengan realisasi capaian kinerja 39.336 Ton dan tingkat capaian kinerja 182%. Produksi cabe

besar ditargetkan 3.042 Ton dengan realisasi 1.954 Ton dan tingkat capaian kinerja 64%. Produksi jeruk ditargetkan 986 Ton dengan realisasi 552 Ton dan tingkat capaian kinerja 56%. Produksi durian ditargetkan 2.289 Ton dengan realisasi kinerja 1.721 Ton dan tingkat capaian kinerja 75%. produksi rambutan ditargetkan 816 Ton dengan realisasi 1.403 Ton dan tingkat capaian kinerja 172%. Dan produksi tanaman perkebunan, pada tembakau ditargetkan 6.228 Ton dengan realisasi 18.985 Ton dan tingkat capaian kinerja 305%. Produksi tebu ditargetkan 6.620 Ton dengan realisasi 6.180 Ton dan tingkat capaian kinerja 93%. Produksi kelapa ditargetkan 4.862 Ton dengan realisasi 4.776 Ton dan tingkat capaian kinerja 98%. Produksi jambu mete ditargetkan 108 Ton dengan realisasi 99 Ton dan tingkat capaian kinerja 92%. Dan produksi cabe jamu ditargetkan 473 Ton dengan realisasi 468 Ton dan tingkat capaian kinerja 99%.

23.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.23

Evaluasi Hasil Renja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
I.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendampingan Kelompok Tani	%	100	100	100 %
1.	Peningkatan SDM & Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM & penyuluhan pertanian	Tahun	1	1	100%
2.	Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan	Terlaksananya pembinaan poktan/gapoktan	Kelompok	13	13	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
II.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Unggulan	Kecamatan	13	13	100 %
1.	Promosi Atas Hasil Produksi pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jml promosi yang dilaksanakan	Kali	4	4	100%
III.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	4,7	4,7	100%
1.	Penyusunan Program Penyuluhan	Tersusunnya program penyuluh yg tersusun	Paket	1	1	100%
2.	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluh	Terselenggaranya monev, supervisi dan pelaporan penyuluhan	Tahun	1	1	100%
3.	Perbaikan BPP Galis (DAK)	Perbaikan BPP	Unit	1	0	0%
4.	Perbaikan BPP Proppo (DAK)	Perbaikan BPP	Unit	1	0	0%
IV.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	Capaian Luas Panen Tanaman Pangan, Luas Panen Hortikultura, Luas Panen Perkebunan	Ha	69.7507.12030.460	69.4026.84530.363	99 % 96 % 99 %
1.	Pembangunan Dam Parit Ds. Bangkes (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
2.	Pembangunan Dam Parit Ds. Bungbaruh (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
3.	Pembangunan Dam Parit Ds. Dempo Timur (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
4.	Pembangunan Dam Parit Ds. Kertagena Tengah 1 (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
5.	Pembangunan Dam Parit Ds. Kertagena Tengah 2 (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
6.	Pembangunan Dam Parit Ds. Majungan (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
7.	Pembangunan Dam Parit Ds. Sana Daja (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
8.	Pembangunan Dam Parit Ds. Potoan Daja (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%
9.	Pembangunan Dam Parit Ds. Kertagena Laok (DAK)	Terbuatnya Dam Parit	Unit	1	0	0%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
10.	Pembangunan JUT Ds. Ambender (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
11.	Pembangunan JUT Ds. Banyu Pelle (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
12.	Pembangunan JUT Ds. Branta Tinggi (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
13.	Pembangunan JUT Ds. Pamoroh (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
14.	Pembangunan JUT Ds. Tagengser (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
15.	Pembangunan JUT Ds. Blumbungan (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
16.	Pembangunan JUT Ds. Larangan Luar (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
17.	Pembangunan JUT Ds. Majungan (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
18.	Pembangunan JUT Ds. Palengaan Daja (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
19.	Pembangunan JUT Ds. Palengaan Laok (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
20.	Pembangunan JUT Ds. Pegantenan 1 (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
21.	Pembangunan JUT Ds. Pegantenan 2 (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
22.	Pembangunan JUT Ds. Rombuh (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
23.	Pembangunan JUT Ds. Tebul Barat 1 (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
24.	Pembangunan JUT Ds. Tebul Barat 2 (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
25.	Pembangunan JUT Ds. Teja Timur (DAK)	Terbuatnya JUT	Unit	1	0	0%
V.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/ha	10,95	10,75	98
1.	Budidaya Aneka Sayuran	Jmlh tanaman cabe rawit	Pohom	2011	2011	100%
2.	Peningkatan Bibit Unggul Pertanian (Bawang Merah)	Luas areal percontohan bawang merah	Ha	1.25	1.25	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
3.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan (PAK)	Luas pengembangan tanaman durian	Ha	10	10	100%
VI.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produktivitas Tanaman Pangan	Ton/ha	3,86	3,53	91 %
1.	Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Pengendalian OPT Tanaman Padi	Ha	518	518	100%
2.	Pengembangan Usaha Tani Padi di Lahan Kering	Tertanamnya padi varietas unggul	Ha	172	172	100%
VII.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan	Ton/ha	0,70	0,63	90
1.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan (Pengembangan Tanaman Kelapa)	Bertambahnya areal tanaman kelapa	Ha	32	32	100%
2.	Pengembangan Tanaman Cabe Jamu	Berkembangnya areal tanaman cabe jamu	Ha	3	3	100%
VIII.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Produktivitas Tembakau Madura	Ton/ha	0,58	0,54	93 %
1.	Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan GAP Tembakau (DBHCT Earmark)	Luas Penangkaran Tembakau	Ha	2.5	2.5	100%
2.	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Melalui Pelatihan Budidaya Tembakau (DBHCT Earmark)	Tersedianya konsep dan teknologi peningkatan produksi	Kelompok	13	13	100%
3.	Penerapan Inovasi Teknis Melalui Pengembangan Metode Pengujian Kadar Nikotin Tembakau (DBHCT Earmark)	Luas Areal Percontohan	Ha	1.5	1.5	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
4.	Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau Melalui Pembangunan Jalan Produksi Yang Dapat Dilalui Kendaraan roda Empat (DBHCT Earmark)	Terlaksananya pembangunan jalan produksi	Unit	7	7	100%
IX.	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Periode pelaksanaan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya brg dan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	100%
X.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	%	82	80	98 %
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Tahun	1	1	100%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Tahun	1	1	100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	Paket	1	1	100%
XI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	85	80	94 %
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengembangan SDM	Tahun	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Tersusunnya dokumen kelas jabatan	Dokumen	1	1	100%
XII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja Yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Terlaksananya perencanaan program kegiatan & laporan kinerja	Tahun	1	1	100%

23.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, terdapat permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Permasalahannya, adanya perubahan teknis dan penggunaan DAK yakni mengacu pada Peraturan Menteri No.10,1/PERMENTAN/RC.120/3/2018, sehingga solusinya adalah usulan kegiatan DAK harus mengacu pada Peraturan Menteri tersebut.

24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.

24.1. Sasaran Strategis

- 1) *Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi IKM dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Pamekasan, Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.*

Pada tahun 2018, prosentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Pamekasan ditargetkan sebesar 6,20% dengan realisasi kinerja 6,05% dan tingkat capaian kinerja 96,05%. Sedangkan prosentase pertumbuhan industri kecil dan menengah pada tahun 2018, ditargetkan 21,05% dengan realisasi realisasi kinerja sebesar 18,76% dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,38%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.845.706.755,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.709.565.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 83,90%.

- 2) *Meningkatnya volume transaksi perdagangan dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran.*

Pada tahun 2018, Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran ditargetkan ada 9,43% dengan realisasi kinerja sebanyak 8,86% dan tingkat capaian kinerja 97,08%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.698.571.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.690.660.200,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,87%.

- 3) *Meningkatnya kualitas layanan dasar pasar dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Pasar dan Persentase Sarana dan Prasarana Pasar yang Berfungsi dengan Baik.*

Pada tahun 2018, Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Pasar ditargetkan ada 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 88,50% dan tingkat capaian kinerja 88,50%. Sedangkan Persentase Sarana dan Prasarana Pasar yang Berfungsi dengan Baik ditargetkan ada 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 82,50% dan tingkat capaian kinerja 82,50%. Adapun dukungan anggaran dari kedua indikator tersebut sebesar Rp.10.897.243.052,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.209.846.448,44 dan tingkat capaian anggaran sebesar 38,63%.

- 4) *Meningkatnya kualitas barang layak konsumsi dengan indikator kinerja Persentase Barang Konsumsi yang Lolos Uji Layak Edar dan Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen terkait peredaran makanan dan minuman dalam kemasan.*

Pada tahun 2018, Persentase Barang Konsumsi yang Lolos Uji Layak Edar ditargetkan ada 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 89,25% dan tingkat capaian kinerja 89,25%. Sedangkan dan Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen terkait peredaran makanan dan minuman dalam kemasan ditargetkan ada 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 100% dan tingkat capaian kinerja 100%. Adapun dukungan anggaran pada dua indikator kinerja tersebut sebesar Rp.690.272.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.666.360.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,54%.

24.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.24

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
I.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri Kecil Menengah terhadap Industri olahan	%	6.18	6.18	100.00%
1.	Pembinaan produksi dan manajerial Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang kualitas produknya meningkat dengan adanya Gugus Kendali Mutu	IKM	160	160	100.00%
2.	Peningkatan kualitas produk Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan	IKM	30	30	100.00%
3.	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung sentra batik (DID 2016) (DPAL)	Jumlah sentra yang menyediakan sapras pemasaran batik bagi pengrajin batik yang semakin meningkat	Sentra	1	1	100.00%
II.	Program Pembinaan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	75	0	0.00%
1.	Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil dan Menengah (DBHCT Earmark)	Jumlah IKM yang memiliki HKI terdaftar di Kemenkumham semakin meningkat	IKM	35	0	0.00%
III.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase Kontribusi Sektor Perdagangan formal terhadap Perdagangan Eceran dan Besar	%	19.00	19.00	100.00%
1.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Frekuensi terjalannya kerjasama perdagangan antar daerah	Kali	2	2	100.00%
2.	Fasilitasi pemasaran bahan kebutuhan pokok	Frekuensi pelaksanaan pasar murah dengan harga terjangkau	Kali	2	2	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Fasilitasi promosi produk unggulan daerah	Frekuensi pelaksanaan promosi produk unggulan yang terfasilitasi	Kali	3	3	100.00%
4.	Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok	Frekuensi pelaksanaan pendataan dan monitoring harga sembilan bahan kebutuhan pokok	Kali	12	12	100.00%
5.	Pengendalian dan pengawasan distribusi barang bersubsidi dan barang-barang penting lainnya	Frekuensi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang bersubsidi dan barang penting lainnya	Kali	12	12	100.00%
6.	Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (2017) (DPAL)	Frekuensi pelaksanaan pendataan dan monitoring harga sembilan bahan kebutuhan pokok	Kali	12	12	100.00%
IV.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	75.00	75.00	100.00%
1.	Pembinaan pendapatan Pasar	Jumlah pasar & pertokoan yang pendapatannya terdata dalam data base dan aplikasi data pasar	Pasar & Pertokoan	13 & 2	13 & 2	100.00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Pasar	Jumlah pasar & pertokoan yang mendapatkan pendukung pelayanan administrasi pasar	Pasar & Pertokoan	13 & 2	13 & 2	100.00%
3.	Operasionalisasi dan pengembangan pengelolaan Pasar	Jumlah pasar & pertokoan yang mendapatkan operasionalisasi dan pengembangan pengelolaan pasar	Pasar & Pertokoan	13 & 2	13 & 2	100.00%
4.	Revitalisasi Pasar Tradisional (PAK)	Jumlah pasar yang direvitalisasi dengan sumber dana PAK	Pasar	2	0	0.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
5.	Revitalisasi Pasar (DAK Penugasan)	Jumlah pasar yang direvitalisasi dengan sumber dana DAK Penugasan	Pasar	1	1	100.00%
6.	Penyusunan Perencanaan Teknis dan Masterplan Pasar Kolpajung (2016) (DPAL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pasar	Dokumen	30	0	0.00%
7.	Biaya Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Tradisional (PAK 2017) (Jadwal Ulang)	Jumlah Pasar Tradisional yang diperluas	Pasar	1	1	100.00%
8.	Revitalisasi Pasar Tradisional (DID 2016) (DPAL)	Jumlah Pasar yang direvitalisasi dengan DID	Pasar	1	1	100.00%
9.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Peremajaan Pasar Kolpajung (PAK 2017) (DPAL)	Jumlah dokumen KPDBU yang dibuat	Dokumen	4	0	0.00%
10.	Pendukung Pelayanan Administrasi Pasar (2017) (DPAL)	Jumlah pasar & pertokoan yang mendapatkan pendukung pelayanan administrasi pasar	Pasar & Pertokoan	13 & 2	13 & 2	100.00%
11.	Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Tradisional (PAK)	Jumlah Pasar Tradisional yang diperluas	Pasar	1	0	0.00%
12.	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Kolpajung (2017) (Jadwal Ulang)	Jumlah Pedagang Pasar Kolpajung yang ditampung sementara	Pedagang	995	995	100.00%
13.	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Tradisional (2017) (DPAL)	Jumlah Pedagang Pasar Kolpajung yang ditampung sementara	Dokumen	1	0	0.00%
14.	Revitalisasi Pasar (PAK)	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Pasar	1	0	0.00%
V.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase tingkat Pengawasan dan Tertib Ukur	%	100.00	100.00	100.00%
1.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Frekuensi pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kali	12	12	100.00%
2.	Operasionalisasi dan pengembangan kemetrolgian daerah	Jumlah Alat ukur yang di UTPP dengan tertib	UTTP	1400	1400	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Koordinasi dan sinkronisasi jumlah penawaran dan permintaan komoditas penting	Jumlah sasaran yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penawaran dan permintaan tembakau	Pabrikasi & Kecamatan	5 & 13	5 & 13	100.00%
4.	Pengawasan dan monitoring pelaksanaan Tata Niaga komoditas penting (DID)	Jumlah gudang tembakau yang mendapatkan pengawasan dan monitoring	Gudang	60	60	100.00%
VI.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase wilayah Pemberantasan Barang kena Cukai	%	75	75	100.00%
1.	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCT earmark)	Jumlah wilayah dilaksanakannya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai	Kecamatan	13	13	100.00%

24.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) Minimnya para IKM yang menindaklanjuti hasil pelatihan secara manajerial
- 2) Peralatan yang dipergunakan oleh IKM tidak berbasis teknologi
- 3) Belum lengkapnya sarana pendukung sentra IKM
- 4) Tidak satupun pelaku IKM rokok lokal yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan HAKI
- 5) Promosi produk unggulan masih minim karena terkendala anggaran
- 6) Pelaksanaan pasar murah masih belum merata di setiap kecamatan karena minimnya anggaran
- 7) Masih sering ditemukan penjualan barang bersubsidi melampaui batas harga barang bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu

- 8) Tidak tercapainya target penerimaan retribusi di sebagian pasar tradisional
- 9) Sisa waktu setelah penetapan PAK yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar di tahun 2018
- 10) Sebagian besar anggaran Dana Alokasi Khusus tidak bisa direalisasikan karena rendahnya tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II (dua)
- 11) Rendahnya daya tarik investor untuk berinvestasi dalam hal Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di sektor Pasar Tradisional.
- 12) Realisasi anggaran penyusunan rencana teknis pembangunan pasar menunggu penyelesaian proyek fisik Pasar Waru
- 13) Masih banyak ditemukan makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi
- 14) Masih banyak masyarakat yang memiliki alat takar dan ukur yang tidak ditera ulang.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

- 1) Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap hasil pelatihan manajerial
- 2) Diupayakan adanya bantuan hibah alat bagi para pelaku IKM yang memenuhi syarat administratif
- 3) Revitalisasi secara bertahap terhadap sarana pendukung yang kurang lengkap melalui usulan permohonan Dana Alokasi Khusus ke Kemenperin RI.
- 4) Mendorong para IKM rokok lokal untuk memenuhi persyaratan/kelengkapan untuk mendapatkan HAKI
- 5) Adanya skala prioritas keikutsertaan pada event promosi produk unggulan
- 6) Mengupayakan pelaksanaan pasar murah di sebagian pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan

- 7) Adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan barang bersubsidi dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum penjual yang menjual di atas harga barang bersubsidi.
- 8) Memperkecil rasio piutang retribusi pasar dengan mengoptimalkan penagihan retribusi pasar oleh petugas retribusi
- 9) Dilakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan revitalisasi dan dilakukan persiapan lebih awal untuk dilakukan proses lelang
- 10) Mengusulkan melalui sumber dana APBD Perubahan sebagai pengganti dari sisa anggaran DAK yang tidak bisa direalisasikan.
- 11) Berusaha terus menerus untuk mengajak para investor lainnya bekerjasama dalam KPBU di sektor pasar dengan menawarkan bentuk kerjasama yang menarik bagi para investor
- 12) Segera merealisasikan proyek fisik Pasar Waru dan Pasar Kolpajung dengan menganggarkan sesuai kebutuhan baik melalui APBD Kabupaten, Provinsi, APBN maupun dengan system KPDBU.
- 13) Dilaksanakan Pelayanan Madu Koncer yang melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap barang-barang dan jasa yang beredar.
- 14) Penjadwalan secara periodik untuk melakukan tera ulang ke setiap kecamatan.

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

25.1. Sasaran Strategis

1. *Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Prosentase usulan stakeholders yang terakomodir didalam dokumen RKPD/RPJMD, Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, Prosentase SKPD dengan Perencanaan Strategis Berkualitas Baik, Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 % dan Prosentase data dan informasi yang terpenuhi dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah.*

Pada tahun 2018, pagu anggaran sebesar Rp.8.121.045.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.965.011.729,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 85,76%.

25.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.25

Evaluasi Hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} = \frac{6}{5} \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase dukunga pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times 100\%$
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lama / periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100.00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lama / periode pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	12	12	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan terpenuhi	%	100	100	100.00%
1.	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi SIM Administrasi Perkantoran Berbasis IT (PAK)	Jumlah Aplikasi SIM administrasi perkantoran yang dikembangkan	aplikasi	1	1	100.00%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	gedung	1	1	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	unit RA	2	2	100.00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	jenis	3	3	100.00%
			unit	18	18	100.00%
5.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (PAK)	Jumlah gedung kantor yang mendapat rehab sedang/berat	gedung /kantor	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang difasilitasi	%	100	100	100.00%
		Prosentase unit kerja yang memiliki kelas jabatan	%	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mendapat diklat formal	bulan	12	12	100.00%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	ASN	33	31	93.94%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6}{5} \times 100\%$
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	5	5	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100.00%
V.	Program Pengembangan Data / Informasi	Prosentase data kebutuhan perencanaan pembangunan yang terpenuhi	%	85	85	100.00%
		Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100.00%
1.	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang dianalisis	macam data informasi	1	1	100.00%
2.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen	macam data informasi	1	1	100.00%
3.	Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen profile daerah yang disusun	dokumen	2	2	100.00%
4.	Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Data dan Informasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	1	1	100.00%
5.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah sistem informasi yang disusun	sistem	1	1	100.00%
6.	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Profil kecamatan yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
7.	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)	Dokumen RAD SDGs	dokumen	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
VI.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Prosentase ketaatan terhadap tata ruang	%	60	60	100.00%
		Prosentase program dan kegiatan SKPD bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75 %	%	100	100	100.00%
1.	Analisa Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pamekasan (2012-2032)	Jumlah dokumen Peninjauan Kembali RTRW yang dianalisa	dokumen	1	1	100%
2.	Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya-Madura	Jumlah kerjasama percepatan pertumbuhan ekonomi yang dikoordinasikan	kerjasama	1	1	100.00%
3.	Fasilitasi perencanaan pengembangan kawasan pedesaan (PAK)	Jumlah pelaksanaan program pengembangan kawasan perdesaan	kawasan pedesaan	2	2	100.00%
4.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPMJD(PAK)	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
VII.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Prosentase program dan kegiatan SKPD bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75 %	%	100	100	100.00%
		Prosentase Jumlah SKPD yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times 100\%$
1.	Optimalisasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi	Jumlah pelaksanaan program kerja kelompok kerja air minum dan sanitasi yang di operasionalkan	desa sasaran	15	15	100.00%
2.	Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah program kotaku yang difasilitasi	Program	1	1	100.00%
3.	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP)	Jumlah lembaga sumber daya air yang mendapat pembinaan dan perkuatan	lembaga	2	2	100.00%
4.	Review Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah dokumen Reviu Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah dan yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
VIII.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	100	100,00%
		Prosentase SKPD dengan perencanaan strategis berkualitas baik	%	80	80	100,00%
1.	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
2.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah peserta musrenbang	orang	350	342	97.71%
3.	Penetapan RPJMD	Jumlah Perda yang ditetapkan	perda	1	1	100.00%
4.	Penyusunan rancangan RKPd	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
5.	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Musrenbang kecamatan, forum SKPD, Musrenbang Kabupaten	kegiatan	3	3	100.00%
6.	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
7.	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	2	2	100.00%
			eksemplar	220	220	100.00%
8.	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD yang disusun	dokumen	2	2	100.00%
			eksemplar	220	220	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
9.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
10.	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
11.	Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Program Perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi program perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	kali koordinasi	12	12	100.00%
12.	Penyusunan Laporan Kantor Staf Presiden	Jumlah laporan yang disusun	laporan	1	1	100.00%
13.	Evaluasi dan Pengendalian Dana APBN Melalui Aplikasi SIEVAP	Jumlah evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan	laporan	1	1	100.00%
			Kali	4	4	100.00%
14.	Penyusunan Perjanjaian Kinerja	Jumlah perjanjian kinerja yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100.00%
15.	Penyusunan Perubahan Perjanjaian Kinerja	Jumlah perubahan perjanjian kinerja yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100.00%
16.	Penyusunan / Reviu Indikator Kinerja Daerah	Jumlah dokumen indikator kinerja daerah yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
17.	Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (PAK)	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	54	54	100.00%
IX.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase program dan kegiatan SKPD bidang Perekonomian dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	%	100	100	100.00%
		Prosentase kebutuhan dokumen kajian perencanaan bidang perekonomian yang terpenuhi	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	kegiatan	1	1	100.00%
2.	Fasilitasi Pengembangan Agropolitan	Jumlah dokumen pengembangan agropolitan yang disusun	dokumen	2	2	100.00%
X.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Prosentase program dan kegiatan SKPD bidang sosial budaya dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	%	90	90	100.00%
		Prosentase kebutuhan dokumen kajian perencanaan bidang sosial budaya yang terpenuhi	%	100	100	100.00%
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan budaya	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	25	25	100.00%
2.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Iuran Daerah (PBID)	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	18	18	100.00%
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah Koordinasi dan monev yang dilaksanakan	kali	18	18	100.00%
4.	Koordinasi, Monitoring bidang pendidikan dan kesehatan	jumlah koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	kali	17	17	100.00%
5.	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	12	12	100.00%
6.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Jumlah laporan yang disusun	laporan	1	1	100.00%
			buku	30	30	100.00%
7.	Penyusunan	laporan Indikator	laporan	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
	Indikator Makro Sosial Ekonomi Daerah	Makro Sosial Ekonomi Daerah	buku	100	100	100.00%
XI.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase kebutuhan dokumen kajian penelitian dan pengembangan yang terpenuhi	%	100	100	100.00%
1.	Penyusunan kajian Penelitian Bidang pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kajian penelitian yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
2.	Penyusunan Kajian Penelitian Bidang Sosial Masyarakat	Jumlah dokumen kajian penelitian yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
3.	Penyusunan kajian Penelitian Bidang penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen kajian penelitian yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
4.	Penyusunan kajian Penelitian Bidang Teknologi Tepat guna	Jumlah dokumen kajian penelitian yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
5.	Pembentukan / Pembinaan Dewan Riset Daerah(PAK)	Jumlah dewan riset daerah yang dibentuk / dibina	lembaga	1	1	100.00%
6.	Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan (PAK)	Jumlah dokumen rencana kerja kelitbangan yang disusun	kegiatan	1	1	100.00%
XII.	Program Fasilitasi Pengelolaan Sumber Keuangan Pendukung Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	Prosentase program dan kegiatan SKPD bidang kewilayahan dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	%	100	100	100.00%
1.	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah koordinasi perencanaan dan evaluasi program 2bantuan keuangan provinsi yang dilaksanakan	kali	5	5	100.00%
2.	Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK	Jumlah Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK yang dilaksanakan	kali	5	5	100.00%

25.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1) Dalam hal pengadaan peralatan kantor tidak memiliki cukup waktu dan portal epurchasing ditutup lebih awal.
- 2) Penyusunan masterplan perpustakaan terpadu tidak ada dukungan kegiatan lanjutan dari SKPD dan wewenang dialihkan ke dinas sektoral
- 3) Penyusunan masterplan gedung kantor DPRD tidak ada kepastian lokasi bangunan dan wewenang dialihkan ke Dinas Sektoral

26. Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Keuangan Daerah.

26.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, Prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp. 18.360.209.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.784.220.584,00 dan tingkat capaian anggaran 85,97%.

2) *Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja rasio belanja modal terhadap APBD, prosentase SKPD dengan realisasi anggaran diatas 90% dan Prosentase Peningkatan Asset tetap tanah yang bersertifikat.*

Pada tahun 2018, indikator pertama, rasio belanja modal terhadap APBD ditargetkan sebesar 25%. Indikator kedua, prosentase SKPD dengan realisasi anggaran diatas 90% ditargetkan 95% dan indikator ketiga, prosentase peningkatan asset tetap tanah yang bersertifikat ditargetkan 65%. Adapun dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.21.045.928.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar 11.424.393.601,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 54,28%.

3) *Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator kinerja Peningkatan Penerimaan PAD*

Pada tahun 2018, Peningkatan Penerimaan PAD ditargetkan sebesar 2%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.2.711.071.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.585.595.250,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,13 %.

26.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.26

Evaluasi Hasil Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100.00	100.00%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Layanan yang ditangani	Pelayana n	5	5	100.00%
2.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang di akomodir	Perjalana n dinas	72	0	0.00%
3.	Pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Gardu yang di kelola	Gardi	354	354	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	100.00	100.00%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (PAK)	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	buah kendaraa n	6	6	100.00%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (PAK)	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Konidisi Baik	paket	1	1	100.00%
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	item	6	6	100.00%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik	gedung kantor	3	3	100.00%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit	6	6	100.00%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	item	4	4	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
7.	Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan (DPAL)	Jumlah sertifikat yang dihasilkan	sertifikat	42	0	0.00%
8.	DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah (PAK)	Jumlah DED yang dibuat	buah	1	0	0.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya	%	75	75.00	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dengan baik	ASN	27	31	114.81%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Kelas Jabatan yang tersusun dengan baik	dokumen	1	1	100.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	100.00	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	dokumen	4	4	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100.00%
1.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun 2019	Jumlah rancangan regulasi yang disusun	regulasi	2	2	100.00%
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018	Jumlah rancangan regulasi yang disusun	regulasi	2	2	100.00%
3.	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun 2018	Jumlah rancangan regulasi yang disusun	regulasi	2	2	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
4.	Penunjang Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan	Jumlah SKPD penerima hibah, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembiayaan yang tertangani	SKPD	7	7	100.00%
5.	Pembuatan Buu Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahun 2018 (DPAL)	jumlah buku pedoman penatausahaan keuangan yang dihasilkan	ekslampar	175	175	100.00%
6.	Pembuatan buku pedoman dan sosialisasi Penyusunan RKA PAPBD 2018 dan APBD 2019	jumlah buku pedoman penatausahaan keuangan yang dihasilkan	ekslampar	175	175	100.00%
7.	Pelaksanaan Penatausahaan APBD dan PAPBD 2018	Jumlah koordinasi penatausahaan APBD dan P-APBD yang difasilitasi	SKPD	47	47	100.00%
8.	Pendukung Pengelolaan Bagi Hasil dari Pusat dan Propinsi	Jumlah koordinasi pengelolaan pendapatan DBH yng difasilitasi	dana bagi hasil	2	2	100.00%
VI.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase tanah bersertifikat	%	57	57.00	100.00%
		prosentase penatausahaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	%	60	60.00	100.00%
		prosentase perangkat daerah yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	%	60	60.00	100.00%
1.	Pengelolaan dan Pengendalian Aset Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	47	47	100.00%
2.	Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Asset daerah	jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan	sertifikat	20	20	100.00%
3.	Penyusunan Standart Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019	buku standart satuan harga yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
4.	Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Aset daerah	Jumlah papan nama yang dibuat	buah	25	25	100.00%
5.	Inventarisasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang diinventarisir	SKPD	47	47	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
6.	Pembuatan Sarana Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Sarana Pengamanan aset yang di buat	sarana	3	3	100.00%
7.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	47	47	100.00%
8.	Sosialisasi dan Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan sosialisasi	SKPD	47	47	100.00%
9.	Penyimpanan Gudang Barang, Penyimpanan Dokumen dan Berharga	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	47	47	100.00%
10.	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Pengelolaan Arsip	Jumlah SKPD yang dikelola	SKPD	47	47	100.00%
11.	Sewa Lahan PT KAI (persero) Eks. PJKA Pamekasan	Jumlah lahan PT KAI yang di sewa	lahan/Bidang	1	1	100.00%
12.	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah (PAK)	Jumlah Lahan Tanah aset daerah yang diadakan	bidang	5	3	60.00%
13.	Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMASDA) Online (PAK)	jumlah SIMASDA yang dikembangkan/dikelola	Aplikasi/SKPD	1	1	100.00%
14.	Fasilitasi Pengelolaan/Penyelesaian Dokumen Administrasi Tanah Aset Daerah (PAK)	Dokumen Administrasi tanah yang diselesaikan	Sertifikat	10	0	0.00%
VII.	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00%
1.	Penyediaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan yang di selesaikan	dokumen	7	7	100.00%
2.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Daerah	Jumlah Laporan realisasi anggaran yang disusun	dokumen /eks	1/500	1/500	100.00%
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah regulasi yang disusun	regulasi/ekslampar	1 / 1.400	1 / 1.400	100.00%
4.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi keuangan Daerah	Jumlah software yang dipelihara dalam kondisi baik	software	1	1	100.00%
5.	asistensi Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang melakukan asistensi	SKPD	47	47	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
6.	Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah SKPD penghasil PAD yang dievaluasi	SKPD	10	10	100.00%
7.	Rekonsiliasi Nilai Aset, Penyertaan Modal dan Penyelesaian Piutang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dengan baik	SKPD	47	47	100.00%
VIII.	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Prosentase terselenggara prosedur pengelolaan keuangan daerah	%	100	100.00	100.00%
		Prosentase OPD dengan realiasi anggaran diatas 90%	%	*	*	*
1.	Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Pegawai	jumlah PNS yang dikelola	PNS	7362	6792	92.26%
2.	Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan'	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen /ekslamp a	1/ 175	1 / 175	100.00%
3.	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK	Jumlah SKPD penerima DAK yang dievaluasi	SKPD	13	13	100.00%
4.	Pembinaan Bendahara Pengeluaran Terhadap Surat Pertanggungjawaban GU Nihil dan Pembinaan Pengelolaan Anggaran Kas (PAK)	Jumlah SKPD yang mengikuti pembinaan dan evaluasi	SKPD	47	47	100.00%
IX.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	prosentase pajak dan retribusi daerah yang diperoleh	%	25	25.00	100.00%
1.	Validasi Potensi Pajak Lainnya dan retribusi	Jumlah validasi potensi pajak yang ditangani	WP	550	550	100.00%
2.	Monitoring dan Pengendalian Pemungutan Pajak	Jumlah jenis pajak yang terkendali	jenis pajak	11	11	100.00%
3.	Pengembangan BASIC Data SISMOP dan SIG PBB	Jumlah Sbjek pajak yang ditangani	WP	30000	30000	100.00%
4.	Pengendalian Verifikasi BPHTB	Jumlah survei lokasi dan verifikasi BPHTB	WP	1670	1670	100.00%
5.	Cetak Dokumen PBB	Dokumen PBB yang di susun	dokumen	3	3	100.00%
6.	Penetapan Dasar Zona Nilai Tanah	Jumlah peringkat zona tanah yang ditetapkan	zona	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
7.	Peningkatan Sistem Informasi Pajak	Jumlah wajib pajak yang tangani	WP	7	7	100.00%
X.	Pengelolaan Penagihan dan Pelayanan Keberatan	Prosentase objek pajak dan retribusi yang bisa ditagih	%	25	25.00	100.00%
1.	Fasilitasi Operasional Peningkatan PAD (PBB Pertambangan)	Jumlah jenis PAD yang terfasilitasi	jenis Pajak	11	10	90.91%
2.	Intensifikasi Pemungutan Retribusi dan Pajak Lainnya	Jumlah Jenis Pajak yang ditangani	jenis pajak	1	1	100.00%
3.	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah wilayah pengoptimalan PBB	Kelurahan	11	11	100.00%
4.	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi PBB	Jumlah Aplikasi PBB dalam kondisi baik	aplikasi	1	1	100.00%
5.	sosialisasi PBB dan BPHTB	Jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi	WP	450	450	100.00%

26.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan yaitu:

- 1) Dalam penyelesaian kepemilikan tanah Pemkab Pamekasan (DPAL) dokumen hak milik belum lengkap secara keseluruhan serta koordinasi dengan BPN kurang tercapai.
- 2) DED pembangunan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (PAK) karena waktu untuk tender kegiatan tidak terpenuhi.

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

27.1. Sasaran Strategis

1) *Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP*

Pada tahun 2018, Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi kinerja 70% dan tingkat capaian kinerja sebesar 93,33%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.545.539.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.488.686.969,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 89,58%.

2) *Meningkatnya kompetensi SDM dan profesionalitas ASN yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.*

Pada tahun 2018, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan sebesar 3% dengan realisasi kinerja 2,62%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 87,33%. Adapun dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.251.020.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.747.089.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 59,72%.

3) *Tata kelola penempatan kepegawaian yang berkualitas dengan indikator kinerja Prosentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi*

Pada tahun 2018, Prosentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi ditargetkan sebesar 85% dengan realisasi kinerja sebesar 75% dan tingkat capaian kinerja sebesar 88,24%. Adapun dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.70.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.51.265.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 73,24 %.

4) *Kesejahteraan ASN yang berorientasi pada karier Pegawai dengan indikator kinerja Prosentase ASN yang mendapatkan penghargaan/kepankangan/ karier*

Pada tahun 2018, Prosentase ASN yang mendapatkan penghargaan/kepankangan/ karier ditargetkan sebesar 85%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.318.690.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.165.819.900,00 dan realisasi anggaran sebesar 52,03%.

5) *Perekrutan ASN yang berkualitas berdasarkan Data/Informasi kepegawaian, pembinaan dan tata kelola administrasi kepegawaian yang berkualitas dengan indikator kinerja Prosentase Rekrutmen ASN Sesuai Kompetensi*

Pada tahun 2018, Prosentase Rekrutmen ASN Sesuai Kompetensi ditargetkan sebesar 75%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.354.242.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.101.527.000 dan tingkat capaian anggaran mencapai 81,34%.

27.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.27

Evaluasi Hasil Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi / Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100.00%
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100.00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Periode Pelayanan administrasi Perkantoran	bulan	12	12	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100.00%
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	gedung	1	1	100.00%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	unit roda 4	3	3	100.00%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	item / unit	4 / 10	4 / 10	100.00%
III.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Periode pelaksanaan Diklat	bulan	12	12	100.00%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan	Tersusunnya dokumen kelas jabatan	dokumen	1	1	100.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	90	90	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja.	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dg kualitas baik	dokumen	5	5	100.00%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen dalam perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100.00%
V.	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Manajerial	%	3	2.25	75.00%
1.	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II / Pratama.	Jumlah saselon II yg mengikuti Diklat PIM II	orang	1	1	100.00%
2.	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III / Administrator.	Jumlah saselon III yg mengikuti Diklat PIM III	orang	5	5	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV / Pengawas.	Jumlah saselon IV yg mengikuti Diklat PIM IV	orang	10	10	100.00%
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Diklat Teknis/Fungsional	%	3	3	100.00%
1.	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PNS yg mengikuti Diklat Prajabatan	orang	25	0	0.00%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Daerah.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	orang	120	120	100%
3.	Penilaian Kompetensi (Competence Assessment).	Jumlah PNS yang memenuhi syarat diketahui kompetensinya	orang	13	0	0.00%
VII.	Program Pengelolaan Mutasi Kpegawaian	Prosentase PNS Yang di Mutasi dan Pensiun	%	92	14.02	15.24%
1.	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.	Jumlah PNS yang dimutasi dan pensiun	orang	7535	1,149	15.25%
VIII.	Program Pengelolaan Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala Kpegawaian	Prosentase PNS Yang Mengajukan Administrasi	%	90	83.92	93.24%
1.	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai.	Jumlah PNS yang mengajukan administrasi	orang	5600	5,222	93.25%
IX.	Program Peningkatan Pengembangan Karier	Prosentase Jabatan Yang Diisi Sesuai Kompetensi	%	85	56.67	66.67%
1.	Pengembangan Karier dan Promosi ASN.	Periode koordinasi pengembangan karier dan promosi ASN	bulan	12	12	100.00%
2.	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS.	Jumlah dokumen DUK yang disusun	dokumen	67	67	100.00%
3.	Pelaksanaan Seleksi/ Mutasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.	Jumlah jabatan yang diseleksi	Jabatan	4	0	0.00%
X.	Program peningkatan kualitas data dan pengendalian Sumber Daya Aparatur	Prosentase Data / Informasi Kpegawaian yang dikelola dengan Baik	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pengadaan mesin Absensi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah mesin/absensi yang diadakan	unit	77	66	85.71%
2.	Pengadaan CPNS	Jumlah peserta test CPNS yang diseleksi	orang	7000	10,086	144.09%
3.	Pendukung Pelayanan Administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P).	Jumlah pengadaan blanko isian LP2P	exemplar	22500	22,500	100.00%
4.	Pengelolaan Formasi Aparatur Sipil Negara.	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Formasi ASN	bulan	12	13	108.33%
5.	Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Sipil Negara.	Jumlah ASN yang menerima pembinaan	orang	75	75	100%
6.	Publikasi Informasi Kepegawaian.	Jumlah data kegiatan yang diinformasikan	data	24	52	216.67%
7.	Penyusunan Blanko Penilaian Prestasi Kerja.	Jumlah dokumen yang difasilitasi	exemplar	25000	25,000	100.00%
8.	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	Simpeg	1	1	100.00%

27.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

- 1) Fasilitasi pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak terealisasi pada tahun anggaran 2018.
- 2) Penilaian kompetensi bagi PNS belum terealisasi pada tahun anggaran 2018.
- 3) Pelaksanaan seleksi/mutasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama belum terealisasi pada tahun anggaran 2018.
- 4) Jumlah peserta yang mendaftar dalam pengadaan CPNS melebihi target.
- 5) Jumlah yang melakukan koordinasi formasi pada pengelolaan formasi Aparatur Sipil Negara melebihi target.

6) Dalam hal publikasi dan informasi, jumlah data yang diinformasikan di website melebihi target.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

- 1) Menjadwal ulang pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun anggaran 2019.
- 2) Menjadwal ulang penilaian kompetensi PNS pada tahun anggaran 2019.
- 3) Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan seleksi/mutasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada tahun anggaran 2019.

28. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pamekasan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

28.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Prosentase Kepuasan Pegawai/Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan.*

Pada tahun 2018, Prosentase Kepuasan Pegawai/Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan ditargetkan sebesar 87% dengan realisasi kinerja 87% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.1.187.280.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.923.883.454,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 78%.

2) *Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, Prosentase Perangkat Daerah Counterpart yang telah melaksanakan SPIP dengan level 3 (terdefinisi), Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP Minimal B (Baik).*

pada tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP ditargetkan ada 3 level dengan realisasi kinerja sebanyak 2 level dan tingkat capaian kinerja sebanyak 67%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebanyak Rp.210.390.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.179.060.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 85%.

Pada tahun 2018, Prosentase Perangkat Daerah Counterpart yang telah melaksanakan SPIP dengan level 3 (terdefinisi) ditargetkan ada 70% dengan realisasi kinerja sebanyak 70% dan tingkat capaian kinerja sebanyak 100%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.724.810.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.481.497.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 66%.

Pada tahun 2018, Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti memperoleh anggaran sebesar Rp.1.562.640.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.027.477,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 66%.

Pada tahun 2018, Prosentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP Minimal B (Baik) ditargetkan ada 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran pada tahun 2018, sebesar Rp.327.925.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.256.465.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 78%.

28.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.28

Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Prosentase Dukungan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi	%	100	100	100%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lama / Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12	12	100%
2.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Bulan	12	12	100%
II.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Prosentase sarana dan prasarana aparatur kondisi baik dan terpenuhi	%	80	80	100%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Item	8	8	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Unit	1	1	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	Unit	3	3	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Prosentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100%
5.	Rehab sedang gedung kantor (PAK)	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	1	1	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Prosentase Sumber Daya Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan substantif	%	80	80	100%
		2. Prosentase unit kerja yang telah menyusun kelas jabatan	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Lama / Periode Pendidikan dan pelatihan formal yang difasilitasi	Bulan	12	12	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan (PAK)	Jumlah Dokumen kelas jabatan yang disusun sesuai pedoman	Dokumen	1	1	100%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja disusun sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	Dokumen	5	5	100%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen rencana strategis disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Dokumen	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Pelaksanaan revidi laporan keuangan daerah	Dokumen laporan keuangan disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	LHR	1	1	100%
4.	Pelaksanaan revidi laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pamekasan	Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah	LHR	1	1	100%
5.	Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	LHE	45	45	100%
6.	Optimalisasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	Lama/periode penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Bulan	12	12	100%
V.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah temuan/rekomendasi APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	97.5	92.5	95%
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan	Obrik	87	91	105%
2.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah kasus aduan dan temuan hasil pengawasan yang selesai ditangani	kasus	60	36	60%
3.	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	Jumlah koordinasi pengawasan dan pemutakhiran hasil pengawasan yang dilaksanakan	Kali/Tahun	4	4	100%
VI.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kapabilitas APIP	Level	3	2	67%
1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PAK)	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan yang bersertifikasi penjenjangan dan teknis substansi pengawasan	Aparatur	24	24	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VII.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	Prosentase pelanggaran pegawai	%	0.07	0.08	114%
1.	Pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan APBD dan Perubahan APBD	Jumlah RKA OPD / Unit Kerja yang direviu	OPD / Unit Kerja	54	54	100%
2.	Asistensi pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang diasistensi	Paket	5	0	0%
3.	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	Lama / Periode pengelolaan UPP	Bulan	12	12	100%
4.	Pelaksanaan evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi maturitas SPIP	OPD	13	10	77%
5.	Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (PAK)	Jumlah Petugas pengelola unit pengendali gratifikasi	orang	25	25	100%

28.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kondisi SDM yang belum memadai sehingga terdapat beberapa elemen yang belum terpenuhi
- 2) Terdapat LHP yang terbit pada tanggal 16 Desember 2018 sehingga waktu penyelesaian tindak lanjut kurang memadai
- 3) Berdasarkan register pengaduan, jumlah aduan dan kasus yang masuk hanya sebanyak 36 aduan/kasus.
- 4) Mou sudah berakhir dan sejak tahun 2018, BPKP hanya sebagai Quality Assurance sehingga kegiatan ini disatukan dengan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala

Adapun solusi yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan BPKP dan kompetensi SDM melalui diklat dan bimtek

- 2) Rekomendasi yang belum tuntas akan dijadikan target pada tahun selanjutnya
- 3) Indikator kinerja kegiatan diubah menjadi prosentase kasus kasus aduan dan temuan hasil pengawasan yang selesai ditangani.

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah

29.1. Sasaran Strategis

1) *Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP*

Pada tahun 2018, *Prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP* ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.802.276.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.768.716.781,00 dan tingkat capaian anggaran 95,82%.

2) *Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan dengan indikator kinerja Prosentase Konflik SARA di masyarakat yang difasilitasi.*

Pada tahun 2018, *Prosentase Konflik SARA di masyarakat yang difasilitasi* ditargetkan sebesar 10% dengan realisasi kinerja 10%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.811.300.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.811.300.500,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

3) *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dengan indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik dan Persentase partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*

Pada tahun 2018, *Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik* ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi 80% dan tingkat capaian kinerja sebesar 106,67%. Adapun dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.954.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.954.000.000,00 dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.

Sedangkan Persentase partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi kinerja 85% dan tingkat capaian kinerja sebesar 106,25%. Adapaun dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 954.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.954.000.000,00 dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.

29.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.29

Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terakomodir Dengan Baik	persentase	100	100	100.00%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diakomodir dan difasilitasi	kali	48	48	100.00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah layanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	layanan	7	7	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	unit	4	4	100.00%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	gedung kantor	2	2	100.00%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas/ Operasional	mobil dinas	3	3	100.00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	34	34	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang Mempunyai LatarBelakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	Aparatur	12	12	100.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas baik	persentase	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	jumlah dokumen (RKT, LKPJ, PK, LAKIP) yang ada	dokumen	4	4	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	dokumen	1	1	100.00%
3.	pengelolaan/ Pengembangan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi	jumlah Aplikasi yang dikelola (Simpede, Simkeuda, Tepra, Website)	Aplikasi	4	4	100.00%
4.	Penyusunan Kelas Jabatan	jumlah ASN yang mempunyai Kelas Jabatan	dokumen	1	0	0.00%
V.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peninkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan	Prosentase	80	85	106.25%
1.	Pemantapan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik	Jumlah Peserta Pendidikan Pendahuluan bela negara bagi Siswa/siswi SLTA/Sederajat	Peserta	100	100	100.00%
2.	Pemantapan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Bagi Santri dilingkungan Pondok Pesantren	Jumlah Peserta Pendidikan Pendahuluan bela negara bagi Siswa/siswi SLTA/Sederajat	Peserta	100	100	100.00%
3.	Pemantapan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Bagi Ustad dan Ustadzah VIII dan IX	jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan bagi santri di lingkungan pondok pesantren	Peserta	450	450	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$
4.	Pemantapan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Bagi Pelajar	Jumlah Peserta Pemantapan Wawasan Kebangsaan terhadap Ustadz/ustadiah	Peserta	450	450	100.00%
5.	Diklat Pembentukan Kader Bela Negara	Jumlah Peserta Diklat Pembentukan Kader Bela Negara	Peserta	100	100	100.00%
6.	Gelar Kompetensi Pengetahuan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Gelar Kompetensi Pengetahuan Wawasan Kebangsaan	Peserta	800	800	100.00%
7.	Pemahaman HAM Bagi Wanita	Jumlah Peserta Pemahaman HAM bagi Wanita	Peserta	100	100	100.00%
8.	Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara	Jumlah Peserta Upacara	Peserta	500	500	100.00%
9.	Pengiriman Delegasi Lomba Cerdas Cermat Pancasila ke Propinsi Jawa Timur	Jumlah Peserta Delegasi Lomba Cerdas Cermat Pancasila ke Propinsi Jawa Timur	Peserta	9	9	100.00%
VI.	Program Kewaspadaan Nasional	Prosentase Pencegahan potensi Konflik	*	80	80	100.00%
1.	Penunjang Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	4	4.00	100.00%
2.	Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	4	4.00	100.00%
3.	Penunjang kegiatan komunitas intelegen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	4	4.00	100.00%
VII.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase Ormas, PARPOL, dan LSM yang aktif	Prosentase	75	75	100.00%
1.	Fasilitasi pemberian bantuan Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang difasilitasi	kali	4	4	100.00%
2.	monitoring pelaksanaan pemilihan umum Gubernur/ wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Legislatif	putaran	2	2	100.00%
3.	Sosialisasi Kebijakan Peraturan tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pilpres/Pilkada bag Pemilih Pemula	Jumlah Peserta yang ikut sosialisasi	Peserta	800	800	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
4.	Pembinaan LSM Dalam Rangka Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah LSM yang difasilitasi	LSM aktif	110	100	90.91%
5.	Pembinaan Badan/Lembaga dan Ormas	Jumlah Badan/Lembaga/ Ormas yang difasilitasi	Ormas	115	100	86.96%
6.	Fasilitasi Koordinasi Forum LSM	Jumlah Ormas/lembaga/badan yang di fasilitasi	kali	4	4	100.00%

29.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan, namun permasalahan tersebut tidak terlalu signifikan karena hanya terkait masalah kurangnya koordinasi penyusunan kelas jabatan dan solusinya bisa dijadwal ulang pada tahun anggaran 2019.

30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

30.1. Sasaran Strategis

1) *Terlaksananya fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase indeks kepuasan masyarakat.*

Pada tahun 2018, prosentase indeks kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.648.189.750,00 dengan realisasi sebesar Rp.478.646.376,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 74%.

2) *Menurunnya resiko bencana dengan indikator kinerja prosentase peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana.*

Pada tahun 2018, prosentase peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 90% dan tingkat capaian kinerja sebesar 90%. Dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.530.164.150,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.879.146.650,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 57%.

3) *Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat siaga, tanggap dan transisi bencana dengan indikator kinerja prosentase korban terdampak bencana yang ditangani dan prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap.*

Pada tahun 2018, prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.692.616.837,00 dengan realisasi sebesar Rp.361.294.000,00, dan tingkat capaian realisasi anggaran 52%.

4) *Meningkatnya pemulihan pasca bencana dengan indikator kinerja prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan.*

Pada tahun 2018, prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 95%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 95%. Dukungan anggaran yang disediakan sebesar Rp.11.525.622.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.419.269.000,00, dan tingkat capaian anggaran 73%.

30.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.30

Evaluasi Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100	100%
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah	orang	22	22	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang di Fasilitas	layanan	5	5	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100%
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik	gedung	1	1	100%
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	unit	9	9	100%
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kondisi Baik	unit	22	22	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	ASN	20	20	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan pegawai (PAK)	Jumlah dokumen yang disusun	ASN	25	25	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase penyusunan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah Laporan yang di susun	macam	5	5	100%
2.	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja (PAK)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan capaian kinerja	dokumen	1	1	100%
V.	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam	Prosentase penanganan penanggulangan korban bencana alam	%	100	90	90%
1.	Operasional Penanggulangan bencana di Pamekasan	Jumlah peserta penanggulangan bencana dalam memberikan pelayanan Tanggap Darurat Bencana	orang	48	48	100%
2.	Pengadaan Peralatan Pengeboran (PAK)	Jumlah peralatan pengeboran dalam kondisi baik	set	1	0	0%
3.	Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	Jumlah Desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	desa/kel.	5	5	100%
4.	Review rencana kontinjensi (Renkon) bencana banjir (Jadwal Ulang)	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang di susun	dokumen	1	1	100%
5.	Fasilitasi Gladi Posko bencana (PAK)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Gladi Posko	orang	200	200	100%
6.	Peningkatan kemampuan dasar TRC dan relawan penanggulangan bencana (PAK)	Jumlah peserta Peningkatan Kemampuan TRC dan Relawan Penanggulangan Bencana dalam Menjankan peran tugas dan fungsinya	orang	65	65	100%
7.	Pembuatan saluran pembuang pencegah banjir (PAK)	Jumlah saluran pembuang dalam kondisi baik	lokasi	1	1	100%
8.	Pengadaan Peralatan Search and Rescue (SAR) (PAK)	Jumlah Peralatan SAR dalam kondisi baik	set	2	2	100%
VI.	Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Prosentase Penanganan Kedaruratan dan penyaluran logistik	%	100	100	100%
1.	Operasional Gedung logistik dan peralatan	Jumlah gudang logistik dan peralatan dalam kondisi baik	gedung	1	1	100%
2.	Pengadaan pipanisasi daerah kering kritis (DPA-L)	Jumlah Lokasi yang diberi saluran Pipanisasi	lokasi	2	1	50%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VII.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Paska Bencana)	Prosentase Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	95	95%
1.	Rekonstruksi penanganan pasca bencana	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	lokasi	12	5	42%
2.	Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana	Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	dokumen	1	1	100%
3.	Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana (DPA-L)	Jumlah Lingkungan dalam kondisi baik	lokasi	8	8	100%
4.	Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana (HIBAH PUSAT) (Jadwal Ulang)	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	lokasi	7	7	100%
5.	Pembuatan tebing penahan longsor (PAK)	Jumlah tebing dalam kondisi baik	lokasi	1	1	100%
6.	Pendukung pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana yang bersumber dari dana hibah pusat (PAK)	Jumlah Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi yang di Fasilitas	layanan	2	2	100%
7.	Pemulihan kondisi lingkungan sungai dan saluran pada wilayah pasca bencana (PAK)	Jumlah Lingkungan sungai dalam kondisi baik	lokasi	1	1	100%

30.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program yaitu :

- 1) Kegiatan yang ditetapkan melalui PAK tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya sehingga dijadwal ulang pada tahun anggaran 2019.
- 2) Kegiatan yang masih sebagian pengerjaannya karena terkendala oleh beberapa hal, sehingga di DPA-L pada tahun anggaran 2019.

31. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang melaksanakan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah dan membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian.

31.1. Sasaran Strategis

- 1) *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Pemerintahan dan kesra, serta Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Nilai LPPD, Prosentase peningkatan administrasi pemerintahan dan kewilayahan, Prosentase kelurahan dan kecamatan berkinerja baik, Prosentase data dan informasi bidang pemerintahan dan otoda yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan, Prosentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Prosentase SKPD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai ketentuan, Prosentase SKPD yang memiliki Kelompok Budaya Kerja, Nilai evaluasi SAKIP, Prosentase data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan, Prosentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang berkualitas, Prosentase permasalahan hukum yang tertangani tepat waktu, Prosentase data dan informasi bidang perekonomian dan SDA yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan, Prosentase dokumen administrasi pembangunan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan, Prosentase pemanfaatan Sistem informasi pembangunan berbasis WEB, dan Prosentase tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.*

Pada tahun 2018, Nilai LPPD ditargetkan memperoleh predikat “SANGAT TINGGI”, Prosentase peningkatan administrasi pemerintahan dan kewilayahan ditargetkan sebesar 80%, Prosentase kelurahan dan kecamatan berkinerja baik ditargetkan sebesar 100%, Prosentase data dan informasi bidang pemerintahan dan otoda yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan ditargetkan sebesar 90%,

Prosentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 100 dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Prosentase SKPD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai ketentuan ditargetkan sebesar 100%, Prosentase SKPD yang memiliki Kelompok Budaya Kerja ditargetkan sebesar 70%, Nilai Evaluasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai 91 dengan realisasi 68, 44 dan tingkat capaian kinerja 75,21%. Prosentase data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan ditargetkan sebesar 90%, Prosentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang berkualitas ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 88% dan tingkat capaian kinerja 88%, Prosentase permasalahan hukum yang tertangani tepat waktu ditargetkan sebesar 100%, Prosentase data dan informasi bidang perekonomian dan SDA yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan ditargetkan sebesar 90% dengan realisasi 87% dan tingkat capaian kinerja sebesar 96,67% , Prosentase dokumen administrasi pembangunan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan ditargetkan sebesar 90%, Prosentase pemanfaatan Sistem informasi pembangunan berbasis WEB ditargetkan sebesar 100%, dan Prosentase tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebesar 90%.

2) *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik dengan indikator kinerja prosentase jenis layanan yang memiliki IKM memuaskan (A) dan rata – rata IKM layanan Sekretariat Daerah.*

Pada tahun 2018, prosentase jenis layanan yang memiliki IKM memuaskan (A) ditargetkan sebesar 85 poin dan rata – rata IKM layanan Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 80 poin.

31.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.31

Evaluasi Hasil Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
I.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	*	*	*	*	*
1.	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Desa	178	178	100%
2.	Penyusunan Peta Desa	Tersedianya Informasi Desa	Kecamatan	5	5	100%
3.	Pelaksanaan Hari Jadi Otonomi Daerah	Upacara Hari Otonomi Daerah	SKPD Kabupaten	54	54	100%
4.	Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Upacara Bendera	SKPD Kabupaten	54	54	100%
5.	Pendampingan Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Meningkatnya Kesadaran Tentang Hari Jadi Provinsi	SKPD Kabupaten	54	54	100%
6.	Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Kecamatan	13	13	100%
7.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Data LPPD	SKPD Kabupaten	54	54	100%
8.	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Peningkatan Kerjasama Bidang SDA dan SDM	SKPD Kabupaten	54	54	100%
9.	Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terwujudnya Koordinasi Forkopinda	Bulan	12	12	100%
II.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*	*	*	*	*
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Prosentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	Dokumen	6	6	100%
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*	*	*	*	*
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen yang tersusun dengan kualitas baik.	Dok	5	5	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5}{100\%} \times 100\%$
IV.	Program Peningkatan dan Pembinaan Kemasyarakatan	*	*	*	*	*
1.	Monitoring dan pengendalian pelaksanaan hibah sarana keagamaan	Jumlah monitoring dan pengendalian yang dilakukan	Undangan	350	350	100%
2.	Fasilitasi pelaksanaan sidang isbat	Jumlah pelaksanaan sidang isbat yang difasilitasi	Kecamatan	13	13	100%
3.	Fasilitasi seleksi peserta MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten	Jumlah seleksi peserta MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten difasilitasi	Seleksi	2	2	100%
4.	Fasilitasi pelepasan dan penyambutan kedatangan jamaah haji	Jumlah pelepasan dan penyambutan jamaah haji yang dilaksana	Kegiatan	2	2	100%
5.	Fasilitasi dialog rutin Ulama dan Umara	Jumlah dialog ulama dan umara yang diselenggarakan	Kegiatan	9	9	100%
6.	Fasilitasi Penyelenggaraan Khitan massal	Jumlah Penyelenggaraan Khitan Massal yang Difasilitasi	Peserta	250	250	100%
V.	Program Peningkatan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	*	*	*	*	*
1.	Fasilitasi peringatan Nuzulul Qur'an	Jumlah Peringatan Nuzulul Qur'an yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	100%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	100%
3.	Penyelenggaraan Hari Santri	Jumlah Penyelenggaraan hari santri yang dilaksana	Kegiatan	1	1	100%
4.	Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang dilaksana	Kegiatan	1	1	100%
5.	Fasilitasi Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Jumlah Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	100%
6.	Penyelenggaraan Safari Ramadhan	Jumlah Penyelenggara Safari Ramadhan yang dilaksana	Kecamatan	13	13	100%
7.	Fasilitasi Peringatan Hari Raya Idul Adha	Jumlah Peringatan Hari Raya Idul Adha yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	100%
Bagian Hukum						

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
VI.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Hukum)	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	4	4	100%
VII.	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Prosentase produk hukum yang disusun SOP dan tepat waktu	%	100	95	115%
1.	Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi Berbasis TI	Jumlah aplikasi	aplikasi	1	1	100%
2.	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	peraturan bupati dan keputusan bupati	650	611	94%
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	raperda	12	18	150%
VIII.	Program Peningkatan Fasilitas Bantuan Hukum	Prosentase kasus perdata dan TUN yang difasilitasi	%	100	50	50%
1.	Fasilitasi Penanganan Kasus Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	kasus	2	1	50%
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam						
IX.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	90	90	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Perekonomian & SDA)	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	dokumen	4	4	100%
X.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Penanaman Modal dan BUMD	Prosentase Peningkatan BUMD	%	90	85	94,44%
1.	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	4	4	100%
2.	Kordinasi Peningkatan dan Pengembangan BUMD	Jumlah BUMD yang ditingkatkan dan dikembangkan	BUMD	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
XI.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi dengan OPD terkait dalam Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya alam	%	90	87	96,67%
1.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	Jumlah SPBU,SPBE,SPD N, agen dan pangkalan yang di monitoring dan dievaluasi	kali	12	12	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	13	13	100%
3.	Pemantauan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah kelompok tani yang dipantau	Poktan	390	360	92%
4.	Pemantauan dan Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran dibidang Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan	Jumlah penambang ilegal yang dipantau	penambang	40	40	100%
5.	Sosialisasi Hemat Energi dan Air	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	6	6	100%
XII.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Perekonomian Masyarakat	Prosentase Peningkatan Perekonomian Masyarakat	%	90	87	96,67%
1.	Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai (DBHCT EARMARK)	Jumlah pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan	kali	4	4	100%
2.	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan (DBHCT EARMARK)	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	13	13	100%
3.	Koordinasi Peningkatan Jaringan Usaha Garam	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	4	4	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Nusantara Expo dan/atau Forum Lainnya	Jumlah NEF yang difasilitasi	kali	1	1	100%
5.	Fasilitasi pelaksanaan Car Free Day	Jumlah CFD yang dilaksanakan	kali	48	48	100%
6.	Fasilitasi Penyusunan Data Dinamis	Jumlah Dokumen data dinamis yang dibuat	buku	100	100	100%
7.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pajak Rokok, Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pajak Rokok yang disusun	kali	8	8	100%
Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur						
XIII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan Laporan Kinerja dengan Kualitas baik	%	100	100	100%
1.	Perecanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	5	100%
XIV.	Program Pengelolaan Penyusunan dan Pengendalian Program	Prosentase Program Pembangunan Daerah yang disusun dengan kualitas baik	%	100	100	100%
1.	Penyusunan Harga satuan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan	Jumlah barang jasa yang disusun berdasarkan harga satuan	Buku	60	60	100%
2.	Pengendalian pelaksanaan Program atau kegiatan Pembangunan	Jumlah Kegiatan / pelks.Program pembangunan yang dikendalikan	Lembar	3825	3825	100%
3.	Penyusunan Analisis Standart Belanja (ASB)	Jumlah Belanja kegiatan yang distandartkan	Buku	54	54	100%
XV.	Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase Realisasi Program Pembangunan Daerah yang mencapai 90%	*	*	*	*
1.	Pembinaan e-report Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Jumlah staf entry yang mendapat pembinaan	Orang	54	54	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
2.	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program atau Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah bahan kegiatan APBD,APBN dan APBD Prov. yang dilaporkan	Dokumen	40	40	100%
3.	Penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Jumlah Kegiatan APBD,APBN dan APBD Prov. yang dilaporkan berdasarkan jenis pengadaan/Lokasi/OPD/Penyedia	Dokumen	15	15	100%
4.	Pengelolaan SIM Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program atau Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Operasional pengelolaan informasi Laporan	SIM	1	1	100%
XVI.	Program Peningkatan Penataan Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan	Prosentase Administrasi Pelaksanaan Pemb.Daerah yang sesuai dengan Kebijakan /Peraturan	*	*	*	*
1.	Penyusunan Dokumen Administrasi Pembangunan Program atau Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis dokumen yang disusun	Dokumen	4	4	100%
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Informasi Pembangunan berbasis teknologi Informasi	jumlah informasi pembangunan yang dikelola	Website	1	1	100%
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa						
XVII.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen SAKIP	5	5	100%
XVIII.	Program Peningkatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Prosentase Pemanfaatan TI Dalam Pengelolaan LPSE	%	*	*	*
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana System LPSE	Jumlah Sarana dan Prasarana LPSE	Sarana dan Prasarana	7	7	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/5} \times 100\%$
2.	Operasional e-Procurement System LPSE	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang Menggunakan LPSE	SKPD	54	54	100%
3.	Pengembangan Website LPBJ	Jumlah Website yang dikembangkan	Website	1	1	100%
XIX.	Program Pembinaan Barang dan Jasa	Prosentase SDM Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Yang Berkualitas	%	*	*	*
1.	Pembinaan Rekanan	Jumlah Rekanan yang mendapat pembinaan pengadaan	Rekanan	50	50	100%
2.	Bimbingan Teknis e-Procurement System LPSE	Jumlah Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP	Peserta	54	54	100%
3.	Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah PNS yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa	Peserta	75		0,00%
4.	Pengukuran Tingkat Kematangan ULP dan LPSE	Jumlah SOP ULP dan LPSE	Standarisasi LPSE	8	8	100%
5.	Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Panitia Pejabat Pengadaan/ULP	Peserta	54	54	100%
6.	Operasional Kode etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah	Jumlah penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang mematuhi kode etik	Kelompok Pemilihan	30	30	100%
7.	Pembinaan e-Procurement Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Panitia/Pejabat Pengadaan	Peserta	39	39	100%
XX.	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Standar	%	*	*	*
1.	Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang/jasa	SKPD	54	54	100%
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik berbasis android	SKPD	54	54	100%
3.	Koordinasi dan Operasional Pengelolaan SIRUP	Jumlah Sistem yang dikoordinasikan dan di kelola	admin SIRUP	100	100	100%
Bagian Organisasi						

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
XXI.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100%
1.	Penyusunan kelas jabatan	Jumlah dokumen kelas jabatan yang disusun sesuai ketentuan	PD	43	43	100%
2.	Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi (KISS) kelembagaan perangkat daerah	Jumlah KISS yang dilaksanakan	Kali	18	18	100%
3.	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah dokumen anjab dan abk yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen Anjab dan ABK	1	1	100%
4.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) kelembagaan Perangkat Daerah berbasis WEB	Jumlah SIM yang dikelola	SIM	1	1	100%
XXII.	Program Peningkatan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah	Prosentase SKPD dengan predikat nilai SAKIP minimal B	%	85	100	117,65%
1.	Asistensi Implementasi SAKIP	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Yang Mendapat Asistensi Implementasi SAKIP	PD	43	43	100%
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Dokumen	44	44	100%
3.	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	5	100%
4.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali	2	2	100%
5.	Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unit Layanan Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)	Jumlah sistem Informasi Manajemen Yang dikelola	SIM	2	2	100%
XXIII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase SKPD yang memenuhi dan menerapkan unsur Pelayanan Publik	%	80	50	62,50%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
1.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) tata naskah dinas berbasis android	Jumlah Sistem Informasi Manejemen (SIM) Tata Naskah Dinas yang dibuat	SIM	1	1	100%
2.	Fasilitasi pengembangan inovasi pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Proposal Inovasi Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Proposal Inovasi	73	73	100%
3.	Penilaian kinerja unit pelayanan publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan penilaian kinerja pelayanan publik	UPP	73	73	100%
4.	Penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah	Jumlah dokumen peta proses bisnis yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1	100%
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol						
XXIV.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Lakip Dalam Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan Kinerja Dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Sakip Yang Disusun Dalam Kualitas Baik	Dok	5	5	100%
XXV.	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Kdh/Wkdh	Prosentase Penerima Layanan Keprotokolan Dengan Kategori Memuaskan	%	100	76	76%
1.	Kegiatan Operasional Dan Pendukung Pelayanan Keprotokolan	Prosentase Penerima Layanan Keprotokolan Dengan Kategori Memuaskan	%	100	92,90	93%
2.	Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunker Pejabat Negara/Departemen	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Yang Difasilitasi	Kali	85	52	61%
3.	Penyediaan/Pengadaan Sarana/Fasilitasi Pendukung Keprotokolan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Fasilitasi Pend.Keprotokolan	Unit	5	5	100%
XXVI.	Program Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat	Jumlah Terlaksananya Berita Ekspose,Kegiatan Komunikasi Dan Jumpa Pers Bersama Kdh/Wkdh Yang Difasilitasi	%	100	98	98%
1.	Keg.Koordinasi Pelayanan Pers/Media	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Pers/Media	Pers	80	80	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	$\frac{7-6/5 \times 100\%}{100\%}$
2.	Keg.Penyusunan Dokumentasi Sambutan/Pidato Kdh/Wkdh	Jumlah Buku Dokumentasi Sambutan/Pidato Selama 12 Bulan	Buku	50	50	100%
3.	Keg.Penyusunan Dokumentasi Foto Kegiatan Kdh/Wkdh	Jumlah Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Kdh/Wkdh Selama 12 Bulan	Buku	75	75	100%
4.	Keg.Penyusunan Buku Kliping Berita Daerah	Jumlah Buku Kliping Berita Daerah Selama 12 Bulan	Buku	50	50	100%
5.	Keg.Fasilitasi Komunikasi Dan Jumpa Pers Bersama Kdh/Wkdh	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Komunikasi Dan Jumpa Pers Bersama Kdh/Wkdh Yang Difasilitasi	Berita	2400	2100	88%
6.	Keg.Peliputan Dan Pemberitaan Melalui Media Massa	Jumlah Ekspose Berita Media Dan Cetak, Elektronik Isu Aktual Pemkab Pamekasan Yang Dilakukan	Berita	7200	6900	96%
7.	Keg.Penyusunan Buku Selayang Pandang Pemkab Pamekasan	Tersedianya Jumlah Buku Selayang Pandang Pemkab Pamekasan	Buku	430	430	100%
8.	Keg.Operasional & Pendukung Aplikasi Berbasis It Setda Kab.Pamekasan	Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan	Website	1	1	100%
Bagian Umum						
XXVII.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Administrasi Perkantoran yang	%	95	90	94,74%
1.	Penyediaan Makanan dan Minuman (Bagian Umum)	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman tamu /rapat,Kegiatan yang terlayani dengan baik	mamin Rapat	250	250	100,00%
XXVIII.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur yang layak	Persen	90	85	94,44%
1.	Pengadaan Mobil jabatan (Bagian Umum)	Jumlah kendaraan Dinas KDH/WKDH yang Terpenuhi	Unit	2	2	100%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Bagian Umum)	Jumlah Pengadaan Peralatan untuk Gedung Kantor	Unit	139	139	100%
3.	Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung Kantor (Bagian Umum)	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	2	2	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times 100\%$
4.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bagian Umum)	Jumlah peralatan Gedung Kantora yang mendapatkan pemeliharaan	Bagian	10	10	100%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah Gedung Kantor (Bgaian Umum)	Jumlah Ruang Ibadah Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	1	1	100%
6.	Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung islamic centre (Bagian Umum)	Jumlah Gedung Islamic Centre yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	1	1	100%
7.	Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung Serbaguna (Bagian Umum)	Jumlah Gedung Serba Guna yang siap pakai dan di pelihara secara baik	Unit	1	1	100%
8.	Pengelolaan Data Aset Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Data Aset yang di data secara baik	Bagian	10	10	100%
9.	Operasional Pemamfaatan Gedung Islamic centre (Bagian Umum)	Jumlah Layanan Gedung Islamic centre pertriwulan	layanan	28	28	100%
10.	Rehab Sedang /Berat gedung serba guna (Bagian Umum)	Jumlah Gedung serba guna yang akan direhab	Unit	1	1	100%
11.	Rehab Sedang Berat Sarana /Fasilitasi Rumah dinas KDH/WKDH(Bagian Umum)	Jumlah sarana /Fasilitasi Rumah Dinas KDH/WKDH yang direhab	Unit	2	2	100%
XXIX.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	95	95%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH yang tersedia	Style	9	9	100%
XXX.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan yang terlaksana	%	100	95	95%
1.	Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretarian Daerah (Bagian Umum)	Jumlah Penatausahaan Keuangan dengan kualitas yang memuaskan	Bagian	10	10	100%
2.	Pendukung Pelayanan gaji Sekretariat daerah (Bgaian Umum)	Jumlah Pelayanan Gaji yang memuaskan	Pegawai	233	233	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	$\frac{7}{65} \times 100\%$
3.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	Bulan	12	12	100%
XXXI.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Yang dilaksanakan secara baik	%	95	80	84,21%
1.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)	Tersedianya Gedung kantor dan Rumah Dinas KDH/WKDH yang terawat	Unit	2	2	100%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas (Bgaian Umum)	Tersedianya peralatan gedung kantor dan rumah dinas KDH/WKDH Yang terawat dan terpelihara dengan baik	Unit	2	2	100%
3.	Pendukung Operasional Urusan Dinas Dalam Rumah Tangga KDH/WKDH (Bagian Umum)	Meningkatnya Kinerja Aparatur di Lingkungan Rumah Tangga KDH/WKDH	Layanan	10	10	100%
4.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor .Rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum)	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan KDH/WKDH	Peralatan	229	229	100%
5.	Pendukung Pelayanan SMS Centre Bupati Pamekasan	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik SMS Centre yang Tersalurkan dengan Baik	Sms	1282	1282	100%
6.	Silaturahmi KDH/WKDH dengan Masyarakat (Bagian Umum)	Terlaksananya Silaturahmi KDH/WKDH dengan baik	Kali	1	1	100%
7.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor .Rumah Dinas KDH/WKDH (DPA-L)	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan KDH/WKDH	Peralatan	8	8	100%
8.	Pembangunan /Penyediaan sarana Fasilitasi Gedung Kantor /rumah dinas KDH/WKDH	Tersedianya Penyediaan sarana Gedung kantor dan rumdin KDH/WKDH	Unit	3	0	0,00%
Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian						

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times 100\%$
XXXII.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	95	96%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)	Jumlah layanan administrasi perkantoran	Layanan	7	7	100%
2.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH/WKDH dan lainnya (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)	Jumlah Rapat rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah Setda dan Staf Ahli	Kali	200	200	100%
3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)	Jumlah Rapat rapat koordinasi/konsultasi KDH/WKDH yang dilaksanakan	Kali	250	210	84%
4.	Pendukung pelayanan administrasi kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)	Jumlah administrasi kedinasan KDH/WKDH	Layanan	7	7	100%
XXXIII.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi	%	80	90	113%
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah dan Staf Ahli	Jumlah kendaraan di Setda dan Staf Ahli dalam Kondisi baik	Kendaraan	30	25	83%
2.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)	Jumlah Kendaraan KDH dan WKDH dalam kondisi baik	Kendaraan	6	5	83%
XXXIV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	80	100	125%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times \frac{100\%}{100\%}$
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Lama/ periode jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Aparatur	20	20	100%
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan pegawai yang disusun	dokumen	1	1	100%
XXXV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja (Bagian Tata Usaha & Kepegawaian)	Jumlah Program Kegiatan dan Laporan kinerja yang terlaksana	Dokumen	6	6	100%
XXXVI.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola Tepat waktu	%	100	95	95%
1.	Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian TU dan Kepegawaian)	Jumlah dokumen/Berkas kepegawaian yang dikelola	Berkas	200	190	95%

31.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) Belum optimalnya penyusunan perencanaan, sedangkan semua kegiatan sudah terealisasi dengan benar. Solusinya adalah adanya penyusunan perencanaan yang lebih tepat lagi.
- 2) Realisasi pengadaan mobil jabatan terhambat oleh waktu yang tidak mencukupi untuk pemenuhan dokumen administrasi. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan DPAL pada kegiatan tersebut.

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rumah dinas KDH/WKDH terhambat oleh waktu yang tidak mencukupi untuk pemenuhan dokumen administrasi. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan DPAL pada kegiatan tersebut.
- 4) Pembangunan/penyediaan sarana fasilitasi gedung kantor/rumah dinas KDH/WKDH terhambat oleh waktu yang tidak mencukupi untuk pemenuhan dokumen administrasi. Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan DPAL pada kegiatan tersebut.

32. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

32.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP.*

Pada tahun 2018, prosentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 85% dan tingkat capaian kinerja sebesar 106%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.4.841.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.054.650.596,00 dan tingkat capaian anggaran 84%.

2) *Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja indeks kepuasan DPRD.*

Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 73 dan realisasinya sebesar 74,17 sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.14.338.325.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.058.267.017,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 77%.

32.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.32

Evaluasi Hasil Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7-6}{5} \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir	Prosen	80	90	113%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} \times 100\%$
1.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah layanan pendukung administrasi perkantoran	Kali	110	110	100%
3.	Publikasi Informasi Kegiatan DPRD	jumlah kegiatan DPRD yang diplukisan	kkali	278	280	101%
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis IT	jumlah kegiatan DPRD yang diinformasikan berbasis IT	Kali	500	503	101%
5.	Penyediaan jasa jaminan kesehatan Bagi Anggota DPRD	Jumlah jasa jamininan Kesehatan DPRD yang difasilitasi	jumlah	1	1	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Prosen	80	90	113%
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	Jumlah kendaraan dengan kualitas baik	Unit	10	10	100%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dengan kualitas baik	Jenis	8	8	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung/kantor dengan Kondisi Baik	ruang	11	11	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Jumlah Kendaraan Dengan Kondisi Baik	Unit	11	11	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Dengan Kondisi Baik	Jenis	10	10	100%
6.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah ruangan gedung kantor yang direhabilitasi	ruang	3	3	100%
7.	Pembuatan gudang arsip	Jumlah gudang dengan kondisi baik	gudang	1	1	100%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase layanan Layanan Disiplin aparatur yang kualitas baik	Prosen	80	60	75%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dengan Kualitas Baik	Jenis	5	2	40%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6} = \frac{6/5 \times 100\%}{100\%}$
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosen	80	86	108%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat dengan Nilai Baik	Kali	17	19	112%
2.	Mendengarkan Pidato Kenegaraan dan Hari Jadi	Jumlah Pidato Kenegaraan dan Hari jadi yang dilaksanakan	Kali	2	2	100%
3.	Penyampaian Visi Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyampaian visi misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kali	1	1	100%
4.	Penyusunan kelas jabatan PAK	Jumlah Dukumen penyusunan kelas jabatan	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	Prosen	80	85	106%
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	1	1	100%
2.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	4	4	100%
3.	Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD	Lama / periode penatausahaan pengelolaan keuangan	Kali	55	58	105%
4.	Pengelolaan Gaji Sekretariat DPRD	Lama / periode pengelolaan gaji	Kali	23	23	100%
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase program kerja DPRD yang dilaksanakan tepat waktu	Prosen	80	80	100%
1.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat AKD yang dilaksanakan	jumlah	394	202	51%
2.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal Badan Musyawarah	jumlah	37	36	97%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{100\%} \times 6/5$
3.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan daerah yang dilaksanakan	jumlah	480	167	25%
4.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal Badan Musyawarah	jumlah	1	1	100%
5.	Peningkatan SDM Komisi-Komisi	Jumlah Bimtek Komisi DPRD yang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal Badan Musyawarah	jumlah	1	1	100%
6.	Kegiatan Peningkatan SDM Anggota DPRD Dari Unsur Fraksi	Jumlah Bimtek Anggota DPRD dari unsur Fraksi yang difasilitasi	Kali	16	14	88%
7.	Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	kali	6	6	100%
8.	Pendokumentasian Hasil Rapat	Jumlah Risalah Rapat yang disusun	dokumen	9	9	100%
9.	Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	36	44	122%
VII.	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan dan Layanan Aspirasi	Prosentase legislasi daerah dan aspirasi DPRD yang dilaksanakan tepat waktu	Prosen	80	80	100%
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	Raperda	19	18	95%
2.	Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dibahas	Prolegda	1	1	100%
3.	Koordinasi, Evaluasi, Produk Hukum Daerah	lama/periode Koordinasi, Evaluasi dan Produk Hukum yang dilaksanakan	kali	1	1	100%
4.	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum	dokumen	19	18	95%
5.	Kegiatan Pelaksanaan Reses	jumlah Reses yang dilaksanakan tepatwaktu sesuai jadwal Badan Musyawarah	kali	3	3	100%
6.	Fasilitasi Layanan Penerimaan Aspirasi Kelompok Masyarakat	Jumlah Layanan Penerimaan Aspirasi Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi	kali	60	47	78%
7.	Pengkajian Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah kajian yang disusun	Dokumen	1	0	0%

32.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

33. Kecamatan Pamekasan

Kecamatan pamekasan melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

33.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan.*

Pada tahun 2018, prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.2.022.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.908.523.072,00, dan tingkat capaian anggaran 94%.

2) *Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan dengan Indikator kinerja Prosentase desa yang menyusun APBDesa dengan kualitas baik dan tepat waktu, Prosentase desa dan kelurahan yang melaksanakan musrenbang dengan kalitas baik dan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti.*

Pada tahun 2018, prosentase desa yang menyusun APBDesa dengan kualitas baik dan tepat waktu.ditargetkan sebesar 95% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 105%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.27.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

Pada tahun 2018, prosentase desa dan kelurahan yang melaksanakan musrenbang dengan kalitas baikditargetkan sebesar 95% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 105%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.13.133.000,00

dengan realisasi sebesar Rp.13.133.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

pada tahun 2018, prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 95% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 105%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.998.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.986.458.000,00, dan tingkat capaian anggaran 99%.

3) *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan asri dengan indikator kinerja prosentase kelurahan yang berprestasi di bidang kebersihan minimal di tingkat kabupaten dan Indikator Prosentase lembaga kemasyarakatan aktif dalam mendukung kebersihan lingkungan.*

Pada tahun 2018, prosentase kelurahan yang berprestasi di bidang kebersihan minimal di tingkat kabupaten ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.4.190.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.267.270.000,00, dan tingkat capaian anggaran 30%.

Pada tahun 2018, Prosentase lembaga kemasyarakatan aktif dalam mendukung kebersihan lingkungan di targetkan sebesar 100% dan realisasinya 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.270.200.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.270.200.000,00, sehingga tingkat capaian anggaran 100%.

33.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pamekasan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.33

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Pamekasan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100%
1.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terakomodir	Bulan	12	12	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terakomodir	Bulan	12	12	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100%
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Item	1	1	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	1	1	100%
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Unit	5	5	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	12	12	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	16	0	0%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
2.	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)	Jumlah dokumen kelas jabatan	Dokumen	2	2	100%
IV.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	100	100%
		Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	%	100	100	100%
1.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dan kelurahan	Jumlah perangkat desa dan kelurahan yang mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme	orang	36	36	100%
2.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Kangeran	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Kangeran yang diadakan	Item	37	37	100%
3.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Patemon	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Patemon yang diadakan	Item	37	37	100%
4.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Parteker	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Parteker yang diadakan	Item	37	37	100%
5.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Jungcangcang	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Jungcangcang yang diadakan	Item	37	37	100%
6.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Bugih	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Bugih yang diadakan	Item	37	37	100%
7.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Gladak Anyar	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Gladak Anyar yang diadakan	Item	37	37	100%
8.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Kolpajung	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Kolpajung yang diadakan	Item	37	37	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
9.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Kowel	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Kowel yang diadakan	Item	37	37	100%
10.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemberdayaan Kelurahan Barurambat Kota	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Barurambat Kota yang diadakan	Item	37	37	100%
V.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan	%	100	100	100%
1.	Pengembangan dan operasionalisasi aplikasi pelayanan masyarakat	Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang dikembangkan	Item	1	1	100%
VI.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Sakip yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	5	5	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100%
VII.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	100	100%
		Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	%	100	100	100%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	kali	1	1	100%
2.	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	desa	9	9	100%
3.	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	kegiatan	3	3	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
4.	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	kali	4	4	100%
5.	Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang dikoordinasikan	kali	12	12	100%
6.	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah pemilu yang dilaksanakan	kali	3	3	100%
7.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Berskala Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum berskala kelurahan yang direhabilitasi	Unit	1	1	100%
8.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama / Tokoh dan Masyarakat	Jumlah forum rekonsiliasi/konso lidasi/silaturrahi yang dilaksanakan	kali	1	1	100%
VIII.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan asri	Prosentase kelurahan yang berprestasi di bidang kebersihan minimal di tingkat kabupaten	%	100	100	100%
		Prosentase lembaga kemasyarakatan aktif dalam mendukung kebersihan lingkungan	%	100	100	100%
1.	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan pkk yang terfasilitasi	kel/desa	18	18	100%
2.	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang difasilitasi	kel/desa	18	18	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
3.	Fasilitasi Pemberdayaan RT/RW melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	271	271	100%
4.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Kangenan	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	48	48	100%
5.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Patemon	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	18	18	100%
6.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Parteker	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	21	21	100%
7.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Jungcangang	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	21	21	100%
8.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Bugih	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	45	45	100%
9.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Gladak Anyar	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	40	40	100%
10.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Kolpajung	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	21	21	100%
11.	Oprasionalisasi Peningkatan Kebersihan lingkungan Kelurahan Kowel	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	24	24	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
12.	Oprasionalisasi peningkatan kebersihan lingkungan Kelurahan Barurambat Kota	Jumlah lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	33	33	100%
13.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Kangeran	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	48	44	92%
14.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Patemon	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	18	16	89%
15.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Parteker	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	21	18	86%
16.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Junggang	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	21	18	86%
17.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Bugih	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	45	41	91%
18.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Gladak Anyar	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	40	36	90%
19.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Kolpajung	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	21	18	86%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
20.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Kowel	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	24	22	92%
21.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Barurambat Kota	Jumlah RT / RW yang diberdayakan melalui penataan lingkungan berbasis padat karya	RT/RW	33	30	91%
22.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Kangenan (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
23.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Patemon (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
24.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Parteker (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
25.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Jungcangcang (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
26.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Bugih (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
27.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Gladak Anyar (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
28.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Kowel (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%
29.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Kolpajung (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
30.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kelurahan Barurambat Kota (PAK)	Jumlah kader posyandu yang difasilitasi	orang	25	25	100%

33.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pamekasan antara lain:

- 1) Pada sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan asri dengan indikator kinerja prosentase kelurahan yang berprestasi di bidang kebersihan minimal di tingkat Kabupaten, tingkat capaian anggaran sebesar 30% belum mencapai 100% dikarenakan adanya perubahan mekanisme Operasional Hibah/Belanja Barang yang Akan diserahkan kepada Pihak Ketiga dan keterbatasan waktu pelaksanaan pada kegiatan Pemberdayaan RT/RW melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan pada 9 kelurahan se Kecamatan Pamekasan. Solusinya adalah Hibah/Belanja Barang yang Akan diserahkan kepada Pihak Ketiga pada Kegiatan Pemberdayaan RT/RW melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan dilaksanakan Jadwal Ulang (DPAL) pada Tahun Anggaran 2019.
- 2) Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, tingkat capaian kinerja dan anggaran 0% dikarenakan minimnya surat permintaan/permohonan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sehingga solusinya anggaran kegiatan dimaksud dikembalikan pada Kas Daerah (KASDA).

34. Kecamatan Pademawu

Kecamatan Pademawu melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan..

34.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja prosentase yang puas dengan pelayanan kecamatan.*

Pada tahun 2018, prosentase yang puas dengan pelayanan kecamatan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.596.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.576.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 96,78%.

2) *Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator prosentase desa yang sudah menyusun APBDes dengan kualitas baik dan tepat waktu, Prosentase desa yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik dan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*

Pada tahun 2018, prosentase desa yang sudah menyusun APBDes dengan kualitas baik dan tepat waktu ditargetkan sebesar 98% dengan realisasinya sebesar 98%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,00, sehingga tingkat capaian anggaran 100%.

Pada tahun 2018, prosentase desa yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik ditargetkan sebesar 98% dengan realisasinya sebesar 98%, dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

Pada tahun 2018, prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditargetkan sebesar 98% dengan realisasinya sebesar 98%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.460.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.459.712.000,00, sehingga tingkat capaian anggaran 99,94%.

3) *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, bersih dan asri dengan indikator kinerja prosentase kelurahan yang memperoleh predikat kelurahan berseri dan Perosentae lembaga kemasyarakatan aktif.*

Pada tahun 2018, prosentase kelurahan yang memperoleh predikat kelurahan berseri ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.620.392.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.391.500,00, dan tingkat capaian anggaran 32,30%.

Pada tahun 2018, perosentae lembaga kemasyarakatan aktif ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.700.00,00, sehingga tingkat capaian anggaran 97,00%.

34.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pademawu pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.34

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Pademawu Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100	100.00%
1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terakomodir	Bulan	12	12	100.00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terakomodir	Bulan	12	12	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100.00%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	3	3	100.00%
2.	Pengadaan mebeleur	Jumlah peralatan meubeler yang diadakan	buah	4	4	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	1	1	100.00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Unit	2	2	100.00%
5.	Pembangunan Pagar Makam Cempaka Kelurahan Lawangan Daya	Jumlah gedung yang dibangun	Unit	1	1	100.00%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Item	4	4	100.00%
7.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	9	9	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
IV.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan	%	100	100	100.00%
1.	Pengembangan dan operasionalisasi aplikasi pelayanan masyarakat	Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang dikembangkan	Aplikasi	2	2	100.00%
2.	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey yang dilaksanakan	Survey	2	2	100.00%
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan laporan Kinerja	Jumlah Laporan Program kegiatan Kinerja yang di hasilkan.				
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	4	4	100.00%
VI.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase pengaduan yang tertangani dengan baik	%	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar yang difasilitasi	Pasar	3	3	100.00%
2.	Pendukung penyelesaian sengketa dan masalah	Jumlah sengketa dan masalah yang diselesaikan dengan baik	Sengketa	6	6	100.00%
VII.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
		prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	%	100	100	100.00%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Prosentase desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbang dengan baik	Desa/Kel	22	22	100.00%
2.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa	20	20	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
3.	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang difasilitasi	Desa/Kel	7	7	100.00%
4.	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	Kegiatan	9	9	100.00%
5.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dan kelurahan	Jumlah perangkat desa dan kelurahan yang mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme	Desa/Kel	22	22	100.00%
6.	Koordinasi dan Opraional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang dikoordinasikan	Hari Besar	6	6	100.00%
7.	Penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan kelurahan Barurambat Timur	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Barurambat Timur	RT/RW	19	19	100.00%
8.	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah pemilu yang dimonitoring	Pemilu	2	2	100.00%
9.	Penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan kelurahan Lawangan Daya	Jumlah pelayanan dan pemberdayaan Kelurahan Lawangan Daya	RT/RW	20	20	100.00%
10.	Forum Rekonsiliasi/konsolidasi/silaturrehmi pimpinan daerah bersama ulama/tokoh dan masyarakat	Jumlah forum rekonsiliasi/konsolidasi/silaturrehmi yang dilaksanakan	kali	1	1	100.00%
VIII.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
		prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	%	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK	Organisasi	22	22	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Oprasionalisasi peningkatan kebersihan lingkungan kelurahan Barurambat Timur	Jumlah Lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	19	19	100.00%
3.	Operasionalisasi peningkatan kebersihan lingkungan kelurahan Lawangan Daya	Jumlah Lingkungan yang mengalami peningkatan kebersihan	RT/RW	20	20	100.00%
4.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Barurambat Timur	Jumlah Rt/RW yang diberdayakan Kelurahan Barurambat Timur	RT/RW	19	19	100.00%
5.	Pemberdayaan RT/RW Melalui Penataan Lingkungan Berbasis Padat Karya Kelurahan Lawangan Daya	Jumlah RT/RW yang diberdayakan Kelurahan Lawangan Daya	RT/RW	20	20	100.00%

34.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

35. Kecamatan Larangan

Kecamatan Larangan melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

35.1. Sasaran Strategis

1)

2)

35.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Larangan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.35

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Larangan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*	*	*	*	*
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	*	*	*	*	*
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*	*	*	*	*
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Item / Unit	3 / 5	*	*
2.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	buah	100	*	*
3.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	unit	1	*	*
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik	unit	1	*	*
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional dalam Kondisi baik	Unit R4 / Unit R2	2 / 4	*	*

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor/rumah dinas	*	*	*	*	*
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor dalam kondisi Baik	item/ unit	3 / 12	*	*
8.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Gedung Kantor yang direhabilitasi	Item	3	*	*
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*	*	*	*	*
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Org/ bln	16/ 12	*	*
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*	*	*	*	*
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Sakip yang disusun dengan kualitas Baik	Dokumen	5	*	*
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	1	*	*
V.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	*	*	*	*	*
1.	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar yang difasilitasi	Unit	3	*	*
VI.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	*	*	*	*	*
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	desa	14	*	*
2.	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan dan PKK yang terfasilitasi	desa	14	*	*

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
3.	Fasilitas peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah yang terfasilitasi	desa	5	*	*
4.	Fasilitasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	item	3	*	*
5.	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan Sistem pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan	kali	4	*	*
6.	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme perangkat desa	Jumlah perangkat desa dan kelurahan yang mengikuti peningkatan Kapasitas dan profesionalisme	perangkat desa	14 x 5 x 3	*	*
7.	Koordinasi dan Oprasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang dikoordinasikan	Peringatan	6	*	*
8.	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah pemilu yang dilaksanakan	kali	1	*	*
9.	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata (Elegan Paris)	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	desa	1 x / 14	*	*
10.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama / Tokoh dan Masyarakat	*	kali	1	*	*
VII.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	*	*	*	*	*
1.	Pengembangan dan operasionalisasi aplikasi pelayanan masyarakat	Jumlah Aplikasi pelayanan terpadu yang dikembangkan	aplikasi	1	*	*
2.	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah Survey yang dilaksanakan	kali	2	*	*

36. Kecamatan Galis

Kecamatan Galis melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

36.1. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 90% dengan realisasinya sebesar 83,24%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 92%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.444.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.438.280.000,00, dan tingkat capaian anggaran 99%.

36.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Galis pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.36

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Galis Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran	%	90	88	98%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Kantor	%	90	98	109%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	Presentase Sarana dan Prasarana yang Terlayani dengan Baik	%	90	85	94%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Paket	1	1	100%
2.	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang Dibeli	Paket	2	2	100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas	%	90	100	111%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	%	90	100	111%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	%	90	100	111%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Melaksanakan Diklat dengan Baik	%	90	75	83%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan yang dihadiri	Kegiatan	10	8	80%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi Pra SAKIP	Kategori	A	BB	80%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Perencanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja yang Selesai Tepat Waktu	Dokumen	4	4	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen selesai tepat waktu	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Sengketa/masalah yang Berhasil terselesaikan dengan Baik	%	80	90	113%
1.	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Persentase Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	%	85	90	106%
2.	Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa/Masalah yang Berhasil Terselesaikan	%	85	90	106%
VI.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase Masyarakat yang Puas dengan Kegiatan Kecamatan	%	80	82	103%
		Persentase Desa yang Mendapat Pembinaan dari Kecamatan	%	100	100	100%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG)	Jumlah Desa yang Melaksanakan Administrasi Musrembang dengan Baik	Desa	10	10	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan Baik	Desa	10	8	80%
3.	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Kehadiran Anggota PKK	%	95	93	98%
4.	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang Memiliki Lingkungan yang Baik	%	80	88	110%
5.	Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Berjalan dengan Baik	%	85	85	100%
6.	Koordinasi dan operasional peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional	Persentase kegiatan hari besar berjalan dengan baik	%	90	89	99%
7.	Monitoring Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Desa dalam pelaksanaan Pemilu Berjalan dengan Aman dan Lancar	Desa	10	10	100%
8.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silatutrahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama/Tokoh Masyarakat	Persentase jumlah peserta yang hadir acara forum	%	90	88	98%
VII.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase Layanan yang Sesuai dengan SOP	%	90	85	94%
1.	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen SKM yang disusun	dokumen	1	1	100%

36.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Yaitu, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga solusinya adalah melakukan peremajaan sarana dan prasarana di tahun berikutnya.

37. Kecamatan Tlanakan

Kecamatan Tlanakan melaksanakan urusan penunjang kewilayah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

37.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 92%, dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.207.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.207.200.000,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

2) *Pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM)*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 92%, dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2018, sebesar 92%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.249.680.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.249.680.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

37.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kecamatan Tlanakan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.37

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Tlanakan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Layanan	7	7	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (PAK)	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Unit	3 Unit R2	3 Unit R2	100.00%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor(PAK)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Peralatan	1	1	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas	2	2	100.00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung kantor	1	1	100.00%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Peralatan	1	1	100.00%
6.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik	Rumah Dinas	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan formal	Aparatur	14	3	21.43%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen saki yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	6	6	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	1	1	100.00%
V.	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase sengketa masyarakat yang tertangani	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	Lokasi	2	2	100.00%
VI.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan (MUSREMBANG)	Jumlah Musrenbang desa dan kecamatan yang diselenggarakan	Musrenbang	1	1	100.00%
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	Desa	17	17	100.00%
3.	Fasilitasi Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK Yang Di Fasilitasi	PKK	17	17	100.00%
4.	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan nasional yang di koordinasikan	Hari Besar	2	2	100.00%
5.	Monitoring Pengendalian Keamanan dan Ketertiban pelaksanaan Pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	Pemilu	1	1	100.00%
6.	Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan Olahraga yang terfasilitasi	Kegiatan	1	1	100.00%

37.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikanyang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

38. Kecamatan Proppo

Kecamatan Proppomelaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan..

38.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang aktif dan efisien dengan indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 85%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 85%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.270.650.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.201.885.250,00, dan tingkat capaian anggaran 74,59%.

2) *Pelayanan masyarakat dan tata pemerintahan yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM)*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 87%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 87%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.169.424.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.130.688.500,00,dan tingkat capaian anggaran 77,14%.

38.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Proppo pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.38

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Proppo Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layananan Administrasi Perkantoran yang terakomodir dengan baik	Prosentase	100	100	100.00%

No.	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Layanan	7	7	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pengadaan Meubeleurn	Jumlah meubeleurn yang dibeli	Meubeleurn	8	8	100.00%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung Kantor	3	3	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kendaraan dinas	1	1	100.00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor/Rumah Dinas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Peralatan	9	8	88.89%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan formal	Aparatur	13	0	0.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja dengan Kualitas Baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Perencanaan program kegiatan dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen saking yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	6	6	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PAK)	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	1	1	100.00%
V.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase sengketa masyarakat yang tertangani	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah pasar yang difasilitasi	Lokasi Pasar	3	3	100.00%

No.	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VI.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan dana desa TA.2018.	Desa	27	27	100.00%
2.	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK Yang Di Fasilitasi	PKK	27	27	100.00%
3.	Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Fasilitasi Olah Raga Yang di Laksanakan	Lomba	1	0	0.00%
4.	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan HBN	Jumlah hari besar dan Keagamaan Yang dikoordinasikan	Hari Besar	2	0	0.00%
5.	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Parawisata (elegan paris)	Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan parawisata.	Lokasi Parawisata	1	1	100.00%
6.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh & Masyarakat (PAK)	Jumlah Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Silaturahmi	1	1	100.00%

38.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikanyang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

39. Kecamatan Palengaan

Kecamatan Palengaan melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

39.1. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan palengaan dengan Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan.

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan ditargetkan sebesar 76% dengan realisasinya sebesar 72%, dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 95%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.435.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.406.145.366,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 93%.

39.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Palengaan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.39

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Palengaan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100	100	100%
1.	Penyedia Jasa Kerja	Jumlah jasa kerja yang disediakan	orang	10	10	100%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Priode pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	%	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
1.	Belanja Pengadaan Tempat Parkir (PAK)	Jumlah tempat parkir yang dibangun	lokal	2	2	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	unit	1	1	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	unit	3	3	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	unit	12	12	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan	%	100	100	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	8	8	100%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	jumlah dokumen sakiip yg disusun dengan kualitas baik	dokumen	5	5	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yg disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100%
V.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100%
1.	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah pasar yang difasilitasi	pasar	1	1	100%
2.	Pendukung Penyelesaian sengketa dan masalah di Masyarakat	Jumlah sengketa dan masalah yang diselesaikan	sengketa	3	3	100%
VI.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat binaan yang aktif	%	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
		Prosentase koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100	100%
1.	Fasilitas Pegelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	desa	12	12	100%
2.	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK yang difasilitasi	desa	12	12	100%
3.	Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olah raga yang difasilitasi	item	3	3	100%
4.	Koordinasi Penguatan Sistem Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	kali	8	8	100%
5.	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Perangkat Desa dan Kelurahan	Jumlah perangkat desa dan kelurahan yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	12	12	100%
6.	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari besar Nasional (PAK)	Jumlah hari besar keagamaan dan hari besar nasional dan hari besar nasional	kali	12	12	100%
7.	Monitoring Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	kali	1	1	100%
8.	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata (elegant paris)	Jumlah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang difasilitasi	kali	1	1	100%
9.	Pembinaan POSYANDU (PAK)	Jumlah Posyandu yang difasilitasi	desa	12	12	100%
10.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/ Konsolidasi/ Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat (PAK)	Jumlah pelaksanaan forum yang difasilitasi	peserta	720	720	100%

39.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikanyang menghambat proses pelaksanaan

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

40. Kecamatan Pegantenan

Kecamatan Pegantenan melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

40.1. Sasaran Strategis

Meningkatnya efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 91,13%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 91,13%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.455.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.414.644.910,00, dan tingkat capaian anggaran 91,13%.

40.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pegantenan pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.40

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Pegantenan Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	87,46	87,46%
1.	Pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi layanan perkantoran yang efektif	Jumlah	5	5	100.00%
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	84,18	84,18%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang diadakan	Unit	4	4	100.00%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	1	1	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Unit	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	4	4	100.00%
III.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100	83,55	83,55%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur	9	5	55.56%
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
1.	Perencanaan program kegiatan dan laporan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan pelaporan yang disusun	Dokumen	5	5	100.00%
2.	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (PAK)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	1	1	100.00%
V.	Program pengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi penanganan kelancaran arus lalu lintas pasar	Jumlah pasar yang di fasilitasi	pasar	1	1	100.00%
2.	Pendukung penyelesaian sengketa dan masalah (PAK)	Jumlah potensi sengketa yang dimonitoring	potensi	2	2	100.00%
VI.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan	Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	50	50.00%
1.	Pembinaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan (Musrenbang)	Jumlah musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	Musrenbang Kecamatan	1	1	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa	13	13	100.00%
3.	Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK yang terfasilitasi	Kelompok Organisasi	3	3	100.00%
4.	Fasilitasi peningkatan kualitas kelestarian lingkungan di wilayah kecamatan (PAK)	Jumlah wilayah yang terfasilitasi	Desa	13	13	100.00%
5.	Fasilitasi kepemudaan dan olah raga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olah raga yang terfasilitasi	Cabor	8	0	0.00%
6.	Koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan (PAK)	Jumlah koordinasi penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan di kecamatan	Desa	13	13	100.00%
7.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dan kelurahan	Jumlah perangkat desa dan kelurahan yang mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme	Perangkat desa	75	75	100.00%
8.	Koordinasi dan operasional peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan hari besar nasional	Peringatan	3	3	100.00%
9.	Koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	pemilu	2	2	100%
10.	Koordinasi kerjasama pelaksanaan tentara manunggal membangun desa (TMMD) (PAK)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi	3	3	100%
11.	Pelaksanaan forum rekonsiliasi/ konsolidasi/silaturahmi pimpinan daerah bersama Ulama/tokoh masyarakat (PAK)	Jumlah peserta silaturahmi	peserta	650	650	100%
VII.	Program pelayanan administrasi kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	100	100%
1.	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah survey yang dilaksanakan	survey	2	2	100%

40.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang di hadapi adalah :

- 1) Pada kegiatan dan pelatihan formal tingkat capaian kinerja sebesar 55,56% permintaan diklat dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat hanya sebesar 5 orang.
- 2) Kegiatan ini untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga yang di laksanakan di Kecamatan sedangkan pada tahun 2018 tidak dilaksanakan PORKAB oleh Pemerintah Daerah.

41. Kecamatan Pakong

Kecamatan Pakong melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

41.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 92%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 92%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.289.822.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.289.822.000,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%.

2) *Pelayanan Masyarakat dan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM).*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 92%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 92%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.200.880.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.200.880.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

41.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pakong pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.41

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Pakong Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	Prosentase	100	100	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	Layanan	7	7	100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (PAK)	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Unit	3	3	100%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor(PAK)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Peralatan	9	9	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas	1	1	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung kantor	1	1	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Peralatan	17	17	100%
6.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik	Rumah Dinas	1	1	100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosentase	100	100	100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan formal	Aparatur	14	3	21%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	Prosentase	100	100	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen saku yang disusun dengan kualitas baik	Dokumen	6	6	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	1	1	100%
V.	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase sengketa masyarakat yang tertangani	Prosentase	100	100	100%
1.	Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	Lokasi	2	2	100%
VI.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	Prosentase	100	100	100%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan (MUSREMBANG)	Jumlah Musrenbang desa dan kecamatan yang diselenggarakan	Musrenbang	13	13	100%
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	Desa	12	12	100%
3.	Fasilitasi Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan dan PKK Yang Di Fasilitasi	PKK	12	12	100%
4.	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan nasional yang di koordinasikan	Hari Besar	2	2	100%
5.	Monitoring Pengendalian Keamanan dan Ketertiban pelaksanaan Pemilu	Jumlah pemilu yang di monitoring	Pemilu	1	1	100%
6.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat (PAK)	Jumlah Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Silaturahmi	1	1	100%

41.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal adalah minimnya permintaan diklat dari Pemerintah Kabupaten atau Provinsi.

42. Kecamatan Kadur

Kecamatan Kadur melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan..

42.1. Sasaran Strategis

1) *Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 90%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 90%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.151.000.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.151.000.000,00, sehingga tingkat capaian anggaran 100 %.

2) *Pelayanan masyarakat dan tata pemerintahan yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM).*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 90%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.149.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

42.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kadur pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.42

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Kadur Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir dengan Baik	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terakomodir	layanan	7	7	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Peralatan	6	6	100.00%
2.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Gedung Kantor	1	1	100.00%
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	unit	3	3	100.00%
4.	Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Peralatan Gedung Kantor	6	6	100.00%
5.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik	Gedung Kantor	6	6	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	prosentase	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	Aparatur	12	12	100.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan Dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen saki yang di susun dengan kualitas baik	Dokumen	6	6	100.00%
V.	Program Menginsentifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase sengketa masyarakat yang tertangani	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Fasilitas Penanganan Kelancaran Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar yang terfasilitasi	Lokasi	5	4	100.00%
VI.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase layanan administrasi Kecamatan yang terakomodir dengan baik	prosentase	100	100	100%
1.	Peningkatan PATEN dan SINDES	Jumlah peningkatan layanan Kecamatan yang di Akomodir	layanan	7	7	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
VII.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah	Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan dengan kualitas yang baik	Prosentase	100	100	100.00%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan	Jumlah musrenbang Desa dan Kecamatan yang diselenggarakan	Musrenbang	10	10	100.00%
2.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	10	10	100.00%
3.	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan dan PKK yang difasilitasi	PKK	10	10	100.00%
4.	Fasilitasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi	porkab	10	10	100.00%
5.	Koordinasi dan Oprasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan dan Nasional yang di koordinasikan	Hari Besar	2	2	100.00%
6.	Monitorin Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Pemilu yang di monitoring	Pemilu	1	1	100.00%
8.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	aparatur	10	10	100.00%
9.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/ Konsolidasi/ Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama/ Tokoh dan Masyarakat (PAK)	Jumlah organisasi perempuan dan pkk yang terfasilitasi	Desa	12	12	100.00%

42.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

43. Kecamatan Waru

Kecamatan Waru melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

43.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan*

Pada tahun 2018, prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.246.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.241.356.000,00 dan tingkat capaian anggaran 97,91%.

2) *Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja prosentase desa yang menyusun APBDesa dengan kualitas baik dan prosentase desa yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik.*

Pada tahun 2018, prosentase desa yang menyusun APBDesa dengan kualitas baik ditargetkan sebesar 95% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 105,26%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.49.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran 100%.

pada tahun 2018, prosentase desa yang melaksanakan musrenbang dengan kualitas baik ditargetkan 95% dengan realisasi 100%, dan tingkat capaian kinerja 105,26%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.49.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran 100%.

3) *Meningkatnya koordninasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja prosentase rekomendasikan hasil koordinasi dan fasilitasi bidang*

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2018, prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.113.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan sejahtera dengan indikator kinerja prosentase desa yang berprestasi minimal di tingkat kabupaten dan prosentase lembaga kemasyarakatan aktif.

Pada tahun 2018, prosentase desa yang berprestasi minimal di tingkat kabupaten. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

Pada tahun 2018, prosentase lembaga kemasyarakatan aktif sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

43.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Waru pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.43

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Waru Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100	100	100.00%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terakomodir	Bulan	12	12	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	100	100.00%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	item	1	1	100.00%
2.	Pengadaan mebeuler kantor	Jumlah meubeler yang diadakan	unit	2	2	100.00%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	unit	1	1	100.00%
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	unit	1	1	100.00%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	unit	6	6	100.00%
6.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(PAK)	Jumlah gedung kantor yang direhab	unit	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100	100	100.00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	18	18	100.00%
IV.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Prosentase masyarakat yang puas dengan pelayanan kecamatan	%	100	100	100.00%
1.	Pengembangan dan operasionalisasi aplikasi pelayanan masyarakat	Jumlah aplikasi pelayanan terpadu yang dikembangkan	item	1	1	100.00%
2.	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	desa	12	12	100.00%
3.	Fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pariwisata	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	desa	12	12	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100	100	100.00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Sakip yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	5	5	100.00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PAK)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100.00%
VI.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat	• Prosentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100.00%
1.	Fasilitasi kelancaran arus lalu lintas pasar	Jumlah pasar yang difasilitasi	kali	12	12	100.00%
VII.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	• Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
		• Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	%	100	100	100.00%
1.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas dan profesionalisme	orang	18	18	100.00%
2.	Fasilitasikepemudaan dan olahraga	Jumlahkegiatankepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	Kali	3	3	100,00%
3.	Koordinasi dan Oprasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang dikoordinasikan	kali	6	6	100.00%
4.	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi / Konsolidasi / Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama / Tokoh dan Masyarakat (PAK)	Jumlah forum rekonsiliasi/konsolidasi/silaturahmi yang dilaksanakan	kali	1	1	100.00%
5.	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga (PAK)	Jumlah organisasi perempuan dan pkk yang terfasilitasi	Desa	12	12	100.00%

43.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

44. Kecamatan Batumarmar

Kecamatan Batumarmarmelaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

44.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatkan efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat.ditargetkan dengan pagu. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.322.892.300,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.322.892.300,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar 85%.

2) *Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum kecamatan dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM).*

Pada tahun 2018, indeks kepauasan masyarakat ditargetkan dengan pagu. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.170.000.000,00, dan tingkat capaian anggaran sebesar100%.

44.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Batumarmar pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.44
Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Batumarmar Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Prosentase layanan adm.perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	6	6	100%
1.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran yang efektif	Layanan	6	6	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
II.	Program Peningkatan dan pendukung kualitas kinerja Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	4	4	100%
2.	Pengadaan meubeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit	15	15	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya gedung rumah Dinas	unit	1	1	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung gedung kantor	unit	1	1	100%
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang layak pakai	unit	2	2	100%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung kantor	paket	4	4	100%
7.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya kendaraan operasional	unit	1	1	100%
8.	Pembangunan Paving	Terpenuhinyan sarana kenyamanan layanan	M2	1	1	100%
9.	Rehap ringan gedung kantor	Terpenuhinyan sarana kenyamanan sistem pelayanan	paket	1	1	100%
10.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	10	10	100%
III.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	*	100%	100%	100%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	jumlah laporan kegiatan kinerja yang dihasilkan	dokumen	7	7	100%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	1	1	100%
IV.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase sengketa masyarakat yang tertangani	%	80%	80%	100%
1.	Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah pasar yang terfasilitasi	Paket	1	1	100%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
2.	Pendukung penyelesaian sengketa dan masalah	jumlah pengaduan yang diselesaikan dengan baik	Desa	13	13	100%
3.	Monitoring Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pemilu	jumlah pemilu yang dilaksanakan dengan baik	Paket	13	13	100%
V.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik	%	80%	80%	100%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Prosentase desa yang melaksanakan musrenbang dengan baik	desa	13	13	100%
2.	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	jumlah desa yang terfasilitasi	desa	13	13	100%
3.	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	jumlah organisasi perempuan dan PKK	desa	13	13	100%
4.	Fasilitas kepemudaan dan olahraga	jumlah kepemudaan dan olahraga yang terfasilitasi	desa	13	13	100%
5.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dan kelurahan	jumlah aparatur desa yang terfasilitasi	desa	13	13	100%
6.	Koordinasi dan operasional peringatan hari besar keagamaan dan hari besar	jumlah hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang dikoordinasikan	desa	13	13	100%
7.	rekonsiliasi silaturahmi pimpinan daerah bersama ulama/tokoh masyarakat	forum silaturahmi terfasilitasi dengan baik	desa	13	13	100%

44.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 tidak terdapat masalah signifikan yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

45. Kecamatan Pasean

Kecamatan Pasean melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

45.1. Sasaran Strategis

1) *Meningkatnya efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah dengan indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan unit kerja ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 93%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 93%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.127.033.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.127.033.500,00, dan tingkat capaian anggaran 100%.

2) *Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum kecamatan dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat.*

Pada tahun 2018, indeks kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 95%, dan tingkat capaian kinerja sebesar 95%. Adapun dukungan anggaran sebesar Rp.334.266.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.330.656.500,00, sehingga tingkat capaian anggaran 98,92%.

45.2. Program dan Kegiatan

Target, realisasi, capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pasean pada tahun 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.45

Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Pasean Tahun 2018

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100	100	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%
1.	Kegiatan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran yang Efektif	layanan	4	4	100.00%
2.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Jumlah Musrenbang Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	Desa	9	9	100.00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100.00%
1.	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (PAK)	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan	item	3	3	100.00%
2.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Gedung Rumah Dinas	unit	1	1	100.00%
3.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang layak Pakai	unit	1	1	100.00%
4.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	unit	1	1	100.00%
5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan Baik	paket	1	1	100.00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	9	9	100.00%
1.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	9	9	100.00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja dengan Kualitas Baik	%	100	100	100.00%
1.	Kegiatan Perencanaan program kegiatan dan Laporan Kinerja	jumlah laporan kegiatan kinerja yang dihasilkan	dokumen	4	4	100.00%
	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PAK)	jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	2	2	100.00%

No.	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6/5 x 100%</i>
V.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani dengan baik	%	100	100	100.00%
1.	Kegiatan Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah Di Masyarakat	Jumlah sengketa yang diselesaikan dengan baik	Desa	9	9	100.00%
VI.	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi sesuai SOP dan tepat waktu	%	100	100	100.00%
1.	Kegiatan Penertiban Lalu Lintas Pasar	Jumlah pasar yang terfasilitasi	Desa	2	2	100.00%
2.	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata (Elegan Paris)	Jumlah tempat wisata yang terfasilitasi	Desa	9	9	100.00%
VII.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	100	100.00%
1.	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa	9	9	100.00%
2.	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi Perempuan dan PKK	Desa	9	9	100.00%
3.	Kegiatan Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Kepemudaan dan olah raga yang terfasilitasi	Desa	9	9	100.00%
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Perangkat Desa	Jumlah aparat desa yang terfasilitasi	Desa	9	9	100.00%
5.	Kegiatan Koordinasi dan Oprasional Peringatan hari besar Keagamaan dari besar Nasional	Jumlah hari besar keagamaan yang dikoordinasikan	Desa	9	9	100.00%
6.	Kegiatan Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama Ulama/Tokoh dan Masyarakat (PAK)	Forum Silaturahmi terfasilitasi dengan baik	Silaturahmi	1	1	100.00%

45.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 terdapat masalah yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1) Kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran memiliki sisa anggaran;
- 2) Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor (PAK) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di DPA;
- 3) Adanya sisa anggaran dari kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Kecamatan Pasean meliputi:

- 1) Mengembalikan sisa anggaran ke kasda;
- 2) Pengadaan disesuaikan dengan barang yang ada dengan mengurangi anggaran yang ada.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tanggungjawab pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Timur membangun daerah kota/kabupaten tidak selalu harus menjadi urusan dan dilaksanakan sendiri langsung di lapangan dan alasan keterbatasan aparatur dan tenaga pelaksana, serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan desentralisasi, sebagian urusan pemerintah pusat dan provinsi akhirnya diserahkan kepada daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Sudah barang tentu, sebagai pelaksana tugas pembantuan dari pusat atau provinsi, daerah tidak bisa sepenuhnya menentukan sendiri program dan apa yang diberikan atau diterimakan kepada mereka. Pemerintah pusat maupun provinsi dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah.

Bagaimana tugas pembantuan diberikan dan kemudian dilaksanakan, prosedur dan monitoringnya telah diatur sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada 3 asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah

penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten.

Tugas pembantuan perlu diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dengan kata lain tugas pembantuan diberikan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Di samping itu, pemberian tugas pembantuan juga ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dengan mendasarkan pada ketiga asas tersebut memberikan konsekuensi logis pada pengaturan pendanaan. Artinya seluruh urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 94 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga

kepada kepala daerah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan gubernur, bupati atau walikota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga dikemukakan bahwa penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Di samping itu pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas serta pemeriksaan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh BPK dan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pada tahun 2018 tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pamekasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disajikan sebagai berikut:

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tidak semua SKPD menerima tugas pembantuan dari pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah SKPD dan program dari pusat maupun provinsi yang menerima tugas pembantuan sepanjang tahun 2018 tercatat ada empat SKPD, yaitu Dinas Sosial, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

➤ Dinas Sosial

Dinas Sosial di tahun 2018 mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial RI. Program yang diterima Dinas Sosial ada dua, yaitu : Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, sedangkan nama kegiatan yang dimaksud adalah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni (RS-Rutilahu); dan Program bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP). Nama kegiatan dari program ini adalah Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dasar Hukum pelaksanaan program pembantuan yang diterima Dinas Sosial untuk kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah Surat dari kementerian Sosial Nomor 1381/PFM.PFMPD/BS/11/2018 tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu). Sedangkan untuk kegiatan UEP-KUBE, dasar hukumnya adalah Surat dari Kementerian Sosial Nomor 1381/PFM.PFMPD/BS/11/2018 tentang Usaha Ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).

Kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Klampar dan Desa Jambringin, Kecamatan Proppo. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.000.000, yang semua dimanfaatkan untuk merehabilitasi rumah warga miskin yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

Untuk kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok usaha (UEP-KUBE), lokasi kegiatan ada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pamekasan, Proppo, Pasean dan Kecamatan Waru. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan UEP-KUBE sebesar Rp. 17.000.000. Dana sebesar ini semua telah dimanfaatkan di lapangan, sesuai target kelompok sasaran yang ditetapkan.

➤ **Dinas Perikanan**

Di tahun 2018, Dinas Perikanan memperoleh alokasi anggaran dan tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pelaksanaan program pembantuan ini adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.07.4.059490/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

Program yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan adalah Pengelolaan Ruang Laut. Sedangkan nama kegiatannya adalah Penataan dan Pemanfaatan Kelautan (Pengembangan Usaha garam Rakyat) dengan alokasi anggaran yang dikucurkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.029.000.000, tetapi yang terserap di tahun 2018 hanya sebesar Rp. 2.167.879.100. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Majungan1 dan Desa Majungan 2.

➤ **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, di tahun 2018 memperoleh amanah tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI. Program yang diperbantukan adalah Program pengembangan perdagangan dalam negeri. Sedangkan nama kegiatan yang dimaksud adalah Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah DIPA-090.02.4.4017772/2018. Lokasi kegiatan ditetapkan di desa Palenga'an Laok. Alokasi dana yang dikucurkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 5.801.222.984,00.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Perikanan pada program pengelolaan ruang laut dengan nama kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) disalurkan kembali kepada Koperasi Serba Usaha Teratai Laut. Kegiatan ini, secara khususnya bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi garam rakyat di Pamekasan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.07.4.059490/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

Lokasi kegiatan dari tugas pembantuan yang telah disalurkan ke Koperasi Serba Usaha terletak di Desa Majungan 1 dan 2. Sumber dana kegiatan ini berasal dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran yang sebesar Rp.4.029.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.167.879.100,00. Rendahnya serapan anggaran pada tugas pembantuan yang diberikan, disebabkan calon lokasi lahan integrasi merupakan lahan perhutani yang sudah lama dikelola oleh rakyat namun sampai batas akhir pelaksanaan, rekomendasi pemanfaatan lahan oleh perhutani belum terbit dan sulitnya menentukan lahan terintegrasi seluas lebih kurang 15 hektar karena masing – masing petambak enggan untuk menjadi satu manajemen pengelolaan air. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang dapat dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementrian Lingkungan Hidup adalah memfasilitasi penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan perhutani tersebut. Sedangkan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pendekatan personal kepada calon penerima lahan terintegrasi agar berkenan menyatukan lahan dalam satu manajemen pengelolaan air.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan upaya strategis yang penting dilakukan guna merespon berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas wilayah administratif. Agar kerjasama antar daerah dapat diselenggarakan secara optimal maka yang diperlukan adalah melakukan identifikasi isu-isu strategis dan menentukan model atau bentuk kerjasama yang tepat sesuai prinsip-prinsip yang dianut pemerintah daerah serta penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya.

Secara yuridis dalam proses pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah, kerjasama dengan berbagai pihak merupakan upaya yang harus dilakukan guna membantu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 363 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kerja sama yang dilakukan daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan oleh karenanya daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dikembangkan daerah dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk kerjasama seperti : kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan/ atau Lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktivitas kerjasama yang dibangun dan dikembangkan Pemerintah Daerah selain dapat menjadi jalan keluar dan mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, langkah mengembangkan kerjasama dengan pihak lain akan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Oleh karenanya sangat ideal apabila pemerintah daerah bersikap lebih proaktif dan

kreatif dalam melakukan inovasi serta membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pembangunan secara lebih optimal.

Secara praktis kerjasama antar daerah perlu dilakukan dengan maksud dan tujuan antara lain :

- 1) Menunjang upaya mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di daerah
- 2) Memenuhi kewajiban Pemerintah daerah dalam membangun dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum
- 3) Menanggulangi masalah yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat
- 4) Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik.

Selama Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah antara lain;

- 1) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerjasama dilakukan terkait dengan bidang transmigrasi dan jenis Kegiatan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KSAD). Selanjutnya SKPD pelaksana adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan melalui sumber dana dari APBD kerjasama antar daerah ini dilakukan dengan realisasi dana sebesar 43.550.000,00 dan dilakukan selama 5 tahun dengan *output* dalam bentuk MOU dan *outcome* penempatan calon transmigrasi.
- 2) Kerjasama lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 adalah peningkatan program puskesmas dan jaringannya. Kerja sama ini dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pelaksana program kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama antara lain; Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Kegiatan kerja sama ini dilakukan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018. Sedangkan output kegiatan adalah Optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dengan *outcome* Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan pada azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang bertujuan untuk mendorong dan menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prinsip otonomi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab terutama untuk melakukan pengembangan potensi yang dimiliki daerah. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum.

Melalui kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya kerjasama dengan pihak ketiga memiliki berbagai manfaat antara lain; Dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumber daya dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia, mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha dan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Pihak Ketiga, dibangun dan dikembangkan berdasarkan pemenuhan

kebutuhan yang selama ini tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom.

Bentuk kerja sama dimaksud, antara lain; Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, Kerja sama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD dan Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi. Melalui berbagai bentuk dan pola kerjasama yang telah dibangun dan dikembangkan selama ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan swasta (*investor*) terutama dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang ditekuni.

Pihak ketiga sebagai subyek kerja sama daerah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, terdiri atas perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, juga dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD. Beberapa SKPD terkait antara lain;

➤ **RSUD dr. H. Slamet Martodidjo**

Pada tahun 2018, RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan merumuskan kebijakan dengan membangun dan mengembangkan kerjasama daerah dengan pihak ketiga baik itu dengan pihak swasta, pihak perguruan tinggi maupun kerja sama antar daerah. Kerjasama yang dilakukan dimaksudkan untuk berbagai kepentingan antara lain; Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Mendorong kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana publik serta kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan upaya penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan lahan sebagai praktik mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan dengan memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan konkrit yakni dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik itu dengan pihak swasta, pihak perguruan tinggi maupun kerjasama antar daerah. Kerjasama dimaksud antara lain;

- 1) Kerjasama dengan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya (BPFK) dengan dasar hukum Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan No. 079/2012/432.603/2018 dengan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya No. HK.03.01/XLIX.2/830/2018 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan. Bidang kerjasama berupa Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan dan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit). Jangka waktu pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan. Dukungan Anggaran sebesar Rp.225.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.679.400,00. Keluaran dari kegiatan kerjasama ini adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan melalui pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan yang dimiliki secara berkala atau periodik.
- 2) Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang dengan dasar hukum antara lain; MOU antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Universitas Brawijaya Malang Nomor : 188/136.A/432.401/2018 dan 035/UN10/KS/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Kerjasama yang baik pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Surat Permintaan dari Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor : 050/635/432.604/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permintaan Narasumber Penyusunan Rancangan Rencana Strategis RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Periode

Tahun 2018-2023 dan Surat Tugas dari Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 3302.2/UNI10.15/KS/2018 tanggal 02 Nopember 2018 perihal Tugas Narasumber Penyusunan Rancangan Rencana Strategis RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Tahun 2018-2023. Bidang kerja sama adalah Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Strategis RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Tahun 2018-2023 Tahun Anggaran 2018 dengan nama kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 6 November 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.12.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,00. Kerjasama yang dilakukan ini memiliki keluaran yakni Tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Strategis RSUD dr.H. Slamet Martodirdjo Tahun 2018-2023.

- 3) Kerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Propinsi Jawa Timur. Kerjasama ini dilakukan dengan dasar hukum antara lain; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, dan perubahannya tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Perda Nomor 10 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Propinsi Jawa Timur dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten pamekasan Nomor : 079/253/432.603/2018. Kerjasama yang dilakukan di bidang Penyelenggaraan *In House Training* dalam Penyusunan PAK, PIK, dan CP

Keperawatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Evaluasi Dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 24 Maret 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.10.812.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.812.000,00. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menyusun PAK, PIK, dan CP Keperawatan sesuai standart di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan.

- 4) Kerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Propinsi Jawa Timur. Kerjasama ini dilakukan dengan dasar hukum antara lain; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, dan perubahannya tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Perda Nomor 10 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perbup Nomor 75 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Propinsi Jawa Timur dengan RSUD dr. H.Slamet Martodirdjo Kabupaten pamekasan No. 079/253/432.603/2018. Kerjasama yang dilakukan di bidang Penyelenggaraan *In House Training* dalam Penyusunan PAK, PIK, dan CP Keperawatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Evaluasi Dan Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 24 November 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.9.588.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.588.000,00. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan *In House*

Training Workshop Manajemen dalam Pelayanan HCU (High Care Unit) di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan sebagai *output* kegiatan.

- 5) Kerjasama dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan landasan yuridis Surat Perjanjian kerjasama No. 079/1654/432.603/2018 antara RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Tentang Survei Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan. Sedangkan bidang kerjasama adalah Survei Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Pendukung Pelaksanaan Standarisasi Rumah Sakit). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.20.989.796,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.989.796,00. Kerjasama dilakukan dalam rangka memastikan rumah sakit yang telah diakreditasi mempertahankan dan meningkatkan implementasi mutu layanannya.
- 6) Kerjasama dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan landasan yuridis Surat Perjanjian kerjasama antara Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) No. 117/WS-PMKP/KARS/VI/2018 dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan No. 079/2598/432.603/2018 Tentang Kegiatan Workshop Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien. Kerjasama ini dilakukan dalam bidang kerjasama Workshop tentang Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien dan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Pendukung Pelaksanaan Standarisasi

Rumah Sakit). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Juni 2018. Dukungan Anggaran sebesar Rp.57.122.449,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.122.449,00. Kegiatan kerjasama dengan KARS dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan sesuai standart akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

- 7) Kerjasama dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan landasan yuridis Surat Perjanjian kerjasama No. 079/2570/432.603/2018 antara RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Tentang Bimbingan SNARS Edisi I RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan. Bidang kerjasamanya adalah Bimbingan SNARS Edisi I RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Pendukung Pelaksanaan Standarisasi Rumah Sakit). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal Rp.94.976.774,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.94.976.774,00. Kerjasama dilakukan dengan tujuan agar dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab dan mendapatkan hal tentang Akreditasi Rumah Sakit sesuai standart versi 2012 Untuk memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien serta mempertahankan Akreditasi sebagai predikat Paripurna.
- 8) Kerjasama dengan Akademi Keperawatan Kabupaten Pamekasan (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Kerjasama ini dilakukan dengan landasan hukum Surat Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan No. 079/2321/2018 dengan Akademi Keperawatan Pemkab Pamekasan (Lembaga

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) No. 190/AKPER/PEND-I/V/2018 Tentang Survey Kepuasan Pelanggan/IKM RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Bidang kerjasamanya adalah Survey Kepuasan Pelanggan/IKM RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dengan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat). Kurun waktu pelaksanaan kerjasama selama 1 (satu) tahun. Dukungan anggaran sebesar Rp.30.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.770.000,00. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien tentang pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo pamekasan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan di rumah sakit.

- 9) Kerjasama dengan Stikes Ngudia Husada Madura Bangkalan yang dilakukan dengan dasar hukum Surat Perjanjian kerjasama antara Stikes Ngudia Husada Madura Nomor : 0745/STIKes-NHM/C.03/IV.K/2018 dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Nomor : 079/___/432.603/2018 tentang Praktik Mahasiswa. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dalam bentuk Praktik Siswa Stikes Ngudia Husada Madura Bangkalan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) tahun. Melalui kerjasama yang dilakukan diharapkan kedua belah pihak mampu meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- 10) Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yakni Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Sumenep. Kerja sama ini dilakukan dengan dasar hukum sebagai berikut; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Keputusan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi, tanggal 15 juli 2008, Nomor : 2212/D/T/2008 perihal ijin Penyelenggaraan Program Studi DIII Kebidanan Universitas Wiraraja, Keputusan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi, tanggal 13 Agustus 2008 , Nomor : 2733/D/T/2008 perihal ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) Universitas Wiraraja dan Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 367/E/O/2012 tentang Penyelenggara Program Studi Profesi Ners Universitas Wiraraja, Surat Perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Sumenep Nomor : 576/AKM-20/FIK-Unija/II/2018 dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Nomor : 079/119/432.603/ 2018 Tentang Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) tahun. Melalui kegiatan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang berorientasi pada IPTEK dan IMTAQ serta masyarakat, mengembangkan ilmu kesehatan, meningkatkan

penyelenggaraan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja.

- 11) Kerjasama yang dilakukan dengan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo. Kerjasama dengan institusi ini dilakukan dengan dasar hukum Surat Perjanjian kerjasama antara Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Nomor : 037/111.1/STIKES/I/2018 dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Nomor : 079/051/432.603/2018 Tentang Praktik Mahasiswa Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk Praktik Mahasiswa Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan tujuan untuk mendidik tenaga kesehatan yang profesional dengan memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan dan latihan yang profesional. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) tahun.
- 12) Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yakni Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Sumenep. Kerja sama ini dilakukan dengan dasar hukum Surat Perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Nomor : 581/AKM-20/FIK-Unija/X/2018 dengan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Nomor : 079/1495/432.603/2018 Tentang Praktik Mahasiswa. Kerjasama dilakukan dalam bentuk Praktik Mahasiswa dengan tujuan mengatur segala aspek penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik sesuai dengan standart pendidikan kepaniteraan klinik, meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman peserta didik. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) tahun.

13) Kerjasama dengan pihak RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep. Kerjasama ini dilakukan dengan dasar hukum Surat Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Nomor : 079/1214/432.603/2018 dengan RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : 445/16/435.102.101/2018 Tentang Pemeriksaan *CT-SCAN*. Bidang kerjasama yang dilakukan adalah pemeriksaan *CT-SCAN* dan dengan nama kegiatan Peningkatan Layanan Dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit (Peningkatan Pelayanan Penunjang Medis Bidang Laboratorium Dan Radiologi). Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) bulan. Dukungan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dengan realiasi anggaran sebesar Rp.60.234.200,00. Melalui kerjasama yang dilakukan diharapkan akan mampu memberikan pelayanan Pemeriksaan *CT-SCAN* kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

➤ **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan instansi yang memiliki bertugas dan memfokuskan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat baca di lingkungan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Untuk kepentingan meningkatkan kesadaran dan minat baca di lingkungan masyarakat maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan lembaga pemerintah lain maupun pihak swasta. Sampai dengan tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kerjasama di Bidang Budaya Literasi dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Pamekasan, RSUD DR. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, Perjanjian kerjasama dengan SDI AL Munawwarah

Kabupaten Pamekasan, SD Plus Nurul Hikmah Kabupaten Pamekasan, dan SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Pamekasan.

Untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kerjasama dengan Coca Cola Foundation Indonesia dengan dasar hukum MOU Nomor : 041/174/432.318/2017. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga melaksanakan kerjasama di Bidang Pembentukan Pojok Baca dengan Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resor Pamekasan (MOU Nomor : 01/922/432.318/2017). Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kerja sama di Bidang Kunjungan Perpustakaan Keliling (Pusling) dan Wisata Edukasi ke Perpustakaan Umum dengan SDN Toronan 1 Kecamatan Pamekasan.

➤ **Inspektorat Daerah**

Inspektorat Kabupaten Pamekasan selama ini telah membangun dan mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam rangka meningkatkan supervisi/*review* proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kerjasama dilakukan pihak Inspektorat dengan pertimbangan masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan pendampingan *review* kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Melalui Kerjasama Pendampingan Supervisi/*review* diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selaras dengan dengan kebijakan dan tugas umum maka inspektorat pada tahun 2018 telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan tujuan meningkatkan kegiatan pengembangan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan menuju tata kelola pemerintahan

yang baik. Kegiatan kerjasama telah dilakukan dengan beberapa pihak antara lain;

- 1) Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga Dedy Syafrawi, SE dengan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 188/290b/ 432.200/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari tanggal 29 Oktober s.d. 14 Desember 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,00. Kerjasama yang dilakukan termasuk dalam bidang kerjasama ketatalaksanaan. Pihak ketiga berperan sebagai narasumber atau tenaga ahli pada kegiatan penyusunan kelas jabatan. Keluaran atau *output* kegiatan kerjasama adalah Sosialisasi, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Penyusunan Peta Jabatan dan Penyusunan Informasi Faktor Jabatan.
- 2) Kerjasama dengan PT. Prajatama Consulting Yogyakarta dengan dasar hukum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 800/309/432. 200/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari tanggal 16 November s.d. 19 November tahun 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp. 103.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.500.000. Kegiatan kerjasama dalam bentuk Bimbingan Teknis Audit dan nama kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PAK). Kegiatan kerjasama dilakukan dengan keluaran atau output dalam bentuk Bimbingan Teknis Audit atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Serta Pemanfaatannya Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
- 3) Kerjasama dengan Sdr. Susilowati, S.Sos., M.AB Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama, Naskah Kesepakatan Nomor : 700/311a/432.200/2018 tanggal 02 November 2018.

Dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan adalah sebagai narasumber atau tenaga ahli dalam kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Waktu pelaksanaan kerjasama mulai selama 2 hari (enam jam). Dukungan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,00. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan keluaran atau *output* dalam bentuk kegiatan, instruktur, diskusi dan kegiatan lain dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Periode Tahun 2018-2023.

➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka mendukung dan membantu mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan tahun 2018, antara lain:

- 1) Kerjasama di Bidang Pengamanan Bersama dengan Komando Distrik Militer 0826 dan Kepolisian Resor Pamekasan. Dasar Hukum pelaksanaan Kerjasama Nota Kesepahaman bersama antara Bupati Pamekasan, Kapolres Pamekasan, Komandan Kodim 0826 Pamekasan Nomor : 300/235/432.305/18, Nomor : B/4/VI/2018/Bagops, dan Nomor : B/225/VI/2018. Kegiatan Pengamanan bersama dilaksanakan pada Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 1 tahun. Dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.288.185.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 288.185.000,00 dan tingkat capaian kinerja sebesar

100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- 2) Kerjasama di Bidang Ketatalaksanaan. Dasar Hukum MOU Nomor : 188/525.1/432.305/2018. Pihak ketiga berperan sebagai Narasumber pada kegiatan penyusunan kelas jabatan. Dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%. Jangka waktu peaksanaan kerjasama selama 3 bulan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen kelas jabatan.
- 3) Kerjasama di Bidang Perencanaan dengan Sdr. Susilowati, S.Sos., M.AB Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan kerjasama berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/535.1/432.305/2018. Kerjasama dilaksanakan pada kegiatan penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah. Pihak ketiga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Dukungan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%. Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.

➤ **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada selama tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut catatan yang ada pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura yang dilakukan dengan dasar hukum Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, bidang yang dikembangkan dalam kerjasama ini adalah Optimalisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di mana dari aspek pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja para pihak yang melakukan kerjasama.

➤ **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu SKPD yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peningkatan kapasitas SDM serta mendorong bagi tercapainya pembangunan di desa maka pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2018 telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Selain dengan pihak perguruan tinggi SKPD ini juga telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dengan pihak ketiga pada tahun 2018 meliputi;

- 1) Kerjasama di Bidang Perencanaan dengan Universitas Brawijaya Malang. Kerjasama berdasarkan MOU Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Universitas Brawijaya Malang Nomor : 188/136.A/432.401/2018 dan 035/UNI10/KS/2018 Tanggal 13 Maret 2018. Kerjasama dilaksanakan pada Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Dukungan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) bulan. Dalam kegiatan kerjasama ini *output* atau keluarannya adalah Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2018-2023.

- 2) Kerjasama di Bidang Ketatalaksanaan dengan PT. Mitra Niaga Cipta Solusi, Jakarta. Pelaksanaan Kerjasama berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kerjasama dilaksanakan pada Kegiatan Penyusunan Kelas Jabatan dengan nama kegiatan Penyusunan Kelas Jabatan. Dukungan anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100%. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan. Keluaran atau *output* pelaksanaan kegiatan tersusun dokumen kelas jabatan.

➤ **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Pada tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam bentuk CV maupun perorangan dalam rangka meningkatkan aktivitas usaha ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha skala mikro. Kerjasama tidak hanya dimaksudkan untuk memperkenalkan produk-produk usaha yang dihasilkan masyarakat melalui kegiatan pameran, tetapi juga memberikan bantuan manajemen, pendampingan sertifikat, peningkatan akses koperasi dan sebagainya. Berikut dikemukakan beberapa kerjasama yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama tahun 2018.

- 1) Kerjasama di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan CV. Cahaya Nusantara. Kerjasama ini dilakukan dengan dasar hukum 027/20.08.3/18/432.315/2018 dan dilakukan dengan bidang kerjasama konsultan perencanaan. Nama kegiatan yang dilakukan adalah Tindaklanjut Transplantasi manajemen Usaha bagi KSP/KSPPS ke Luar Provinsi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 9.825.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.825.000. jangka waktu pelaksanaan selama 4 (empat) bulan. Output atau keluaran dari kegiatan kerjasama

ini adalah banyaknya atau jumlah pameran yang diikuti/dilaksanakan.

- 2) Kerjasama yang dilakukan dengan CV. Dokter 46, 027/20.08.4/18/432.315/2018, dengan bidang kerjasama dalam bentuk Pelaksanaan pameran. Dalam kerjasama ini nama kegiatannya adalah Tindaklanjut Transplantasi manajemen Usaha bagi KSP/KSPPS ke Luar Provinsi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 9.725.000 dengan realisasi Rp. 9.725.000. jangka waktu pelaksanaan selama 4 (empat) bulan. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah pameran yang diikuti/dilaksanakan mengalami peningkatan.
- 3) Kerjasama di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan CV. Dokter 46. Kerjasama ini dilakukan melalui dasar hukum 027/18.20.08.1/18/432.315/ SPKS/2018 dengan bidang kerjasama Pelaksanaan pameran. Secara lebih spesifik nama kegiatannya adalah Tindaklanjut Transplantasi manajemen Usaha bagi KSP/KSPPS ke Luar Provinsi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 189.355.000 dengan realisasi sebesar Rp. 189.355.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 35 hari. Kerjasama yang dilakukan ini diharapkan juga mampu meningkatkan jumlah pameran yang diikuti/dilaksanakan oleh para pelaku usaha ekonomi produktif.
- 4) Kerjasama di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan CV. Cahaya Nusantara. Kerjasama dilaksanakan dengan Dasar Hukum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/9.19.17/432.315/ SPKS/2018. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan study banding dengan nomenklatur Kegiatan Transplantasi Pemberdayaan Koperasi Syariah ke Luar Daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp. 32.025.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.025.000. jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 36 hari. Kegiatan kerjasama

ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat pelaku ekonomi memperoleh wawasan atau pengetahuan terkait dengan koperasi syariah untuk selanjutnya mampu menerapkannya dalam upaya pemberdayaan koperasi di wilayah masing-masing.

- 5) Kerjasama di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan CV. Cahaya Nusantara. Dasar hukum Pelaksanaan Kerjasama, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/9.19.14/432.315/SPKS/2018. Kerjasama dalam bentuk kegiatan pemberian sertifikat tanah dengan nomenklatur Kegiatan Peningkatan Akses Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT). Dukungan anggaran sebesar Rp.37.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.37.000.000. jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 45 hari. Melalui kerjasama dilakukannya kerjasama ini diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah sertifikat yang diberikan/diserahkan pada masyarakat pelaku usaha ekonomi dengan skala mikro.
- 6) Kerjasama di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan CV. Cahaya Nusantara dengan dasar hukum Surat Perintah Kerja Nomor : 027/9.19.18/432.315/SPK/2018. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelaksanaan pengisian/pemenuhan produk UKM dengan nomenklatur Kegiatan Sinergitas Kerjasama Koperasi/Usaha Mikro dengan Koperasi/Usaha Pasar Luar daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp.13.425.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.425.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 45 hari. Melalui kegiatan kerjasama ini diharapkan jumlah produk yang dipasarkan juga mengalami peningkatan.
- 7) Kerjasama di Bidang Ketatalaksanaan dengan Sdr. Edi Purwanto, SE. Pelaksanaan Kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/723/432.315/2018.

Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendampingan/penunjukan sebagai narasumber dalam Penyusunan Kelas Jabatan. Dukungan anggaran sebesar Rp.25.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.25.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 2 (dua) bulan. Melalui kegiatan ini maka *output* atau keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya kelas jabatan yang berkualitas baik.

- 8) Kerjasama di Bidang Perencanaan dengan Sdr. Susilowati, S.Sos.M.AB. Dasar Hukum Perlaksanaan Kerjasama, Nota Kesepakatan Nomor : 700/627/432.315/2018. Bentuk kerjasama pendampingan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pihak ketiga berperan sebagai narasumber selama proses penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pelaksanaan kerjasama ini, diharapkan dapat tersusun dokumen renstra yang berkualitas baik.

➤ **Dinas Perikanan**

Pada Tahun 2018, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dari berbagai institusi baik dengan lembaga pendidikan seperti SMK maupun perguruan tinggi dan yayasan serta insitusi yang lainnya. Bentuk kerjasama juga relatif beragam tidak hanya menyangkut penyusunan dokumen perencanaan melainkan juga melakukan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Secara lebih rinci kerjasama yang telah dilakukan Dinas Perikanan dengan pihak ketiga antara lain;

- 1) Kerjasama dengan Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Kerjasama ini dilakukan dengan berbagai dasar hukum MOU antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Universitas Brawijaya Malang Nomor : 188/136.A/432.401/2018 dan 35/UN10/KS/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Kerjasama yang Baik pada

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Surat permintaan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Nomor : 523/919.2/432.318/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Permohonan Narasumber Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, Surat Tugas dari Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 3115/UN10.15/KS/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Surat Tugas Tim Narasumber Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Kerjasama ini dilakukan dengan bidang kerjasama perencanaan pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Perencanaan Perangkat Daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp.6.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.6.000.000. jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 2 (dua)/ 4 jam.

- 2) Kerjasama di Bidang Ketatalaksanaan dengan Sdr. Dedy Syafrawi, SE. Dasar Hukum Kerjasama Perjanjian Kerjasama Nomor : 188/25/432.319/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Pihak ketiga berperan sebagai Narasumber/Tenaga Ahli dalam Penyusunan Kelas Jabatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun dokumen kelas jabatan yang berkualitas baik.
- 3) Kerjasama yang dilakukan dengan SMK Ibnu Cholil Bangkalan. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan. Kerjasama dilakukan dengan Dasar Hukum Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indinonesia Nomor 19 dan 22 Tahun 2009. Bidang kerjasama

yang dilakukan adalah Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) untuk meningkatkan layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan.

➤ **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan kerjasama baik dengan maupun perorangan. Kerjasama dilaksanakan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kerjasama Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan dengan Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Trunojoyo Madura, dan Badan Pusat Statistik Pamekasan.

Dasar pelaksanaan kerjasama adalah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Universitas Brawijaya Nomor : 188/136.A/432.401/2018 – 035/UN10/KS/2018 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Universitas Trunojoyo Madura Nomor : 134.4/387.1/432.401/2018 – 20/UN46/KS2018 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.

Kerjasama tersebut, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang merupakan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selama tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kerjasama dengan LPPM - UNIVERSITAS BRAWIJAYA (An. SUSENOHAJI, SE., ME.) Pihak Ketiga berperan Ahli/Instruktur Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Dukungan Anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 , dengan Realisasi anggaran Rp 50.000.000,00 berdasarkan

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/57.5/432.401/2018 mulai tanggal 06 Agustus s.d 11 Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

- 2) Pelaksanaan kerjasama dengan LPPM - UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Pihak Ketiga berperan Tenaga Ahli/Instruktur Penyusunan/Reviu Indikator Kinerja Daerah. Dukungan Anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 00 , dengan Realisasi anggaran Rp 75.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/58.01/432.401/SPKS/2018 - 1590/UN10.C10/KS/2018 mulai tanggal 01 Oktober s.d 14 Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Reviu Indikator Kinerja.
- 3) Pelaksanaan Kerjasama dengan LPPM - UNIVERSITAS BRAWIJAYA (An. SUSENOHAJI, SE., ME.). Pihak Ketiga berperan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. Dukungan anggaran sebesar Rp 3.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 3.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/64/432.401/2018 mulai tanggal 06 Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Narasumber Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- 4) Pelaksanaan Kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. SELAMET JOKO UTOMO, SE., ME.). Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.680.000,00

- berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/37/432.401/2018 mulai tanggal 09 April s.d. 24 April 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. TRIPITONO ADI PRABOWO, SE.ME.). Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Dukungan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.680.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/38/432.401/2018 mulai tanggal 09 April s.d. 24 April 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
- 6) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. SELAMET JOKO UTOMU, SE.ME.). Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Pendampingan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019. Dukungan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.680.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/43/432.401/2018 mulai tanggal 27 Juni s.d. 11 Juli 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019.
- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. SELAMET JOKO UTOMO, SE.ME.). Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Pendampingan Penyusunan Rancangan (RKPD) Perubahan. Dukungan anggaran sebesar Rp.37.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.500.000,00 berdasarkan Surat

Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/56.1/432.401/2018 mulai tanggal 25 Juni s.d. 06 Juli 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya Rancangan (RKPD) Perubahan.

- 8) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. HENNY OKTAVIANI, SE.ME.). Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Pendampingan Penyusunan Rancangan (RKPD) Perubahan Dukungan Sebesar Rp 37.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp37.500.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/56.2/432.401/2018 mulai tanggal 25 Juni s.d 06 Juli 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya Rancangan (RKPD) Perubahan.
- 9) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. SELAMET JOKO UTOMO, SE.ME.). Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Dukungan anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 50.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/57.1/432.401/2018 mulai tanggal 06 Agustus s.d 11 Nopember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- 10) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. TRIPITONO ADI PRABOWO, SE.ME.) Pihak Ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Dukungan Anggaran sebesar RP 50.000.000,00 dengan Realisasi anggaran Rp 50.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/57.2/432.401/2018 mulai tanggal 06 Agustus s.d 11

Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

- 11) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. KHOIRUL ROSADI, PhD.) Pihak Ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli / Instruktur Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Dukungan Anggaran sebesar RP 50.000.000,00, dengan Realisasi anggaran Rp 50.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/57.3/432.401/2018 mulai tanggal 06 Agustus s.d 11 Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- 12) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. SELAMET JOKO UTOMO, SE., ME.). Pihak Ketiga berperan Tenaga Ahli/Instruktur Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Dukungan Anggaran sebesar Rp 50.000.000,00, dengan Realisasi anggaran Rp 50.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/57.4/432.401/2018 mulai tanggal 06 Agustus s.d 11 Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- 13) Pelaksanaan kerjasama dengan LPM-UTM BANGKALAN (An. SELAMET JOKO UTOMO, SE., ME.). Pihak Ketiga berperan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs). Dukungan anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 , dengan realisasi anggaran Rp 3.900.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 700/65.1/432.401/2018 mulai

tanggal 20 September 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusun Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs).

- 14) Pelaksanaan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penyusunan Profil Daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp.18.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.600.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/34/432.401/2018 mulai tanggal 09 April s.d. 03 Desember 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya dokumen Penyusunan Profil Daerah.
- 15) Pelaksanaan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penyusunan Profil Kecamatan. Dukungan anggaran sebesar Rp.41.925.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.925.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/51/432.401/2018 mulai tanggal 03 September s.d. 30 November 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunnya dokumen Penyusunan Profil Kecamatan.
- 16) Pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Airlangga. Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017. Dukungan anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/01.01/432.401/SPK/2018 mulai tanggal 10 Januari s.d. 09 April 2018. Keluaran atau output dari kegiatan ini, tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2017.

17) Pelaksanaan Kerjasama dengan Universitas Airlangga. Pihak ketiga berperan sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati. Dukungan anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/02.01/432.401/SPK/2018 mulai tanggal 10 Januari 2018 s.d. 09 April 2018. Keluaran atau output kegiatan ini, tersusunya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati.

➤ **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, telah dilaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak. Kerjasama tidak hanya dilaksanakan dengan institusi pendidikan saja, melainkan juga dengan pihak swasta serta lembaga internal yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berikut kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2018.

- 1) Kerjasama di Bidang Ketatalaksanaan dengan PT. Mitraniaga Cipta Solusi. Dasar Hukum kerjasama, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 188/1400.A/432.403/2018. Pihak ke tiga menyediakan Narasumber dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kelas Jabatan 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.25.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.25.000.000. jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) bulan. Kegiatan ini diharapkan tersusun dokumen kelas jabatan yang berkualitas baik.
- 2) Kerjasama di Bidang Perencanaan dengan Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Dasar Hukum pelaksanaan kerjasaman, Perjanjian Kerjasama Nomor 188/1332.A/432.403/2018. Dalam kerjasama ini,

pihak ketiga menyediakan Narasumber dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp.9.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.000.000. jangka waktu kegiatan kerjasama selama 3 (tiga) bulan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.

- 3) Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Dasar Hukum pelaksanaan, MOU Nomor : 893.3/28003/205.2/2018 dan Nomor : 893.3/848.A/432.403/2018. Dalam pelaksanaan kegiatan, pihak ketiga memfasilitasi pelaksanaan Diklat PIM II/Pratama. Dukungan anggaran sebesar Rp.54.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.48.805.000. jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 4 (empat) bulan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 4) Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dengan Dasar Hukum MOU Nomor: 893.3/242.A/432.403/2018 dan Nomor : 893.3/7756/205.3/2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.778.500. Jangka waktu pelaksanaan kerjamasam selama 6 (enam) hari. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 5) Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Dasar Hukum Kerjasama MOU Nomor : 893.3/914/432.403/2018 dan Nomor : 893.3/30352/205.3/ 2018. Dukungan anggaran sebsar Rp.100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.63.473.000. jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 6 (enam) hari.

Bidang kerjasama dalam bentuk kediklatan dengan jenis kegiatan Diklat Teknis bagi PNS Daerah/Laporan Kinerja.

- 6) Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Dasar Kerjasama MOU Nomor : 893.3/1240.A/432,403/2018 dan Nomor : 893.3/47751/205.3/2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.100.000.000 Dengan realisasi Rp.64.442.400. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 6 (enam) hari. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, untuk membekali Aparatur Sipil Negara dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam.
- 7) Kerjasama di Bidang Keamanan dengan Kepolisian Resor Pamekasan. Dasar Hukum Kerjasama Surat Kepolisian Resor Pamekasan Nomor : B/1667/X1/SIP.II/2018. Tujuan pelaksanaan kerjasama untuk pengamanan kegiatan rekrutmen CPNS. Dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.12.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 18 hari.
- 8) Kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar Hukum Kerja Sama, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Nomor : 900/565/432.403/2018. Dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 dengan realisasi Rp.3.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 18 hari. Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterbiban pelaksanaan rekrutmen CPNS.

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengembangkan kerjasama dengan mitra pihak ketiga yakni dengan 2 tenaga ahli. Berikut ini dikemukakan kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 1) Kerjasama dengan Tenaga ahli dengan Dasar Hukum Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013. Kerjasama dengan melibatkan tenaga ahli ini masuk dalam bidang kerjasama penyusunan kelas jabatan dengan nama kegiatan Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK). Dukungan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 Dengan realisasi sebesar Rp. 24.650.000. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan.

- 2) Kerjasama dengan tenaga ahli dengan Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka penyusunan Renstra. Oleh sebab, itu jenis kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja. Dukungan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 Dengan realisasi sebesar Rp. 15.775.000. Jangka Waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan.

➤ **Sekretariat Daerah**

Bagian Perekonomian dan SDA

Selama tahun 2018 Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan telah melakukan sejumlah kegiatan kerjasama dengan mitra pihak ketiga dalam rangka mengoptimalkan kinerja sesuai tupoksi institusi. Berbagai bentuk kegiatan telah dilakukan terkait dengan penghematan energi listrik, distribusi BBM, distribusi LPG, peredaran pupuk bersubsidi, koordinasi pengembangan BUMD, pengembangan potensi air minum dalam kemasan, manajemen perkantoran dan peningkatan SDM dan sebagainya. Secara lebih rinci Bagian perekonomian dan SDA selama tahun 2018 telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain;

- 1) Kerjasama dengan Rendy Herdijanto, SE.M.Ak (Kasi Konservasi Energi Dinas ESDM Prov. Jatim) sebagai

- narasumber dengan kegiatan sosialisasi hemat energi listrik dan air. Dukungan anggaran sebesar Rp. 1.200.000 Dengan realisasi Rp. 1.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.
- 2) Kerjasama dengan Erlangga Prabhasasri (SE BBM Retail IV PT. Pertamina Surabaya) sebagai narasumber dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 2.000.000 Dengan realisasi Rp. 1.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.
 - 3) Kerjasama dengan Agna Eria Denta (staf sales marketing LPG) sebagai narasumber dalam kegiatan monitoring dan evaluasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 2.000.000 Dengan realisasi Rp. 1.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.
 - 4) Kerjasama dengan Syariful Iman Dion (AE PT. Pupuk Kaltim) sebagai narasumber dalam kegiatan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 Dengan realisasi Rp. 1.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.
 - 5) Kerjasama dengan Syariful Iman Dion (AE PT. Pupuk Kaltim) sebagai narasumber dalam kegiatan koordinasi penyusunan alokasi pupuk bersubsidi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 1.950.000 Dengan realisasi Rp. 1.500.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.
 - 6) Kerjasama dengan CV. Persada Taman Sari dengan bidang kerjasama dalam bentuk sewa tempat penginapan hotel, sewa mobilitas darat, Sewa pakaian adat tradisional, dan sewa peralatan kesenian daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp. 141.000.000 Dengan realisasi Rp. 140.645.000. Jangka

waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 5 (lima) hari. Seluruh jenis kerjasama tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Nusantara Expo dan/atau forum lainnya.

- 7) Kerjasama dengan Lestari Rahajoe (Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur) sebagai narasumber dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana pajak rokok. Dukungan anggaran sebesar Rp. 3.500.000 Dengan realisasi Rp. 1.500.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.
- 8) Kerjasama dengan Ratna Kartika Sari (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) sebagai narasumber dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana pajak rokok. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari.
- 9) Kerjasama dengan CV. Widi Prakarsa Consulting sebagai jasa konsultasi pengembangan SPM dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi peningkatan dan pengembangan BUMD. Dukungan anggaran sebesar Rp. 50.199.500 Dengan realisasi Rp. 50.187.500. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 2 (dua) hari.
- 10) Kerjasama dengan Drs. H. Ashari Hardiono (Direktur Eksekutif Persatuan PAM Indonesia (PERPAMSI) sebagai narasumber dalam kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan BUMD. Kegiatan ini dilakukan dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000 dan realisasi Rp. 12.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 1 (satu) hari.

Bagian Umum

Dalam tahun 2018 Bagian Umum Kabupaten Pamekasan telah melakukan kerjasama dengan mitra pihak ketika yakni Bank Jatim dengan bentuk kegiatan sewa lahan ukuran 4 x 4 meter halaman

kantor pemda barat dan pemda timur. Kegiatan ini dilakukan dengan besar anggaran yakni Rp.13.200.000,00. Namun demikian dalam realisasinya kegiatan ini hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp.8.800.000,00 dengan masa sewa selama 3 Tahun, mulai 2 September Tahun 2017.

Bagian Hukum

Dalam kurun waktu tahun 2018 Bagian Hukum Kabupaten Pamekasan telah melakukan beberapa kegiatan dengan dukungan mitra pihak ketiga. Output atau keluaran yang dihasilkan juga beragam sesuai dengan tupoksi institusi tersebut yakni; menyusun rumusan raperda, rumusan raperbup, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta arahan terhadap muatan Raperda, melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta arahan terhadap muatan Raperda. Kerjasama dilakukan secara personal dengan berbagai pihak yang didasari oleh perjanjian kerja sama. Berikut secara rinci kerjasama yang dilakukan Bagian Hukum Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018.

- 1) Kerjasama dengan Achmad Mukhlisin, SH, MH. Kerjasama secara personal ini dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 188/02/432.013/2018. Dalam kerjasama ini bidang kerjasama sebagai Tenaga Ahli Pembentukan Peraturan Daerah. Dengan tugas dalam Pembahasan Peraturan Daerah. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000 Dengan realisasi Rp. 12.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 12 bulan.
- 2) Kerjasama dengan Achmad Mukhlisin, SH, MH. Kerjasama secara personal ini dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 188/02C/432.013/2018. Dalam kerjasama ini bidang kerjasamanya sebagai Tenaga Ahli Pembentukan Peraturan Bupati. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000 Dengan

realisasi sebesar Rp. 12.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 12 bulan.

- 3) Kerjasama dengan Fannan Hanani, SH, MH dengan didasari oleh Perjanjian Kerjasama Nomor 188/02A/432.013/2018. Bidang kerjasamanya adalah narasumber yang bertugas untuk Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah Pembahasan Peraturan Daerah. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 12 bulan.
- 4) Kerjasama dengan Jempin Marbun, SH, MH dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 188/02B/432.013/2018. Bidang kerjasamanya adalah Narasumber Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dengan jenis kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 12.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.600.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 12 bulan.

Bagian Organisasi

Untuk mendukung kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tupoksi yang melekat dalam institusi maka pada tahun 2018 Bagian Organisasi telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni; CV. Mukti Pratama Konsultan dan CV. Mitra Government. *Output* atau keluaran dalam kerjasama tersebut adalah tersusunya Dokumen LKJiP tepat waktu dan sesuai ketentuan dan dokumen peta proses bisnis disusun sesuai ketentuan. Berikut ini dikemukakan pihak yang menjadi mitra kerjasama Bagian Organisasi pada Tahun 2018.

- 1) Kerjasama dengan pihak CV. Mukti Pratama Konsultan dengan tujuan untuk melakukan penyusunan laporan kinerja organisasi perangkat daerah. Bidang kerjasama yang dilakukan adalah Penyusunan LKJiP Kabupaten Pamekasan

dan nama kegiatannya Penyusunan laporan kinerja organisasi perangkat daerah. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.950.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 3 bulan.

- 2) Kerjasama dengan CV. Mitra Government dengan tujuan untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Oleh sebab itu jenis kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 84.755.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 3 bulan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam tahun 2018 Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan telah melakukan sejumlah kerjasama dengan mitra pihak ketiga dengan memfokuskan perhatian pada aktivitas keagamaan. Jenis kegiatan yang dilakukan beragam baik dalam bentuk ceramah agama, dialog, sidang isbat, peringatan maulid Nabi, kegiatan peringatan Nuzulul Qur'an dan sebagainya. Berikut dikemukakan secara detail kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018.

- 1) Kerjasama dengan dengan dasar MOU Antara Kepala Bagian Kesra dengan KH. A Taufiq Hasyim Tentang Penceramah Kegiatan Fasilitasi Dialog Rutin Ulama Umara Nomor: 450/190/432.112/2018. Dukungan anggaran sebesar Rp. 450.000 dengan realisasi sebesar Rp. 450.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 6x pertemuan. Dalam kerjasama ini kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi Dialog Rutin Ulama dan Umara dengan KH. A Taufiq Hasyim sebagai penceramah tersebut.

- 2) Kerjasama dengan KH. Ali Rahbini Latif dengan dasar hukum MOU Antara Kepala Bagian Kesra dengan KH. Ali Rahbini Latif Tentang Penceramah Fasilitas Peringatan Isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW Nomor : 188/61.1/432.012/2018. Kegiatan kerjasama dilakukan dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga peran Kiai adalah Sebagai Penceramah Fasilitas Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dukungan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 dalam Jangka waktu 1x kegiatan.
- 3) Kerjasama dengan Drs. H. Mat Busiril, MH. Melalui MOU Antara Kepala Bagian Kesra dengan Kantor Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pelaksanaan Fasilitas Sidang Isbat Tahun 2018 Nomor: 450/206.1/432.012/2018. Dalam kerjasama ini mitra berposisi sebagai Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dengan tugas memberikan fasilitas Sidang Isbat. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 90.920.000 dengan realisasi sebesar Rp. 90.920.000 dan Jangka waktu pelaksanaan kerjasama 1x kegiatan.
- 4) Kerjasama dengan Rizal Umami dengan dasar MOU Antara Kepala Bagian Kesra Dengan Rizal Umami Tentang Qari' Peringata Nuzulul Qur'an 1439H Tahun 2018 Nomor : 450/139/432/.012/2018. Dalam kerjasama ini mitra sebagai Qari' yang bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 300.000 dan jangka waktu pelaksanaan selama 1x kegiatan.
- 5) Kerjasama dengan Moch. Syafii dengan dasar MOU Antara Kepala Bagian Kesra Dengan Ketua Tim Patwal Kepolisian Resort Pamekasan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas

Pelepasan dan Jema'ah Haji Tahun 2018 Nomor : 450/169.2/432.012/2018. Dalam kerjasama ini mitra berperan sebagai Petugas Pengawal Rangkaian Kegiatan Fasilitas Pelepasan dan Penyambutan kedatangan Jamaah Haji. Dengan demikian jenis kegiatan yang dilakukan adalah Fasilitas Pelepasan dan Penyambutan kedatangan Jamaah Haji. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.000.000 dan jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 2 kali kegiatan.

- 6) Kerjasama dengan Moch. Sholehoddin Abrori yang dilakukan dengan dasar hukum MOU Antara Kepala Bagian Kesra Dengan Moh. Sholehoddin Abrori Tentang Qori pada Kegiatan Fasilitas Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H/2018M Nomor: 450/240.1/432.012/2018. Dalam kegiatan ini mitra sebagai Qari' dengan jenis kegiatan Fasilitas Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 300.000 dan Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 1 kali kegiatan.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2018 Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa telah melakukan kerjasama dengan mitra pihak ketiga yakni Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD JATIM dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD JATIM. Bidang kerjasama dilakukan dalam bentuk narasumber. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku baik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Daerah Kab. Pamekasan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Daerah Kab. Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018,

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018.

Berikut bentuk kerjasama yang dilakukan bagian layanan pengadaan barang jasa Kabupaten Pamekasan tahun 2018 dengan mitra pihak ketiga;

- 1) Kerjasama dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD JATIM yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Daerah Kab. Pamekasan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp. 55.000.000 dengan realisasi Rp. 54.119.780. jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) bulan. Dalam kegiatan ini posisi mitra sebagai narasumber dan kegiatannya adalah melakukan Pembinaan e-Procurement System Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- 2) Kerjasama dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD JATIM yang didasari oleh dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Daerah Kab. Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018. Dukungan anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 64.678.400. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 3 (tiga) bulan. Kegiatan ini memposisikan mitra sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pada tahun 2018 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yakni Universitas Madura. Kegiatan ini dilandasi oleh dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 dan 22 Tahun 2009. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret tahun 2018 s.d. 26 Maret Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

➤ **Sekretariat DPRD**

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja, peran dan fungsi legislatif sesuai dengan tupoksi yang diemban dalam kurun waktu tahun 2018 sekretariat DPRD telah melakukan kerjasama dengan mitra pihak ketiga. Menurut catatan yang ada pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan adalah LPPM Universitas Brawijaya. Bagi pihak sekretariat DPRD kerjasama ini sangat penting sebab melalui kerjasama yang dilakukan tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman tentang tupoksi DPRD tetapi juga dapat memberikan pemahaman tentang tupoksi komisi dan tersusunnya Raperda. Selanjutnya pada tahun 2018 sekretariat DPRD telah melakukan kerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya dalam berbagai jenis aktivitas antara lain;

- 1) Bimbingan teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 495.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 414.067.308 dengan Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 3 hari.
- 2) Bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan SDM Komisi. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 557.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 410.401.891. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 3 hari.
- 3) Kajian Akademik Raperda melalui kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya.

Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 2.352.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.710.506.337. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 2 hari.

- 4) Kajian akademik Raperda Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 2.352.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.710.506.337. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 2 hari.

➤ **Kecamatan Pamekasan**

Pada Tahun 2018, Kerjasama dikembangkan oleh Kecamatan Pamekasan dengan perguruan tinggi dan pihak swasta. Kerjasama dengan pihak ketiga sangat dibutuhkan terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Pamekasan. Di samping berperan dalam memberikan asistensi dalam proses penyusunan rencana strategis pembangunan kerjasama dengan pihak ketiga sangat penting kaitannya dengan penyusunan dokumen kelas jabatan. Berikut dikemukakan kerjasama yang telah dilakukan Kecamatan Pamekasan selama tahun 2018.

- 1) Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang yang dilandasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bidang kerjasama yang dilakukan terkait dengan Naskah kesepakatan Pelaksanaan Teknis Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamekasan tahun 2018-2023 Tahun Anggaran 2018. Sedangkan jenis kegiatan yang dilakukan adalah Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dukungan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dimulai tanggal 25 Oktober s.d. 26 Oktober.
- 2) Kerjasama dengan PT Mitra Niaga Ciptasolusi dengan dasar hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Bidang kerjasama yang dilakukan adalah visitasi/kunjungan langsung dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan, pengolahan data, dan evaluasi jabatan kecamatan dan kelurahan Kabupaten Pamekasan. Oleh karenanya jenis kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Kelas Jabatan. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 71.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 57.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dimulai tanggal 29 Oktober Tahun 2018 s.d. 14 Desember Tahun 2018

➤ **Kecamatan Galis**

Kecamatan Galis telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri. Kegiatan kerjasama dilakukan untuk kepentingan melakukan penyusunan Restra kecamatan Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang dengan dasar hukum DPA SKPD No. 3.08.08.06.06. Kerjasama yang dilakukan dalam Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Galis. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 2 bulan. Melalui Kegiatan ini, diharapkan tersusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas baik.

➤ **Kecamatan Pakong**

Pada tahun 2018 Kecamatan Pakong telah melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. Kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Brawijaya Malang didasari oleh landasan hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sedangkan bidang kerjasamanya adalah Naskah kesepakatan Pelaksanaan Teknis Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong tahun 2018-2023 Tahun

Anggaran 2018. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 3 hari.

➤ **Kecamatan Kadur**

Pada tahun 2018 Kecamatan Kadur melakukan kerjasama dengan mitra pihak ketiga yakni dengan Universitas Brawijaya Malang. Kerjasama ini dibangun atas dasar Permendagri nomor 86 tahun 2017 dengan bidang kerjasama MOU. Sementara itu jenis kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan kerjasama ini sangat penting dilakukan agar dapat mendukung tersusunya Dokumen Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Periode Tahun 2018-2023. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 3 hari.

➤ **Kecamatan Batumarmar**

Pada tahun 2018 Kecamatan Batumarmar melakukan kerjasama dengan mitra pihak ketiga yakni dengan Universitas Brawijaya Malang. Kerjasama ini dibangun atas dasar Permendagri nomor 86 tahun 2017 dengan bidang kerjasama MOU. Sementara itu jenis kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan kerjasama ini sangat penting dilakukan agar dapat mendukung tersusunya Dokumen Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Batumarmar Periode Tahun 2018-2023. Dukungan anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dilakukan selama 2 hari.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk membantu

pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal 1 point (18) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni; “Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”. Urusan Pemerintahan Umum menurut Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan”. Urusan pemerintahan umum tersebut selanjutnya dilimpahkan kewenangannya oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan umum tersebut kepada Camat. Urusan pemerintahan umum tersebut, merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan urusan *konkuren* atau urusan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan dari instansi vertikal di wilayahnya masing-masing.

Sehubungan dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni; “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, dan FORKOPIM Kecamatan. FORKOPIMDA Provinsi diketuai oleh Gubernur, FORKOPIMDA kabupaten diketuai oleh Bupati, dan FORKOPIMDA Kota diketuai oleh Walikota serta FORKOPIM Kecamatan diketuai oleh Camat. Anggota FORKOPIMDA Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas;

- 1) Pimpinan DPRD
- 2) Pimpinan Kepolisian
- 3) Pimpinan Kejaksaan
- 4) Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah

Sedangkan anggota dari FORKOPIM Kecamatan, terdiri dari unsur sebagai berikut;

- 1) Pimpinan Kepolisian
- 2) Pimpinan Kewilayahan TNI di Kecamatan.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas dan kecamatan membantu pemerintah daerah dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum diwilayah kerjanya. Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 7 (tujuh) jenis, seperti yang diatur pada Pasal 25 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini adalah untuk menunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan Umum tersebut lebih berorientasi kepada pembinaan, pengembangan, koordinasi dan penanganan konflik masyarakat di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- 1) *Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Indikator Kinerja Prosentase Konflik SARA di masyarakat yang difasilitasi.*

Prosentase Konflik SARA di masyarakat yang difasilitasi ditargetkan sebesar 10% dengan realisasi 10% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dukungan Anggaran sebesar Rp. 811.300.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.811.300.500,00 dan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%.

- 2) *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dengan indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik dan Persentase partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.*

Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik 75% dengan realisasi kinerja sebesar 80% dan tingkat capaian kinerja sebesar 106,67%. Persentase partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi kinerja sebesar 85% dan tingkat capaian kinerja sebesar 106,25%. Dukungan anggaran sebesar Rp.954.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.954.000.000,00 dan tingkat capaian anggaran sebesar 100,00%

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan program dan kegiatan melalui SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 6.1

Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan perangkat daerah	Indikator kinerja program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terakomodir Dengan Baik	Persentase	100	100	100,00%
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diakomodir dan difasilitasi	Kali	48	48	100,00%
2.	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah layanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Layanan	7	7	100,00%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Prosentase	100	100	100,00%
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	Unit	4	4	100,00%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	gedung kantor	2	2	100,00%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas/ Operasional	mobil dinas	3	3	100,00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	34	34	100,00%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	Prosentase	100	100	100,00%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	Aparatur	12	12	100,00%
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas baik	Persentase	100	100	100,00%
1.	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	jumlah dokumen (RKT, LKPJ, PK, LAKIP) yang ada	Dokumen	4	4	100,00%
2.	Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Dokumen	1	1	100,00%
3.	pengelolaan/ Pengembangan Aplikasi Berbasis	jumlah Aplikasi yang dikelola (Simpede,	Aplikasi	4	4	100,00%

	Teknologi Informasi	Simkeuda, Tepra, Website)				
4.	Penyusunan Kelas Jabatan	jumlah ASN yang mempunyai Kelas Jabatan	Dokumen	1	0	0,00%
V.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peninkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan	Prosentase	80	85	106,25%
1.	Pemantapan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik	Jumlah Peserta Pendidikan Pendahuluan bela negara bagi Siswa/siswi SLTA/Sederajat	Peserta	100	100	100,00%
2.	Pemantapan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Bagi Santri dilingkungan Pondok Pesantren	Jumlah Peserta Pendidikan Pendahuluan bela negara bagi Siswa/siswi SLTA/Sederajat	Peserta	100	100	100,00%
3.	Pemantapan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Bagi Ustad dan Ustadzah VIII dan IX	jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan bagi santri di lingkungan pondok pesantren	Peserta	450	450	100,00%
4.	Pemantapan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Bagi Pelajar	Jumlah Peserta Pemantapan Wawasan Kebangsaan terhadap Ustadz/ustadah	Peserta	450	450	100,00%
5.	Diklat Pembentukan Kader Bela Negara	Jumlah Peserta Diklat Pembentukan Kader Bela Negara	Peserta	100	100	100,00%
6.	Gelar Kompetensi Pengetahuan Wawasan Kebangsaan	Jumlag Peserta Gelar Kompetensi Pengetahuan Wawasan Kebangsaan	Peserta	800	800	100,00%
7.	Pemahaman HAM Bagi Wanita	Jumlah Peserta Pemahaman HAM bagi Wanita	Peserta	100	100	100,00%
8.	Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara	Jumlah Peserta Upacara	Peserta	500	500	100,00%
9.	Pengiriman Delegasi Lomba Cerdas Cermat Pancasila ke Propinsi Jawa Timur	Jumlah Peserta Delegasi Lomba Cerdas Cermat Pancasila ke Propinsi Jawa Timur	Peserta	9	9	100,00%
VI.	Program Kewaspadaan Nasional	Prosentase Pencegahan potensi Konflik	Persen	80	80	100,00%
1.	Penunjang Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4,00	100,00%
2.	Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4,00	100,00%
3.	Penunjang kegiatan komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4,00	100,00%
VII.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase Ormas , PARPOL, dan LSM yang aktif	Prosentase	75	75	100,00%

1.	Fasilitasi pemberian bantuan Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang difasilitasi	Kali	4	4	100,00%
2.	monitoring pelaksanaan pemilihan umum Gubernur/ wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Legislatif	Putaran	2	2	100,00%
3.	Sosialisasi Kebijakan Peraturan tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pilpres/Pilkada bag Pemilih Pemula	Jumlah Peserta yang ikut sosialisasi	Peserta	800	800	100,00%
4.	Pembinaan LSM Dalam Rangka Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah LSM yang difasilitasi	LSM aktif	110	100	90,91%
5.	Pembinaan Badan/Lembaga dan Ormas	JumlahBadan/Lembaga/ Ormas yang difasilitasi	Ormas	115	100	86,96%
6.	Fasilitasi Koordinasi Forum LSM	Jumlah Ormas/lembaga/badan yang di fasilitasi	Kali	4	4	100,00%

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum terdiri dari 7 jenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti dinyatakan pada Pasal 25 ayat (5) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa; Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Demikian juga untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat pemerintah kecamatan juga dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.

Namun secara realita, walaupun penyelenggaraan urusan pemerintahan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sampai saat belum dibiayai melalui APBN seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur khusus tentang FORKOPIMDA, tentunya secara tidak langsung dapat menghambat pemerintah daerah dan FORKOPIMDA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, agar FORKOMPIMDA memiliki aturan yang jelas dalam fungsi membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden. Sedangkan langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, menanggulangi biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan secara bersama - sama dengan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Penentuan batas daerah secara pasti di lapangan sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan batas wilayah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Adapun kegiatan pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan adalah :

- 1) Rencana pengembangan jalur utara – selatan perbatasan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;
- 2) Jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kecamatan Proppo dengan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan Kecamatan Pakong dengan Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
- 3) Ancaman daerah rawan bencana abrasi disepanjang bagian pesisir utara – selatan wilayah administrasi Kabupaten Sampang dan Sumenep.
- 4) Peningkatan aksesibilitas antar wilayah Kabupaten Sampang dan Sumenep;
- 5) Pengembangan pariwisata dengan Kabupaten dan Sumenep.
- 6) perencanaan dan pengembangan potensi wilayah pesisir utara – selatan kawasan perbatasan.
- 7) Kerjasama dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan.

Pelaksanaan realisasi kegiatan pembinaan batas daerah dengan Kabupaten Sampang :

- 1) Pengadaan kesepakatan rencana pengembangan jalur utara-selatan perlu ditingkatkan mengenai kondisi badan jalan (dimensi/lebar, perkerasan, badan dan bahu jalan) rencana kedepan jalur utara ditingkatkan menjadi jalan tol melalui Wilayah Kabupaten Pamekasan (Batumarmar – Pasean), Wilayah Kabupaten Sampang (Banyuates – Ketapang – Sokobanah) sedangkan jalur selatan Wilayah Kabupaten Pamekasan Wilayah Kabupaten Sampang (Camplong – Sampang – Torjun – Jrengik) perlu adanya peningkatan badan jalan (dimensi/lebar, perkerasan, badan dan bahu jalan) yang merupakan salah satu rencana strategis kedua Kabupaten.
- 2) Pengadaan kesepakatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang perlu adanya peningkatan (dimensi/lebar, perkerasan, badan dan bahu jalan, fungsi dan kualitas jalan) untuk memperlancar aksesibilitas pergerakan moda transportasi yang melintas antara perbatasan kabupaten, dan pengelolaannya memerlukan kerjasama antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 3) Sinkronisasi kesamaan perencanaan didalam menghadapi ancaman daerah rawan bencana abrasi disepanjang bagian pesisir utara – selatanwilayah administrasi, sehingga koordinasi dan antisipasi dapatdilakukan secara bersama.
- 4) Pengadaan kesepakatan kesamaan dalam menghadapi ancaman daerah rawan bencana banjir dan longsor di sepanjang kawasan perbatasan, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi bersama.
- 5) Pengadaan Kesepakatan bahwa terkait dengan peningkatan aksesibilitas antar wilayah, perlu dikembangkan transportasi yang mendukung pergerakan baik orang, barang dan jasa. Serta dalam

pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan secara bersama antara kedua kawasan perbatasan tersebut.

- 6) Pengadaan kesepakatan pengembangan pariwisata guna menarik wisatawan baik lokal/mancanegara, sehingga perlu adanya penyusunan jadwal atau kalender wisata yang disusun secara bersama.
- 7) Koordinasi perencanaan dan pengembangan potensi wilayah pesisir utara-selatan kawasan perbatasan secara bersama, Wilayah Utara Kabupaten Pamekasan (Pasean – Batumarmar), Wilayah Utara Kabupaten Sampang (Sokabanah – Ketapang – Banyuates) dan Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Pamekasan (Larangan – Galis – Pademawu – Tlanakan), Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Sampang (Camplong – Sampang – Torjun – Sreseh).
- 8) Pengadaan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam sinkronisasi perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan secara bersama, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan realisasi kegiatan pembinaan batas daerah dengan Kabupaten Sumenep :

- 1) Pengadaan kesepakatan rencana pengembangan jalur utara-selatan perlu ditingkatkan mengenai kondisi badan jalan (dimensi/lebar, perkerasan, badan dan bahu jalan) rencana kedepan jalur utara ditingkatkan mejadi jalan tol melalui Wilayah Kabupaten Pamekasan (Batumarmar – Pasean), Wilayah Kabupaten Sumenep (Pasongsongan – Ambunten – Dasok – Mondung) sedangkan jalur selatan Wilayah Kabupaten Pamekasan (Larangan – Galis – Pademawu – Tlanakan), Wilayah Kabupaten Sumenep (Pragaan – Bluto – Saronggi – Kalianget) perlu adanya peningkatan badan jalan (dimensi/lebar, perkerasan, badan dan bahu jalan) yang merupakan salah satu rencana strategis kedua Kabupaten.
- 2) Pengadaan kesepakatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Pakong di Pamekasan dan Guluk-guluk di Sumenep perlu adanya peningkatan (dimensi/lebar,

perkerasan, badan dan bahu jalan, fungsi dan kualitas jalan) untuk memperlancar aksesibilitas pergerakan modal transportasi yang melintas antara kedua perbatasan kabupaten, dan pengelolaannya memerlukan kerjasama antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- 3) Sinkronisasi kesamaan perencanaan didalam menghadapi ancaman daerah rawan bencana abrasi disepanjang bagian pesisir utara – selatan wilayah administrasi, sehingga koordinasi dan antisipasinya dilakukan secara bersama.
- 4) Pengadaan kesepakatan kesamaan dalam menghadapi ancaman daerah rawan bencana banjir dan longsor di sepanjang kawasan perbatasan, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi bersama.
- 5) Pengadaan Kesepakatan bahwa terkait dengan peningkatan aksesibilitas antar wilayah, perlu dikembangkan moda transportasi yang mendukung pergerakan baik orang, barang dan jasa. Serta dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dan disinkronisasikan secara bersama antara kedua kawasan perbatasan tersebut.
- 6) Pengadaan kesepakatan pengembangan pariwisata guna menarik wisatawan baik lokal/mancanegara, sehingga perlu adanya penyusunan jadwal atau kalender wisata yang disusun secara bersama.
- 7) Koordinasi perencanaan dan pengembangan potensi wilayah pesisir utara–selatan kawasan perbatasan secara bersama, Wilayah Utara Kabupaten Pamekasan (Pasean – Batumarmar), Wilayah Utara Kabupaten Sumenep (Pasongsongan – Ambunten – Dasuk – Batu putih – Batang Batang – Dungkek) dan Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Pamekasan (Larangan – Galis – Pademawu – Tlanakan), Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep (Pragaan – Bluto – Saronggi – Kalianget – Gapura Dungkek – Kepulauan Sumenep) dalam perencanaan dan pengembangan potensi wilayah pesisir utara – selatan kawasan perbatasan dalam penyusunannya perlu dikoordinasikan secara bersama.

Pengadaan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan yang akan selalu disinkronisasikan secara bersama, demi mewujudkan pembangunan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2018 berbagai jenis bencana telah melanda masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Menurut data yang ada dalam kurun waktu setahun berbagai jenis bencana telah terjadi antara lain; banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, hujan deras disertai petir dan sebagainya. Bencana alam yang terjadi telah menyebabkan kerusakan baik pada rumah penduduk maupun fasilitas umum yang ada sehingga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Memperhatikan lokasi bencana terlihat bahwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pamekasan terlihat tersebar di berbagai wilayah baik di daerah pegunungan maupun daerah pantai. Memperhatikan potensi dan berbagai jenis bencana alam yang pernah terjadi maka sangat dibutuhkan langkah yang bersifat antisipatif dan penanganan serius agar kondisi warga masyarakat yang mengalami bencana alam tidak semakin menderita bahkan mengalami kesulitan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir berbagai jenis bencana alam telah dialami warga masyarakat Kabupaten Pamekasan sehingga menimbulkan kerugian dan kerusakan yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Bencana alam banjir, angin puyuh, kebakaran tidak saja menyebabkan warga masyarakat terpaksa kehilangan rumah atau tempat tinggal tetapi banjir yang melanda sebagian wilayah tidak jarang telah mengakibatkan warga masyarakat terpaksa kehilangan mata pencaharian akibat lahan pertanian diterpa banjir. Akibat tanah longsor dan jembatan yang terputus telah memberikan efek terhadap sulitnya masyarakat mengalami mobilitas fisik bahkan kadang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Masjid dan mushola yang rusakpun juga telah menyebabkan aktivitas ibadah yang mereka dilakukan masyarakat terganggu.

Memperhatikan akibat dan kerugian yang harus ditanggung warga masyarakat serta efek yang ditimbulkan oleh berbagai jenis bencana alam maka pemerintah harus melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan serta penanganan yang serius agar korban bencana alam kehidupannya semakin menderita.

Selama tahun 2018 kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pamekasan masih dalam skala relatif kecil dan dapat ditanggulangi secara maksimal oleh BPBD Kabupaten Pamekasan beserta SKPD terkait lainnya sehingga belum ditetapkan sebagai lokal, regional maupun nasional. Jenis bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pamekasan diakibatkan oleh fenomena alam seperti hujan deras disertai petir dan angin puting beliung yang telah menyebabkan banjir, tanah longsor, kerusakan rumah penduduk dan jembatan serta berbagai jenis kerusakan yang lainnya. Di samping bencana yang disebabkan oleh fenomena alam di Kabupaten Pamekasan juga ditemukan bencana kebakaran yang menyebabkan kerusakan rumah, garasi dan kandang ternak. Menurut data yang ada pada tahun 2018 hampir setiap bulan selalu terjadi bencana baik yang disebabkan oleh fenomena alam maupun kelalaian manusia. Berbagai jenis bencana yang dialami oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Pamekasan sepanjang tahun 2018 dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 6.2

Bencana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2018

No.	Jenis Bencana	Waktu Kejadian	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Angin Puting Beliung	Rabu, 3 Januari Tahun 2018, jam 08.30 WIB	Kec. Pamekasan	Kel. Kangingan
2	Angin Puting Beliung	Rabu, 3 Januari Tahun 2018, jam 13.00 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Pasanggar
3	Angin Puting Beliung	Kamis, 4 Januari Tahun 2018, jam 19.45 WIB	Kec. Pamekasan	Kel. Parteker

4	Angin Puting Beliung	Jum'at, 5 Januari Tahun 2018, jam 07.00 WIB	Kec. Pamekasan	Kel. Patemon
5	Angin Puting Beliung	Senin, 8 Januari Tahun 2018, jam 13.45 WIB	Kec. Pamekasan	Kel. Barurambat Kota
6	Angin Puting Beliung	Rabu, 10 Januari Tahun 2018, jam 13.30 WIB	Kec. Pademawu	Ds. Jarin
7	Angin Puting Beliung	Rabu, 10 Januari Tahun 2018, jam 12.15 WIB	Kec. Kadur	Ds. Pamaroh
8	Angin Puting Beliung	Rabu, 10 Januari Tahun 2018, jam 09.45 WIB	Kec. Galis	Ds. Konang
9	Angin Puting Beliung	Kamis, 11 Januari Tahun 2018, jam 08.00 WIB	Kec. Pademawu	Kel. Lawangan Daya
10	Angin Puting Beliung	Jum'at, 12 Januari Tahun 2018, jam 15.20 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Plakpak
11	Angin Puting Beliung	Jum'at, 12 Januari Tahun 2018, jam 09.30 WIB	Kec. Waru	Ds. Tampojung Prenggih
12	Angin Puting Beliung	Jum'at, 12 Januari Tahun 2018, jam 15.30 WIB	Kec. Pamekasan	Kel. Patemon
13	Angin Puting Beliung	Jum'at, 12 Januari Tahun 2018, jam 15.30 WIB	Kec. Larangan	Ds. Larangan Luar
14	Angin Puting Beliung	Senin, 15 Januari Tahun 2018, jam 09.30 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Lesong Laok
15	Angin Puting Beliung	Selasa, 16 Januari Tahun 2018, jam 14.00 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Batubintang
16	Angin Puting Beliung	Senin, 22 Januari Tahun 2018, jam 13.45 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Blaban

17	Angin Puting Beliung	Rabu, 24 Januari Tahun 2018, jam 12.45 WIB	Kec. Proppo	Ds. Groóm
18	Angin Puting Beliung	Rabu, 24 Januari Tahun 2018, jam 17.45 WIB	Kec. Waru	Ds. Tampojung Prenggih
19	Angin Puting Beliung	Kamis, 25 Januari Tahun 2018, jam 19.20 WIB	Kec. Proppo	Ds. Groóm
20	Angin Puting Beliung	Kamis, 25 Januari Tahun 2018, jam 19.20 WIB	Kec. Proppo	Ds. Samiran
21	Angin Puting Beliung	Kamis, 25 Januari Tahun 2018, jam 15.45 WIB	Kec. Proppo	Ds. Samatan
22	Angin Puting Beliung	Jum'at, 26 Januari Tahun 2018, jam 10.00 WIB	Kec. Waru	Ds. Tampojung Prenggih
23	Angin Puting Beliung	Senin, 29 Januari Tahun 2018, jam 14.00 WIB	Kec. Larangan	Ds. Panagguan
24	Angin Puting Beliung	Senin, 29 Januari Tahun 2018, jam 12.00 WIB	Kec. Larangan	Ds. Taraban
25	Angin Puting Beliung	Senin, 29 Januari Tahun 2018, jam 13.20 WIB	Kec. Proppo	Ds. Pangbatok
26	Angin Puting Beliung	Selasa, 30 Januari Tahun 2018, jam 09.30 WIB	Kec. Larangan	Ds. Larangan Luar
27	Longsor	Jum'at, 2 Februari Tahun 2018, jam 14.00 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Bujur Barat
28	Batu jatuh dari bukit	Minggu, 4 Februari Tahun 2018, jam 09.00 WIB	Kec. Waru	Ds. Waru Timur
29	Tenggelam	Jum'at, 9 Februari Tahun 2018, jam 14.00 WIB	Kec. Palengaan	Ds. Palengaan Laok

30	Angin kencang	Minggu, 18 Februari Tahun 2018, jam 12.15 WIB	Kec. Pakong	Ds. Bicolorong
31	Angin kencang	Senin, 19 Februari Tahun 2018, jam 12.45 WIB	Kec. Pademawu	Kel. Barurambat Timur
32	Banjir	Sabtu, 24 Februari 2018, jam 17.00 WIB	Kec. Larangan	Ds. Kaduara Barat
33	Banjir	Sabtu, 10 Maret Tahun 2018, jam 02.00 WIB	Kec. Galis	Ds. Konang
34	Kebakaran	Selasa, 15 Mei Tahun 2018, jam 01.30 WIB	Kec. Palengaan	Ds. Kacok
35	Kebakaran	Rabu, 16 Mei Tahun 2018, jam 15.15 WIB	Kec. Galis	Ds. Galis
36	Rumah Roboh	Selasa, 5 Juni Tahun 2018, jam 10.00 wib	Kec. Pamekasan	Ds. Nyalabuh Daya
37	Angin Puting Beliung	Jumát, 22 Juni Tahun 2018, jam 13.00 WIB	Kec. Waru	Ds. Tampojung Prenggih
38	Kebakaran	Jumát, 29 Juni Tahun 2018, jam 12.00 WIB	Kec. Proppo	Ds. Srambah
39	Kebakaran	Ju'mat, 6 Juli Tahun 2018, jam 07.00 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Bujur Tengah
40	Kebakaran	Rabu, 18 Juli Tahun 2018, jam 07.30 WIB	Kec. Tlanakan	Ds. Bukek
41	Kebakaran	Kamis, 19 Juli Tahun 2018, jam 13.00 WIB	Kec. Tlanakan	Ds. Bandaran

42	Kebakaran	Selasa, 24 Juli Tahun 2018, jam 13.40 WIB	Kec. Proppo	Ds. Jambringin
43	Kebakaran	Jum'at, 3 Agustus jam Tahun 2018, jam 10.30 WIB	Kec. Pakong	Ds. Bajang
44	Kebakaran	Selasa, 21 Agustus Tahun 2018, jam 14.50 WIB	Kec. Palengaan	Ds. Palengaan
45	Kebakaran	Rabu, 30 Agustus Tahun 2018, jam 20.30 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Bujur Tengah
46	Kebakaran	Rabu, 30 Agustus Tahun 2018, jam 22.00 WIB	Kec. Batumarmar	Ds. Bujur Tengah
47	Kebakaran	Senin, 3 September Tahun 2018, jam 00.30 WIB	Kec. Larangan	Ds. Peltong
48	Kebakaran	Selasa, 4 September Tahun 2018, jam 14.00 WIB	Kec. Galis	Ds. Pegandingan
49	Kebakaran	Rabu, 12 September Tahun 2018, jam 11.15 WIB	Kec. Larangan	Ds. Taraban
50	Angin Puting Beliung	Sabtu, 22 September Tahun 2018, jam 14.00 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Bulangan Barat
51	Kebakaran	Sabtu, 22 September Tahun 2018, jam 09.15 WIB	Kec. Palengaan	Ds. Rek-kerrek
52	Angin Puting Beliung	Kamis, 27 September Tahun 2018, jam 12.00 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Bulangan Barat

53	Tenggelam	Minggu, 21 Oktober Tahun 2018, jam 09.20 WIB	Kec. Palengaan	Ds. Akkor
54	Kebakaran	Jumát, 2 November Tahun 2018, jam 09.00 WIB	Kec. Tlanakan	Ds. Ambat
55	Hujan Lebat	Sabtu, 3 November Tahun 2018, jam 07.00 WIB	Kec. Larangan	Ds. Larangan Luar
56	Hujan Lebat	Jum'at, 9 November Tahun 2018, jam 12.00 WIB	Kec. Larangan	Ds. Duko Timur
57	Angin Puting Beliung	Minggu, 11 November Tahun 2018, jam 13.30 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Tlagah
58	Angin Kencang dan Hujan Lebat	Sabtu, 17 November Tahun 2018, jam 19.30 WIB	Kec. Larangan	Ds. Peltong
59	Angin Kencang dan Hujan Lebat	Sabtu, 17 November Tahun 2018, jam 19.30 WIB	Kec. Larangan	Ds. Larangan Luar
60	Angin Kencang dan Hujan Lebat	Jum'at, 30 November Tahun 2018, jam 05.00 WIB	Kec. Larangan	Ds. Larangan Luar
61	Angin Puting Beliung	Minggu, 9 Desember Tahun 2018, jam 12.00 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Plakpak
62	Angin Puting Beliung	Kamis, 13 Desember Tahun 2018, jam 04.00 WIB	Kec. Pegantenan	Ds. Bulangan Haji
63	Hujan Lebat	Jum'at, 14 Desember Tahun 2018, jam 00.15 WIB	Kec. Tlanakan	Ds. Ceguk

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan sejumlah aktivitas dalam rangka penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan antara lain;

- 1) Melakukan cek terhadap lokasi bencana alam;
- 2) Menetapkan status darurat kepada Bupati Pamekasan untuk dapat mengajukan biaya tidak terduga;
- 3) Memperhitungkan dampak dan kerugian yang terjadi pada masyarakat dan lingkungannya;
- 4) Membuat kajian tanggap darurat;
- 5) Mengajukan TS ke Bupati untuk memberikan bantuan kepada korban (sembako, makanan siap saji dan atau bantuan perbaikan);
- 6) Untuk kerusakan infrastruktur dilakukan tanggap darurat dan penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi secara permanen diserahkan kepada SKPD terkait;
- 7) Dilakukan Koordinasi Untuk penanganan dengan SKPD terkait.

Untuk melakukan langkah penanggulangan bencana alam telah tersedia dana dari berbagai sumber. Selama ini sumber dana untuk penanggulangan bencana berasal dari APBD, APBN dan dana BTT Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan terjadinya bencana alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi maka yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi terjadinya bencana dan cara penanggulangannya sehingga diharapkan resiko yang terjadi akibat bencana dapat ditekan sekecil mungkin. Adapun langkah-langkah BPBD Kabupaten Pamekasan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan mengurangi terjadinya resiko bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Membentuk Desa Tangguh Bencana;
- 2) Menyiapkan/membantu pengadaan sarana prasarana yang diperlukan dan;
- 3) Mengadakan sosialisasi kebencanaan dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

Dengan memperhatikan pola atau ritme bencana alam yang kerap terjadi di Kabupaten Pamekasan dan telah berlangsung secara berkelanjutan dari

tahun ke tahun maka ke depan bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Pamekasan diprediksi tidak jauh berbeda. Beberapa jenis bencana alam dapat disebabkan oleh berbagai fenomena alam seperti; Kekeringan, Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Abrasi. Memperhatikan jenis bencana alam dan faktor penyebabnya maka sejak dini pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya antisipatif dan pencegahan sesuai dengan potensi bencana antara lain;

- 1) Untuk bencana banjir tindakan pencegahan yang dilakukan adalah Pembentukan Desa/kelurahan Tangguh Bencana, Pemulihan Kondisi Lingkungan Sungai dan Saluran pada wilayah Pasca Bencana (PAK), Review Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana Banjir (Jadwal Ulang), dan Pengadaan Peralatan *Search and Rescue (SAR)* (PAK).
- 2) Bencana Kekeringan tindakan pencegahan yang dilakukan adalah; Pengadaan Pipanisasi Daerah Kering Kritis (DPA-L).
- 3) Bencana Tanah Longsor tindakan pencegahan yang dilakukan adalah Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana, Pemulihan Kondisi Lingkungan Pasca Bencana (DPA-L) dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana (HIBAH PUSAT) (Jadwal Ulang).
- 4) Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dll, maka tindakan pencegahan yang dilakukan adalah Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Untuk memperoleh informasi secara lebih detail berikut disajikan tabel tentang potensi bencana, kegiatan pencegahan dan instansi pelaksana serta lokasi.

Tabel 6.3

Potensi Bencana dan Pencegahannya di Kabupaten Pamekasan

No.	Potensi Bencana	Kegiatan Pencegahan	Instansi Pelaksana	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Banjir	Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	BPBD	1. Desa Lemper, 2. Desa Sumedangan,

No.	Potensi Bencana	Kegiatan Pencegahan	Instansi Pelaksana	Lokasi
				3. Kel. Kanginan,
				4. Desa Jalmak,
				5. Kel. Barurambat Timur
		Pemulihan kondisi lingkungan sungai dan saluran pada wilayah pasca bencana (PAK)	BPBD	1. Normalisasi Sungai Konang Desa Konang Kec. Galis
				2. Normalisasi Saluran Kanginan Gg.II Kel. Kanginan Kec. Pamekasan
		Review rencana kontijensi (Renkon) bencana banjir (Jadwal Ulang)	BPBD	Pamekasan
		Pengadaan Peralatan Search and Rescue (SAR) (PAK)	BPBD	Pamekasan
2	Kekeringan	Pengadaan pipanisasi daerah kering kritis (DPA-L)	BPBD	Desa Pasanggar Pegantenan
3	Longsor	Rekonstruksi penanganan pasca bencana	BPBD	1. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Ds.Tebul Timur Kec. Pegantenan
				2. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan
				3. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Kampung Sobih Kel. Bugih Kec. Pamekasan
				4. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Dusun Keppo Desa Polagan Kec. Galis
				5. Pembangunan Saluran Pembuang RT.01RW.04 Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan

No.	Potensi Bencana	Kegiatan Pencegahan	Instansi Pelaksana	Lokasi
				6. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Dsn Morsongai Desa Majungan Kec. Pademawu
				7. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Desa Blumbungan Kec. Larangan
				8. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Desa Lesong Laok Kec. Batumarmar
				9. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Dusun Panjelin Desa Waru Barat Kec. Waru
				10. Pembangunan Tebing Penahan Tebing Desa Tampojung Prenggih Kec. Waru
				11. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Desa Waru Timur Kec. Waru
				12. Pembangunan Tebing Penahan Longsor Cok gunung barat Desa Waru Barat Kec. Waru
		Pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana (DPA-L)	BPBD	1. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Kel. Kolpajung Kec. Pamekasan
				2. Pembuatan Tebing Penahan Jalan, Desa Tlanakan Kec. Tlanakan
				3. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Palengaan Laok Kec. Palengaan
				4. Pembuatan Tebing Penahan Jalan, Desa Banyu Bulluh Kec. Proppo

No.	Potensi Bencana	Kegiatan Pencegahan	Instansi Pelaksana	Lokasi
				5. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Sana Laok Kec. Waru
				6. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Dusun Maddis Desa Pamaroh Kec. Kadur
				7. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Konang Kec. Galis
				8. Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Akkor Kec. Palengaan
		Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana (HIBAH PUSAT) (Jadwal Ulang)	BPBD	1. Rekonstruksi Penahan Tebing Desa Rombuh Kec. Palengaan
				2. Rekonstruksi Tebing Penahan Longsor Sungai Gladak Basar Bugih Kec. Pamekasan
				3. Rekonstruksi Tebing Penahan Longsor Sungai Desa Plakpak Kec. Pegantenan
				4. Rekonstruksi Tebing Penahan Longsor Sungai Semajid Desa Majungan Kec. Pademawu
				5. Rekonstruksi Saluran Drainase Jl. Jokotole Asemmanis Desa Buddagan Kec. Pademawu
4	Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dll	Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana	BPBD	Pamekasan

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam kehidupan keseharian ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Dengan kondisi wilayah yang tertib dan aman masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial keagamaan dan budaya, ekonomi serta aktivitas dalam aspek kehidupan yang lainnya. Di samping itu apabila kondisi masyarakat aman dan tertib yang disertai perlindungan maka akan sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala sektor sesuai dengan visi dan misi serta cita-cita yang telah ditetapkan.

Diakui atau tidak situasi tentram dan aman merupakan kebutuhan dan keinginan yang selalu dicita-cita sebagian besar masyarakat, namun pada saat yang sama tidak dapat diingkari bahwa gangguan senantiasa muncul di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah harus mengambil peran terdepan dan utama untuk selalu menciptakan dan menjaga situasi ketentraman dan ketertiban termasuk dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat.

Meski situasi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan tetapi dalam praktek sosial masih ditemukan berbagai jenis gangguan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya kondisi ketentraman dan keamanan itu sendiri. Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan lancar dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian dalam kenyataan di setiap daerah selalu diwarnai oleh gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2018 berbagai jenis gangguan telah terjadi di Kabupaten Pamekasan antara lain; diantaranya : Pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pekerja Seks Komersil (PSK) yang meresahkan masyarakat, terjaringnya pasangan mesum di tempat kost dan hotel, adanya siswa yang

bolos sekolah, Penyalahgunaan fungsi trotoar, Penertiban baleho dan spanduk yang telah lewat izinnya, Banyaknya Gepeng (Gelandangan pengemis) yang berkeliaran di perkotaan, dan Penanganan bencana kebakaran yang dinilai masih belum cekatan atau lamban. Berbagai jenis aktivitas yang dinilai mengganggu dan dilakukan oleh sebagian warga masyarakat perlu memperoleh perhatian dan dibutuhkan upaya agar berbagai jenis pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, selama ini pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan kegiatan yang berupaya memberikan sosialisasi dan memberikan teguran serta sanksi bagi pelaku dengan melibatkan berbagai pihak atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pamekasan. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sangat penting selaku penegak dan pelaksana Peraturan Daerah dalam menangani gangguan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Namun demikian dalam implementasi kegiatan atau pelaksanaan kegiatan dilibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang turut berperan serta membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan. Berbagai SKPD atau pihak yang turut membantu menciptakan ketentraman dan keamanan yaitu : Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Kodim 0826 Pamekasan, Polres Pamekasan, dan Subdenpom V/4-3 Pamekasan.

Komposisi SDM yang melakukan penanganan terhadap berbagai jenis gangguan dan upaya menciptakan ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak hanya soal kuantitas atau banyaknya jumlah pegawai tetapi persoalan kualitas atau kualifikasi pendidikan serta pangkat dan golongan akan memberikan kontribusi cukup berarti bagi Satuan

Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas yang cukup berat yakni menciptakan ketentraman dan keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Komposisi dan kualitas tenaga SDM ini perlu memperoleh perhatian sebab dalam menangani gangguan yang muncul di tengah masyarakat dan mewujudkan situasi yang aman, tentram dan tertib di wilayah Kabupaten Pamekasan dibutuhkan pendekatan dan langkah yang tepat sehingga penanganan yang dilakukan efektif dan efisien.

Tabel 6.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja
menurut pangkat jenjang pendidikan Tahun 2018

No.	Gol.	Jml	Pendidikan Umum						Pendidikan Penjenjangan		
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Diklat Struktural		
									PIM IV	PIM III	PIM II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IV/c	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
2.	IV/b	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3.	IV/a	3	-	-	-	-	1	2	1	1	-
4.	III/d	7	-	-	1	-	3	3	4	-	-
5.	III/c	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-
6.	III/b	7	-	-	4	-	3	-	-	-	-
7.	III/a	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-
8.	II/d	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9.	II/c	15	-	1	14	-	-	-	-	-	-
10.	II/b	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
11.	II/a	6	2	-	4	-	-	-	-	-	-
12.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	I/c	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-
14.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		58	4	5	28	-	13	7	7	2	1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2018 tenaga SDM yang bergabung dan bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagian besar berpendidikan umum yakni SMA (28 orang), SMP (5 orang) dan SD (4 orang). Meski demikian menurut data yang ada terdapat sebanyak 13 pegawai yang berpendidikan S1 (13 orang) bahkan S2 (7 orang). Di samping itu dalam tabel diatas terlihat terdapat 7 orang yang telah memiliki pendidikan penjenjangan yakni Diklat Struktural PIM IV. Dengan komposisi tenaga SDM yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan

berbagai jenis gangguan yang mengancam ketentraman, keamanan dan ketertiban dapat diatasi dengan optimal.

Selama tahun 2018, diakui telah dihadapi berbagai jenis gangguan yang memunculkan permasalahan di Kabupaten Pamekasan. Pada kasus PKL misalnya, selama ini telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara rutin dengan sasaran para pedagang kaki lima (PKL) dan telah pula dilakukan relokasi ketempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian dalam praktek masih ditemukan PKL yang kembali lagi beroperasi dan melakukan aktivitas pada tempat yang tidak diizinkan oleh pemerintah daerah. Menurut para pedagang lokasi yang disediakan dinilai kurang strategis sehingga tidak banyak warga masyarakat yang membeli barang dagangan mereka.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah masih kurangnya pengawasan dari pemilik kost dan hotel sehingga penghuni kost dan hotel bisa leluasa mengajak dan menerima teman dari luar yang berlainan jenis. Kasus ini kerap terjadi akibat pengawasan yang masih lemah dari pemilik tempat penginapan atau tempat kost yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Selama ini, Satuan Polisi Pamong Praja tidak jarang melakukan razia terhadap para siswa dan melakukan penertiban di kalangan siswa dengan tujuan agar mereka lebih fokus pada pendidikan, tidak bolos sekolah dan meningkatkan motivasi belajar. Bahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga berupaya agar tidak terjadi tawuran pelajar dan mengharapkan para guru dan orang tua siswa untuk meningkatkan pengawasan terhadap para murid terutama pada jam-jam sekolah. Bagaimanapun juga sangat dibutuhkan peran guru dan orang tua agar siswa mempunyai semangat belajar dan menghindari tawuran antar pelajar.

Kegiatan lain yang tidak jarang dilakukan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menertibkan fungsi Trotoar agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat parkir dan membuat para pejalan kaki lebih nyaman, aman

dan tertib. Sebagai ruang publik Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa mengupayakan agar trotoar benar-benar bebas sebagai tempat parkir, tempat meletakkan bahan bangunan dan sebagainya sehinggamengganggu para pejalan kaki. Selanjutnya selain masalah pemanfaatan trotoar di Kabupaten Pamekasan juga masih ditemukan adanya gelandangan dan pengemis (Gepeng). Gepeng biasanya beroperasi di wilayah perkotaan dan tidak semua diantara mereka menjadi gepeng berlatar belakang kesulitan ekonomi. Sebab ditemukan pula orang menjadi gepeng di kota tetapi tempat tinggal dan kehidupan mereka di desa sebenarnya tergolong cukup. Dalam kasus seperti ini tidak jarang petugas Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi agar mereka bersedia kembali di desa atau mencari pekerjaan dan menghilangkan sifat malas serta tidak bersedia untuk bekerja keras.

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan bukan hanya dilihat dari indikator seberapa banyak perubahan sarana-prasarana fisik yang telah dibangun, tetapi yang terpenting adalah seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan di Kabupaten Pamekasan bukan sekadar mengejar laju pertumbuhan ekonomi, tetapi yang terpenting justru bagaimana memastikan agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan.

Selama lima tahun terakhir hingga pelaksanaan program pembangunan tahun 2018 telah disadari bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan terintegrasi akan menjadi fondasi yang kuat, serta mempengaruhi kualitas hasil-hasil pembangunan yang dicapai --yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling mendukung bagi terciptanya pembangunan yang efektif dan efisien. Pembangunan bukanlah proses yang segmenter dan parsial, yang hanya mementingkan satu aspek, tetapi menelantarkan aspek yang lain. Sebagai sebuah proses perubahan, pembangunan adalah proses yang multi-dimensional dan terintegrasi.

Pembangunan yang dikembangkan selama tahun 2018 di Kabupaten Pamekasan, telah terbukti banyak memberikan manfaat, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Meski dengan dukungan dana yang terbatas, dan seringkali proses pembangunan yang sedang berjalan harus menghadapi tekanan dan dampak kondisi perekonomian nasional maupun global, tetapi dengan tekad yang kuat dan didukung perencanaan program yang benar-benar kontekstual, maka hasil-hasil pembangunan dicapai selama kurun waktu tahun 2018 telah memperlihatkan berbagai kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan segala keterbatasan yang ada, baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun kemampuan anggaran,

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pamekasan.

Pencapaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang diuraikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2018 sebagaimana tersaji, merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang harmonis. Kinerja yang kami capai dalam tahun 2018 merupakan produk dari pelaksanaan Program SKPD dan APBD tahun anggaran 2018 yang sesuai dengan prosedur dan norma yang berlaku, dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif (Pemerintah Kabupaten Pamekasan) dengan legislatif (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan di tahun 2018 adalah kelanjutan dan merupakan terjemahan dari visi-misi yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Berbagai keberhasilan, bahkan prestasi yang telah dicapai Kabupaten Pamekasan selama tahun 2018 ini, sudah barang tentu merupakan modal dasar dan fondasi lebih lanjut bagi upaya perbaikan di tahun-tahun mendatang. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018 tentu akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang, terutama di era lima tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya. Harus diakui tidak semua program pembangunan yang dikembangkan berjalan seperti skenario yang diharapkan. Namun demikian, secara umum pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pamekasan tahun 2018 telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan tahun 2018 ini disusun sebagai pertanggungjawaban sekaligus mengetengahkan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018, yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. LKPJ 2018 ini bukan hanya berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Pamekasan di penghujung tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, tetapi sekaligus memaparkan pelaksanaan berbagai program pembangunan di masing-masing SKPD. Di bawah visi-misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan dari berbagai program SKPD telah berjalan terintegrasi dan saling mengisi satu dengan yang lain.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sejauh memungkinkan telah didasarkan pada isu prioritas, data dan besaran masalah yang dihadapi, serta didasarkan pada parameter yang jelas dan objektif, sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya proses perencanaan dan penetapan program yang terkontaminasi oleh kepentingan politik orang atau kelompok-kelompok tertentu. Selain mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari bawah (*bottom-up planning*), yang tidak kalah penting dalam proses perencanaan program pembangunan telah pula mempertimbangkan masukan dari nara sumber yang berkompeten.

Sepanjang tahun 2018, berbagai program pembangunan yang dirumuskan di masing-masing SKPD telah dilaksanakan dan dilakukan secara partisipatif, demokratis dan proporsional, dan yang tak kalah penting rencana pembangunan yang disusun harus pula mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas atau arti penting program itu bagi masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan telah berusaha dijaga, dalam arti, program pembangunan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan di lapangan, telah dipastikan proses pelaksanaannya tidak terjadi bias yang dapat merugikan masyarakat sebagai kelompok sasaran atau subyek utama program pembangunan tersebut. Kontrol dan pengawasan yang dilakukan di sini, oleh sebab itu tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban administratif dan laporan keuangan di atas kertas saja, tetapi juga

pertanggungjawaban yang berbasis pada hasil dan efektivitas capaian tujuan program dan ketepatan pemilihan kelompok sasaran di lapangan.

Demikian LKPJ Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sebagaimana telah dilaksanakan. Berdasarkan dari apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018, beberapa pelajaran penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program pembangunan di tahun-tahun mendatang adalah:

Pertama, untuk memastikan manfaat dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pamekasan, ke depan salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah tentang substansi program yang dilaksanakan di lapangan. Menilai apakah sebuah program sudah sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan seyogianya tidak hanya melihat “nama programnya” saja, tetapi harus memastikan substansi program yang dijalankan apakah benar untuk kepentingan masyarakat ataukah bias kepentingan yang lain.

Kedua, di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang tersedia, penetapan program prioritas apakah yang perlu dikembangkan seyogianya benar-benar mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat. Artinya, program apakah yang kemudian ditetapkan menjadi “ikon” program pembangunan di Kabupaten Pamekasan perlu mengacu pada besaran masalah dan prioritas kebutuhan serta usulan masyarakat secara *bottom up*. Apa yang menjadi ikon program Kabupaten Pamekasan, ada baiknya jika dirumuskan oleh masing-masing SKPD, sehingga hasil akhirnya nanti akan dapat menimbulkan daya ungkit yang lebih signifikan.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Pamekasan seyogianya fokus pada upaya pengembangan program dan kegiatan pembangunan yang memfasilitasi dan melibatkan potensi swakarsa masyarakat, sehingga dapat menjadi investasi atau modal sosial pembangunan. Kegiatan pembangunan yang menafikan peran masyarakat dan potensi swakarsa masyarakat lokal, niscaya tidak akan dapat berjalan kontinyu, dan bahkan bukan tidak mungkin akan memudarkan apa yang disebut mekanisme self-help masyarakat miskin itu sendiri.

Keempat, apa pun program pembangunan yang dirancang di Kabupaten Pamekasan seyogianya tidak dibatasi dengan pikiran bahwa program itu harus segera memperlihatkan hasil dalam jangka pendek, maksimal satu periode masa jabatan Kepala Daerah, sehingga ujung-ujungnya menafikan arti penting keberlanjutan dan pelestarian program di masyarakat. Program pembangunan yang disusun akan jauh lebih baik jika dasar pertimbangan utamanya adalah pada manfaatnya bagi masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan keberlanjutannya untuk dan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa program pembangunan apapun yang direncanakan benar-benar harus mempertimbangkan keberlanjutannya di masyarakat, dan sebaliknya harus dicegah kemungkinan pelaksanaan program yang justru mematikan potensi swakarsa dan mekanisme self-help masyarakat. Program-program yang sifatnya darurat-penyelamatan, misalnya, meski dibutuhkan untuk mengurangi atau meringankan beban yang mesti ditanggung masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM, tetapi seyogianya program-program semacam ini dibatasi dan dikombinasikan dengan program penanggulangan kemiskinan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan.

Kelima, selain mengandalkan pada bentuk-bentuk pengawasan yang sifatnya formal, untuk mengkaji sejauhmana program pembangunan yang direncanakan benar-benar terimplementasi di lapangan, maka perlu ditingkatkan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Dengan kata lain, agar pelaksanaan program pembangunan di berbagai daerah tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem kontrol yang kuat, khususnya pelibatan dan kontrol dari masyarakat itu sendiri sebagai kelompok sasaran dan kontrol dari lembaga-lembaga lokal dan kelompok-kelompok sekunder di masyarakat.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun 2018 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Pamekasan yang lebih sejahtera.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa selalu memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian, Amien.

Sekian dan terimakasih.

Pamekasan, 29 Maret 2019



BUPATI PAMEKASAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BADDRUT TAMAM', written over the right side of the official stamp.

B. BADDRUT TAMAM, S.Psi.